
SOSIOHUMANIORA

Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora
Journal of Social Sciences and Humanities

Volume 21, No. 2, Juli 2019

Editor	: Asep Sumaryana
Editor Bagian	: Suwandi Sumartias Sulaeman Rahman Nidar Agus Nero Sofyan Munadjat Rd. Ahmad Buchari Yoga Bestari Anissa Lestari Kadiyono Nia Kurniati Asep Agus Handaka Suryana Ella Lesmanawaty Wargadinata Linda Sunarti
Manajer Jurnal	: Usep Sahrudin U. Santosa Kusumah
Sekretariat	: Trisatya Yono Yugiono Lala Adilla Nur Dodih Firmansyah

Alamat Penerbit / Redaksi:

Direktorat Sumberdaya Akademik dan Perpustakaan Universitas Padjadjaran
Graha Kandaga (Perpustakaan) Jatinangor Lt. 4
Jl. Raya Bandung - Sumedang KM. 21 Jatinangor
Telepon/Fax (022) 842 88806 ext. 3806 dan E-mail: sosiohumaniora@yahoo.co.id
website: <http://sosiohumaniora.unpad.ac.id/user>

(Terbit 3 Kali dalam Satu Tahun: Maret, Juli dan Nopember)

PERINGKAT AKREDITASI SINTA 2

**Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3/E/KPT/2019**

Terindeks di:



DAFTAR ISI
SOSIOHUMANIORA
Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora
Journal of Social Sciences and Humanities

Volume 21, No. 2, Juli 2019

Pengembangan Wakaf Tanah dan Rumah Susun Berdasarkan Asas Pemisahan Horizontal (<i>Nia Kurniati, dan Helza Novalita</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i2.9901	113 - 121
Anak Bekerja di Indonesia: Bukti Empiris terhadap <i>Wealth Paradox</i> (<i>Disty Putri Ratna Indrasari</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i2.12101	122 - 129
Ruang Terbuka Hijau Dalam Tata Ruang Kota Bandung Akhir Abad XIX Hingga Pertengahan Abad XX (<i>Miftahul Falah, Agusmanon Yuniadi, dan Rina Adyawardhina</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i2.21020	130 - 139
Lembaga Keuangan Mikro dan Pemberdayaan Perempuan sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang (<i>Layyinaturrobaniyah, Mokhamad Anwar, Sulaeman R. Nidar, dan Ida Yuliani</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i2.19516	140 - 143
Kinerja Usaha Wirausaha Perempuan "Gurem" Penerima Kredit di Desa Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor (<i>Laras Sirly Safitri, Suharno, dan Siti Jahroh</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i2.11408	144 - 149
Sekolah Inklusi Sebagai Arena Kekerasan Simbolik (<i>Nanang Martono, Mintarti, Elis Puspitasari, dan Sulyana Dadan</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i2.18557	150 - 158
Strategi Pengembangan Pariwisata Perdesaan Di Lebakmuncang, Kabupaten Bandung Jawa Barat (<i>Sam'un Jaja Raharja, Arianis Chan dan Michael Marbun</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i2.21051	159 - 165
Exploring the use of Modal Auxiliary Verbs in Corpus of Contemporary of American English (COCA) (<i>Meita Lukitawati Sujatna, Eva Tuckyta Sari Sujatna, dan Kasno Pamungkas</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i2.19970	166 - 172
Implementasi Kebijakan Ekspor di Indonesia (<i>Uyat Suyatna</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i2.19370	173 - 183
Pengembangan <i>Mining Tourism</i> di Kawasan Pertambangan Sawahlunto (<i>Rudy Anarta, Santun R P Sitorus, Widiatmaka, Siti Nurisjah, dan Hartrisari Hardjomidjojo</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i2.11236	184 - 193
Effisiensi Faktor-Faktor Produksi Usahatani Kedelai (<i>Eti Suminartika, Lies Sulistiyowati dan Kuswarini Kusno</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i2.14879	194 - 199
Aplikasi Model Organisasi pada Struktur Organisasi Perangkat Daerah (<i>Ani Martini, M. Irwan Tahir dan Halilul Khairi</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i2.21780	200 - 209
Konstruksi Maskulinitas Sunjaya Purwadisastra (Perwira TNI AD dan Bupati Cirebon) (<i>Ahmad Fauzan, Reiza Dienaputra dan Hazbini</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i2.10099	210 - 215
Efisiensi Alokatif Input Faktor pada Usahatani Bawang (<i>Allium asconicum</i> L) di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat (<i>Nurul Risti Mutiarasari, Anna Fariyanti, dan Netti Tinaprilla</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i2.9888	216 - 221
Perubahan Budaya Organisasi dari Universitas Pembelajaran Ke Universitas Penelitian di Universitas Lampung (<i>Feni Rosalia, dan Lilih Muftihah</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.14541	222 - 227

PENGANTAR REDAKSI

Dalam edisi kali ini, dihadirkan 15 tulisan yang bertema variatif. Dimulai dengan persoalan wakaf yang dikupas oleh Nia dkk, tampaknya menjadi menarik ketika dikaitkan dengan persoalan rumah susun dan asas pemisahan horizontal. Dalam hal yang relatif dekat, ruang terbuka hijau pun menjadi keniscayaan untuk tetap hadir agar bisa memberikan kontribusi udara sehat bagi warganya. Tidak heran jika perlu ditelusuri dari mulai abad XIX sampai XX seperti ditulis Falah.

Dalam tulisan lain, lahan memang menempati posisi penting agar kehidupan dan kebutuhan manusia menjadi seimbang. Tidak heran jika dalam usaha tani pun lahan menjadi kebutuhan pokok agar dapat memproduksi pertanian, dalam kaitan tersebut, usaha tani kedelai menghendaki agar efisiensinya dapat diperoleh seperti suplai air dan kesuburan lahan serta bibitnya. Hal seperti ini dikupas oleh Suminartika dkk. Bukan hanya kedelai, bawang pun memerlukan hal sama. Dengan mengambil lokasi riset di Majalengka, Mutiarasari dkk mengupas hal tersebut untuk pembaca sekalian.

Pariwisata juga menjadi kupasan dalam terbitan kali ini. Jaja Raharja menguliti pariwisata perdesaan yang ada di Lebakmuncang Bandung agar dapat bertahan dan bahkan dapat terus dikembangkan. Kehadiran beragam *stakeholder* menjadi utama agar dapat ditemput tanpa merusak alam. Ternyata bukan hanya perdesaan yang bersettingkan pertanian, lahan pertambangan pun dapat dijadikan destinasi wisata seperti diuraikan Ananta dkk di Sawahlunto. Dalam konteks tersebut dapat digalakkan potensi lain seperti kewirausahaan yang memanfaatkan kebutuhan turis dari lokasi destinasi wisatanya seperti dikupas safitri dengan setting perempuan “gurem” di kecamatan Ciampea.

Tulisan lainnya yang cukup penting untuk dibaca adalah fenomena anak bekerja tulisan Indrasari serta sekolah inklusi sebagai arena kekerasan simbolik seperti uraian Martono dkk. Lembaga keuangan Mikro juga sedang naik daun untuk diarahkan memberdayakan perempuan agar dapat mengentaskan kemiskinan. Tulisan Layyinaturrobaniyah seakan mengingatkan bahwa lembaga ini patut mendapat perhatian semua pihak untuk dijadikan kekuatan sosial ekonomi yang handal, boleh jadi hal tersebut berkaitan dengan pasar yang ada di dalam atupun diluar negeri. Tidak berlebihan bila tulisan lainnya yang menyangkut kebijakan Ekspor tulisan Suyatna menjadi perlu dicermati juga agar bisa membantu kekuatan tulisan lain yang bersifat ekonomis.

Tulisan lainnya tentang *Exploring the use of Auxiliary* di Amerika –English juga dapat ditelusuri esensinya. Tulisan Lukitawati pun dapat dilihat dari sisi budaya dan kebahasaan agar pembacanya tidak gagal paham atas hal yang dikupas. Demikian halnya dengan Aplikasi Model Organisasi karya Martini dkk serta perubahan Budaya Organisasi tulisan Rosalia patut dicermati juga. Demikian halnya konstruksi Maskulinitas Sunjaya tulisan Fauzan dapat dibaca untuk melihat perkembangan mantan bupati Cirebon tersebut.

Semoga pembaca berkenan mencermati dan mengkritisi seluruh artikel yang disajikan untuk menemukan esensi dan manfaat untuk semua. Selamat membaca!!!!

Hormat kami,

Dewan Redaktur

PENGEMBANGAN WAKAF TANAH DAN RUMAH SUSUN BERDASARKAN ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL

Nia Kurniati, dan Helza Novalita

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 456363,

E-mail: nia.kurniati@unpad.ac.id ; helza.nova@unpad.ac.id

ABSTRAK. Wakaf tanah dipergunakan untuk mendirikan bangunan bagi usaha dalam bidang keagamaan dan sosial. Sejak terbit UU Nomor 41 Tahun 2004, di dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, dinyatakan, harta wakaf berupa tanah dan rumah susun difungsikan selain sebagai sarana keagamaan, juga untuk memajukan kesejahteraan umum. Melalui metode yuridis normatif, artikel ini mencoba memberikan landasan pemikiran, mengenai pembaharuan hukum wakaf produktif, dengan menerapkan asas pemisahan horizontal untuk mengembangkan potensi ekonomi harta benda wakaf berupa tanah dan rumah susun melalui kerjasama dengan pihak ketiga, menghasilkan keuntungan tanpa melanggar prinsip syariah dan kewenangan Nazhir sebagai pemegang hak tanah wakaf.

Kata kunci: Asas Pemisahan Horizontal; Wakaf Tanah; Wakaf Rumah Susun; Pengembangan Wakaf Tanah dan Rumah Susun; Prinsip Syariah.

DEVELOPMENT OF LAND WAQF AND FLATS BASED ON THE PRINCIPLE OF HORIZONTAL SEPARATION

ABSTRACT. Land waqf is used to build buildings for businesses in the religious and social fields. Since the issuance of Law No. 41 of 2004, in Article 16 paragraph (2) letter d, stated, waqf property in the form of land and flats functioned other than as religious facilities, also to promote public welfare. Through the normative juridical method, this article tries to provide a rationale, regarding renewal of productive waqf law, by applying the principle of horizontal separation to develop the economic potential of waqf property in the form of land and flats through cooperation with third parties, making profits without violating the sharia principle and Nazhir's authority as the holder of waqf land rights.

Key words: Horizontal Separation Principle; Waqf of Land; Waqf of Flats; Development of Land waqf and Flats; Sharia principle.

PENDAHULUAN

Wakaf tanah sejauh ini fungsinya dipandang sebagai sarana dan prasarana ibadah semata, (Hasanah, 2008: 1). Namun sejak terbitnya UU Wakaf Tahun 2004, secara yuridis formal telah membuka *cakrawala baru* bagi pengelolaan wakaf secara produktif (Djunaidi, *et.all*, 2008: 90). Dalam hal ini, secara undang-undang wakaf telah membantu membangun kesejahteraan keluarga dhuafa dan anak yatim. Wakaf tanah dan bangunan dalam pengelolaannya seharusnya oleh Nazhir yang memiliki jiwa wira usaha dan dikelola secara profesional (Nurhidayani *et all*, 2017: 173). Pengelolaan wakaf tanah dan bangunan (rumah susun) secara profesional oleh Nazir dilakukan dengan dengan jalinan kerjasama dengan berbagai pihak agar mampu menghasilkan keuntungan (Muhibbin, 2011). Pengelolaan wakaf dalam kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk *musyarakah* maupun *mu'dlarabah*, dan prinsip-prinsip syariah atas wakaf tetap dijunjung tinggi dan diperhatikan, yaitu prinsip kekekalan atau "*ta'bidul ashli*" dan kemanfaatan atau "*tashbilul manfaah*". Sehubungan dengan itu peningkatan produktivitas benda wakaf untuk kemanfaatan peribadatan, sekaligus diupayakan perlindungannya oleh hukum dan ditujukan pula untuk peningkatan kesejahteraan umum (Ilyas, 2016: 144).

Pengembangan dan pengelolaan wakaf tanah secara produktif telah dipraktekan oleh negara tetangga, menunjukkan keberhasilan yang signifikan, seperti contoh di Singapore, Mesir dan Dubai. Di ke tiga negara tersebut di atas tanah wakaf didirikan bangunan-bangunan gedung yang pengelolaannya dilakukan dengan cara bagi hasil antara Nazhir dengan mitranya. Dari keuntungan yang diperoleh atas hasil pengelolaan benda wakaf ternyata dapat mendukung pembiayaan sektor pendidikan, seperti contoh Universitas Al Azhar di Kairo. (Majalah Sharing, 2011). Di Singapore hasil pengelolaan harta benda wakaf berupa tanah, oleh *Waress Investments Pte Ltd* dikontribusikan bagi kepentingan sosial dan pendidikan. Sedangkan *Awqaf Minors Foundation* sebagai lembaga *independence* di Dubai mengelola tanah wakaf untuk tujuan men-sejahterakan "komunitas warga masyarakat yang kurang beruntung termasuk anak-anak". *Awqaf Minors Founda-tion* melaksanakan misinya di Dubai berdasarkan Law No.9 of 2007 article 21 menyebut tentang "Pendirian Yayasan Urusan Awqaf dan Anak-anak" (<http://www.amaf.gov.ae>).

Memperhatikan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa benda yang diwakafkan tidak terbatas hanya pada tanah melainkan pula unit-unit bangunan-bangunan bertingkat yang didirikan di atas tanah wakaf, yaitu berupa rumah susun/ apartemen/ condominium. Keberadaan

unit-unit bangunan-bangunan bertingkat sebagai objek wakaf, saat ini telah terakomodasi pula di dalam UU Wakaf Tahun 2004 dimana menyebut di dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, bahwa “rumah susun” merupakan benda yang dapat diwakafkan. Secara yuridis formal, terdapat kesamaan dalam memfungsikan benda wakaf di ketiga negara tersebut dengan di Indonesia, yaitu fungsi wakaf bukan semata-mata kepentingan peribadatan dan sosial. Sementara itu persepsi sebagian warga masyarakat di negara Indonesia masih memandang wakaf secara konvensional yaitu sebagai fungsi keagamaan dan sosial.

Di dalam penulisan ini, masalah yang hendak dikaji secara umum adalah mengenai penyelenggaraan wakaf tanah dan rumah susun menurut hukum Indonesia. Secara spesifik permasalahan yang hendak dikaji adalah tentang penerapan asas pemisahan horizontal yang dapat digunakan menjadi dasar pembaharuan hukum wakaf berupa wakaf produktif yang dapat memberi manfaat ekonomi dan berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan umum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang merupakan pendekatan deduktif. Dalam hal ini dilakukan pengkajian terhadap UU Wakaf dan UU Agraria terkait Hak Kepemilikan Tanah oleh Nazhir yang diperoleh melalui ikrar wakaf oleh Wakif. Deskriptif analitis digunakan sebagai spesifikasi penelitian, yaitu mengemukakan fakta tentang pengelolaan berupa wakaf tanah dan rumah susun secara profesional agar menghasilkan nilai keuntungan yang dapat meningkatkan nilai harta benda wakaf berdasarkan UU Wakaf dan UU Agraria yang dijiwai asas pemisahan horizontal sebagai dasar hukum wakaf produktif. Deskriptif analitis digunakan sebagai spesifikasi penelitian, yaitu mengemukakan fakta tentang pengelolaan berupa wakaf tanah dan rumah susun secara profesional agar menghasilkan nilai keuntungan yang dapat meningkatkan nilai harta benda wakaf berdasarkan UU Wakaf dan UU Agraria yang dijiwai asas pemisahan horizontal sebagai dasar hukum wakaf produktif. Tahap penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan. Sumber data penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum yang mengikat sebagai bentuk bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yang berupa ensiklopedia dan berbagai artikel di media cetak dan elektronik. Guna memperoleh landasan teoretis digunakan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data terhadap data sekunder. Penelaahan terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan analisis kualitatif sehingga diperoleh simpulan terhadap permasalahan yang dihadapi berdasarkan asas hukum dan norma hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Wakaf Tanah dan Rumah Susun di Indonesia serta Pendaftarannya

Istilah *Waqf* dalam Bahasa Arab di-eja menjadi “Wakaf” menurut Kamus Indonesia (Suhrawadi Lubis, K., 2010), mengandung arti “menahan sesuatu” (Al-Kasibi, 2004: 17). Pengertian “menahan sesuatu” menurut pandangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’id dan Hambali, adalah “menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama” (Nurhidayani, *et.all*, 2017: 167). Harta yang ditahan ini berupa tanah yang merupakan benda tidak bergerak karena sifatnya (Sofwan, 1981:20).

Adapun ayat dalam al-Qurán yang dinyatakan sebagai dalil-dalil umum yang mengenai makna wakaf menurut para ulama antara lain termaktub dalam al-Qurán surat al-Baqarah [2]:261. (Departemen Agama Republik Indonesia, 1995).

قَبَّحَ لِشِمِّكَ إِلَّا لِيَبْسَ يَفِ مَهْلًا وَمَا نَوْقِيْنِي نِيذِلًا لِّثَمِّ
مَلَلًا وَقَبَّحَ قِيَامَ قَلْبُنِي سُنِّ لِكِّ يَفِ لَبَانَسَ غَبْسَ شَتَبْنًا
مَّيْلَ عِ حَسَاوَ قَلَلًا وَأَشْرِي نَمَلِ فُعَاعِضِي (261)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir pada tiap-tiap bulir : seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (kurnia-Nya) lagi maha mengetahui”.

Dalam ayat diatas Allah SWT menjelaskan keberuntungan orang yang suka mendermakan harta bendanya di jalan Allah, dengan niat untuk mencapai keridhaan-Nya (Departemen Agama Republik Indonesia, 1995). Ketentuan dalil wakaf dalam al-Qurán dapat dilihat juga dalam Surat ali-Imran [3]:92:

نِمَ أَوْ قَبَّحَ ثَمَامًا وَنَبُحًا ثَمَامًا أَوْ قَبَّحَ ثَمَامًا أَوْ قَبَّحَ ثَمَامًا أَوْ قَبَّحَ ثَمَامًا
مَّيْلَ عِ حَسَاوَ قَلَلًا وَأَشْرِي نَمَلِ فُعَاعِضِي

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” ((Suhrawadi Lubis, K., 2010: 15).

Ayat ini menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kebajikan yang sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang dicintai. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki maksudnya bukan untuk keseluruhannya melainkan sebagian saja dan dinafkahkan dari harta yang disukai bukan dari harta yang tidak disukai. Ayat ini hendaknya dihubungkan dengan Surat al-Baqarah [2]:267 yang menjelaskan agar jangan memilih harta yang buruk untuk dinafkahkan. Dengan mewakafkan harta yang disukai akan tampak keseriusan berwakaf

dari wakif seperti mewakafkan tanah milik di perkotaan yang harganya terus meningkat. Dengan mengharapkan keridhaan Allah, wakif tidak merasa rugi dan bahkan memberikan keuntungan untuk memberikan yang terbaik untuk kepentingan umat.

Dalam salah satu *Hadist* dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Saw bersabda:

“Ketika seseorang meninggal dunia terputuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendo’kannya” (HR.Muslim, Ibn Majah, Turmudzi, Abu Dawud, dan Ahmad). *Hadist* tersebut menegaskan bahwa sedekah merupakan amalan yang pahalanya tidak akan terputus. Sementara, sedekah itu sendiri tidak mungkin diberikan kecuali dengan cara menahan atau mewakafkan (Al-Kasibi, 2004:65). Oleh karena itu wakaf merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam (Suhrawadi Lubis, K., 2010).

Perbuatan menahan harta yang dimiliki merupakan perbuatan hukum berdasarkan ajaran agama Islam berupa memisahkan bagian dari harta milik seseorang atau badan hukum untuk selama-lamanya bagi kepentingan ibadah atau sosial (Harsono, 2003 : 348). Menurut “Hadis Ibnu Umar”, konsep “Wakaf” yang berasal dari sabda Nabi Muhammad SAW yang menuturkan “*in syi’ra habbasta aslaha wa tashaddaqa biha.*” Berdasarkan hadis ini dapat diketahui beberapa prinsip-prinsip wakaf menurut syariah, (Hermawan, 2014: 150) yaitu :

- a. wakaf berbeda dengan zakat;
- b. wakaf bersifat abadi;
- c. wakaf tidak dapat dialihkan atau dihibahkan;
- d. nazhir pengelola wakaf mendapat imbalan wajar;
- e. wakaf harus produktif;
- f. Nilai wakaf harus disedekahkan kepada pihak yang berhak sesuai ikrar wakaf;
- g. wakif menyerahkan objek wakaf.

Di dalam Ketentuan Umum UU No.41 Tahun 2004, dikemukakan pengertian otentik “wakaf” menurut undang-undang adalah, “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Memperhatikan pengertian-pengertian tersebut, fungsi wakaf adalah “untuk keabadian”. Penyerahan tanah Hak Milik ke dalam suatu wakaf, menjadikan berakhirlah haknya, namun tanahnya berubah status menjadi tanah wakaf yang diatur oleh Hukum Agama Islam. Eksistensi wakaf sejak awal keberadaannya dimaksudkan untuk menebar kebaikan berupa manfaat ekonomis kepada orang lain atau masyarakat (Hermawan, 2014:147). Secara teoretik, “Wakaf” hanya dapat terlaksana jika telah dipenuhi unsur-unsurnya yang meliputi :

- a. Subjek hukum yang mewakafkan benda wakaf disebut Wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, yang meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum;
- b. *Nazhir*, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Nazhir mempunyai tugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- c. Benda Wakaf merupakan harta kekayaan berupa benda tidak bergerak yang mengandung manfaat dan mempunyai nilai ekonomis tinggi
- d. *Ikrar “wakaf”*; ialah “pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan dengan lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya”. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. “Akta Ikrar Wakaf” yang dibuat oleh PPAIW menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendaftarannya oleh BPN setempat kepada Kantor Pertanahan, maksimal satu bulan sejak ditandatanganinya Akta Ikrar Wakaf.

Kedudukan Wakaf dalam UUPA mendapat tempat yang khusus, dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (3), menyebutkan “perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Dalam hal ini UUPA memerintahkan pengaturan perwakafan tanah milik dengan Peraturan Pemerintah. Kenyataannya sejak tahun 1960 baru 17 tahun kemudian terbit PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara 1977-38 Tambahan Lembaran Negara 3107). Namun kini PP tersebut telah digantikan oleh UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Terkait dengan rumah susun, telah diatur sejak terbit UU No. 16 Tahun 1985 yang mengatur Rumah Susun saat telah diperbarui oleh UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Rumah susun menjadi jenis hak baru dalam khazanah hukum pertanahan nasional. Di dalam UU Wakaf yang berlaku saat ini, “Rumah Susun” dikategorikan sebagai salah satu jenis harta benda wakaf. Pengertian menurut undang-undang tentang “Rumah susun”, adalah “bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama”.

UU telah menentukan objek wakaf terdiri dari:

- a. Hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 UUPA;
- b. Hak Milik Adat;
- c. HGU, HGB, HP diatas tanah negara
- d. HGB, HP, diatas HPL dan HM
- e. HMSRS
- f. TN

Jika status tanah yang akan diwakafkan bukan tanah Hak yang belum terdaftar, seperti Tanah Hak Milik Adat, maka tanah yang bersangkutan harus ditingkatkan dulu statusnya menjadi Tanah Hak melalui pencatatan dan pendaftarannya di Kantor Pertanahan, untuk memperoleh tanda bukti hak yaitu Sertifikat. Pendaftaran tanah pada dasarnya merupakan kewajiban Pemerintah yang ditegaskan dalam UUPA Pasal 19, dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang telah menggantikan PP Nomor 10 Tahun 1961. Tujuan daripada Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan satuan rumah susun (Soerodjo, 2002:106). Syarat pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan, atas tanah yang akan di wakafkan, tidak lain bertujuan sebagai pembuktian bahwa tanah yang bersangkutan dijamin oleh hukum atas data-data yuridis dan data fisiknya. Hal ini mengingat yang berhak mewakafkan Tanahnya adalah benar dan sah menurut hukum, yaitu “Wakif perorangan sebagai pemilik tanah, sudah dewasa, sehat akal nya dan tidak terhalang oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum”. Selain itu dengan pendaftaran tanah dapat diketahui ada tidaknya hak-hak tertentu yang membebaninya. Oleh karena tanah yang akan di wakafkan harus bebas dari segala beban ikatan jaminan, sita dan sengketa.

Perbedaan di antara jenis-jenis tanah hak ditinjau dari wewenang yang terkandung pada haknya dan jangka waktunya. Hanya Hak Milik yang tidak ada pembatasan jangka waktunya, oleh karenanya Hak Milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh. Sedangkan wewenang yang terkandung dalam Hak Guna Usaha, yaitu ditujukan untuk pengembangan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan di atas tanah Negara”. Hak Guna Bangunan dan atau Hak Pakai di atas Tanah Negara, wewenang dalam penggunaannya untuk mendirikan bangunan di atas tanahnya. Contohnya berupa pendirian hotel, pertokoan/perdagangan, perkantoran, restoran, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), pabrik, gudang, rumah tempat tinggal, rumah susun/apartemen/condominium, gedung pendidikan, gedung peribadatan, panti asuhan, pemakaman/ kuburan. Semua pembangunan rumah susun/ apartemen/ condominium, termasuk *flat*, *town house*, Ruko/Rukan, Hotel, Gedung-Gedung Perkantoran semuanya mengacu pada rumusan rumah susun yang

diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Rizal Afif, M., 2009:71). Beragamnya peruntukan penggunaan tanah menunjukkan tanah mempunyai *multiple* fungsi, selain fungsi sosial dan keagamaan juga fungsi ekonomi (Santoso, 2014 :71). Pembatasan jangka waktu hak atas tanah ditetapkan pada saat pemberian haknya yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak oleh Kepala BPN, atau ditetapkan dalam Perjanjian Pemberian Haknya pada Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Hak Milik atau Hak Pengelolaan.

Hak Pengelolaan terkait dengan Objek Wakaf, ketika Objek Wakaf yang bersangkutan terbit dari Hak Pengelolaan. Dikemukakan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, bahwa Hak Pengelolaan sebagai hak atas tanah negara yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk:

- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;
- b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya ;
- c. menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga dengan Hak Pakai berjangka waktu 6 tahun;
- d. menerima uang pemasukan/ganti rugi/uang wajib tahunan.

Sehubungan dengan HGB dan HP diatas HPL atau Tanah Milik Adat yang akan dijadikan sebagai objek wakaf, sebelumnya harus mendapat persetujuan secara tertulis dari pemiliknya semula yang dilanjutkan dengan pelepasan hak oleh pemiliknya serta persetujuan dari lembaga yang kompeten dalam hal ini BWI.

Tanah sebagai objek wakaf, dalam pengertian secara yuridis, adalah “hak atas permukaan bumi yang dapat didayagunakan dan dimanfaatkan bagi kepentingan pemiliknya”. Di dalam setiap hak atas tanah terkandung hak, kewajiban dan larangan untuk berbuat sesuatu atas tanahnya. Demikian pula halnya dengan Nazhir selaku pemegang hak atas tanah wakaf, melekat padanya hak, kewajiban, dan larangan untuk berbuat sesuatu atas tanahnya sesuai peraturan hukum sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004. mengenai Wewenang, kewajiban serta larangan meliputi selain atas tanah dalam arti permukaan bumi, juga meliputi sesuatu yang terkandung di dalam tanah, serta ruang yang ada di atas tanahnya. Penggunaan atas permukaan bumi (tanah), tubuh bumi, dan ruang di atas tanahnya dibatasi, yaitu untuk keperluan yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan tanahnya (Harsono, 2003: 23). Tanah-tanah objek wakaf diwakafkan untuk jangka waktu selamanya.

Fungsi dan potensi ekonomi harta benda Wakaf berupa Tanah dan Rumah Susun, menurut Pasal 5 UU

Wakaf, ditujukan untuk memajukan “kesejahteraan umum”. Kesejahteraan umum meliputi seluruh aspek kehidupan yaitu aspek sosial, ekonomi, budaya. Indikator “kesejahteraan umum” yang paling pokok dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia yaitu sandang, pangan, dan papan sejatinya harus sudah terpenuhi.

Menurut Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2017 Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 ditegaskan tentang pendaftaran Wakaf berupa Tanah Milik Adat, Hak Milik/HGU/HGB/HP diatas TN harus dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. permohonan;
- b. keterangan fisik tanah (surat ukur);
- c. tanda bukti kepemilikan atau sertipikat;
- d. Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf;
- e. surat pengesahan Nazhir dari KUA
- f. keterangan tertulis oleh Nazir yang menyatakan tanah tidak dalam status qou dan sedang tidak dibebani hak tanggungan

Berbeda, objek Wakaf yang berasal dari Tanah Hak Milik Adat, dilengkapi dengan:

- a. surat permintaan;
- b. keterangan fisik tanah;
- c. sertipikat kepemilikan;
- d. Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf;
- e. surat pengesahan Nazhir dari KUA
- f. surat keterangan tertulis dari Nazhir atau wakif dan atau dari pejabat pemerintah desa setempat yang menerangkan bahwa objek wakaf tidak dalam status qou dan tidak sedang dijaminkan

Ketika semua persyaratan tersebut diatas telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, BPN Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan yang menegaskan objek wakaf berada dalam kekuasaan Nazir sebagai pemegang haknya, sesuai dengan keputusan BPN menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir

Kepala BPN Kabupaten/Kota menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir, yang memuat pernyataan dengan “Hak atas Tanah ini hapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal... Nomor... dan diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor.../... sesuai Surat Ukur tanggal... Nomor... luas... m²”.

Pencatatan objek tanah wakaf yang terdiri atas HMSRS diatas HM, HGB dan HP harus dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan;
- b. tanda bukti kepemilikan atau sertipikat;
- c. Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf;
- d. surat pengesahan Nazhir dari KUA

Syarat-syarat tersebut merupakan syarat formil dan syarat materil yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pendaftaran wakaf tanah dan rumah susun guna diterbitkan Sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah wakaf yang bersangkutan (Santoso, 2014 : 79).

Kepala Kantor Pertanahan mencatat atas nama Nazhir dalam Buku Tanah dan sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun pada kolom perubahan yang disediakan, dengan kalimat: “Hak Milik atas Satuan Rumah Susun ini hapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/ Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal... Nomor... dan diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor.../... sesuai Surat Ukur tanggal... Nomor ... luas... m²”.

Sebelum diterbitkan Sertifikat Tanah Wakaf, terlebih dulu dilakukan “pengukuran bidang tanah dengan cara terrestrial, fotogrametrik atau cara lainnya”. Hasil pengukuran akan dapat dipetakan dan diketahui letak, serta batas-batasnya di atas peta dan direkonstruksi batas-batasnya di lapangan. Berdasarkan hasil pengukuran lalu dibuatkan GU (Gambar Ukur), dan seluruh data hasil ukuran batas bidang tanah dicatat pada GU ,dan setiap GU diberi nomor GU. Bangunan yang terdapat pada suatu bidang tanah digambarkan pada GU. Selanjutnya dalam GU dicantumkan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB).

Pada prinsipnya urgensi pendaftaran tanah wakaf tidak lain untuk diterbitkan Sertifikat Wakaf sebagai tanda bukti haknya (Santoso, 2014 :71). Sertifikat Hak atas Tanah mempunyai kekuatan hukum sebagai *alat bukti hak yang kuat*. Kepastian hukum Tanah Wakaf, menjadi penjaga keabadian harta benda wakaf, dan terhindar dari kemungkinan gangguan-gangguan saat mengenyam kenikmatan dalam penggunaannya. Dengan terbitnya UU Wakaf berikut peraturan pelaksanaannya menggambarkan sebuah upaya pembaruan hukum wakaf, dan secara khusus mengenai tata cara pendaftaran tanah wakaf telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017.

Pengembangan Wakaf Produktif Bagi Tanah Wakaf dan Rumah Susun Berdasarkan Asas Pemisahan Horizontal

Keberadaan tanah wakaf di Indonesia diketahui dari sumber pada Kementerian Agama mencapai 435.768 titik lokasi atau seluas 4.359.443.170,00 m² atau 435.944,32 hektar. Potensi ekonomi dari tanah wakaf tersebut akan menghasilkan keuntungan jika dikelola secara produktif. Data tanah wakaf yang riil disinyalir lebih dari itu, sebab terdapat tanah wakaf yang diikrarkan secara lisan tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut sumber dari Kementerian Agama pada tahun 2015 keberadaan tanah wakaf dapat digambarkan sebagai berikut :

Di bawah ini dapat digambarkan alokasi penggunaan tanah wakaf masih belum diberdayakan secara produktif, melainkan masih sebatas memenuhi kepentingan sosial dan keagamaan.

Tabel 1. Status Hak Tanah Wakaf

No.	Status Tanah Wakaf	Keterangan
1.	Jumlah Titik Lokasi Tanah Wakaf	1.768 tik
2.	Luas Tanah Wakaf	4.359.443.170,00 m ² 1.1.32 hektar
3	Sudah Bersertipikat	1.160 persil
4.	Belum Bersertipikat	1.447 persil
5.	Sudah/Dalam Proses AIW/APAIW	1.90 persil
6.	Belum AIW/APAIW	1.403 persil
7.	Persentase Sertipikat Tanah Wakaf	66,90%
	Persentase Tanah Wakaf yang Belum Bersertipikat	33,10%

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2016 yang lalu diperoleh data potensi ekonomi tanah wakaf yang berlokasi di kota besar yang dapat dikembangkan menjadi “wakaf produktif” diantaranya, terdapat di Kota Jakarta dan Bandung yaitu :

- Tanah wakaf berupa “Masjid Baitul Muchlisin, Gatot Subroto-Jakarta”, dapat diproduktifkan dengan cara tukar guling asset dimana bangunan masjid berdiri sekaligus membangun gedung perkantoran tanah wakaf pengganti (Djunaidi, 2016).
- Tanah wakaf Yayasan Said Naum di sekitar Tanah Abang seluas kurang lebih dua hektar dengan nilai aset, sedang direncanakan untuk dikembangkan di atasnya rencana pembangunan gedung berupa *Rental Office*, *Service Apartemen* dan *Lifestyle Mall*. Pembangunan ini dilakukan dalam kerjasama pembiayaan oleh IDB dan Bank Swasta Luar Negeri dengan Nazhir.
- Rencana pembangunan Gedung Global Waqaf Tower (GWT) setinggi 16 lantai, telah ditandatangani kerjasama antara Nazhir dengan PT. Provera Development sekitar tahun 2016 yang lalu. Hasil pengelolaan Global Waqaf Tower akan didayagunakan untuk kepentingan kemanusiaan dan dakwah (Djunaidi, 2016).
- Potret wakaf produktif di Kota Bandung, telah dibangun dan dilaksanakan oleh Nazhir “Daarut Tauhiid”, yang mendayagunakan tanah wakaf secara produktif dengan cara mendirikan bangunan-bangunan berupa:
 - Masjid di Bandung, Cipaku, Serua dan Batam;
 - Pesantren;
 - Ruko-ruko untuk disewakan sebagai mini market;
 - Cottage Daarul Jannah;
 - Gedung Daarul Hajj;
 - Area parkir
 - Ruang ATM untuk disewakan kepada Perbankan;
 - Dome Central V;

- Swalayan SMM Daarut Tauhid;
- SMK Daarut Tauhiid Boarding School;
- SMP Daarut Tauhiid Boarding School;

“Potret” pemberdayaan tanah wakaf sebagaimana tersebut di atas merupakan salah satu penanda, era baru pemberdayaan fusi wakaf tanah untuk berkontribusi bagi kesejahteraan umum yang dirintis di Indonesia. Pemberdayaan tanah wakaf tersebut, apabila dikaitkan dengan aspek di bidang sosial ekonomi, diharapkan memberikan kontribusi untuk kepentingan sosial dan keagamaan, serta menyediakan lapangan pekerjaan.

Di dalam pemberdayaan dan pengelolaan tanah Wakaf untuk menjadi wakaf Produktif, didasari prinsip syariat Islam, yaitu wakaf tidak boleh merugi atau tidak boleh tidak memberikan keuntungan dalam pemanfaatannya. Dalam hal ini wakaf harus senantiasa menghasilkan keuntungan, sehingga dikatakan wakaf produktif. Untuk mempertahankan pengelolaan harta benda wakaf agar senantiasa selalu produktif, peraturan perundang-undangan wakaf telah mengadakan pembatasan masa jabatan Nazhir yaitu hanya menjabat untuk 2 (dua) kali masa jabatan dan setiap masa jabatan berlangsung selama 5 tahun. Pergantian Nazhir setelah masa jabatan paling lama 2 tahun, dimaksudkan agar dalam pengelolaan wakaf produktif selalu dinaungi oleh semangat berusaha agar Wakaf tidak menanggung rugi. Jika dalam pengelolaan oleh Nazhir wakaf merugi, maka Badan Wakaf Indonesia dapat merekomendasikan agar dilakukan penggantian Nazhir. Prinsip syariah ini menjadi faktor pendorong bahwa wakaf produktif selama-lamanya akan mampu memberi kesejahteraan bagi pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Undang-Undang Wakaf Indonesia dan peraturan pelaksanaannya, dalam pasal-pasal telah mengakomodir “wakaf produktif”, yang mampu memberikan kontribusi selain bagi kepentingan keagamaan Islam juga mampu menciptakan keuntungan berupa tambahan nilai finansial atas pengelolaan benda wakaf berupa tanah dan rumah susun. Ini merupakan sebuah paradigma baru, meskipun telah tersedia landasan hukumnya, namun masih perlu dilakukan upaya akselerasi pengembangan wakaf produktif di era modern, yaitu dengan melakukan beberapa langkah berikut:

- Identifikasi dan inventarisasi tanah wakaf di seluruh Indonesia oleh KUA pada masing-masing wilayah Kabupaten/Kota;
- Tingkatkan kepastian hukum tanah wakaf melalui pendaftaran tanah untuk memperoleh Sertifikat tanda bukti hak;
- Dayagunakan harta benda wakaf secara optimal khususnya di kota-kota besar karena senantiasa akan selalu diincar oleh para pemodal besar;

- d. Larangan pengalihan tanah wakaf kecuali di dasari oleh UU dengan pemberian tanah pengganti;
- e. Ciptakan Nazhir profesional yang berorientasi menghasilkan profit dari tanah wakaf:

Sebagai bahan perbandingan tentang “wakaf produktif” dapat dikemukakan di salah satu Negara Uni Emirat Arab (Dubai). Di Dubai, tanah wakaf dikelola oleh Lembaga Independen yang berorientasi meningkatkan nilai ekonomi dari benda wakaf sehingga menghasilkan keuntungan (uang). Lembaga *Awqaf Minors Foundation* (AMAF), membagi “tanah wakaf” menjadi 2 bagian yaitu berupa “Property Mesjid”/untuk keagamaan yang dipadukan untuk area “komersial” dan “residental”. “Property building” secara penuh dialokasikan untuk “residental” dan “komersial” yaitu berupa “Ruko/Rumah Toko”, “Kantor”, “Stors”, “Falts/Flat” dan “Villas”.

Pengaturan tentang wakaf produktif di Dubai terdapat persamaan dan perbedaan dengan di Indonesia. Persamaannya telah memadukan prinsip syariah dan prinsip ekonomi pada umumnya di dalam pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan perbedaannya terletak pada keberadaan “Waqif”, dimana Wakif masih berperan serta di dalam pengelolaan dan peruntukan benda wakaf.

Di negara Singapore, wakaf dikelola oleh MUIS atau Majelis Uagama Islam yang memiliki aset tanah wakaf, dan MUIS mengembangkan properti wakaf sangat produktif. MUIS sangat menyadari tingginya harga tanah di Singapore sehingga MUIS mengelola asetnya secara efisien dan profesional dalam bidang usaha yang dikelola oleh *Warees Investments Pte Ltd* (Muhammad, 2013).

Sejak tahun 1955 MUIS bekerja sama dengan konsultan profesional seperti DTZ *Debenham Tie Leung* untuk membantu mengembangkan dan mengelola wakaf atas properti, berupa properti komersial dan residensial. Untuk *Chancery proyek*, DTZ telah ditunjuk sebagai konsultan pengembangan dan agen pemasaran tunggal untuk proyek dengan *Warees Land Pte Ltd* sebagai pengembang *real estate*. Hal ini merupakan prestasi yang signifikan bagi MUIS dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan properti wakaf untuk kepentingan masyarakat muslim. Sebelum konsepsi *The Residence Chancery*, properti wakaf menghasilkan uang melalui persewaan tanah. Hasil pendapatan ini menjadi dana wakaf yang mengalir kepada penerima wakaf. Properti wakaf ini terletak di distrik perumahan utama, dan rencana untuk pembangunan kembali dengan total 71.204 sq ft (6,615.03 meter persegi) akan semakin menambah keuntungan untuk wakaf tersebut (Nafis, 2013).

Dari kesuksesan wakaf produktif di negara lain kiranya dapat di replikasi di Indonesia, dimana untuk menyelenggarakan wakaf produktif telah tersedia ketentuan hukumnya. UU Nomor 5 Tahun 1960 sebagai payung Hukum Tanah Indonesia didasari oleh suatu asas hukum

yaitu asas Pemisahan Horizontal. Berdasarkan asas ini, tanah dan segala benda yang berada di atasnya tidak merupakan satu kesatuan. Asas Pemisahan Horizontal mendasari pembentukan kaidah hukum pertanahan Indonesia yang mengindahkan unsur-unsur dalam hukum agama. Asas pemisahan horizontal dapat digunakan dalam hubungan hukum transaksi tanah yang diadakan antara perorangan/badan hukum sebagai pemilik tanahnya dengan pihak ketiga. Dalam hal ini dapat dilakukan pemisahan antara tanahnya dengan bangunan gedung yang didirikan di atas tanah, yang dituangkan dalam perjanjian (I, 2011:65). Dengan demikian “hak atas rumah/bangunan” yang didirikan di atas tanah adalah terlepas dengan tanahnya.

Kedudukan asas pemisahan horizontal terhadap pengembangan wakaf produktif adalah sangat penting, karena adanya perluasan objek wakaf yang meliputi pula rumah susun. Rumah susun sebagai objek wakaf telah di elaborasi oleh PP Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 16 huruf d, yang menegaskan bahwa rumah susun sebagai objek wakaf selain memenuhi fungsi sosial dan keagamaan juga untuk kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum pada hakekatnya merupakan penjabaran daripada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan penggunaan tanah atau bumi untuk kesejahteraan/kemakmuran rakyat, merupakan tujuan nasional menurut Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4. Oleh sebab itu potensi ekonomi daripadanya harus dikelola sedemikian rupa hingga memberi nilai atau kontribusi terhadap kesejahteraan umum. Pemberdayaan fungsi wakaf tanah dan rumah susun secara independens dan profesional dengan dilandasi hukum yang berlaku, Insya Allah dapat menjadi sarana memajukan kesejahteraan umum bagi bangsa Indonesia.

Didirikannya bangunan gedung di atas tanah wakaf yang diorientasikan penggunaan dan pemanfaatannya untuk memperoleh keuntungan, seperti Hotel, Gedung Perkantoran, Residensial, maupun area komersial lainnya merupakan salah satu bentuk pengembangan wakaf produktif. Dengan penerapan asas pemisahan horizontal, menjadi solusi pemecahan masalah untuk mengatur kepemilikan tanah oleh nazhir yang dipisahkan dari kepemilikan bangunan gedung oleh individu-individu masing-masing, sebagaimana yang telah terjadi di negara Singapore dan Dubai sebagai contohnya.

Hubungan kerjasama antara Nazhir dengan investor pengembang yang membangun property gedung-gedung didasari oleh perjanjian atau *al-A'qd*. Menurut para ahli hukum Islam, *al-A'qd* merupakan “hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan”, (Djamil, 2016:247). Sahnya perjanjian menurut syariat Islam adalah, jika dipenuhi syarat-syaratnya:

- a. Ada *ijab* dan *qabul yang didasari oleh Al-Hurriyah (freedom of making contract)*, yang berisi berisi

- pernyataan kehendak dari satu pihak dan pihak lain menyatakan untuk menerimanya;
- b. Ada *ahliyatul*, yaitu para pihak memiliki kecakapan hukum untuk melakukan akad;
 - c. Ada *Mahal al-Aqd*, yaitu objeknya harus dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak;
 - d. Ada *Maudhu'Aqd*, yaitu ada tujuan utama dilakukannya akad.

Ke-4 prinsip syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut meliputi syarat subjektif dan syarat objektif sahnya perjanjian, sebagaimana halnya dengan syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Syarat subjektif adalah menyangkut subjeknya sedangkan syarat objektif menyangkut objek perjanjian.

Perjanjian yang diadakan oleh Nazhir dengan investor sebagai mitra dalam Kerjasama Pengembangan Tanah Wakaf, dapat menggunakan konsep perjanjian kerjasama atau *aqadmudharabah* untuk mengadakan pembiayaannya. Rukun *mudharabah* ini apabila dikaitkan dengan kerjasama pengembangan tanah wakaf antara Nazhir dengan Mitra atau investor pemodal harus memenuhi 4 syarat/rukun berupa:

- a. *shahibul maal* (modal tanah yang dimiliki Nazhir);
- b. *mudharib* (pengusaha/mitra/investor pemilik modal uang);
- c. *amal* (usaha/pekerjaan);
- d. *hasil* (bagi hasil/keuntungan);
- e. *aqad* (ijab –qabul).

Di dalam kerjasama pengembangan tanah wakaf ini, Nazhir memberikan batasan mengenai tujuan menginvestasikan tanah wakaf kepada *mudharib* sehingga *mudharib* terikat dengan prestasi yang harus dilakukannya berupa “memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan atau tidak berbuat sesuatu”, serta ketentuan-ketentuan khusus lainnya seperti nilai perbandingan bagi hasil, jumlah modal, jangka waktu penempatannya dan lainnya. Pembagian keuntungan yang diperoleh diantara *shahibul maal* berdasarkan nisbah sesuai dengan kesepakatan awal dan dalam jumlah yang tidak pasti. *Nisbah* bagi hasil disetujui dalam kontrak dan perbandingan bagi hasil dapat ditentukan dalam persen atau pembagian. Di dalam pengembangan tanah wakaf ini, Nazhir memiliki tanggung jawab terhadap institusi yang mengangkatnya (Badan Wakaf Indonesia), karena implementasi daripada fungsi wakaf senantiasa harus memperoleh keuntungan dan terhindar dari keadaan merugi.

Penerapan prinsip *mudharabah* dalam pemberdayaan fungsi “wakaf tanah dan rumah susun” yaitu untuk melakukan pembiayaan oleh investor bagi pendirian bangunan-bangunan gedung di atas tanah wakaf,

yang dibangun untuk kebutuhan “komersial” dan atau “residensial”. Melalui Ijab dan qabul, Nazhir, dalam hal ini “memberikan izin” kepada investor untuk mendirikan bangunan-bangunan gedung di atas tanahnya yang sumber pembiayaan pembangunannya berasal dari pihak investor”. Konsep *mudharabah* dapat diadopsi dengan menggunakan dasar perjanjian dalam bentuk BOT (*Built, Operate & Transfer*).

Dalam perjanjian tersebut, setidaknya harus ditegaskan tentang:

- a. Kesepakatan mengenai hak kewajiban para pihak;
- b. Legal standing masing-masing pihak atas objek wakaf;
- c. Penunjukan titik lokasi tanah wakaf yang akan dikerjasamakan;
- d. Hal-hal yang diperjanjikan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan UU Wakaf yang berlaku, ketertiban umum, dan keadilan.

Dengan dilakukannya hubungan-hubungan hukum perikatan, kedudukan Nazhir sebagai subjek hukum pemegang hak atas tanah Wakaf tidak terganggu, Nazhir tetap sebagai pemilik tanah wakaf, karena kepemilikan atas tanahnya tidak beralih meskipun dilakukan pembangunan gedung-gedung di atas tanah wakaf. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dapat dilakukan pemisahan antara tanah dengan unit-unit bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya. Unit-unit bangunan gedung dapat diperuntukkan bagi kepentingan komersial maupun residential. Kepemilikan atas unit-unit bangunan gedung yang berada di atas tanah wakaf dapat dipisahkan dari kepemilikan atas tanah yang dijadikan alasnya berdasarkan asas pemisahan horizontal.

Kepemilikan tanah wakaf tetap berada pada Nazir dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Tanah Wakaf yang diterbitkan oleh BPN, sedangkan kepemilikan atas unit-unit bangunan gedung oleh individu-individu ditandai dengan tanda bukti hak berupa SKBG atau Surat Kepemilikan Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang Pekerjaan Umum (Kementerian PUPERA). Selain itu dapat pula digunakan dasar perjanjian sewa menyewa unit bangunan gedung di atas tanah wakaf. Pendayagunaan tanah wakaf dengan cara sewa dengan bukti kepemilikan berupa SKBG Sarusun menunjukkan penerapan asas pemisahan horisontal secara konsisten (Pujiwati Yani, et.all, 2015:94-99)

Kepastian hukum kepemilikan tanah wakaf oleh Nazhir dijamin oleh hukum melalui pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan. Pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf dilaksanakan berdasarkan Permenag/Ka. BPN No. 2 Tahun 2017 yang mengatur Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. Sertifikat Tanah Wakaf yang diterbitkan oleh BPN mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti hak yang kuat.

SIMPULAN

Asas pemisahan horizontal meskipun bukan peraturan konkrit namun memuat landasan filosofis sebagai dasar pikiran bagi pembaharuan hukum wakaf dalam paradigma baru fungsi wakaf yaitu melalui pemberdayaan tanah dan rumah susun dalam kerjasama pemanfaatan tanah dengan pihak ketiga yang menghasilkan keuntungan yang diperuntukan bagi kalangan umat dalam masyarakat yang berhak mendapatkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alif, M.R. (2009). *Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun di dalam Kerangka Hukum Benda*. Bandung: Penerbit CV. Nuansa Aulia.
- Al-Kasibi, M.A.A. (2004). *Hukum Wakaf*. Diterjemahkan dari *Ahkam Al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah* oleh Ahrul Sani Faturrahman, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Ilman Press.
- Badan Wakaf Indonesia (2015). *Sistem Pengelolaan Wakaf Dalam Aplikasinya di Masa Kini*. Jakarta: Penerbit Badan Wakaf Indonesia.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1995. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, PT. Dana Bhakti Wakaf UII.
- Djunaidi, A. & Al-Asyar, T (2008). *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cetakan kelima. Depok: Mumtaz Publishing.
- Djunaidi, A. (2016). *Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan*, Makalah disampaikan pada FGD "Penerapan Prinsip Syariah dan Asas Pemisahan Horizontal dalam Paradigma Baru Pemberdayaan Wakaf Berupa Tanah dan Rumah Susun Untuk Kesejahteraan Umum", Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Hakim, A. (2010). Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syari'ah. *Riptek*. 4, (11), 21-28.
- Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: (Edisi ke 9). Penerbit Djambatan.
- Hasan, D. (2011). *Lembaga Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*. Bandung:(Cet ke 1. Edisi ke 9). Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Hasanah,U (2008). *Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Hermawan, W. (2014). *Politik Hukum Wakaf di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, 12, (2), 147-161.
- Ilyas, M. (2016). Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam. *Jurisprudentie*, 3, (2), 138-150.
- Lubis, K., S. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Medias, F. (2010). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*. IV, (1), 69-84.
- Mubarak, J. (2008). *Waqaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama.
- Muhibbin, H. (2011). Paradigma Baru Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif Indonesia. <http://www.rumahwakaf.org/paradigma-baru-pengelolaan-dan-pemberdayaan-wakaf-produktif-di-indonesia>. Selasa, April 2, 2019.
- Mulyadi, K. & Wijaya, Wijaya, G (2004). *Hak-Hak atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media.
- Nafis, C. (2013). Peluang Kemitraan Investasi Wakaf Produktif. <https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/704-peluang-kemitraan-investasi-wakaf-produktif.html> diunduh pada 02 April 2019.
- Nurhidayani., Yasin, M. & Busaini, (2017). Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. 2, (2), 163-175.
- Pujiwati, Y. & Rubiaty B., (2015). Asas Pemisahan Horizontal Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Satuan Rumah Susun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). *Sosiohumaniora*, 17, (2), 94-99
- Santoso, U. (2014). Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik. *PERPEKTIF*. XIX, (2). 71-80
- Sembiring, J (2016). *Tanah Negara*. Jakarta: Prenada Media.
- Soerodjo, I. (2014). *Hukum Pertanahan, Hak Pengelolaan atas Tanah (HPL), Eksistensi, Pengaturan dan Praktek*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Sofwan, S., S., M., (1981). *Hukum Perdata Hukum Benda*, Yogyakarta : Liberty.

ANAK BEKERJA DI INDONESIA: BUKTI EMPIRIS TERHADAP *WEALTH PARADOX*

Disty Putri Ratna Indrasari

Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia

E-mail: distyp@gmail.com

ABSTRAK. Banyak penelitian mengungkapkan bahwa keluarga yang semakin miskin akan menyebabkan kejadian anak bekerja lebih banyak (*luxury axiom*). Akhir-akhir ini, peneliti sudah mulai melihat adanya kondisi dimana keluarga yang mempunyai banyak tanah (keluarga yang lebih kaya), justru membuat fenomena anak bekerjanya lebih banyak (*wealth paradox*). Kondisi *wealth paradox* dibayangkan menjadi paradox dari kondisi *luxury axiom*. Namun demikian, kondisi *wealth paradox* sebenarnya dapat diintegrasikan ke dalam kondisi *luxury axiom*. Banyak penelitian tentang anak bekerja di Indonesia yang spesifikasi empirisnya belum dapat menangkap adanya kemungkinan perilaku *wealth paradox* dan *luxury axiom*, sehingga penelitian ini mencoba memberikan kontribusi perilaku anak bekerja di Indonesia dengan menggunakan spesifikasi empiris yang dapat menangkap perilaku *wealth paradox* dan *luxury axiom*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis *wealth paradox* dan *luxury axiom* terhadap anak bekerja di Indonesia dengan menggunakan data IFLS 5. Model yang digunakan di sini adalah tobit dengan *instrumental variable*. Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris bahwa perilaku *wealth paradox* dan *luxury axiom* juga terjadi dalam konteks anak bekerja pada keluarga pertanian di Indonesia.

Kata kunci: anak bekerja; *ivtobit*; *luxury axiom*; *wealth paradox*; tanah.

CHILD WORKING IN INDONESIA: EMPIRICAL EVIDENCE OF *WEALTH PARADOX*

ABSTRACT. Some studies on child working have shown that there is positive relationship between household poverty and child working (*luxury axiom*). Recently, researchers have started to see the conditions that greater land wealth leads to higher child working (*wealth paradox*). Seemingly, *wealth paradox* becomes a paradox of *luxury axiom*. However, the condition of the *wealth paradox* can be integrated into *luxury axiom*. Empirical specifications some studies on children working in Indonesia have not been able to capture the possible behavior of *wealth paradox* and *luxury axiom*, so contribution of this study is using empirical specification that can capture the *wealth paradox* and *luxury axiom* of child working in Indonesia. The study aims to test *wealth paradox* and *luxury axiom* for child working in Indonesia. This study using data number of working hours of children, land, per capita consumption expenditure, the characteristics of children, families and the environment from IFLS 5, and tobit with *instrumental variables* model. The results support for hypothesis of *wealth paradox* and *luxury axiom* for child working in Indonesia.

Keywords: child working; *ivtobit*; land; *luxury Axiom*; *wealth paradox*.

PENDAHULUAN

Hipotesis *wealth paradox* sepertinya tidak sesuai dengan *luxury axiom*. *Luxury axiom* mengungkapkan bahwa keluarga yang semakin miskin akan menyebabkan kejadian anak bekerja lebih banyak, sedangkan hipotesis *wealth paradox* mengungkapkan bahwa keluarga yang mempunyai banyak tanah (semakin kaya) justru akan menyebabkan kejadian anak bekerja lebih banyak. Pada awalnya, Basu & Van (1998) mengungkapkan adanya perilaku *luxury axiom*. Sejalan dengan Basu & Van (1998), banyak penelitian tentang anak bekerja yang sesuai dengan perilaku *luxury axiom* (Nielsen, 1998; Blunch & Verner, 2000; Ray, 2000; Delap, 2001; Amin, Quayes, & Rives, 2004; Edmonds, 2005; dan Chiawaula, 2010). *Luxury axiom* melihat waktu luang anak sebagai barang mewah (Basu, Das & Dutta, 2010; dan Fan, 2011). Sehingga, keluarga yang pendapatan selain dari upah pekerja anak lebih rendah (lebih miskin) akan mengkonsumsi waktu

luang anak lebih sedikit, atau dengan kata lain keluarga miskin akan mengkonsumsi waktu anak bekerja lebih banyak. Namun demikian, akhir-akhir ini, peneliti sudah mulai melihat adanya kondisi dimana keluarga yang mempunyai banyak tanah (keluarga yang lebih kaya), justru membuat fenomena anak bekerjanya lebih banyak (*wealth paradox*). Fenomena itu menjadi perhatian para peneliti saat ini karena kondisi tersebut dibayangkan menjadi paradox dari kondisi sebelumnya (*luxury axiom*). Bhalotra & Heady (2003) yang pertama kali mengungkapkan adanya *wealth paradox*. *Wealth paradox* biasanya terjadi di negara-negara berkembang, khususnya di daerah-daerah pertanian, dan daerah pertanian biasanya berada di area perdesaan (Bhalotra & Heady, 2003; Basu, Das & Dutta, 2010; dan Lima, Mesquita & Wanamaker, 2014).

Konsep *wealth paradox* sebenarnya dapat diintegrasikan dalam konsep *luxury axiom*. Setelah Bhalotra & Heady (2003) berhasil menangkap adanya perilaku *wealth*

paradox di keluarga pertanian, kemudian Basu, Das & Dutta (2010) mencoba mengintegrasikan *wealth paradox* ke dalam konsep *luxury axiom*. Dalam penelitiannya, Basu, Das & Dutta (2010) menjelaskan bahwa *wealth paradox* itu ternyata merupakan konsekuensi dari pasar tenaga kerja tidak sempurna. Pasar tenaga kerja tidak sempurna biasanya terjadi di negara berkembang. Penelitian yang dilakukan oleh Basu, Das & Dutta (2010) awalnya berhasil menangkap perilaku *wealth paradox*, artinya keluarga yang mempunyai banyak tanah akan menyebabkan anak bekerja lebih banyak pada awalnya. Akan tetapi, *wealth paradox* dapat terjadi sampai di suatu titik tertentu. Kemudian, jika keluarga yang memiliki atau mengoperasikan tanah terus menambah jumlah tanahnya, keluarga tersebut akan semakin sejahtera (semakin kaya), dan justru tidak menginginkan anaknya untuk bekerja, atau dengan kata lain, penambahan tanah terus menerus justru akan mengurangi anak bekerja. Artinya perilaku *luxury axiom* terjadi kembali dalam kasus anak bekerja. Sehingga Basu, Das & Dutta (2010) menginformasikan bahwa, pada awalnya, peningkatan luas tanah yang dimiliki keluarga akan meningkatkan anak bekerja, lalu jika terjadi peningkatan luas tanah keluarga terus menerus justru akan menurunkan anak bekerja. Kondisi demikian disebut sebagai *inverted-U*. Jadi apa yang disampaikan tentang perilaku *luxury axiom* pada anak bekerja oleh Basu & Van (1998) masih tetap berlaku, meskipun adanya pendapat baru yang mengatakan bahwa ada *wealth paradox* dalam konteks area perdesaan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, perlu spesifikasi empiris yang dapat digunakan untuk menangkap kemungkinan perilaku yang sesuai dengan *luxury axiom* maupun *wealth paradox*. Bhalotra & Heady (2003); Basu, Das & Dutta (2010); dan Lima, Mesquita & Wanakamer (2014) secara garis besar menggunakan spesifikasi empiris yang sama, yaitu: 1) menggunakan variabel yang mewakili kesejahteraan keluarga (pendapatan keluarga atau pengeluaran konsumsi per kapita) untuk menangkap perilaku *luxury axiom*, 2) menggunakan variabel tanah pertanian yang dimiliki atau diolah keluarga untuk menangkap perilaku *wealth paradox*, 3) menggunakan variabel-variabel yang mewakili karakteristik anak, keluarga, dan lingkungan, 4) menggunakan variabel jumlah jam kerja anak untuk menggambarkan anak bekerja, dan 5) menggunakan *instrumental variable* untuk *treatment* variabel yang diduga endogen, yaitu pengeluaran konsumsi per kapita.

Dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Bhalotra & Heady (2003); Basu, Das & Dutta (2010); dan Lima, Mesquita & Wanakamer (2014) tersebut, juga dapat diketahui bahwa penelitian yang dapat menangkap kemungkinan perilaku *wealth paradox* dan *luxury axiom* mempunyai beberapa karakteristik. Pertama, obyek penelitian terkait hal ini umumnya adalah keluarga yang

mempunyai bisnis pertanian, dan keluarga dengan bisnis pertanian biasanya berada di perdesaan. Kedua, penelitian tentang *wealth paradox* ini juga mengambil populasi keluarga yang memiliki akses terhadap aset tanah produktif (untuk kegiatan pertanian), baik tanah yang dimiliki sendiri atau dikelola dengan cara menyewa. Ketiga, penelitian *wealth paradox* juga membutuhkan data atau informasi tentang keputusan anak bekerja, dan jumlah jam kerja anak untuk mengetahui penawaran tenaga kerja anak.

Penggunaan variabel tanah dan pengeluaran konsumsi per kapita dapat memberi informasi kondisi terkait *wealth paradox* dan *luxury axiom*. Pertama, terkait *wealth paradox*. Jika *wealth paradox* terjadi, ekspektasinya adalah jumlah jam kerja anak di keluarga yang memiliki luas tanah lebih besar akan lebih banyak bila dibandingkan dengan anak yang berada di keluarga yang memiliki luas tanah lebih kecil, *given* dua keluarga tersebut memiliki tingkat kesejahteraan yang sama. Kedua, terkait *luxury axiom*. Jika *luxury axiom* juga terjadi, ekspektasinya adalah jumlah jam kerja anak di keluarga yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih rendah akan lebih banyak bila dibandingkan dengan anak yang berada di keluarga yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi, *given* dua keluarga tersebut memiliki luas tanah yang sama.

Jika membandingkan dengan spesifikasi empiris yang dapat menangkap perilaku *wealth paradox* dan *luxury axiom* terkait anak bekerja, spesifikasi empiris penelitian di Indonesia tentang anak bekerja belum bisa menangkap perilaku kemungkinan anak bekerja terkait *wealth paradox* dan *luxury axiom*. Penelitian-penelitian terdahulu di Indonesia yang dilakukan oleh Munawaroh (2012), Nabawiyah (2014), Iryani & Priyarsono (2013), Rizkianto, Muflikhati & Hernawati (2013), dan Irianti & Riasih (2015) memang sudah terkait dengan fenomena anak bekerja di Indonesia, tetapi spesifikasi empirisnya belum bisa menangkap perilaku terkait dengan *wealth paradox* dan *luxury axiom*. Hal tersebut dapat disebabkan karena penelitian-penelitian terdahulu tidak membatasi observasi hanya pada keluarga pertanian, sementara konsep *wealth paradox* observasinya lebih tepat dilakukan di keluarga pertanian. Sehingga spesifikasi empiris penelitian-penelitian terdahulu di Indonesia tidak bisa menunjukkan kemungkinan adanya *wealth paradox* di area perdesaan. Untuk menangkap bukti empiris terkait *wealth paradox*, penelitian ini perlu fokus kepada keluarga pertanian, dan keluarga pertanian pada umumnya berada di perdesaan (Bhalotra & Heady, 2003; Basu, Das & Dutta, 2010; dan Lima, Mesquita & Wanakamer, 2014). Setelah membandingkan spesifikasi empiris yang dibutuhkan dengan penelitian yang telah dilakukan di Indonesia, penelitian ini mencoba memberikan kontribusi perilaku anak bekerja di Indonesia dengan menggunakan spesifikasi empiris yang dapat menangkap perilaku *wealth paradox* dan *luxury axiom*.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya perilaku *wealth paradox* dan *luxury axiom* dalam konteks anak bekerja di Indonesia dengan menggunakan data data *Indonesia Family Life Survey* (IFLS) gelombang 5 (IFLS tahun 2014). Untuk mengetahui perilaku *wealth paradox*, penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh tanah pertanian terhadap anak bekerja dengan tetap memperhitungkan tingkat kesejahteraan keluarga.

Penelitian tentang anak bekerja yang sesuai dengan perilaku *wealth paradox* ini penting dilakukan karena implikasi kebijakan untuk anak bekerja yang sesuai dengan perilaku *wealth paradox* berbeda dengan implikasi kebijakan untuk anak bekerja yang sesuai dengan perilaku *luxury axiom*. Menurut Bhalotra & Heady (2003), jika perilaku *wealth paradox* terbukti secara empiris, maka kebijakan untuk mengurangi anak bekerja yang sesuai dengan perilaku *luxury axiom* kurang efektif bila diaplikasikan untuk mengurangi anak bekerja yang sesuai dengan perilaku *wealth paradox*.

Batasan usia anak bekerja dalam penelitian ini merujuk pada batasan usia anak bekerja yang menurut BPS & ILO (2009), yaitu anak-anak usia 5-17 tahun. Anak bekerja dalam penelitian ini juga dibatasi hanya anak yang berada dalam keluarga pertanian.

Untuk menjelaskan hubungan antara aset berupa tanah dengan anak bekerja, penelitian ini menggunakan teori Basu, Das & Duta (2010). Dalam penelitian Basu, Das & Duta (2010), dijelaskan bahwa *wealth paradox* terjadi di negara berkembang. Negara berkembang mempunyai pasar tenaga kerja tidak sempurna. Definisi pasar tenaga kerja tidak sempurna (dalam konteks pertanian) di sini dapat dilihat dari sisi penawaran dan dari sisi permintaan. Pasar tenaga kerja tidak sempurna dari sisi penawaran maksudnya pekerja enggan untuk menawarkan tenaganya untuk bekerja meskipun akan mendapatkan upah karena pekerja enggan untuk bekerja pada tanah atau lahan orang lain. Hal yang menjadi motivasi seseorang tidak mau bekerja pada tanah atau lahan orang lain adalah tingginya biaya untuk mencari pekerjaan, di mana biaya mencari pekerjaan tersebut berbeda-beda tiap individu, tergantung pada tempat tinggal dan jaringan sosial di mana individu tersebut berada (Goto & Mano, 2012). Selain itu, Key, Sadoulet & de Janvry (2000) juga menyimpulkan bahwa biaya transaksi (biaya transportasi) dapat mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi ke pasar tenaga kerja.

Sedangkan, jika dilihat dari sisi permintaan, maksud pasar tenaga kerja tidak sempurna adalah keluarga enggan untuk mempekerjakan tenaga kerja dari luar anggota keluarga. Hal tersebut dikarenakan adanya *principal agent problem*. *Principal agent problem* dapat terjadi karena keluarga menghadapi masalah *moral hazard* jika mempekerjakan tenaga kerja dari luar lingkungan keluarga. Menurut Heltberg (1998),

permasalahan *moral hazard* terjadi ketika tenaga kerja dari luar anggota keluarga tidak terlalu peduli dan tidak berusaha optimal untuk menghasilkan output dari lahan keluarga. Jika terjadi kondisi *moral hazard*, artinya keluarga harus mengeluarkan tambahan waktu dan usaha untuk mensupervisi dan mengawasi tenaga kerja yang berasal dari luar anggota keluarga sehingga total biaya produksi bertambah. Selain itu, ada konsekuensi lagi jika menggunakan tenaga kerja dari luar anggota keluarga, yaitu tenaga kerja dari luar lingkungan keluarga tidak mau berbagi resiko, seperti kemampuan manajerial, dan hewan yang dibutuhkan di pertanian. Sehingga, definisi pasar tenaga kerja tidak sempurna adalah adanya keterbatasan dari sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja yang dapat menyebabkan tidak terjadinya pasar tenaga kerja sehingga dapat memberi stimulasi kepada keluarga pemilik lahan pertanian untuk mempekerjakan anak.

Dalam penelitian Basu, Das & Duta (2010), keluarga diasumsikan mempunyai aset tanah sebesar unit. Pada pasar tenaga kerja sempurna, jika naik, maka jumlah anak bekerja akan turun karena keluarga lebih senang mempekerjakan orang yang lebih kompeten menggarap lahan pertanian keluarga daripada mempekerjakan anak sendiri. Sebaliknya, pada kondisi pasar tenaga kerja tidak sempurna, keluarga miskin ingin mengirimkan anak mereka untuk bekerja (supaya bisa keluar dari kondisi miskin), tetapi keluarga tersebut tidak dapat mengirimkan anak mereka untuk bekerja karena tidak ada pasar tenaga kerja yang dekat dengan tempat tinggal mereka, dan orang tua tidak tega untuk mengirimkan anak mereka ke perusahaan atau pabrik yang jauh. Kemudian, jika keluarga miskin tersebut dapat memperoleh tanah, maka anak mereka akan dikirim untuk bekerja karena apa yang mereka harapkan pada awalnya dapat tercapai. Basu, Das & Duta (2010) juga menjelaskan bahwa jika keluarga tersebut dapat terus menambah aset tanahnya sampai pada level tertentu, maka keluarga tersebut sudah tidak akan menginginkan anaknya bekerja. Dengan kata lain, peningkatan aset tanah keluarga akan meningkatkan pekerja anak pada awalnya, dan akan berkurang kemudian jika aset tanah keluarga terus bertambah, atau disebut *inverted-U*.

Diasumsikan masing-masing keluarga mempunyai fungsi utiliti dalam bentuk umum sebagai berikut:

$$u = u(x, e) \quad (1) \text{ di mana:}$$

x adalah total konsumsi rumah tangga
 e adalah jumlah anak yang bekerja

Asumsi berikutnya adalah masing-masing rumah tangga mempunyai satu orang dewasa yang bekerja (tidak peduli berapa upahnya).

Persamaan (1) secara spesifik dapat ditulis menjadi:

$$u = \Phi(x) - c \cdot e \quad (2)$$

di mana

di mana:

Φ adalah fungsi dari X .

c adalah *marginal return to child leisure or non work* atau *marginal return to child schooling*. Maksud dari *marginal return to child schooling* adalah *opportunity cost* dari penggunaan waktu anak untuk bekerja dan *opportunity cost* tersebut menjadi pengurang utiliti keluarga. Jika anak bekerja, anak akan menghadapi *opportunity cost*, yaitu kehilangan *marginal return to child schooling*.

$\Phi'(x) \geq 0$ dan $\Phi''(x) \leq 0$ menggambarkan *diminishing marginal utility*, artinya karena semakin banyak x dikonsumsi, maka mengkonsumsi sejumlah tambahan x akan menghasilkan penambahan utiliti yang semakin kecil (Pindyck & Rubinfeld, 2009). Kedua pertidaksamaan ini ($\Phi'(x) \geq 0$ dan $\Phi''(x) \leq 0$) mempunyai nilai x sampai, $x > 0$ dan C adalah bilangan riil positif.

Dalam pasar tenaga kerja tidak sempurna, keluarga akan mengkonsumsi apa yang diproduksi sendiri dari lahan mereka, $x = q$, sehingga fungsi utiliti keluarga menjadi $u = u(q, e)$ atau $u = \Phi(q) - c.e$. Asumsi $x = q$ menggambarkan bahwa keluarga bersifat autarki, yaitu keluarga tidak membeli barang di pasar dan tidak pula menjual surplus produksi di pasar. Sadoulet, de Janvry & Benjamin (1996) menyampaikan dalam penelitiannya, bahwa dalam pasar tenaga kerja tidak sempurna, hal-hal yang menjadi penentu pilihan konsumsi perlu dimasukkan dalam keputusan produksi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Stanhill (1978) terhadap keluarga pertanian di Israel yang bersifat autarki dapat dilihat bahwa keluarga pertanian yang bersifat autarki memiliki konsekuensi, yaitu hasil produksi pertaniannya rendah, meskipun hasil produksi tersebut juga tergantung pada cuaca, kondisi tanah, kondisi tanah, dan input lainnya.

Masing-masing keluarga mempunyai fungsi produksi:

$$q = f(k, e + 1) \tag{3}$$

di mana:

q adalah output yang diproduksi keluarga.

k adalah aset keluarga berupa tanah.

$e + 1$ adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan, di mana berasal dari anak-anak, dan 1 berasal dari orang dewasa.

Asumsi yang digunakan adalah $f_k, f_e > 0$; $f_{kk}, f_{ee} \leq 0$; dan $f_{ek} > 0$, di mana:

$f_{ek} > 0$ menunjukkan kompatibiliti atau kecocokan antara anak bekerja dengan tanah atau dapat dikatakan *marginal productivity of land* akan meningkat jika jumlah anak bekerja ditambah, atau *productivity of child work* akan meningkat jika jumlah tanahnya ditambah.

Asumsi berikutnya adalah tanah bersifat *immobile* (aset tidak bergerak), dan keputusan untuk menjual tanah tidak diperhitungkan di sini.

Kemudian, optimisasi permasalahan keluarga menggunakan persamaan (2) dan (3) yaitu dengan cara mensubstitusikan persamaan (3) ke persamaan (2), dapat ditulis dalam persamaan berikut:

$$\max_e \Phi(f(k, e + 1)) - ce \tag{4}$$

sehingga diperoleh *first-order condition*

$$\Phi_x \cdot f_e = c \tag{5}$$

Diferensial total terhadap k dan e , diperoleh persamaan berikut

$$\frac{de}{dk} = - \frac{f_e \Phi_{xx} f_k + \Phi_x f_{ek}}{f_e^2 \Phi_{xx} + \Phi_x f_{ee}} \tag{6}$$

Untuk mempermudah penjelasan, persamaan (7) dibagi menjadi empat bagian:

- i. $f_e \Phi_{xx} f_k$
- ii. $\Phi_x f_{ek}$
- iii. $f_e^2 \Phi_{xx}$
- iv. $\Phi_x f_{ee}$

Denominator (penyebut) dalam persamaan (6) selalu bernilai negatif, jadi nilai $\frac{de}{dk}$ tergantung pada besarnya nilai bagian i dan bagian ii. persamaan (6).

Jadi *wealth paradox* dalam Basu, Das & Duta (2010) terjadi jika bernilai positif dan bagian ii mempunyai nilai yang lebih besar daripada bagian i, *given* $f_e, f_k, \Phi_x, \Phi_{xx}$

Nilai bagian i persamaan (6) dapat mendominasi jika f_{ek} nilainya kecil, artinya hubungan tanah dengan anak tidak terlalu kompatibel. Hal tersebut dapat terjadi pada lingkungan industri yang menggunakan teknologi atau mekanisasi, atau pada lingkungan pertanian yang telah memanfaatkan teknologi tinggi. Sebaliknya, bagian ii persamaan (6) dapat mendominasi jika f_{ek} nilainya besar (anak bekerja dapat menjadi substitusi tenaga kerja dewasa), artinya hubungan tanah dengan anak itu bersifat kompatibel.

METODE

Berdasarkan penjelasan dan teori tersebut di atas, penelitian ini akan mengestimasi hubungan antara luas lahan pertanian dan jumlah jam kerja anak di keluarga yang mempunyai aktivitas pertanian. Proksi untuk pendapatan keluarga dalam penelitian ini adalah pengeluaran konsumsi per kapita, tapi karena pendapatan keluarga dan keputusan anak bekerja dibuat dilakukan secara simultan oleh keluarga, maka ada kemungkinan pendapatan keluarga bersifat endogen dalam persamaan regresi. Selain itu, ada variabel kontrol lain yang diduga endogen dan telah terbukti setelah dilakukan uji Durbin-Wu-Hausman (Greene, 2008), yaitu status anak saat ini sedang sekolah atau tidak karena diduga keputusan anak bekerja dan sekolah dilakukan secara simultan.

Untuk mengatasi masalah endogenitas ini, penelitian ini akan menggunakan *instrumental variable* berupa variabel-variabel indikator perkembangan infrastruktur lingkungan sekitar, dan variabel yang mewakili karakteristik keluarga (Bhalotra & Heady, 2003; Lima, Mesquita & Wanamaker, 2014). *Instrumental variable* yang akan

digunakan di sini antara lain: 1) dummy transportasi umum, 2) dummy pasar, 3) jarak pasar, 4) dummy listrik pln, 5) ketersediaan listrik pln per harinya, 6) dummy air, dan 7) produktivitas kepala keluarga (upah kepala keluarga).

Hasil pengujian empiris menunjukkan nilai signifikansi *instrumental variable* secara keseluruhan terhadap status anak sekolah saat ini dengan nilai $F = 27.31$, dan menunjukkan nilai signifikansi *instrumental variable* secara keseluruhan terhadap pengeluaran konsumsi per kapita dengan nilai $F = 127.89$. Artinya, *instrumental variables* tersebut mempunyai korelasi dengan variabel yang diduga endogen.

Sesuai dengan spesifikasi empiris yang dibutuhkan untuk menangkap adanya perilaku *wealth paradox* dan *luxury axiom* di Indonesia, penelitian ini akan menggunakan model tobit dengan IV. Dalam melakukan estimasi, ada dua tahap yang dilakukan dalam estimasi parameter (Bhalotra & Heady, 2003; Cameron & Trivedi, 2009). Tahap pertama, metode yang akan digunakan adalah OLS untuk mengestimasi persamaan variabel yang diduga endogen. Tahap kedua, metode analisis yang akan dipakai adalah prosedur standar tobit. Tahap kedua ini digunakan untuk mengestimasi persamaan anak bekerja.

Persamaan jumlah jam kerja anak (H_i), di mana variabel bebasnya adalah *censored dependent variable*:

$$H_i^* = X_i\beta + Y_i\gamma + e_i \quad (7)$$

untuk $i = 1, \dots, N$

di mana:

H_i^* adalah jumlah jam kerja anak yang berasal dari keluarga pertanian

X_i adalah vektor variabel eksogen

Y_i adalah variabel endogen

N adalah jumlah sampel.

$$H_i = \begin{cases} H_i^* & \text{jika } H_i^* \geq 0 \\ 0 & \text{jika } H_i^* < 0 \end{cases}$$

Variabel terikat yang dipakai dalam penelitian ini adalah jumlah jam kerja anak. Definisi jumlah jam kerja anak adalah jumlah jam kerja seminggu yang lalu untuk anak usia 5-17 tahun yang berasal dari keluarga pertanian. Variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi empat karakteristik, yaitu karakteristik sumber daya keluarga, karakteristik anak, karakteristik keluarga, karakteristik lingkungan.

Variabel bebas yang mewakili sumber daya keluarga adalah tanah pertanian keluarga (dalam hektar), tanah pertanian kuadrat (dalam hektar), dan persentase pengeluaran konsumsi per kapita. Variabel bebas yang mewakili karakteristik anak adalah umur anak (dalam tahun), dummy pendidikan anak, dummy status anak sekolah saat ini, dummy status hubungan anak dengan kepala keluarga, dan dummy jenis kelamin anak. Variabel bebas yang mewakili karakteristik keluarga adalah dummy

kepala keluarga perempuan, jumlah anak yang berumur 18 tahun ke atas (dalam orang), jumlah orang dewasa dalam keluarga (dalam orang), jumlah anggota keluarga (dalam orang), lama sekolah kepala keluarga (dalam tahun), dan upah kepala keluarga (dalam rupiah). Sedangkan variabel-variabel yang mewakili karakteristik lingkungan semuanya digunakan sebagai *instrumental variable*, antara lain: dummy transportasi umum, dummy pasar, jarak ke pasar terdekat, dummy ketersediaan listrik PLN ketersediaan listrik pln per harinya (dalam jam), dummy pemakaian air PAM dan non PAM.

Sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah survei IFLS 5 dengan unit analisis jumlah jam kerja anak usia 5-17 tahun yang tinggal di perdesaan. Data IFLS memiliki keunggulan dan kelemahan. IFLS memiliki keunggulan, yaitu merupakan sumber data yang menyediakan informasi yang lengkap mengenai karakteristik individu, keluarga, maupun lingkungan (komunitas).

Penelitian ini mempunyai dua hipotesis. Pertama, jika parameter tanah bernilai positif, maka penelitian ini berhasil menangkap perilaku *wealth paradox* secara empiris untuk kasus anak bekerja di Indonesia. Kedua, jika parameter persentase pengeluaran konsumsi per kapita bernilai negatif, maka penelitian ini juga berhasil menangkap perilaku *luxury axiom* secara empiris untuk kasus anak bekerja di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu analisis deskriptif dan analisis hasil estimasi model empiris.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Karakteristik Sumber Daya Keluarga, Karakteristik Anak, Karakteristik Keluarga, Karakteristik Lingkungan

Variabel	Mean	Std. Dev.
(jam)	41.2646	24.2043
<u>Sumber Daya Keluarga</u>		
(hektar)	0.5191	1.3997
(hektar)	2.2284	25.6627
	15.8435	0.5710
<u>Karakteristik Anak</u>		
(tahun)	10.8159	3.6535
<u>Karakteristik Keluarga</u>		
(orang)	0.7511	0.7620
(orang)	2.1350	0.5016
(orang)	4.5793	1.7251
(tahun)	5.3881	4.9545
(rupiah)	932012.6	2269171
<u>Karakteristik Lingkungan</u>		
(km)	2.1504	3.9075
Observasi	5919	

Sumber: IFLS 5, diolah

Tabel 1 merupakan statistik deskriptif dari observasi terhadap anak bekerja usia 5-17 tahun pada keluarga pertanian.

Tabel 2. Hasil Estimasi Persamaan Anak Bekerja Pada Keluarga Pertanian-Koefisien

Variabel terikat:		
Variabel	Koef (Std. Err)	
<u>Sumber Daya Keluarga</u>		
(hektar)	7.2426 (0.9916)	***
(hektar)	-0.2100 (0.0490)	***
	-21.3851 (2.5292)	***
<u>Karakteristik Anak</u>		
(tahun)	-0.1608 (0.1153)	
(1=pendidikan anak paling tinggi adalah SMP ke bawah)	5.3568 (1.4730)	***
(1=anak sedang bersekolah)	-96.8182 (9.2743)	***
(1=anak kandung kepala keluarga)	3.2421 (2.2184)	
(1=anak laki-laki)	-0.6984 (0.8363)	
<u>Karakteristik Keluarga</u>		
(1=kepala keluarga adalah perempuan)	5.0128 (1.3343)	***
(orang)	-0.2425 (1.0454)	
(orang)	-3.6800 (1.0864)	***
(orang)	-0.9494 (0.5764)	*
(tahun)	1.6221 (0.1458)	***
<u>Konstanta</u>	380.9616 (40.2924)	***
Observasi	5919	

Sumber: IFLS 5, diolah.

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

instrumental variables: dummy public transport, dummy market, distance to market, dummy electricity, time electricity, dummy water, headwage

Tabel 2 merupakan hasil estimasi empiris.

Dari tabel 1 diketahui bahwa rata-rata jam kerja anak per minggu adalah 41 jam, atau 5-6 jam per hari. Luas lahan rata-rata yang dimiliki keluarga sebesar 0.5 hektar. Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita keluarga sebesar 15%. Pada karakteristik anak untuk seluruh observasi, dapat diketahui dari tabel 1 bahwa rata-rata usia anak bekerja adalah 11 tahun. Pada karakteristik keluarga untuk seluruh observasi, dapat diketahui bahwa rata-rata kepala keluarga bersekolah selama 5 tahun atau hanya bersekolah sampai kelas 5 sekolah dasar, keluarga

memiliki 1 anak usia 18 tahun ke atas, 2 orang dewasa, dan jumlah anggota keluarga sebanyak 4 orang. Selain itu, kepala keluarga mempunyai upah rata-rata per bulan Rp 932.000,-.

Estimasi dari tobit dengan *instrumental variable* untuk anak bekerja usia 5-17 tahun di keluarga pertanian dapat dilihat pada tabel 4.2. Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa koefisien tanah mempunyai tanda positif, artinya semakin besar luas lahan pertanian yang dimiliki atau diolah oleh keluarga, maka semakin banyak jumlah jam kerja anak. Koefisien tanah kuadrat mempunyai tanda negatif, artinya jika keluarga terus menambah luas tanah pertanian, maka jumlah jam kerja anak justru semakin menurun. Hal ini disebabkan keluarga tersebut dapat dikatakan lebih sejahtera, sehingga tidak menginginkan anaknya bekerja lagi (Basu, Das & Dutta, 2010). Selain itu, koefisien variabel persentase pengeluaran konsumsi per kapita bernilai negatif, artinya keluarga yang lebih miskin akan mempunyai jumlah jam kerja anak lebih banyak daripada keluarga yang lebih kaya.

Tabel 2 juga dapat menunjukkan hasil estimasi terkait karakteristik anak. Koefisien dummy pendidikan tertinggi anak menunjukkan bahwa jumlah jam kerja anak pada kelompok anak yang pendidikan paling tingginya SMP ke bawah lebih banyak daripada kelompok anak yang pendidikan paling tingginya SMA ke atas. Hal tersebut dapat mencerminkan masih tingginya biaya pendidikan tingkat dasar dan menengah bagi keluarga di perdesaan sehingga memilih anaknya untuk bekerja daripada sekolah. Koefisien dummy status anak sekolah saat ini menunjukkan bahwa jumlah jam kerja anak pada kelompok anak yang sedang sekolah lebih sedikit daripada kelompok anak yang sedang tidak sekolah.

Kemudian, tabel 2 juga dapat menunjukkan hasil estimasi terkait karakteristik keluarga. Koefisien dummy jenis kelamin kepala keluarga menunjukkan bahwa jumlah jam kerja anak pada kelompok yang kepala keluarganya perempuan lebih banyak daripada kelompok yang kepala keluarganya laki-laki. Atau dengan kata lain, jika ibu menjadi kepala keluarga, maka akan meningkatkan jumlah jam kerja anak. Hal tersebut dapat disebabkan stabilitas ekonomi keluarga kurang baik jika ibu menjadi kepala keluarga, sehingga dapat menyebabkan anaknya ikut bekerja. Koefisien variabel jumlah orang dewasa bertanda positif, artinya semakin banyak keluarga yang mempunyai orang dewasa, maka jumlah jam kerja anak semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena orang dewasa dapat menjadi substitusi anak bekerja. Koefisien jumlah anggota keluarga bertanda negatif, artinya semakin banyak jumlah anggota keluarga, akan mengurangi jumlah jam kerja anak karena anggota keluarga yang lain dapat menjadi substitusi untuk anak bekerja, sehingga pembagian jam kerja anak semakin sedikit. Koefisien variabel lama sekolah kepala keluarga bertanda positif,

artinya semakin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga, maka jumlah jam kerja anak semakin bertambah. Hal tersebut dapat disebabkan karena semakin tingginya tingkat pendidikan orang tua, anak dapat memperoleh informasi pekerjaan lebih baik dari orang tua sehingga dapat meningkatkan jumlah jam kerja anak (Bhalotra & Heady, 2003).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ternyata ada hubungan antara tanah dengan anak bekerja di Indonesia, khususnya di keluarga pertanian. Hipotesis dari penelitian ini pun dapat dibuktikan secara empiris. Hasil dari penelitian ini mengkonfirmasi bahwa perilaku *wealth paradox* juga dapat berlaku untuk anak bekerja di Indonesia, khususnya pada keluarga pertanian yang tinggal di area perdesaan. Begitu pula dengan *luxury axiom* juga berlaku untuk anak bekerja di Indonesia, khususnya pada keluarga pertanian yang tinggal di area perdesaan. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa jumlah jam kerja anak di keluarga yang punya tanah lebih luas akan lebih banyak daripada anak di keluarga yang punya tanah lebih sempit, *given* pengeluaran konsumsi per kapitanya sama. Atau, jumlah jam kerja anak di keluarga lebih miskin akan lebih banyak daripada anak di keluarga yang lebih kaya, *given* punya luas tanah yang sama. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa meskipun jumlah jam kerja anak meningkat seiring bertambahnya luas lahan pertanian keluarga, tetapi penambahan luas tanah yang terus menerus justru akan menurunkan jumlah jam kerja anak. Artinya perilaku *inverted-U* juga terbukti secara empiris untuk anak bekerja di Indonesia. Pada akhirnya, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa aset keluarga berupa tanah pertanian merupakan salah satu indikator yang dapat menyebabkan anak bekerja untuk kondisi pasar tenaga kerja tidak sempurna

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Dr. Arie Damayanti, Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia
2. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S., Quayes, M. S. & Rives, J.M. (2004). Poverty and Other Determinants of Child Labor in Bangladesh. *Southern Economic Journal*, 70, (4), 876-892.
- Basu, K. & Van, P.H. (1998). The Economics of Child Labor. *The American Economic Review*, 88, (3), 412-427.
- Basu, K., Das, S. & Dutta, B. (2010). Child Labor and Household Wealth: Theory and Empirical Evidence of an Inverted-U. *Journal of Development Economics*, 91, (1), 8-14.
- Bhalotra, S. & Heady, C. (2003). Child Farm Labor: The Wealth Paradox. *World Bank Economic Review*, 17, (2), 197-227.
- Blunch, N. H. & Verner, D. (2000). Revisiting the Link Between Poverty and Child Labor: The Ghanaian Experience. *Policy Research Working Paper*, 2-21.
- BPS, & ILO. (2009). Pekerja Anak Indonesia 2009. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Cameron, A. C. & Trivedi, P.K. (2009). *Microeconometrics Using Stat a*. Texas: Stata Press.
- Chiawaula, L.S. (2010). Household Poverty and Child Labor Decisions in Malawi. *Research in Labor Economics*, 31, 33-51.
- Delap, E. (2001). Economic and Cultural Forces in The Child Labour Debate: Evidence from Urban Bangladesh. *The Journal of Development Studies*, 37, (4), 1-22.
- Edmonds, E.V. (2005). Does Child Labor Decline with Improving Economic Status?. *The Journal of Human Resources*, 40, (1), 77-99.
- Fan, C.S. (2011). The Luxury Axiom, The Wealth Paradox, and Child Labor. *Journal of Economic Development*. 36, (3), 25-45.
- Goto, H. & Mano, Y. (2012). Labor Market Competitiveness and The Size of The Informal Sector. *Journal of Population Economics*, 25, (2), 495-509.
- Greene, W.H. (2008). *Econometric Analysis*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Heltberg, R. (1998). Rural Market Imperfections and The Farm Size-Productivity Relationship: *Evidence from Pakistan*. *World Development*, 26, (10), 1807-1826.
- Iryani, B.S. & Priyarsono, D.S. (2013). Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. 13, (2), 177-195
- Key, N., Sadoulet, E. & de Janvry, A. (2000). Transactions Cost and Agricultural Household Supply Response. *American Journal Agricultural Economics*, 82, (2), 245-259.
- Lima, L.R., Mesquita, S. & Wanamaker, M. (2014). Child Labor and the Wealth Paradox: The Role of Altruistic Parents. *Economics Letters*, 130, (C), 80-82.

- Munawaroh, T. (2012). Pengaruh Kemiskinan Rumah Tangga Terhadap Penawaran Tenaga Kerja Anak di Indonesia. Tesis Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nabawiyah, M. (2014). Pengaruh Kredit Terhadap Pekerja Anak di Provinsi Kalimantan Selatan. Tesis Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia .
- Nielsen, H.S. (1998). Child Labor and School Attendance: Two Joint Decisions. *Centre for Labour Market and Social Research*, 1-32.
- Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D.L. (2009). *Microeconomics*. New Jersey: Prentice Hall.
- Irianti, D. & Riasih, T. (2015). Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Penanganan Anak Jalanan di Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat. *Sosiohumaniora*, 17, (1), 13-20.
- Ray, R. (2000). Child Labor, Child Schooling, and Their Interaction with Adult Labor: Empirical Evidence for Peru and Pakistan. *The World Bank Economic Review*, 14, (2), 347-367.
- Rizkianto, R., Mufflikhati, I. & Hernawati, N. (2013). Nilai Ekonomi Anak, Motivasi, dan Self-Esteem Pekerja Anak. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. 6, (3), 172-179
- Sadoulet, E., de Janvry, A. & Benjamin, C. (1996). Household Behavior with Imperfect Labor Markets. *Journal of Industrial Relations*. 37, (1), 85-108
- Stanhill, G. (1978). The Fella's Farm: an Autarkic Agro-Ecosystem. *Agro-Ecosystems*. 4, (4), 433-448.

RUANG TERBUKA HIJAU DALAM TATA RUANG KOTA BANDUNG AKHIR ABAD XIX HINGGA PERTENGAHAN ABAD XX

Miftahul Falah, Agusmanon Yuniadi, dan Rina Adyawardhina

Departemen Sejarah dan Filologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran

Jalan Ir. Soekarno KM 21, Jatinangor, Sumedang 45636

E-mai: miftahul.falah@unpad.ac.id; agusmanon@unpad.ac.id; adyawardhina@unpad.ac.id

ABSTRAK. Dalam tata ruang kota, ruang terbuka hijau merupakan salah satu komponen pembentuk fisik kota dan keberadaannya menjadi salah satu indikator penilaian terhadap kualitas lanskap kota. Di Kota Bandung, ruang terbuka hijau cukup banyak baik yang dibangun pada masa kolonial maupun masa kemerdekaan, tetapi secara historis, belum banyak yang mengkaji. Bagaimana keletakan ruang terbuka hijau dalam konstelasi tata ruang Kota Bandung pada Abad XX? Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan itu, dalam kajian ini diterapkan metode sejarah yang dalam tataran operasional terdiri atas empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Untuk menganalisisnya, digunakan konsep morfologi kota yakni salah satu pendekatan dalam mengkaji kota dengan menekankan pada aspek perubahan fisik kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Pemerintahan *Gemeente* Bandung (Pemerintah Kota Bandung), ruang terbuka hijau lebih banyak dibangun di wilayah Bandung Utara; hutan kota yang ada Kota Bandung yang dikenal dengan nama *Jubileumpark* memiliki area lebih luas dibandingkan dengan kondisi sekarang; taman-taman kota yang telah dibangun oleh Pemerintah *Gemeente* Bandung sebagian besar masih berfungsi setelah direvitalisasi oleh Pemerintah Kota Bandung; dan beberapa taman kota mengalami transformasi karena berbagai alasan, antara lain ketidaksesuaian dengan budaya lokal.

Kata kunci: *Gemeente* Bandung; Ruang Terbuka Hijau; Hutan Kota; Taman Kota

GREEN OPEN SPACE IN BANDUNG'S URBAN PLAN FROM THE LATE 19 TH TO THE MID-20TH CENTURY

ABSTRACT. In the space of the city, open green space is one of the components of the physical creation of the city and its existence became one of the indicators of assessment of the quality of the urban landscape. In the city of Bandung, both during the colonial period and independence period, green open space has become part of the plan of spatial planning of the city but has not much studied in a historical perspective. How does the green open space change in the spatial layout of Bandung in the 21st century? For answers to questions that, in this study, the history of the methods applied in the operational landscape consists of four stages, namely, heuristics, critique, interpretation, and historiography. The analysis of the study uses the conceptual approach of the city morphology, as one of the approaches in reviewing the city by emphasizing on the physical change of the city. The results showed that during the colonial period, the Government of *Gemeente* Bandung more build green open space in the area of North Bandung; *Jubileumpark* is a city forest that was inaugurated in commemoration of the establishment of the Government of *Gemeente* Bandung with a wider area than the current condition; the city parks that have been built by the Government of *Gemeente* Bandung are largely still functioning after being revitalized by the Bandung city government; and some of the city's parks are undergoing transformation for various reasons, such as inconsistency with local cultures.

Keywords: *Gemeente* Bandung; the Green open space; Forest City; Garden City

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Bandung gencar membangun taman kota sebagai bagian dari upaya mempercantik kota, memenuhi persentase ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah, dan sebagai media memperbanyak area bercengkerama warga kota. Secara historis, keberadaan ruang terbuka hijau bukanlah sesuatu yang baru, tetapi sudah ada sejak masa kolonial. Akan tetapi, pembangunan ruang terbuka hijau pada masa ini, lebih ditujukan untuk kepentingan penduduk dari golongan Belanda atau Eropa lainnya.

Pada masa kolonial, terdapat taman kota yang dibangun untuk menghormati tokoh yang dianggap berjasa. Ada juga taman yang dibangun dengan merujuk pada peristiwa tertentu atau tema tertentu. Taman kota yang dibangun mayoritas terletak di wilayah Bandung

Utara dan hampir dapat dikatakan bahwa di wilayah Bandung Selatan tidak pernah dibangun ruang terbuka hijau kecuali kawasan Tegallega. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?

Pada masa kemerdekaan, ruang terbuka hijau tidak terlalu diprioritaskan sebagai komponen penataan kota. Selain “membiarkan” taman kota yang sudah ada, sebagian taman kota bahkan ada yang bertransformasi dengan berbagai alasan. Kondisi tersebut bukan tanpa alasan karena pada masa transisi (1945-1950), bangsa Indonesia tidak memiliki ahli di bidang penataan kota. Akibatnya, perkembangan kota seakan-akan terjadi tanpa melalui perencanaan. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin bertambahnya penduduk Kota Bandung sehingga diperlukan pembangunan perumahan bagi penduduk Kota Bandung. Dampaknya adalah ruang terbuka hijau memperlihatkan kecenderungan semakin menyusut karena

lahan terbuka banyak difungsikan sebagai kawasan pemukiman.

Menyempitnya ruang terbuka hijau mengakibatkan julukan Bandung Kota Kembang terlebih julukan *the Garden of Allah* seakan hilang maknanya (Indira dkk., 2013: 47). Untuk mengembalikan “hijaunya” Kota Bandung, bukan berarti tidak ada upaya dari Pemerintahan Kota Bandung. Akan tetapi, pada masa Pemerintahan Walikota Ridwan Kamil (2013-2018), pembangunan ruang terbuka hijau dirasakan cukup gencar. Selain merevitalisasi taman kota warisan kolonial, beberapa ruang terbuka, seperti trotoar, persimpangan jalan, atau batas jalan dijadikan sebagai ruang terbuka hijau. Meskipun belum mencapai luas ideal, tetapi hal itu menunjukkan bahwa Kota Bandung, sebagai nama resmi (domain) milik Pemerintah Kota Bandung berdasarkan No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (Amirulloh, 2017), masih memiliki peluang untuk amanat perundangan-undangan yang mengharuskan luas ruang terbuka hijau minimal 20% dari luas wilayahnya.

Pemerintah Kota Bandung mulai menyebar proses pembangunan ruang terbuka hijau. Di wilayah Bandung Utara, selain mempercantik taman-taman kota yang sudah ada, pemerintah pun membangun taman kota baru meskipun tidak seluas yang sudah ada. Pembangunan ruang terbuka hijau dilakukan juga di wilayah Bandung Selatan, Bandung Timur, dan Bandung Barat. Hal tersebut menunjukkan keinginan dari Pemerintah Kota Bandung untuk membangun ruang terbuka hijau di setiap wilayah administrasi pemerintahannya. Keinginan tersebut tidak terlepas dari sisi historis bahwa pada masa kolonial, ruang terbuka hijau hanya dibangun di wilayah Bandung Utara. Mengapa hal tersebut dapat terjadi?

Kajian mengenai tata ruang Kota Bandung sudah banyak dilakukan, tetapi rata-rata bukan dari disiplin ilmu sejarah. Para planolog atau arsitek sudah banyak yang mengupas ruang terbuka hijau di Kota Bandung dalam konteksi tata ruang kota. Sampai tahun 2011, beberapa taman kota yang ada di Kota Bandung belum mencerminkan suatu taman yang layak bagi anak-anak. Tidak hanya itu, beberapa taman bahkan menjadi “rumah” bagi pengemis atau tuna wisma sehingga menghilangkan kenyamanan dan keamanan bagi warga Kota Bandung yang hendak menikmati taman (Dewiyanti, 2011). Apabila dikaitkan dengan tingkat idealisme ruang terbuka menurut perundang-undangan yang berlaku, sampai tahun 2012, Kota Bandung belum memiliki ruang terbuka yang ideal karena terbentur pada keterbatasan kawasan ruang terbuka. Untuk dapat meningkatkan persentase luas ruang terbuka hijau adalah dengan mengoptimalkan sepadan jalan, optimalisasi penataan jalur koridor komersial, atau dengan memperbanyak taman lingkungan yang bersifat privat (Rahmy, dkk., 2012).

Salah satu faktor yang mengakibatkan belum terwujudnya ruang terbuka yang ideal di Kota Bandung

(dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa) adalah pertambahan kawasan area terbangun. Pembangunan kawasan terbangun dengan sendirinya akan mengubah fungsi ruang terbuka karena mayoritas pembangunan pusat aktivitas warga kota dilakukan di pusat perkotaan yang kemudian secara perlahan menyebar ke daerah pinggiran yang akhirnya membentuk jaringan perkotaan. Konsekuensinya, beberapa lahan terbuka berubah fungsi menjadi kawasan terbangun, yang sebagian sudah ada sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda dan sebagian lagi dibangun pada masa Pemerintahan Republik Indonesia (Budiman, 2014).

Menyadari bahwa ruang terbuka hijau semakin menyempit, Pemerintah Kota Bandung berupaya menambah kawasan tersebut dengan membangun dan merevitalisasi kawasan terbuka yang fungsinya tidak jelas atau menjadikan koridor jalan, ruang di bawah jalan layang, dan sepadan jalan sebagai taman kota sehingga menambah persentase luas ruang terbuka. Dalam kurun 2004-2007, pembangunan ruang terbuka hijau dilakukan dengan menjalankan program intensifikasi melalui gerakan reboisasi. Dari tahun 2007-2010, luas ruang terbuka hijau di Kota Bandung mencapai 9,94% dari luas wilayah Kota Bandung dan satu tahun kemudian menjadi 11,42% (Puspitojati, 2015). Melalui program revitalisasi taman kota, sampai tahun 2015, di Kota Bandung bermunculan taman “baru” baik yang bertemakan alam, kepahlawanan, kesehatan, seni, olah raga, dan sebagainya (Budiman, 2015). Kurniati (2016) tidak membahas secara khusus ruang terbuka hijau, melainkan menyoroti masalah yang lebih luas, yakni tata ruang kota Kota Bandung dari sudut pandang ilmu komunikasi. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah berupaya menyosialisasikan kebijakan penataan ruang kota kepada seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi, dari data yang diperoleh, Poni Sukaesih menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat cukup kurang dan ketersediaan sumber daya manusia yang bisa menunjang penataan ruang kota masih belum cukup ideal, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut terlihat dari masih lemahnya penegakkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar regulasi mengenai tata ruang kota.

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yakni *The process of critically examining and analyzing the records and survivals of the past. The imaginative reconstruction of the past from the data derived by the process is called historiography* (Gottschalk, 1968: 48). Dalam tataran operasional, metode sejarah dilakukan dalam empat tahap. Pertama *heuristik* yakni proses mencari, menemukan, dan menghimpun sumber sejarah yang relevan dengan pokok

masalah. Heuristik merupakan sebuah proses pencarian dan penghimpunan sumber data atau informasi yang bisa didapatkan dari sumber-sumber sejarah yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda atau artefak (Gottschalk, 1968; Kuntowijoyo, 1995; Herlina, 2008). Sementara itu, G. J. Renier (1997) membedakan sumber sejarah menjadi dua jenis, yakni sumber material dan sumber immaterial. Selain sejarah lisan dan tradisi lisan, sumber sejarah dimasukkan ke dalam klasifikasi sumber material.

Secara pragmatis, heuristik dilakukan untuk menghimpun sumber yang relevan dengan topik tulisan ini, antara lain *Mooi Bandoeng* yakni majalah mingguan yang banyak memberitakan kehidupan Kota Bandung pada dalam kurun waktu 1920-1940-an. *Mooi Bandoeng* banyak menginformasikan keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Demikian juga dengan terbitan berkala lainnya yakni *Groot Bandoeng* yang banyak mengupas tentang Kota Bandung. Selain itu, dalam kegiatan heuristik dihimpun juga sumber lainnya, antara lain foto-foto baik yang lama maupun yang baru, peta Kota Bandung, buku, surat kabar, dan sumber internet.

Tahap selanjutnya adalah kritik, baik kritik ekstern maupun kritik intern. Kritik dilakukan untuk memastikan bahwa sumber yang telah dihimpun merupakan sumber otentik sekaligus memiliki tingkat kredibilitas tinggi (Garraghan, 1957; Gottschalk, 1968; Herlina, 2008). Kritik intern dilakukan juga terhadap sumber sezaman yang secara eksternal bersifat otentik. Hal ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas sumber sehingga dapat dipergunakan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah. Misalnya, pada peta Kota Bandung yang dibuat tahun 1953, terdapat keterangan (legenda) terkait keberadaan Universitas Padjadjaran. Secara internal, sumber kartografi tersebut patut dipertanyakan kredibilitasnya karena Universitas Padjadjaran baru didirikan pada 1957. Oleh karena informasi yang lainnya benar, peta tersebut tetap dapat dipergunakan karena informasi yang terkandung di dalam peta tersebut tidak bertentangan. Dengan demikian, peta tersebut tetap dapat dipergunakan sebagai sumber sejarah yang kredibel karena bisa jadi kesalahannya hanya pada penulisan angka tahun reproduksi peta tersebut, bukan pada informasi (isi) peta secara keseluruhan. Kritik yang dilakukan menghasilkan serangkaian fakta yang kemudian diinterpretasi baik secara verbalistis, teknis, faktual, logis, maupun psikologis (Garraghan, 1957; Herlina, 2008). Hasil penafsiran yang bersifat kronologis, menjadi dasar merekonstruksi kisah masa lampau yang kemudian dinamai historiografi (Gottschalk: 1968; Abdullah, 1984; Kuntowijoyo, 1995; Renier, 1997; Herlina, 2008; Sofianto, 2014). Historiografi dalam tulisan ini diberi judul *Ruang Terbuka Hijau dalam Tata Ruang Kota Bandung pada Akhir Abad XIX hingga Pertengahan Abad XX*.

Untuk keperluan eksplanasi sejarah, kajian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan morfologi

kotasehinggabentuk logis sebuah kota sebagai produk perubahan *sosio-spatial* dapat dipahami baik secara historis, sosiologis, maupun teknis. Morfologi kota tidak hanya membicarakan mengenai bentuk fisik kota, melainkan juga membahas berbagai komponen pembentuk fisik kota, yang salah satu di antaranya adalah ruang terbuka. Secara konseptual, ruang terbuka didefinisikan sebagai “*any urban ground space, regardless of public accessibility, that is not roofed by an architectural structure*” (Stanley *et al.*, 2012: 1089). Ruang terbuka merupakan salah komponen pembentuk fisik kota yang saling memengaruhi dengan komponen lainnya, seperti bangunan, sirkulasi jalan, pusat ekonomi, dan sebagainya.

Secara konseptual, ruang terbuka dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Kedua ruang terbuka tersebut merupakan salah satu bagian penting dari pertumbuhan morfologi kota. Ruang terbuka hijau adalah kawasan permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang berfungsi sebagai perlindungan habitat tertentu dan sarana lingkungan kota atau kawasan perkotaan sehingga bisa dipergunakan untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, serta untuk meningkatkan kualitas lanskap kota (Hakim, 2004). Sementara itu, Ruang Terbuka Non-hijau adalah ruang yang secara fisik bukan berbentuk bangunan gedung dan tidak dominan ditumbuhi tanaman ataupun permukaan berpori, dapat berupa perkerasan, badan air, ataupun kondisi tertentu lainnya (Indonesia, 2009)

1. Ruang Terbuka Hijau Masa Pemerintahan *Gemeente Bandung*

Setelah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bandung pada 25 September 1810, tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Bandung semakin memegang peranan penting. Peran politik Kota Bandung semakin bertambah ketika dijadikan sebagai pusat pemerintahan Keresidenan Priangan menggantikan Kota Cianjur, berdasarkan *Besluit van Gouverneur Generaal van Nederlandsche-Indie van 11 October 1856, No. 84*. Meskipun demikian, realisasi *besluit* itu baru dilaksanakan 7 Agustus 1864 sering dengan terbitnya *Besluit van Gouverneur Generaal van Nederlandsche-Indie van 7 Augustus 1864, No. 18 (Staatsblad van Nederlandsche-Indie 1864 Nomor 114)*. Sejak menjadi pusat pemerintahan Keresidenan Priangan, Kota Bandung tumbuh menjadi pusat politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pertumbuhan Kota Bandung semakin meningkat sejalan dengan adanya wacana menjadikan kota ini sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Wacana tersebut diawali dengan pembangunan dua gedung militer, yaitu *Paleis Legercommandant* (rumah dinas Panglima Tentara Hindia Belanda) dan *Departement van Oorlog* (Departemen Peperangan). Dalam tata ruang Kota Bandung, wilayah di sekitar kedua bangunan tersebut kemudian menjadi kawasan militer.

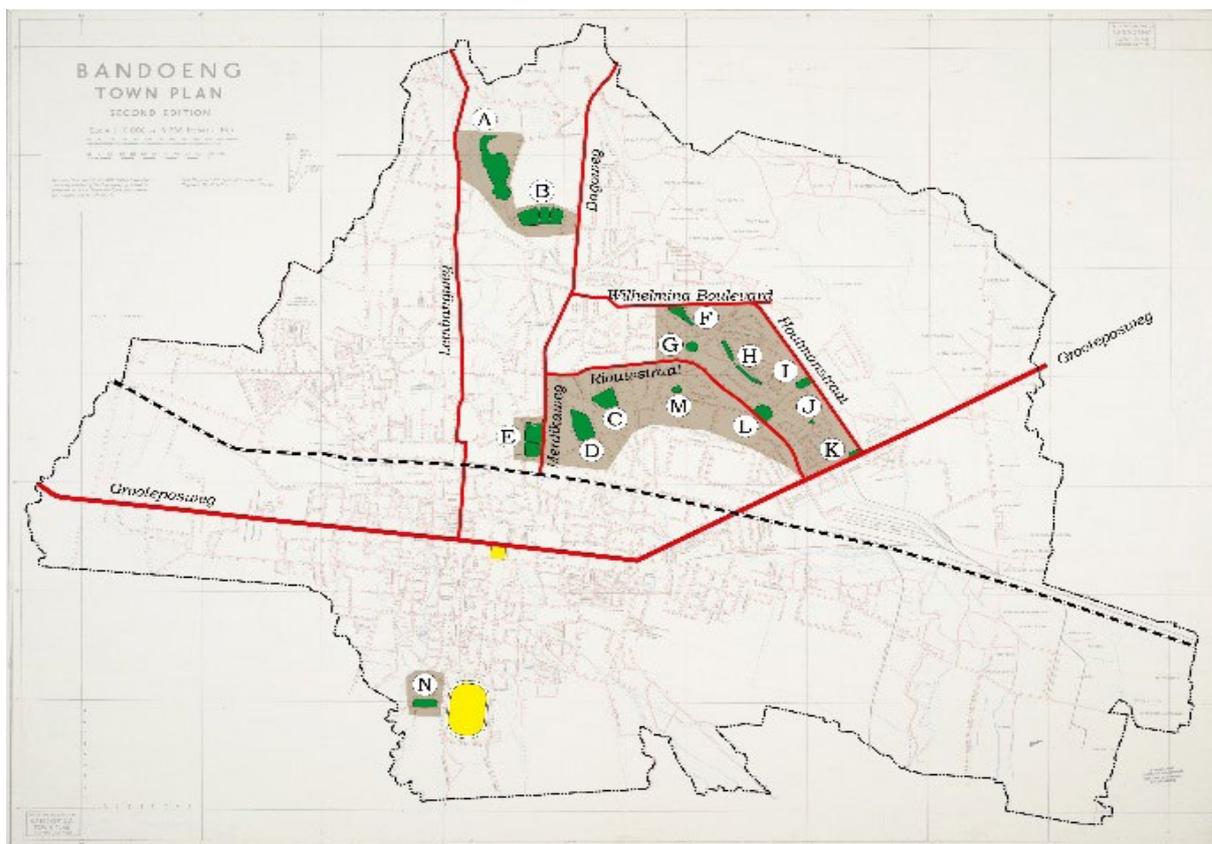
Wacana menjadikan Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda, direpsons oleh Pemerintah *Gemeente* Bandung (Pemerintahan Kota Bandung masa kolonial Belanda) dengan merencanakan perluasan kota ke arah utara rel kereta api. Rencana tersebut didasarkan pada suatu kondisi bahwa sampai awal Abad XX, wilayah Bandung Utara relatif masih kosong dibandingkan dengan kawasan Bandung Selatan. Oleh Pemerintah *Gemeente* Bandung, wilayah Bandung Utara akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan, pusat pemukiman orang-orang Belanda/Eropa, pusat ekonomi, dan pusat sosial-budaya (Falah, 2018: 343).

Konsekuensi logis dari pembangunan pemukiman adalah dibangunnya ruang terbuka hijau untuk memenuhi kebutuhan penduduk Belanda/Eropa. Di kalangan mereka, taman kota merupakan suatu kebutuhan sebagai primer sebagai tempat untuk bercengkerama dengan sesama warga kota dan untuk menikmati keindahan kota, untuk melepaskan kepenatan (Budiman, 2015: 190). Taman-taman yang dibangun di Kota Bandung oleh Pemerintah Hindia Belanda, semuanya berada di wilayah Bandung Utara karena di wilayah inilah pembangunan pemukiman orang-orang Belanda/Eropa dikonsentrasikan, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.

Di Kota Bandung, taman kota pertama yang dibangun adalah *Pieter Sijthoffpark*. Setelah itu, dibangun beberapa taman yang semuanya berada di kawasan Bandung Utara, antara lain *Insulinde Park*, *Molukken Park*, *Tjibeunjing Plantsoen*, *Tjilakiplein*, *Oranjeplein*, dan *Ijzermanpark*. Selain taman-taman tersebut, terdapat juga beberapa taman kecil sehingga pada 1930-an, Kota Bandung acapkali disebut sebagai *tuinstad* (kota taman) karena keberadaan taman kota menjadikan Bandung sebagai kota yang sangat indah (*Mooi Bandoeng*, Feb. 1933: 117-119).

2. Jubileumpark

Keberadaan hutan kota tidak dimiliki oleh setiap kota pusat pemerintahan di Priangan. Meskipun tidak sebesar Kebun Raya Bogor, di Kota Bandung terdapat sebuah hutan kota yang pada masa kolonial dikenal dengan sebutan *Jubileumpark* yang mulai dibangun pada 1923 yang terletak di Lembah Cikapundung, yakni antara *Lembangweg* (berubah menjadi Jalan Cipaganti, sekarang menjadi Jalan R. A. A. Wiranatakusumah III) dan *Taman sariweg* (sekarang Jalan Tamansari), sebagaimana dapat lihat pada gambar 2.

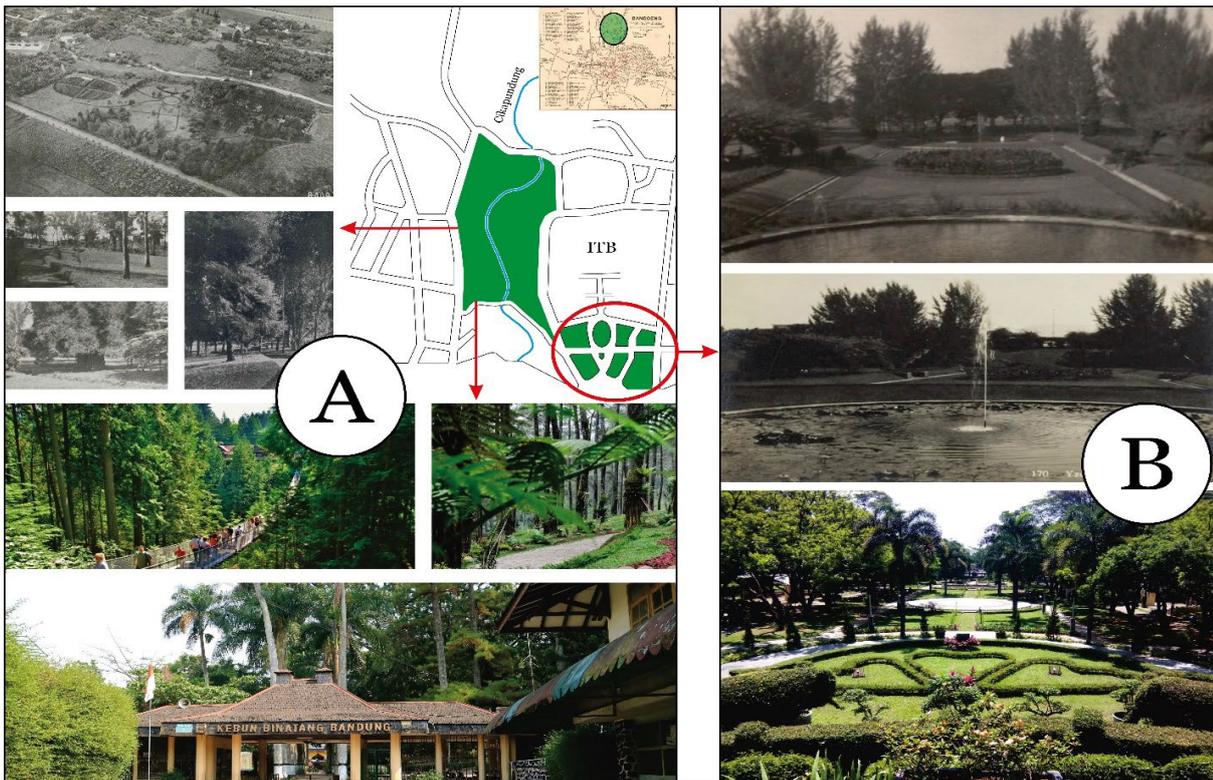


Gambar 1. Keletakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung Tahun 1885-1942

Keterangan:

(A) *Jubileumpark*; (B) *Ijzermanpark*; (C) *Molukkenpark*; (D) *Insulin depart*; (E) *Pieters Sijthoffpark*; (F) *Tjilakiplein*; (G) *Tjitaroemplein*; (H) *Tjibeunjing Plantsoen*; (I) *Houtmanplein*; (J) *Orchidplein*; (K) *van Limburg Stirum Plein*; (L) *Oranje Nassauplein*; (M) *Sabangplein*; (N) *P.W.S. Plein*.

Sumber: Rekonstruksi oleh Miftahul Falah dari *Bandoeng: Town Plan*, 1945; Collectie Kaarten van Coloniaal Nederlandsch-Indie. Inv. D E 29,7. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden.



Gambar 2. Keletakan Jubileumpark dan Ijzermanpark

Keterangan : A = *Jubileumpark* (Kebun Binatang Bandung & Babakan Siliwangi); B = *Ijzermanpark* (Taman Ganesha ITB)

Sumber: Direkonstruksi oleh Miftahul Falah dari Allied Geographical Section. "Bandoeng (*Monash Collections Online*).” Diakses dari <http://repository.monash.edu/items/show/27141>. Tanggal 15 Juli 2019. Pukul 22.37 WIB; "Jubileumpark". *Mooi Bandoeng. Maanblad van Bandoeng en Omstreken*. October 1934. Bandoeng: A. C. Nix & Co.; "Bandoeng als Tuinstad". *Mooi Bandoeng. Maanblad van Bandoeng en Omstreken*. Februari 1934. Bandoeng: A. C. Nix & Co.; *Het Ijzermanpark te Bandoeng, 1925*. Collectie Koninklijk Insituit Taal-, Land-, en Volkenkunde (KITLV). Inv. Nr. 34882. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden; *Het Ijzermanpark te Bandoeng, 1930*. Collectie Koninklijk Insituit Taal-, Land-, en Volkenkunde (KITLV). Inv. Nr. 143590. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden; Dokumentasi Penulis, November 2016.

Di kawasan *Jubileumpark*, terdapat beragam kekayaan flora dan fauna yang selain menjadi tempat berwisata juga memainkan peranan sebagai pusat penelitian kebiologian. Di kawasan *Jubileumpark*, terdapat juga *Zoological Garden*. Untuk keperluan pariwisata, *Jubileumpark* mulai dibuka untuk umum pada 1931 (*Mooi Bandoeng*, October 1934). Sebagai objek wisata, Pemerintah *Gemeente* Bandung melakukan pengembangan *Zoological Garden*. Sampai tahun 1936, pemerintah telah menambah lebih dari 58 satwa (Suganda, 2007: 154; Budiman, 2015: 199). Setelah Indonesia merdeka, *Zoological Garden* kemudian menjadi Kebun Binatang Bandung dan hingga saat ini menjadi salah satu destinasi wisata utama di Kota Bandung. Wisatawan yang mengunjungi tempat ini, bukan hanya warga Kota Bandung dan wilayah sekitarnya, tetapi banyak juga yang berasal dari luar wilayah Kota Bandung.

Tidak jauh dari *Jubileumpark*, terdapat sebuah taman yang bernama *Ijzermanpark* yang pada masa Republik berubah nama menjadi Taman Ganesha (ITB). Taman ini berlokasi di depan kampus *Techniese Hoogeschool* (sekarang ITB), di antara jalan Hoogeschoolweg (sekarang Jalan Ganesha) dan Maclaine Pontweg (sekarang Jalan Gelap Nyawang). Meskipun memiliki ukuran jauh lebih

kecil jika dibandingkan dengan *Jubileumpark*, tetapi taman yang dibangun pada 1927 ini sangat indah karena ditata sangat rapih bunga dalam berbagai warna. Di taman ini terdapat juga fitur air segar yang bening diselingi dengan rumput hijau dan pohon kelapa sawit dekoratif. Penataan seperti itu menjadikan *Ijzermanpark* sebagai salah satu taman dengan lanskap paling bagus pada masanya (*Mooi Bandoeng*, February 1934).

Setelah Indonesia merdeka, *Ijzermanpark* berubah nama menjadi Taman Ganesha. Patung dada Ijzerman, salah seorang penggagas didirikannya *Techniese Hoogeschool* sampai tahun 1950-an masih berdiri tegak. Pada 1960-an, patung itu menghilang dan diganti oleh patung ganesha. Saat ini, di lokasi bekas patung dada Ijzerman dan patung ganesha, dibangun sebuah tugu kontemporer yang terbuat dari baja tahan karat berbentuk rangka kubus (<http://aldes91.blogspot.com/2010/01/sejarah-taman-kota-di-bandung.html>).

3. *Pieters Sijthoffpark*

Di tengah-tengah Kota Bandung (*midden in de Stad Bandoeng*), pada 1885 dibangun sebuah taman yang kemudian diberi nama *Pieters Sijthoffpark* yang dirancang oleh R. Teuscher, seorang ahli tanaman (botanikus),

berlokasi di depan rumah asisten residen (yang pada 1906 berubah menjadi *Gemeente Huis*). Taman tersebut diberi nama *Pieter Sijthoffpark* sebagai bentuk penghargaan kepada asisten residen yang telah berjasa dalam pembangunan infrastruktur Kota Bandung (Budiman, 2015: 190; Kunto, 1984: 114). Bentuk tamannya persegi empat, beserta dengan jalanan berbentuk mirip huruf “Y”. Sebuah Gazebo ditempatkan di tengah pertemuan jalan taman ini. Kanal taman dengan jembatan penyeberangan artistik yang terbuat dari besi dibangun mengelilingi taman. Berbagai jenis pohon pelindung, pohon hias, tanaman hias, dan bunga-bunga menambah keindahan taman tersebut (<https://portal.bandung.go.id/taman-kota-bandung-tempo-dulu>).

Taman sederhana tersebut diberi nama *Pieter Sijthoffpark* sebagai bentuk penghargaan terhadap Pieter Sijthoff, Asisten Residen Bandung, yang turut berkontribusi dalam mengembangkan Bandung sebagai Pusat Pemerintahan Keresidenan Priangan. Selain itu, taman ini pun dikenal dengan nama Kebon Raja karena di sebelah timur terdapat *Kweekschool* yang acapkali disebut dengan istilah Sakola Raja. Pada 1950, *Pieter Sijthoffpark* (Kebon Raja) berubah nama menjadi Taman Merdeka dan sejak Desember 1996 namanya menjadi Taman Dewi Sartika (<https://portal.bandung.go.id/taman-kota-bandung-tempo-dulu>).

4. *Insulindepark* dan *Molukkenpark*

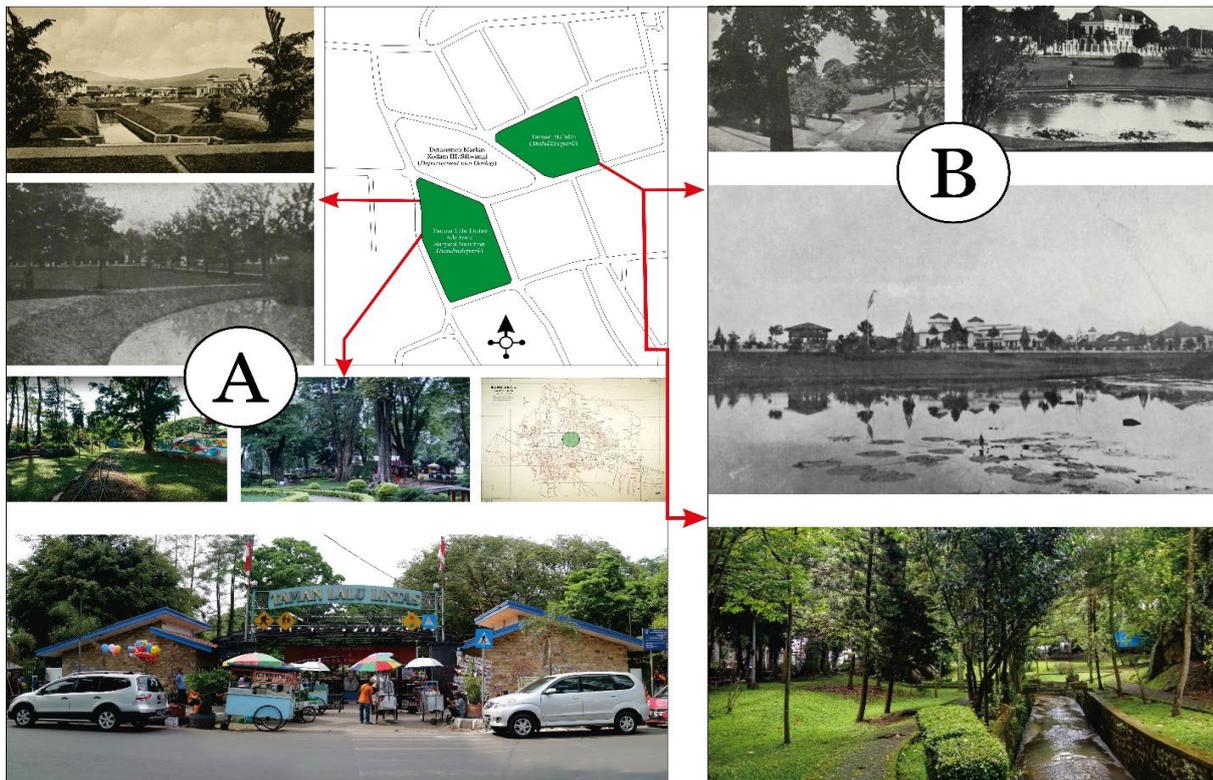
Insulindepark dibangun di atas tanah kosong yang sampai tahun 1918 masih berupa rawa. Setelah dikeringkan dan ditanami pepohonan di sepanjang pinggirannya, pada 1919-1920 tanah tersebut dijadikan sebagai pusat latihan militer. Pada akhir tahun 1920, pemerintah menjadikan lapangan itu sebagai taman tropis yang sampai tahun 1935 telah memiliki sekitar 90 jenis tanaman keras dan aneka bunga. Pada 1925, pemerintah kolonial menamai taman tropis itu sebagai *Insulindepark*. Setelah Indonesia merdeka, pada 28 April 1950, Pemerintah Kotapraja Bandung mengubah nama *Insulindepark* menjadi Taman Nusantara. Pada tanggal 1 Maret 1958, namanya berubah lagi menjadi Taman Lalu Lintas. Untuk mengenang korban peristiwa Gerakan 30 September, Taman Nusantara berubah nama menjadi Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution (<https://portal.bandung.go.id/taman-kota-bandung-tempo-dulu>).

Sementara itu, *Molukkenpark* dibangun oleh Pemerintah *Gemeente* Bandung pada 1919 yang berlokasi di kawasan militer, tepatnya di antara *Menadostraat* (Jalan Manado), *Celebesstraat* (Jalan Sumatera), *Ambonstraat* (Jalan Ambon), dan *Saparuastraat* (Jalan Saparua). Pada saat, *Molukkenpark* ditata dan dilengkapi dengan sebuah kolam besar berhiaskan air mancur, bunga teratai, tanaman hias, pohon pelindung sebagai peneduh, bangku



Gambar 3. Keletakan *Pieters Sijthoffpark*

Sumber: Direkonstruksi oleh Miftahul Falah dari Allied Geographical Section. “Bandoeng (*Monash Collections Online*).” Diakses dari <http://repository.monash.edu/items/show/27141>. Tanggal 15 Juli 2019. Pukul 22.37 WIB;; “Pieter Sijthof Park”. *Mooi Bandoeng. Maanblad van Bandoeng en Omstreken*. Jaargang 1. Nr. 8. Feb. 1933. Bandoeng: A. C. Nix & Co.; “Pieter Sijthof Park”. *Mooi Bandoeng. Maanblad van Bandoeng en Omstreken*. Jaargang 1. Nr. 5. Nov. 1933.. Bandoeng: A. C. Nix & Co.; Dokumentasi Penulis, 4 Oktober 2015.



Gambar 4. Keletakan *Insulindepark* dan *Molukkenpark*

Keterangan : A = *Insulindepark* (Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution); B = *Molukkenpark* (Taman Maluku)

Sumber: Direkonstruksi oleh Miftahul Falah dari *Bandoeng: Town Plan, 1945*. Collectie Kaarten van Coloniaal Nederlandsch-Indie. Inv. D E 29,7. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden; S. A. Reitsma. 1926. *Bandoeng: The Mountain City of Netherlands India*. Batavia: G. Kolff; Bandoengsche Administratie Mij. *De Jaarbeurs en Bandoeng 1921*. Bandoeng: Visser & Co.; "Bandoeng als Tuinstad". *Mooi Bandoeng. Maanblad van Bandoeng en Omstreken*. Februari 1934. Bandoeng: A. C. Nix & Co.; "Bandoeng als Tuinstad". *Mooi Bandoeng. Maanblad van Bandoeng en Omstreken*. Februari 1934. Bandoeng: A. C. Nix & Co.; *Het paleis van de legercommandant aan het Insulinde Park te Bandoeng, 1920*. Collectie Koninklijk Insituut Taal-, Land-, en Volkenkunde (KITLV). Inv. Nr. 1400613. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden; Dokumentasi Penulis, November 2016.

taman di keteduhan pohon, Jalan taman, dan tiang-tiang lampu berdekorasi artistik, sehingga memberikan kesan sejuk dan asri (dari <https://por-tal.bandung.go.id/taman-kota-bandung-tempo-dulu>).

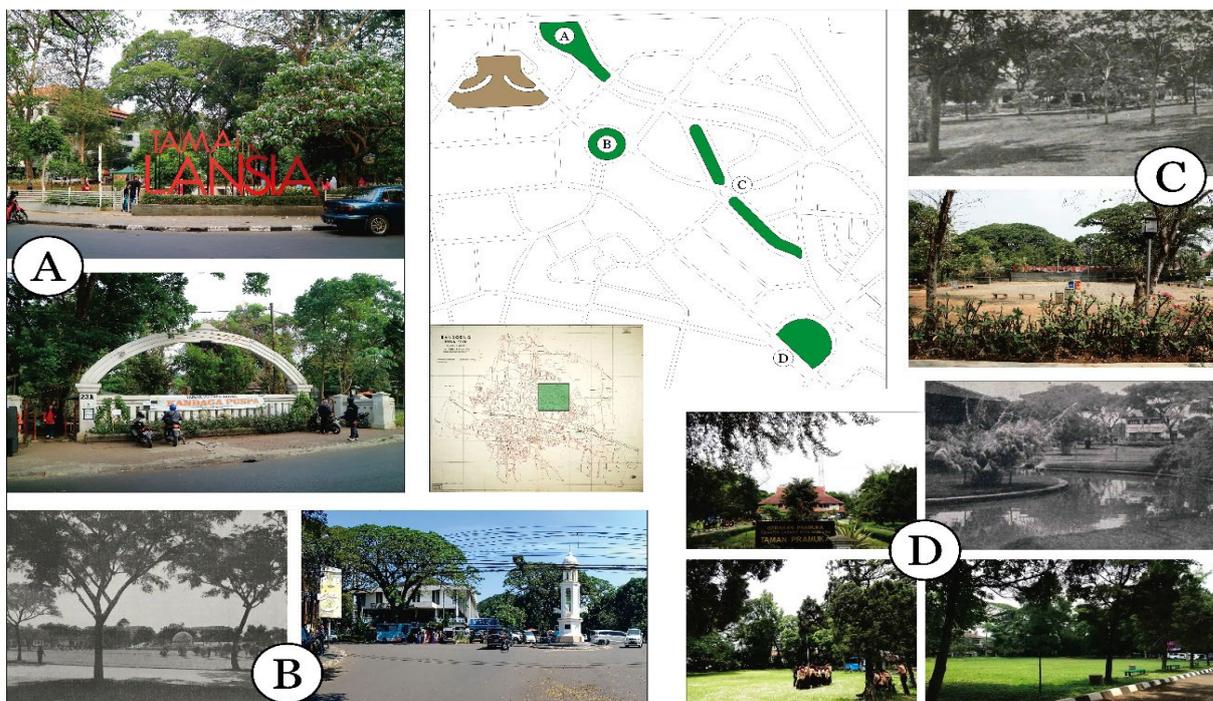
5. *Tjilakplein*, *Tjibeunjing Plantsoen*, *Tjitaroemplein*, dan *Oranje Nassauplein*

Pada awalnya, *Tjilakplein* dibuat bukan sebagai taman kota, tetapi lebih cenderung sebagai hutan kota. Hal tersebut bisa dilihat dari penataan pepohonnya yang relatif tidak diatur layaknya sebuah taman. *Tjilakplein* terbagi menjadi tiga bagian. **Pertama**, area utara *Tjilakplein* berada pada lokasi di antara *Wilhelmina Boulevard* (sekarang Jalan Diponegoro) dan *Tjimanoekstraat* (sekarang Jalan Cimanuk). **Kedua**, area tengah *plein* yang berlokasi di antara *Tjimanoekstraat* dan *Tjitaroemstraat* (sekarang Jalan Citarum). **Ketiga**, bagian *selatanplein* dimulai dari *Tjitaroemstraat* sampai *Tjiliwoengstraat* (sekarang Jalan Ciliwung).

Saat ini, ketiga bagian dari *Tjilakplein* itu telah direvitalisasi oleh Pemerintah Kota Bandung menjadi tiga buah taman, yaitu Taman Lansia, Taman Kandaga Puspa, dan *Pet Park*. Di Taman Kandaga Puspa disimpan lebih dari 100.000 spesies tanaman. Oleh karena itu, taman ini

selain berfungsi sebagai hutan kota, juga memiliki fungsi edukasi (<http://www.wisatabdg.com/2014/09/inilah-taman-tematik-di-kota-bandung.html>). Pada Desember 2014, Kota Bandung memiliki taman baru yakni *Pet Park* yang berlokasi di Jalan Cilaki, tidak jauh dari Taman Lansia dan Taman Pustaka Bunga, sengaja dibuat untuk warga Kota Bandung yang memiliki kegemaran mengajak hewan peliharaannya "berjalan-jalan menyusuri Kota Bandung. Meskipun demikian, taman ini terbuka untuk warga kota yang tidak memiliki hewan peliharaan (<http://www.wisatabdg.com/2014/10/ingin-mengajak-jalan-jalan-hewan.html>).

Taman lain yang sudah ada pada masa kolonial adalah *Tjitaroemplein* dibangun oleh Pemerintah *Gemeente* Bandung untuk mengenang keberhasilan Dr. Ir. De Groot yang berhasil membangun Stasiun Radio Malabar yang diresmikan oleh Gubernur Jenderal de Fock pada 5 Mei 1923. Melalui stasiun ini, komunikasi antara Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda dapat dilakukan melalui radio. Untuk mengenang jasa-jasanya itu, dibangun sebuah taman yang diberi nama *Tjitaroemplein* yang di tengah-tengahnya terdapat monumen bola dunia dan dua orang telanjang sedang melakukan komunikasi (<https://mooibandoeng.com/2013/06/27/stasiun-radio->



Gambar 5. Keletakan *Tjilakplein*, *Tjitaroemlein*, *Tjibeunjing Plantsoen*, dan *Oranje Nassauplein*

Keterangan: A= *Tjilakplein* (Taman Lansia & Taman Kandaga Bunga); B = *Tjitaroemlein* (Masjid Istiqomah); C = *Tjibeunjing Plantsoen* (Taman Cibeunying); D = *Oranje Nassauplein* (Taman Pramuka)

Sumber: Direkonstruksi oleh Miftahul Falah dari *Bandoeng: Town Plan, 1945*. Collectie Kaarten van Coloniaal Nederlandsch-Indie. Inv. D E 29,7. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden; ;“Bandoeng als Tuinstad”. *Mooi Bandoeng. Maanblad van Bandoeng en Omstreken*. Februari 1934. Bandoeng: A. C. Nix & Co.; “Doorkijk Tiitaroemplantsoen” in *Mooi Bandoeng. Maanblad van Bandoeng en Omstreken*. Jaargang 6. Nr. 6. Juni. 1938. Bandoeng: A. C. Nix & Co.; “Oranjeplein” in *Mooi Bandoeng. Maanblad van Bandoeng en Omstreken*. Jaargang 1. Nr. 5. Nov. 1933. Bandoeng: A. C. Nix & Co.; “Oranjeplein” in *Mooi Bandoeng. Maanblad van Bandoeng en Omstreken*. Jaargang 1. Nr. 8. Feb. 1934. Bandoeng: A. C. Nix & Co.; Dokumentasi Penulis, November 2017; 5 April 2018.

malabar-gunung-puntang/# more-944Mooi *Bandoeng*, 6 Juni. 1938). Setelah Indonesia merdeka, monumen itu dibongkar karena dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai susila. Di atas lahan bekas *Tjitaroemlein*, pemerintah mendirikan Masjid Istiqomah yang kemudian menjadi salah satu masjid yang sangat aktif menjalankan syiar keagamaan di Kota Bandung. Pembongkaran taman tersebut mengakibatkan perubahan ruang terbuka hijau yang digantikan oleh bangunan keagamaan.

Tjibeunjing Plantsoen yang terletak di *Tjibeunjing Plantsoen Zuidstraat* (sekarang Jalan Cibeunying Utara dan Selatan). Taman yang dibangun oleh Pemerintah *Gemeente* Bandung berada pada kawasan hijau antara gedung *Gouvernements Bedrijven* (Gedung Sate) dan kawasan perumahan untuk penduduk golongan Belanda/Eropa yang banyak dibangun di sekitar *Riouwstraat* (sekarang Jalan Laksamana R. E. Martadinata). Pada 1980-an, Taman Cibeunying diubah menjadi pusat perdagangan tanaman hias di Kota Bandung dan pada September 1986, Pemerintah Kota Bandung secara resmi mengubah nama taman itu menjadi Taman PKK Cibeunying (<http://disparbud.jabarprov.go.id/wisata/destdet.php?id=1089&>

lang=idwisata). Sampai sekarang, *Tjibeunjing Plantsoen* menjadi ruang terbuka hijau koridor jalan yang cukup rindang karena di sisi kiri kanan Jalan Cibeunying ditumbuhi pula oleh aneka jenis pepohonan.

Oranje Nassauplein (sekarang menjadi Taman Pramuka) dibangun sekitar tahun 1920-an dengan bentuk setengah lingkaran. Taman yang berada di antara *Bengawanstraat* (sekarang Jalan Bengawan) dan *Riouwstraat* ini dibuat sederhana dengan pepohonan yang ditanam tidak begitu rapat. Di tengah-tengah terdapat sebuah bangunan yang mirip sebagai gazebo yang berdiri di tengah-tengah kolam. Di gazebo inilah, para pengunjung bersantai dengan melakukan minum-minum. Dalam perkembangannya, pada 1940-an, kolam tersebut ditimbun tanah, sedangkan gazebo itu menjadi kantin yang menjual kebutuhan sehari-hari. Pada 1970-an, bangunan tersebut tidak terawat sehingga tidak dapat difungsikan kembali. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan taman yang sebenarnya lebih cenderung sebagai hutan kota itu, pemerintah menjadikannya sebagai pusat kegiatan pramuka di Kota Bandung. Berkaitan dengan itu, nama *Oranje Nassauplein* pun lebih dikenal dengan nama

Taman Pramuka. Di seberang gerbang utamanya, terdapat monumen kelapa sebagai lambang gerakan pramuka (Kartodiwirio, 2006: 514).

SIMPULAN

Dari pemaparan yang telah dilakukan dapat dirumuskan beberapa simpulan sebagai berikut. Pertama, pada masa kolonial, ruang terbuka hijau lebih banyak dibangun di wilayah Bandung Utara karena di wilayah tersebut banyak dibangun pemukiman untuk masyarakat golongan Belanda dan Eropa lainnya. Secara kultural, mereka lebih banyak membutuhkan ruang terbuka hijau sebagai sarana untuk melepaskan rasa penat dari rutinitas. Di wilayah Bandung Selatan, pembangunan ruang terbuka hijau sangat jarang bahkan hampir dikatakan tidak pernah dilakukan karena masyarakat pribumi tidak memiliki budaya yang menjadikan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari aktivitas sosialnya. Kedua, pada saat Kota Bandung merayakan hari jadinya, pemerintah kota menjadikan kawasan hijau di lembah Cikapundung sebagai kawasan hutan kota dengan nama *Jubileumpark*. Kawasan ini memiliki kekayaan flora yang luar biasa sehingga selain difungsikan sebagai kawasan terbuka hijau, juga sebagai pusat penelitian botani. Saat ini, *Jubileumpark* menjadi kawasan yang dikenal dengan nama Babakan Siliwangi dengan fungsi yang relatif sama, tetapi area wilayahnya lebih sempit dibandingkan pada masa kolonial. Ketiga, Pemerintah *Gemeente* Bandung mewariskan banyak taman kota kepada Pemerintah Kota Bandung. Sebagian besar taman kota tersebut masih difungsikan sebagai ruang terbuka hijau setelah direvitalisasi oleh Pemerintah Kota Bandung. Sebagian kecil, taman kota warisan kolonial berubah fungsi karena dipandang tidak sesuai dengan budaya lokal, antara lain *Tjitaroemplein* yang dialihfungsikan menjadi bangunan ibadah (Masjid Istiqomah). Alih fungsi itu dilakukan karena di tengah-tengah taman terdapat monumen dua orang tanpa busana yang sedang “memeluk” bola dunia. Hal itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak etis karena memperlihatkan tubuh telanjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah mendanai penelitian ini melalui skema Penelitian Dasar pada tahun anggaran 2019. Ucapan terima kasih pun penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Padjadjaran, Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Padjadjaran, serta Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran yang telah memfasilitasi sehingga penulis dapat melakukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- “Bandoeng als Tuinstad”. *Mooi Bandoeng. Maanblad van Bandoeng en Omstreken*. Februari 1934. Bandoeng: A. C. Nix & Co.
- “Doorkijk Tiitaroemplantsoen” in *Mooi Bandoeng. Maanblad van Bandoeng en Omstreken*. Jaargang 6. Nr. 6. Juni. 1938. Bandoeng: A. C. Nix & Co.
- “Jubileumpark”. *Mooi Bandoeng. Maanblad van Bandoeng en Omstreken*. October 1934. Bandoeng: A. C. Nix & Co.
- “Oranjeplein” in *Mooi Bandoeng. Maanblad van Bandoeng en Omstreken*. Jaargang 1. Nr. 5. Nov. 1933. Bandoeng: A. C. Nix & Co.
- “Oranjeplein” in *Mooi Bandoeng. Maanblad van Bandoeng en Omstreken*. Jaargang 1. Nr. 8. Feb. 1934. Bandoeng: A. C. Nix & Co.
- “Pieter Sijthof Park”. *Mooi Bandoeng. Maanblad van Bandoeng en Omstreken*. Jaargang 1. Nr. 8. Feb. 1933. Bandoeng: A. C. Nix & Co.
- “Pieter Sijthof Park”. *Mooi Bandoeng. Maanblad van Bandoeng en Omstreken*. Jaargang 1. Nr. 5. Nov. 1933. Bandoeng: A. C. Nix & Co.
- Allied Geographical Section, “Bandoeng,” *Monash Collections Online*, accessed July 15, 2019, <http://repository.monash.edu/items/show/27141>.
- Amirulloh, M. (2017). Penggunaan Nama Kota Sebagai Nama Domain di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 19, (1), 8-17.
- Bandoeng: Town Plan, (1945)*. Collectie Kaarten van Coloniaal Nederlandsch-Indie. Inv. D E 29,7. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden.
- Bataviasch Handelsblad*, 30 Juli 1890; *Taman Kota Bandung Tempo Dulu*. Diakses dari <https://portal.bandung.go.id/taman-kota-bandung-tempo-dulu>. Tanggal 1 April 2018. Pukul 0234 WIB
- Besluit van Gouverneur Generaal van Nederlandsche-Indie van 11 October 1856, No. 84*.
- Besluit van Gouverneur Generaal van Nederlandsche-Indie van 7 Augustus 1864, No. 18*.
- Budiman, A., Sulistyantara, B., & Zain, A.F. (2014). Deteksi perubahan ruang terbuka hijau pada 5 kota besar di Pulau Jawa (Studi kasus: DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Jogjakarta, dan Kota Surabaya). *Jurnal Lanskap Indonesia*, 6, (1), 7-15.
- Budiman, H.G. (2015). Perkembangan Taman Kota Di Bandung Masa Hindia Belanda (1918-1942). *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 7, (2), 185-200.

- Dewiyanti, D. (2011). Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung: Suatu Tinjauan Awal Taman Kota Terhadap Konsep Kota Layak Anak. *Majalah Online Unikom*, 7, (1).
- Falah, Miftahul. (2018). *Pertumbuhan Morfologi Kota-Kota Pusat Pemerintahan di Priangan Abad XX-Abad XXI*. Disertasi. Jatinangor: Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran
- Garraghan, J. Gilbert. (1957). *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University.
- Gottschalk, Louis. (1969). *Understanding History; A Primer of Historical Method*. 2nd Edition. New York: Alfred A, Knoff.
- Hakim, R. (2003). *Arsitektur Lanskap: Manusia, Alam dan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Herlina, Nina. (2008). *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Het Ijzermanpark te Bandoeng, (1925)*. Collectie Koninklijk Insituut Taal-, Land-, en Volkenkunde (KITLV). Inv. Nr. 34882. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden.
- Het Ijzermanpark te Bandoeng, (1930)*. Collectie Koninklijk Insituut Taal-, Land-, en Volkenkunde (KITLV). Inv. Nr. 143590. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden.
- Het Paleis van de Legercommandant aan het Insulinde Park te Bandoeng, (1920)*. Collectie Koninklijk Insituut Taal-, Land-, en Volkenkunde (KITLV). Inv. Nr. 1400613. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden.
- Indira, D., Ismanto, S.U., & Santoso, M.B. (2013). Pencitraan Bandung Sebagai Daerah Tujuan Wisata: Model Menemukanali Ikon Bandung Masa Kini. *Sosiohumaniora*, 15, (1), 45-54.
- Indonesia. (2009). Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M 2009.
- Ingin Mengajak Jalan-Jalan HewanPeliharaan Anda? BawaSajake Pet Park*. Diaksesdari<http://www.wisatabdg.com/-2014/10/ingin-mengajak-jalan-jalan-hewan.html>. Tanggal 24 Sep-tember 2015. Pukul 00.59 WIB
- Inilah Taman-Taman Tematik di Kota Bandung*. Diakses dari <http://www.wisatabdg.com/2014/09/inilah-taman-tematik-di-kota-bandung.html>. Tanggal 23 September 2015. Pukul 00.11 WIB
- Kartodiwirio, S. K. (2006). *Bandung: kilas peristiwa di mata filatelis: sebuah wisata sejarah*. Kiblat Buku Utama.
- Kunto, Haryoto. (1984). *Wajah Bandoeng Tempo Doloe*. Bandung: Granesia.
- Kuntowijoyo, (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Kurniati, P. S. (2016). “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Di Kota Bandung” dalam *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*,VI, (2).
- Mooi Bandoeng*,Feb. 1933; February 1934; October 1934; 6 Juni. 1938.
- Pramiadi, Alde. 2010. *Sejarah Taman Kota di Bandung*. Diakses dari <http://aldes91.blogspot.com/2010/01/sejarah-taman-kota-di-bandung.html>. Tanggal 8 Mei 2019. Pukul 19.27 WIB.
- Puspitojati, T. & Samsuedin, I. (2015). Kajian Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12, (1), 55-66.
- Rahmy, W. A., Faisal, B., & Soeriaatmadja, A. R. (2012). Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Kawasan Padat, Studi Kasus di Wilayah Tegallega, Bandung. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 1, (1), 27-38.
- Reitsma, S. A. (1926). *Bandoeng; The Moun-tain City of Netherlands India*. Batavia: G. Kolff.; Bandoengsche Administratie Mij. *De Jaarbeurs en Bandoeng 1921*. Bandoeng: Visser & Co.
- Sofianto, K. (2014). Garut Pada Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang (1942-1945). *Sosiohumaniora*, 16, (1), 70-86.
- Staatsblad van Nederlandsche-Indie* 1864 Nomor 114.
- Stanley, B. W., Stark, B. L., Johnston, K. L., & Smith, M. E. (2012). Urban open spaces in historical perspective: A transdisciplinary typology and analysis. *Urban Geography*, 33, (8), 1089-1117.
- Stasiun Radio Malabar – GunungPuntang*. Diakses dari <https://mooibandoeng.com/2013/06/27/stasiun-radio-malabar-gu-nung-puntang/#more-944>. Tanggal 1 April 2018. Pukul 12.47 WIB
- Suganda, H. (2007). *Jendela Bandung: Pengalaman Bersama Kompas*. Penerbit Buku Kompas.
- Taman Cibeuving*. Diakses dari <http://disparbud.jabarprov.go.id/wisata/destdet.php?id=1089&lang=idwisata>. Tang-gal 30 Maret 2018. Pukul 11.31 WIB
- Taman Kota Bandung Tempo Dulu*. Diaksesdari <https://portal.bandung.go.id/taman-kota-bandung-tempo-dulu>. Tanggal 1 April 2018. Pukul 0234 WIB.

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SUMEDANG

Layyinaturrobaniyah, Mokhamad Anwar, Sulaeman R.Nidar, dan Ida Yuliani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

E-mail: layyinaturrobaniyah@unpad.ac.id

ABSTRAK. Lembaga keuangan mikro disebut sebagai suatu lembaga yang dapat memberikan kemudahan bagi para pengusaha kecil dan mikro dalam pemberian kredit mikro untuk melakukan pengembangan usaha serta untuk mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lembaga keuangan mikro dan pemberdayaan perempuan terhadap tingkat kemiskinan pada Orang terkena Dampak di daerah sekitar pembangunan Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, dengan populasi sebesar 10.924 orang. Dengan metode *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* dipilih 100 orang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede yang tersebar di lima kecamatan di Sumedang yakni Cisitu, Darmaraja, Wado, Jatigede dan Jatinunggal. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuisioner langsung kepada masyarakat OTD. Untuk mengetahui pengaruh dari lembaga keuangan mikro dan pemberdayaan perempuan terhadap tingkat kemiskinan, penelitian ini menggunakan analisis PLS SEM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro dan pemberdayaan perempuan secara simultan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Secara parsial, lembaga keuangan mikro dan pemberdayaan perempuan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang, khususnya di 5 Kecamatan yaitu Cisitu, Darmaraja, Wado, Jatigede dan Jatinunggal. Dengan melakukan pemberdayaan perempuan melalui pemberian akses yang lebih pada perempuan dengan pemanfaatan kredit mikro akan membantu menambah penghasilan keluarga, khususnya bagi masyarakat OTD.

Kata kunci: Lembaga keuangan mikro; kredit mikro; pemberdayaan perempuan; pengentasan kemiskinan

MICROFINANCE INSTITUTION AND WOMAN EMPOWERMENT AS POVERTY ALLEVIATION EFFORT IN SUMEDANG REGENCY

ABSTRACT. *Microfinance institutions referred to as an institution that can provide facilities for small and micro entrepreneurs in the provision of micro credit to develop businesses and to alleviate poverty. This study aims to determine the effect of microfinance institutions and women's empowerment on poverty levels in Affected People (OTD) in the area around the construction of the Jatigede Dam, Sumedang, West Java, with a population of 10,924 OTD. With a non-probability sampling method with a purposive sampling technique, 100 people were affected by the construction of the Jatigede reservoir spread across five sub-districts in Sumedang, namely Cisitu, Darmaraja, Wado, Jatigede and Jatinunggal. Data collection is done through filling out questionnaires directly with the OTD community. To find out the influence of microfinance institutions and women's empowerment on poverty levels, this study uses PLS SEM analysts. The results of this study indicate that microfinance institutions and women's empowerment simultaneously influence poverty levels. Partially, microfinance institutions and women's empowerment have a positive and significant impact on reducing poverty in Sumedang Regency.*

Key words: Microfinance institutions; micro credit; woman empowerment; poverty alleviation

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama yang sedang dihadapi Indonesia pada saat ini. Kemiskinan merupakan implikasi dari beberapa faktor yang bersifat multi dimensial baik sosial-ekonomi, budaya maupun politik (Nugroho, 2001). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 10,70%, dimana angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 11,25%.

Salah satu daerah yang masih menghadapi masalah kemiskinan di Indonesia adalah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, tingkat kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Sumedang pada tahun 2014 sebesar 10,78%, kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 11,36%, lalu mengalami penurunan

pada tahun 2016 menjadi sebesar 10,57%. Peningkatan tingkat kemiskinan yang terjadi pada tahun 2015 dapat saja terjadi dari beberapa faktor, salah satunya adalah akibat terendahnya pedesaan di sekitar kawasan waduk. Waduk Jatigede ini telah menenggelamkan pemukiman warga sebanyak 28 Desa di 5 kecamatan di Kabupaten Sumedang, termasuk hutan seluas 1.382 hektar dan cagar budaya. Akibatnya sebanyak 10.924 orang terkena dampak dari pembangunan waduk tersebut kehilangan tempat tinggal dan lahan pertanian, sehingga masyarakat kehilangan mata pencahariannya.

Berdasarkan data yang yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, tingkat kemiskinan di beberapa kecamatan yang terkena dampak, seperti Kecamatan Darmaraja, pada tahun 2014 sebesar 14,24%, dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 15,66%, selain itu terdapat empat desa yang dihapuskan karena terendam waduk. Kemudian di Kecamatan Cisitu pada tahun 2014

tingkat kemiskinannya sebesar 13,59% dan pada tahun 2015 sedikit mengalami penurunan menjadi 13,48%, dan hanya satu desa saja yang dihapuskan.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut adalah dengan melakukan pemberdayaan pada usaha ibu-ibu rumah tangga karena kaum perempuan pada umumnya selalu berupaya melepaskan diri dari belenggu kesulitan ekonomi dan mengusahakan kehidupan ekonomis yang lebih baik dalam bentuk atau kiat-kiat tertentu dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Pada salah satu desa yaitu Desa Pakualam terdapat beberapa masyarakat yang membuka usaha nasi liwet dan usaha dagang lainnya, dimana kebanyakan yang mengelola usaha tersebut adalah ibu-ibu rumah tangga yaitu sebanyak 50 orang Ibu Rumah Tangga (IRT). Selain membuka usaha, ibu-ibu juga ada yang menjadi buruh tani dengan data sebanyak 100 orang (Statistik Data Kecamatan Jatigede, 2018).

Oleh karena itu, perlu dilakukannya pemberdayaan perempuan dengan cara mendukung kelompok-kelompok usaha para perempuan terkena dampak tersebut, yaitu dengan membantu usaha ibu-ibu rumah tangga, kelompok wanita tani (KWT), dan kelompok-kelompok usaha lainnya untuk meningkatkan usahanya.

Menurut Basuki dan Prasetyo (2007) perempuan miskin memiliki peran dalam kehidupan keluarganya. Pertama, sebagai pengelola keuangan keluarga. Kedua, sebagai penanggung jawab seluruh pekerjaan domestik. Ketiga, sebagai pencari nafkah keluarga. Keempat, sebagai salah satu simpul jaringan sosial yang penting dalam hal transfer sosial, khususnya pada masa-masa kritis dan krisis.

Namun dalam perkembangannya, usaha kecil memiliki beberapa kendala terutama keterbatasan modal, kesulitan pemasaran, keterbatasan sumber daya manusia, masalah bahan baku maupun keterbatasan teknologi (Tulus, 2002). Dari beberapa faktor yang disebutkan, yang menjadi faktor kendala yang utama adalah keterbatasan modal yang dimiliki. Hal ini tentunya dapat menghambat perkembangan dari usaha, salah satu solusinya adalah dengan mendapatkan pembiayaan untuk mengembangkan usaha tersebut. Salah satu alternatif dalam upaya pendanaan usaha masyarakat adalah dengan pemberian kredit mikro dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM berfungsi sebagai lembaga keuangan untuk kredit mikro yang merupakan jasa finansial pada skala kecil yang diperuntukan bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan akses ke jasa perbankan tradisional, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan kredit mikro. Program keuangan mikro sendiri telah terbukti dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan di Bangladesh, program yang dipelopori oleh Muhammad Yunus melalui *Grameen Bank* dengan memprioritaskan perempuan sebagai nasabahnya.

Dalam perkembangannya, LKM terbukti dapat mengurangi tingkat kemiskinan melalui meningkatkan pendapatan rumah tangga, meningkatkan peran wanita dalam pembangunan ekonomi (Samer, Majid, Muhamad, Halim, & Rashid, 2015). Akses ke lembaga keuangan mikro berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, terutama pada partisipasi perempuan dan penurunan kemiskinan secara keseluruhan pada level desa Khandker (2005). Kemudian penelitian yang dilakukan Nihayah (2015) yang menunjukkan bahwa adanya perubahan yang signifikan terhadap pendapatan sebelum pinjaman dengan pendapatan sesudah pinjaman pada simpan pinjam kelompok perempuan.

Masyarakat perempuan diharapkan mampu meningkatkan akses, kontrol, partisipasi dan kesejahteraan di dalam keluarga maupun kehidupan bermasyarakat (Marwati, 2012). Melalui akses, kontrol dan partisipasi serta kesejahteraan masyarakat perempuan diharapkan dapat membantu meningkatkan penghasilan keluarga. Hal ini tentunya membuka kesempatan bagi masyarakat perempuan dalam berpartisipasi membangun ekonomi pedesaan menjadi lebih baik. Semakin berkembangnya usaha masyarakat, semakin banyak pula pendapatan yang dihasilkan, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup standar meliputi pangan, kesehatan, rumah, pendidikan dan kebutuhan transportasi.

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pengaruh layanan yang diberikan Lembaga Keuangan Mikro dan Program Pemberdayaan Perempuan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan pada masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Jenis penelitian yang diterapkan adalah dengan pendekatan kuantitatif melalui metode survei, dimana dilakukan penyebaran kuesioner kepada Orang Terkena Dampak (OTD) yang menjadi sampel penelitian. Proses penyebaran kuesioner dilakukan pada tahun 2018.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Orang Terkena Dampak Waduk Jatigede yang berjumlah 10.924. Oleh karena keterbatasan waktu dan biaya, maka tidak semua populasi menjadi responden, sehingga dilakukan proses pengambilan sampel. Umar (2008:59) mengemukakan bahwa untuk menghitung besarnya ukuran sampel dapat dilakukan dengan menggunakan Teknik Slovin dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{10.924}{1 + 10.924 \times 0,1^2}$$

$$n = 99,09 \approx 100$$

Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 OTD.

Proses pengambilan sampelnya dilakukan dengan metode *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016:122) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang ditentukan peneliti adalah Orang Terkena Dampak Waduk Jatigede yang tersebar di lima kecamatan yaitu: Jatigede, Jatinunggal, Wado, Damaraja dan Cisitu, memiliki usaha dalam skala mikro, kecil, dan menengah, pernah atau sedang menggunakan kredit yang diperoleh dari Lembaga keuangan mikro baik formal maupun informal.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan mikro dan pemberdayaan perempuan, sedangkan variabel dependennya adalah tingkat kemiskinan. Variabel lembaga keuangan mikro akan menggunakan dimensi kemudahan akses, kemudahan layanan, kualitas jasa kredit, dan kehandalan pegawai. Sementara itu variabel pemberdayaan perempuan menggunakan dimensi akses, kontrol, partisipasi, dan kesejahteraan.

Penelitian ini menggunakan analisis PLS SEM dengan SmartPLS versi 3.0 untuk windows. Analisa PLS SEM terdiri dari tiga tahap yakni analisa *outer model*, analisa *inner model* dan pengujian hipotesis (Gozali, 2013).

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, kredit mikro yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Mikro berpengaruh positif terhadap pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat OTD pembangan Jatigede Sumedang dan Pemberdayaan perempuan berpengaruh positif terhadap pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat OTD pembangan Jatigede Sumedang. Pernyataan tersebut merupakan dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

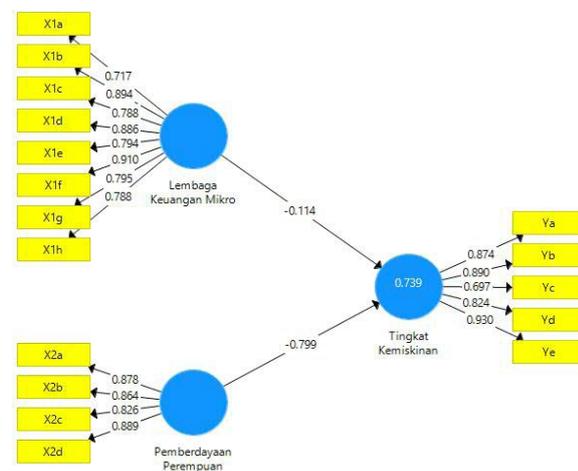
Berdasarkan dari hasil analisis deskriptif, lembaga keuangan mikro yang digunakan oleh masyarakat OTD telah memberikan pelayanan sudah sangat baik dilihat dari sisi waktu pencairan dana, persyaratan, cicilan pinjaman, jumlah pinjaman, suku bunga, cara pembayaran, kemampuan petugas dan respon petugas. lama pinjaman hingga jangka waktu pembayaran. Masyarakat OTD sebagian besar mengakses LKM yang berbentuk formal yaitu KUR dan PNPB Mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa LKM-LKM tersebut telah menjalankan fungsinya dengan baik khususnya pada layanan kredit mikro.

Begitupun dengan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan memprioritaskan masyarakat perempuan sebagai nasabahnya adalah baik dengan melihat sisi akses, kontrol, partisipasi dan kesejahteraan. Dengan begitu masyarakat perempuan dapat membantu kebutuhan rumah tangga. Tingkat kemiskinan yang dirasakan para masyarakat OTD

masih tergolong tinggi, hal ini disebabkan masih banyak OTD yang terkendala dalam mencukupi pangan, akses terhadap kesehatan, pendidikan rumah dan kebutuhan transportasi.

Berdasarkan analisis verifikatif dengan model SEM dapat dilihat mengenai pengaruh lembaga keuangan mikro dan pemberdayaan perempuan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel lembaga keuangan mikro dan pemberdayaan perempuan secara simultan mempengaruhi variabel tingkat kemiskinan sebanyak 73,9%. Hal ini berarti 73,9% pengentasan kemiskinan dipengaruhi oleh adanya lembaga keuangan mikro dengan memberikan pelayanan kredit mikro pada nasabah dengan memprioritaskan perempuan sebagai nasabahnya, sisanya 26,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berikut model struktural yang digunakan dan diolah dengan Smart PLS Versi 3.0 untuk windows:



Sumber: data diolah, 2018

Gambar 1. Model Struktural Smart PLS

Tabel 1 Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	t-Statistic	P-Values
LKM → KMS	-0.114	-0.116	0.050	2.285	0.023
PP → KMS	-0.799	-0.802	0.043	18.806	0.000

Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan hasil analisis dengan Smart PLS, Lembaga Keuangan Mikro memiliki arah koefisien yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (*p-value* < 5%). Hal ini berarti semakin baik dan fleksibel pelayanan kredit mikro yang diberikan kepada masyarakat OTD, maka semakin banyak pula masyarakat yang tertarik untuk menggunakan kredit mikro, yang mana akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan bagi masyarakat OTD di Sekitar Waduk Jatigede, khususnya di 5 Kecamatan di Kabupaten Sumedang yakni Cisitu, Damaraja, Wado, Jatigede dan Jatinunggal.

Sementara itu, variabel Pemberdayaan perempuan juga memiliki arah koefisien yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan ($p\text{-value} < 5\%$). Artinya, dengan semakin banyaknya pemberian kesempatan pada masyarakat perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan berwirausaha dan memprioritaskan perempuan sebagai nasabahnya, maka dari usaha yang dijalankan tersebut dapat membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat OTD.

Lebih lanjut, secara simultan variabel Lembaga Keuangan Mikro dan pemberdayaan perempuan mempengaruhi variabel tingkat kemiskinan OTD di daerah sekitar pembangunan waduk Jatigede sebesar 73,9%, sedangkan 26,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang belum dimasukkan dalam model penelitian.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan di Kecamatan Bayat oleh Maika dan Kiswanto (2007) mengenai pemberdayaan perempuan miskin pada usaha kecil di Pedesaan melalui layanan Lembaga Keuangan Mikro dan penelitian yang dilakukan oleh Nihayah (2015) bahwa program simpan pinjam kelompok perempuan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan usaha mikro kecil dan menurunkan tingkat kemiskinan, yang mana dikarenakan adanya perubahan pendapatan sebelum mereka menerima pinjaman dengan pendapatan sesudah mendapatkan pinjaman.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi masyarakat miskin khususnya OTD sangat dibutuhkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan untuk mendirikan usaha baru ataupun mengembangkan usaha yang telah berjalan. Dengan adanya usaha yang dijalankan oleh masyarakat, maka masyarakat dapat memperoleh penghasilan dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan masyarakat khususnya bagi para Orang Terkena Dampak (OTD) di daerah sekitar pembangunan Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat.

SIMPULAN

Layanan kredit mikro yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Mikro telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat OTD, di Sekitar Waduk Jatigede yaitu dengan memberikan akses pencairan pinjaman yang relatif singkat, memberikan persyaratan yang mudah, memberikan cicilan yang rendah yang mampu dijangkau oleh masyarakat, memberikan jumlah pinjaman

yang sesuai kebutuhan masyarakat, membebaskan suku bunga yang lebih rendah, sehingga masih terjangkau oleh masyarakat, memberikan cara pembayaran yang relatif mudah serta melayani masyarakat dengan baik dan ramah. Adanya kredit mikro yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Mikro dan Program Pemberdayaan Perempuan dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang, khususnya di 5 Kecamatan yaitu Cisitu, Darmaraja, Wado, Jatigede dan Jatinunggal. Dengan melakukan pemberdayaan perempuan melalui pemberian akses yang lebih pada perempuan dengan pemanfaatan kredit mikro akan membantu menambah penghasilan keluarga, khususnya bagi masyarakat OTD, sehingga tingkat kemiskinan dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, A. & Prasetyo, Y. E. (2007). Memusiumkan Kemiskinan. *PATTIRO* Surakarta. Surakarta.
- Gozali, I. (2006). *Structural Equation Modelling: Metode Alternatif dengan Partial Least Square* (edisi 2). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Khandker, S. R. (2005) Microfinance and Poverty: Evidence Using Panel Data from Bangladesh, *The World Bank Economic Review*, 19, (2), 263-286.
- Kiswanto, E. & Maika, A. (2007). Pemberdayaan Perempuan Miskin Pada Usaha Kecil Di Pedesaan Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro. *Populasi*, 18, (1), 0853 – 0262.
- Nihayah, A.Z. (2015). Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan *Poverty Reduction* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bangilan, Tuban). *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5, (2).
- Nugroho, H. (2001). *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial* (cetakan pertama), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samer, Majid, Muhamad, Halim, & Rashid. (2015). The Impact of Microfinance on Poverty Reduction: Empirical Evidence from Malaysian Perspective. *Procedia: Sosial and Behaviour Science*, 195, 721-728.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

KINERJA USAHA WIRUSAHA PEREMPUAN “GUREM” PENERIMA KREDIT DI DESA CIHIDEUNG ILIR, KECAMATAN CIAMPEA, KABUPATEN BOGOR

Laras Sirly Safitri¹, Suharno², dan Siti Jahroh²

¹Jurusan Agroindustri, Politeknik Negeri Subang

²Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

E-mail: larassirlysafitri@gmail.com

ABSTRAK. Wirausaha perempuan merupakan salah satu faktor kunci pertumbuhan ekonomi, khususnya di pedesaan. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, usaha kecil bahkan skala “gurem” yang dijalankan perempuan seringkali menghadapi hambatan akses terhadap modal. Tujuan dari penelitian ini, untuk menganalisis dampak pemberian kredit melalui pengukuran kinerja usaha perempuan, sebelum dan setelah menerima kredit. Penelitian ini merupakan sebuah aksi yang berbasis pada riset eksperimen. Responden terdiri dari tiga puluh orang yang dipilih secara sengaja (*purposive*) untuk diberikan perlakuan berupa kredit modal usaha. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja usaha perempuan penerima kredit belum meningkat setelah menerima kredit. Hal tersebut ditunjukkan oleh tingkat pengembalian kredit yang hanya mencapai 83 persen. Di samping itu, Uji Pangkat Tanda Wilcoxon menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan omset rata-rata per hari dan marjin keuntungan rata-rata per hari wirausaha perempuan, baik sebelum maupun setelah menerima kredit. Perlu penelitian lanjutan yang dapat mendesain ulang penyaluran kredit yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wirausaha perempuan, serta dilengkapi dengan pendampingan manajemen usaha.

Kata kunci: kinerja usaha; kredit; wirausaha perempuan

THE PERFORMANCE OF SMALLEST WOMEN ENTREPRENEURS WHO RECEIVED CREDIT IN CIHIDEUNG ILIR VILLAGE, CIAMPEA SUB-DISTRICT, BOGOR DISTRICT

ABSTRACT. Women entrepreneurs are one of the key factors for economy growth, especially in rural areas. In its growth and development, small businesses, even smallest scale, that running by women often face the obstacles especially about of access to capital. The purpose of this study is to analyze the impact of credit through measurement of women's business performance, before and after get the credit. This study was conducted based on experimental research. Respondents in this research consisted from the thirty of women entrepreneurs selected purposively. These respondents then were given the treatment in form of capital credit for their business. The analysis showed that the business performance of women entrepreneurs had not improved after accept the credit. This is shown by credit rate of return that only reached 83 percent. In addition, the Wilcoxon sign rank test showed that there was no difference in the average of sales per day and the average of profit margin per day, either before or after accept the credit. Therefore, the further research is needed to redesign the credit distribution in accordance with the situation and needs of women entrepreneurs, and equipped with business management assistance.

Key words: business performance; woman entrepreneur; credit

PENDAHULUAN

Wirausaha di Indonesia, jumlahnya kurang dari dua persen dari total penduduk, dimana pelaku usaha perempuannya kurang dari 0,1 persen. Meskipun jumlahnya sangat kecil, namun usaha kecil perempuan justru lebih tangguh dan terbukti sebagian besar dari mereka bertahan saat dihantam krisis tahun 1998 maupun tahun 2009 lalu. Disamping itu, pada tahun 2011, kontribusi pendapatan perempuan meningkat 0.66 persen dari tahun sebelumnya. Beberapa literatur pun memaparkan bahwa perempuan memiliki peran yang besar dalam pembangunan perekonomian pedesaan melalui usaha-usaha rumah tangga. Penelitian Grenee *et al.* (2002) dan Ushakiran *et al.* (2012) melaporkan bahwa wirausaha perempuan menjadi kekuatan pendorong perekonomian di Amerika Serikat. Begitu pula di Indonesia, penelitian Yuzaria & Fitriani (2010) menyebutkan bahwa usaha ayam goreng gerobak yang dilakoni oleh perempuan di Pasar Satelit Padang terbukti mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat. Usaha ini

berpotensi dalam menambah pendapatan keluarga. Selain itu, dilaporkan pula bahwa di kota Ambon, sebagian besar UMKM dijalankan dan dikelola oleh perempuan (Hanoeboen & Sasongko, 2012). Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa wirausaha perempuan merupakan salah satu sektor kunci dari pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, usaha kecil dan atau rumah tangga yang banyak dijalankan oleh perempuan, umumnya masih tergolong tradisional atau usaha keluarga yang biasanya tidak bersifat padat modal. Usaha kecil ini umumnya masih menghadapi berbagai kompleksitas masalah baik internal maupun eksternal. Penemuan penting dari penelitian Tambunan (2012) bahwa hambatan utama yang dihadapi wirausaha perempuan untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka adalah keterbatasan modal. Mereka sangat sulit mendapatkan pinjaman dari bank-bank atau lembaga keuangan formal karena tidak adanya kolateral dan suku bunga pinjaman yang mereka anggap terlalu tinggi.

Meskipun telah banyak program permodalan yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga

keuangan mikro, wirausaha perempuan masih sulit berkembang. Hal tersebut diduga karena banyak program pemerintah yang tidak dapat menyentuh wirausaha perempuan “gurem”. Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, Kecil, dan menengah, kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 000 000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 000 000. Sementara di lapangan, menurut Menteri KPP-PA masih banyak dijumpai perempuan yang berusaha meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui usaha yang sangat kecil skalanya dengan kapasitas produksi masih sangat kecil serta sasaran konsumennya hanya sekitar rumah mereka, sehingga usaha-usaha tersebut belum dapat dikategorikan sebagai usaha mikro. Wirausaha perempuan dengan kriteria tersebut, dapat dikatakan sebagai wirausaha perempuan “gurem”, dimana kriterianya masih berada di bawah kriteria wirausaha perempuan mikro.

Menurut Sumarti dkk. (2011) wirausaha perempuan industri rumahan di desa lingkaran kampus mengembangkan usaha-usaha kecil dengan nilai peralatan hanya berkisar antara Rp 100.000 sampai Rp 500.000. Di samping itu, seringkali mereka mengalami fenomena “gulung tikar” dan sulit berkembang meski telah dijalankan bertahun-tahun. Untuk merespon hal tersebut, IPB sebagai perguruan tinggi yang berkarakter kewirausahaan yang wajib melaksanakan tridarma perguruan tinggi, melalui Departemen Agribisnis turut bertanggung jawab dalam pengembangan pola-pola usaha peningkatan pendapatan masyarakat di desa lingkaran kampus, melalui pemberdayaan wirausaha perempuan. Oleh karena itu melalui penelitian ini, Departemen Agribisnis bekerja sama dengan *Netherlands Initiative for Capacity Development* (NICHE) memberikan stimulan berupa kredit modal usaha kepada wirausaha perempuan di lingkaran kampus IPB. Inisiatif ini diberi nama “Mitra AGB”.

Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh pemberian kredit “Mitra AGB” tersebut, dalam beberapa studi, dijelaskan bahwa akses terhadap modal berhubungan dengan kinerja wirausaha perempuan. Menurut Ocholah *et al.* (2013), pembiayaan mikro dalam jumlah yang cukup akan memberikan efek yang besar terhadap *profitabilitas*, produktivitas dan pertumbuhan usaha yang dimiliki perempuan. Sehubungan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyaluran kredit kepada wirausaha perempuan dengan mengukur kinerja usaha mereka dari tingkat pengembalian kredit serta perbedaan penjualan (omset) dan marjin keuntungan (*profit margin*), sebelum dan setelah menerima kredit.

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah aksi yang berbasis pada riset eksperimen (*action based experiment research*). Metode penelitian eksperimen dimaksudkan untuk

mengetahui ada tidaknya akibat dari “sesuatu” yang dikenakan pada subjek penelitian. Penelitian eksperimen pada umumnya memiliki tujuh bagian, yaitu (1) *treatment* atau variabel independen, (2) variabel dependen, (3) *pretest*, (4) *posttest*, (5) kelompok eksperimen, (6) kelompok kontrol, dan (7) *random assignment*. Namun demikian riset eksperimen memiliki beberapa desain, dimana ketujuh bagian di atas tidak selalu terpenuhi. Penelitian ini tergolong riset eksperimen dengan *One-Group Pretest-Posttest Designs*, dimana hanya terdapat satu kelompok eksperimen, *pretest*, *treatment*, dan *posttest*. Neuman (2000) menjelaskan bahwa kelemahan dari desain tersebut ialah tidak adanya kelompok kontrol dan *random assignment*, sehingga peneliti tidak dapat mengetahui faktor lain selain *treatment*, yang terjadi di antara *pretest* dan *posttest* yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Perlakuan (*treatment*) dalam penelitian eksperimen ini berupa penyaluran kredit modal usaha. Adapun desain kredit ini sedikit banyak mengadopsi model *Grameen Bank*. Marpaung, Sarma, dan Limbong (2013) beranggapan bahwa model ini sesuai karena dalam penerapannya di Bangladesh dan banyak negara lainnya, dapat memberikan pelajaran akan pentingnya institusi keuangan mikro bagi kaum miskin, khususnya perempuan. *Grameen Bank* merancang kredit mikro berbasis kepercayaan, bukan kontrak legal. Cara ini dirancang guna mendorong rasa tanggung jawab dan solidaritas terhadap sesama peminjam dalam suatu komunitas.

Pengumpulan data primer terkait kinerja usaha sebelum menerima kredit diperoleh dari formulir penerima kredit yang telah diisi wirausaha perempuan, sementara data terkait kinerja usaha setelah menerima kredit diperoleh melalui pembukuan usaha atau laporan keuangan sederhana yang dibuat oleh wirausaha perempuan. Selain itu, dilakukan pula wawancara mendalam dengan responden dan informan, serta *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menggali dan menemukan fenomena-fenomena yang terjadi pada wirausaha perempuan “gurem” di lokasi penelitian. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan sumber-sumber lain yang relevan.

Sampel sebanyak tiga puluh orang yang diambil menggunakan teknik *purposive sampling* atau *judgemental sampling*, dengan berbagai pertimbangan kriteria yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Kriteria tersebut diantaranya adalah wirausaha perempuan skala “gurem” dengan penjualan rata-rata per hari paling banyak Rp 800.000 dan mampu melakukan pengembalian kredit secara harian (perputaran usaha harian). Adapun lokasi penelitian adalah di salah satu desa lingkaran kampus IPB, yaitu Desa Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor yang dipilih pula secara *purposive*. Periode pengamatan kinerja usaha wirausaha perempuan dilakukan selama tiga puluh hari kerja, terhitung mulai

minggu ketiga bulan Februari hingga minggu pertama bulan April 2014.

Metode Analisis Data

Pengukuran dampak kredit terhadap kinerja wirausaha perempuan dilihat dari tiga indikator, yaitu tingkat pengembalian kredit, omset rata-rata per hari dan marjin keuntungan (*profit margin*) rata-rata per hari. Tingkat pengembalian kredit dijelaskan secara deskriptif. Sementara, teknik analisis yang digunakan untuk menguji perbedaan penjualan (omset) dan marjin keuntungan (*profit margin*) pada wirausaha perempuan sebelum dan sesudah perlakuan adalah uji pangkat tanda Wilcoxon dengan bantuan program SPSS 20.0 *for windows*. Teknik tersebut digunakan sebagai uji beda, karena data yang diteliti pada sejumlah responden yang sama dilakukan pada periode pengamatan yang berbeda. Diantara periode waktu pengamatan tersebut responden diberi perlakuan berupa kredit modal usaha Adapun dasar penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada beda penjualan (omset) dan marjin keuntungan (*profit margin*) sebelum dan sesudah pemberian kredit

H_1 : Ada beda penjualan (omset) dan marjin keuntungan (*profit margin*) sebelum dan sesudah pemberian kredit

Jika probabilitas > 0.05 , maka H_0 tidak ditolak. Sementara, jika probabilitas ≤ 0.05 , maka H_0 ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menjelaskan dampak penyaluran kredit mikro kepada wirausaha perempuan di Desa Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, perlu dijelaskan terlebih dahulu desain kredit “Mitra AGB”.

Latar Belakang Kredit “Mitra AGB”

Kredit “Mitra AGB” merupakan sebuah inisiasi program yang diperuntukkan bagi para wirausaha perempuan di lingkaran kampus IPB berupa pemberian dana pinjaman sebagai kredit modal usaha yang disertai dengan pelatihan dan pendampingan manajemen usaha. Adapun dana pinjaman tersebut berasal dari *Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher Education* (NICHE) yang bekerjasama dengan Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Program ini diinisiasi oleh salah seorang dosen pengajar di Departemen Agribisnis, bekerjasama dengan mahasiswa program sarjana dan mahasiswa program pascasarjana di departemen yang sama. Pada dasarnya, program ini dibentuk dalam rangka penelitian akademik, namun dalam penelitian ini terdapat pula misi pengabdian kepada masyarakat di lingkaran kampus IPB. Inisiasi kredit “Mitra AGB” ini diharapkan dapat menjadi kerangka awal sebagai

masukan untuk membangun model kredit yang tepat bagi wirausaha perempuan

Sasaran Kredit “Mitra AGB”

Adapun sasaran dari kredit “Mitra AGB” adalah wirausaha perempuan “gurem” di desa lingkaran kampus IPB. Selama ini istilah “gurem” seringkali dikaitkan dengan penguasaan lahan. Sayogyo (1978) membuat kriteria masyarakat miskin, dimana salah satunya adalah penduduk yang memiliki lahan sempit atau “gurem”, yaitu kurang dari 0.5 hektar. Selain itu, istilah “gurem” juga sering dipasangkan dengan kata petani. Petani gurem menurut definisi BPS adalah rumahtangga pertanian yang menguasai lahan (milik sendiri atau menyewa) kurang dari 0.5 hektar dengan pendapatan per bulan rata-rata di bawah Rp 500 000.

Istilah wirausaha perempuan “gurem” dalam penelitian ini diperkenalkan untuk menunjukkan wirausaha perempuan dengan skala di bawah mikro. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, definisi UMKM adalah: (1) usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, (2) usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, dan (3) usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar. Selanjutnya kriteria usaha mikro yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tersebut adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 000 000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak Rp 300 000 000.

Ketentuan-ketentuan Penyaluran Kredit “Mitra AGB”

Sebagaimana program pinjaman dana pada umumnya, program Kredit “Mitra AGB” memiliki sejumlah ketentuan dalam penyalurannya. Ketentuan-ketentuan tersebut disusun dengan mengadopsi model *Grameen Bank*, namun terdapat beberapa modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya:

1. Kredit “Mitra AGB” diberikan tanpa agunan/jaminan hanya kepada tiga puluh wirausaha perempuan dengan

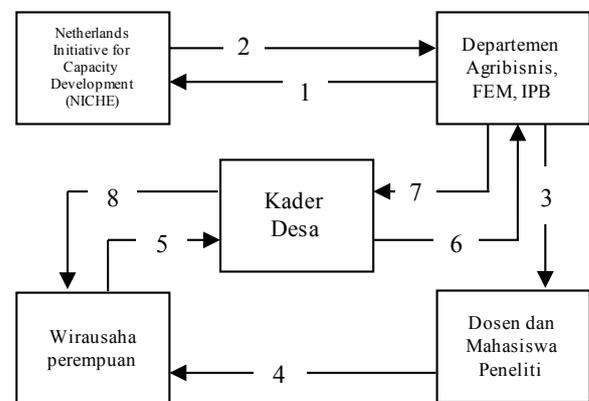
nominal Rp 500 000 per orang. Nominal ini dianggap sesuai dengan skala usaha para wirausaha perempuan yang memang masih relatif sangat kecil bahkan bisa dikatakan “gurem”. Akan tetapi, dana yang diterima oleh peminjam hanya sebesar Rp 475 000, dimana Rp 25 000 dijadikan sebagai simpanan wajib bagi para peminjam.

2. Kredit “Mitra AGB” menerapkan bunga (*interest*) sebesar 5 persen. Bunga ini dimaksudkan untuk melatih *capital building* pada para peminjam. Awalnya bunga yang akan diterapkan sebesar 10 persen, dimana angka tersebut diambil dari 1/3 bunga yang diterapkan oleh bank keliling. Bank keliling merupakan sebutan nama untuk rentenir atau lintah darat yang memberikan pinjaman dengan proses yang sangat mudah dan cepat. Banyak dari masyarakat di lingkaran kampus terlibat utang pada bank keliling, padahal bunga yang diterapkan sangat tinggi. Meskipun bunga pada kredit “Mitra AGB” hanya 1/3 dari bunga bank keliling, para calon peminjam masih merasa keberatan. Di lapangan pun para wirausaha perempuan sebagian besar enggan mengikuti program ini ketika mengetahui adanya sistem bunga. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya besaran bunga diperkecil menjadi 5 persen dan istilah bunga diganti dengan “jasa” yang dapat mudah diterima oleh para peminjam.
3. Selain menerapkan bunga, kredit “Mitra AGB” menerapkan pula tabungan (*saving*) sebesar 5 persen. De Aghion dan Morduch (2005) menyatakan bahwa dengan tabungan, rumahtangga peminjam tidak hanya bisa membangun aset untuk digunakan sebagai jaminan, tetapi mereka juga bisa mengatur kebutuhan konsumsi dan mengasuransikan diri terhadap guncangan besar yang mungkin terjadi pada kondisi keuangan rumah tangga.
4. Jangka waktu peminjaman selama tiga puluh hari (kecuali Sabtu dan Minggu). Waktu tiga puluh hari diasumsikan cukup dapat memberikan gambaran siklus usaha yang sudah ajek, karena usaha yang dijalankan para peminjam merupakan usaha “gurem” dengan omset harian.
5. Sistem pengembalian adalah harian, dengan besar angsuran Rp 18 500 per hari. Hal ini terkait pula dengan karakteristik usaha peminjam yang rata-rata omsetnya adalah harian.
6. Wirausaha perempuan “gurem” yang menerima kredit, dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan kedekatan tempat tinggal. Setiap kelompok memiliki satu orang ketua. Tujuan dibentuknya kelompok ini, agar para peminjam memiliki kontrol sosial yang lebih tinggi saat proses pengembalian. Masing-masing anggota berkewajiban untuk mengingatkan anggota kelompok yang lain dalam membayar angsuran per harinya. Apabila salah satu anggota kelompok menunggak, maka akan menjadi tanggung jawab kelompok tersebut.

Proses Penyaluran Kredit

Proses penyaluran kredit “Mitra AGB” dapat dilihat pada Gambar 1. Pada alur 1, Departemen Agribisnis –selanjutnya ditulis AGB- mengajukan usulan dana program “Mitra AGB” kepada NICHE. Kemudian NICHE menyetujui dan mencairkan dana tersebut kepada AGB (alur 2). Selanjutnya pada alur 3, AGB mencairkan dana tersebut kepada dosen dan mahasiswa peneliti untuk kemudian disalurkan kepada penerima manfaat, dalam hal ini adalah wirausaha perempuan di desa lingkaran kampus IPB (alur 4).

Alur 5 dan alur 6 menggambarkan alur pengembalian dana pinjaman dari peserta “Mitra AGB” kepada AGB melalui kader desa. Dalam program ini, peran kader desa sangat penting, terutama dalam proses penagihan angsuran kepada para peminjam. Angsuran yang telah terkumpul di kader setiap harinya, akan dibawa oleh salah satu staff AGB. Setelah penelitian berakhir dana tersebut



Gambar 1. Proses Penyaluran Kredit “Mitra AGB”

akan kembali digulirkan oleh AGB kepada peserta “Mitra AGB” (alur 7 dan alur 8).

Kinerja Wirausaha Perempuan

Salah satu indikator kinerja yang dapat diukur dalam penelitian ini adalah tingkat pengembalian kredit. Secara umum, tingkat pengembalian peserta “Mitra AGB” adalah sebesar 83 persen, dimana pada akhir periode peminjaman, masih terdapat lima orang peserta yang menunggak. Tingkat pengembalian ini tergolong rendah, karena berdasarkan tulisan Asmorowati (2007), pengalaman selama ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian untuk program mikro kredit bertargetkan perempuan rata-rata mencapai lebih dari 90 persen.

Kinerja wirausaha perempuan selanjutnya ditunjukkan oleh perbedaan omset rata-rata harian dan margin keuntungan rata-rata harian, sebelum dan sesudah menerima kredit. Dari uji pangkat tanda Wilcoxon didapatkan nilai-p sebesar 0,456 untuk omset rata-rata harian, yang berarti H_0 tidak ditolak. Begitu pula dengan margin keuntungan rata-rata per hari, dimana nilai-p yang diperoleh sebesar 0,052, yang berarti H_0 tidak ditolak. Dengan demikian, uji statistik menunjukkan bahwa

tidak ada perbedaan omset rata-rata per hari dan marjin keuntungan rata-rata per hari yang diperoleh wirausaha perempuan sebelum dan sesudah menerima kredit.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis Kinerja Wirausaha Perempuan

Kinerja Usaha	Mean	Nilai-Z	Nilai-p
Omset Rata-rata per Hari			
Sebelum Kredit	Rp 201.167	-0.746	0.456
Sesudah Kredit	Rp 179.550		
Marjin Keuntungan Rata-rata per Hari			
Sebelum Kredit	17.18 persen	-1.944	0.052
Sesudah Kredit	24.83 persen		

Penurunan omset rata-rata per hari yang dialami oleh wirausaha perempuan dimungkinkan terjadi karena pada kenyataannya sebagian besar dari mereka tidak menggunakan kredit tersebut sebagai tambahan modal usaha. Berdasarkan pengakuan responden, hanya sekitar 20 persen yang menggunakan seluruh uang pinjaman sebagai tambahan modal usaha. Selebihnya, mereka gunakan untuk menutupi utang lain dan atau untuk keperluan rumahtangga. Perlu diketahui bahwa sebagian besar wirausaha perempuan terlibat juga dalam beberapa pinjaman, khususnya kepada bank keliling.

Keberanian para wirausaha perempuan ini terlibat dalam beberapa pinjaman tersebut, menunjukkan bahwa mereka memiliki orientasi kewirausahaan berupa nilai resiko. Nilai resiko ini dapat pula mempengaruhi kinerja usaha mereka (Munadjat *et al.*, 2016).

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu. Temuan Pitamber (2003) menunjukkan bahwa kredit mikro yang semakin berkembang selama dekade terakhir di Afrika, ternyata tidak berdampak pada berkurangnya kemiskinan secara berkelanjutan diantara kelompok peminjam. Selain itu, Hanoebon & Sasongko (2012) pun menyebutkan, meskipun telah banyak program permodalan yang diberikan oleh lembaga keuangan di kota Ambon, wirausaha perempuan masih sulit berkembang. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pendampingan dan pembinaan dalam hal penataan sistem manajemen usaha. Kuntaraningsih dan Mariyono (2013) juga mengemukakan bahwa pelatihan berdampak positif pada peningkatan kinerja usaha.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyaluran kredit kepada wirausaha perempuan di Desa Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, belum dapat meningkatkan kinerja usaha mereka. Hal tersebut disimpulkan berdasar kepada beberapa indikator, di antaranya: Tingkat pengembalian kredit yang hanya mencapai persentase sekitar 83 persen, dimana hal ini

menunjukkan kinerja usaha yang rendah; Omset rata-rata per hari yang diperoleh wirausaha perempuan, berdasarkan uji statistik tidak berbeda antara sebelum menerima kredit dengan sesudah menerima kredit; Marjin keuntungan rata-rata per hari yang diperoleh wirausaha perempuan, berdasarkan uji statistik tidak berbeda antara sebelum menerima kredit dengan sesudah menerima kredit.

Kinerja usaha dari wirausaha perempuan yang belum optimal tersebut menunjukkan penyaluran kredit yang belum efektif. Terkait hal tersebut, perlu adanya penelitian lanjutan yang dapat mendesain penyaluran kredit secara lebih sempurna. Di samping itu, penting sekali untuk melibatkan wirausaha perempuan dalam mendesain pola penyaluran kredit, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Hal penting lainnya adalah perlunya pendampingan manajemen usaha bagi wirausaha perempuan, sehingga penggunaan kredit dapat lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmorowati, S. (2007). Dampak Pemberian Kredit Mikro untuk Perempuan: Analisis Pengadopsian Model Grameen Bank di Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 20, (3), 1-13.
- De Aghion, B.A. & Morduch, J. (2005). *The Economics of Microfinance*. London: The MIT Press
- Greene, P.G., Myra, H.M., Gatewood, E. J., Brush, C. G., & Carter, N.M. (2003). Women Entrepreneurs: Moving Front and Center: An Overview of Research and Theory. http://www.unm.edu/~asalazar/Kauffman/Entrep_research/e_women.pdf.
- Hanoebon, B.R.A, & Sasongko, P. (2012). Strategi Pengembangan Usaha Perempuan Pelaku UMKM di Kota Ambon. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/download/1762/pdf>.
- Kuntaraningsih, A & Mariyono, J. 2013. Dampak Pelatihan Petani terhadap Kinerja Usahatani Kedelai di Jawa Timur. *Sosiohumaniora*, 15, (2), 139-150
- Marpaung, E.S., Sarma, M., & Limbong, W.H. (2013). Dampak Pemberian Kredit Pola Grameen Bank Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Masyarakat Pesisir oleh Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina di Kabupaten Tuban. *Manajemen IKM*, 8, (1), 20-26.
- Munadjat, Tasrif, M., & Bayu, K. 2016. Model Orientasi Kewirausahaan dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Perdesaan. *Sosiohumaniora*, 18,(1), 83-90.

- Neuman, W.L. (2000). *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches 4th Edition*. New York (US): Pearson Education Company.
- Ocholah, R.M.A., Ojwang, C., Alla, F., Oima, D., Okelo, S., & Ojera, P.B. (2013). Effect of Micro Finance on Performance of Women Owned Enterprises, In Kisumu City, Kenya. *Greener Journal of Business and Management Studies*, 3, (4), 164-167.
- Pitamber, S. (2003). Factors Impeding The Poverty Reduction Capacity of Micro-credit: Some Field Observations from Malawi and Ethiopia. Economics Research Papers No. 74. African Development Bank. <http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/00157682-FR-ERP-74.PDF>.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sumarti, T., Latifah, M., Purnomo, A.M., & Indriana, H. (2011). Pemetaan Psikososial, Tantangan Struktural dan Isu Gender yang Dihadapi Perempuan Industri Rumahtangga di Kabupaten Bogor dan Kota Jakarta Selatan. Executive Summary.
- Tambunan, T. (2012). Wanita Pengusaha di UMKM di Indonesia: Motivasi dan Kendala. Policy Discussion Paper, Center of Industry, SME and Business Competition Studies, Trisakti University. http://www.fe.trisakti.ac.id/pusatstudi_industri/pusat%20study%20tulus%20tambunan/pusat%20studi/policy%20discussion%20paper/policy%20paper%2033.pdf
- Ushakiran, V., Rajeshwari, & Karunasree, M., (2012). A Study on Business Women in Micro Enterprises. *International Journal of Multidisciplinary Research*, 2, (1), 211-219.
- Yuzaria, D. & Fitriani. 2010. Kontribusi Ekonomi Perempuan Penjual Ayam Goreng Gerobak di Beberapa Pasar Satelit di Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Peternakan*, 8, (5), 245-251.

SEKOLAH INKLUSI SEBAGAI ARENA KEKERASAN SIMBOLIK

Nanang Martono, Mintarti, Elis Puspitasari, dan Sulyana Dadan

Prodi Sosiologi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

E-mail: nanang.martono@unsoed.ac.id,

ABSTRAK. Penelitian ini mendeskripsikan kekerasan simbolik yang terjadi di sekolah favorit. Ketika siswa dari keluarga miskin diberi kesempatan bersekolah di sekolah yang mayoritas siswa berasal dari kelas atas, maka siswa dari kelas bawah akan mengenal banyak habitus kelas atas. Di sinilah awal terjadinya kekerasan simbolik di sekolah. Studi ini menggambarkan bagaimana siswa miskin melakukan interaksi sosial di sekolah meskipun memiliki habitus yang berbeda dengan habitus mayoritas siswa di sekolah. Sekolah yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah sekolah yang didominasi siswa kelas atas di Kota Cilacap. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mewawancarai beberapa siswa miskin di sekolah tersebut. Hasil studi menunjukkan bahwa beberapa siswa merasa minder ketika harus berinteraksi dengan siswa kaya. Mereka sulit mengikuti habitus temannya yang berasal dari kelas atas, misalnya: nonton film di bioskop, jalan-jalan ke mall, dan lainnya. Siswa lain memiliki bersikap masa bodoh dan tidak dekat dengan temannya yang berbeda kelas sosial. Kesimpulan studi menyatakan bahwa sekolah inklusi yang mengakomodasi siswa dari banyak golongan sosial ekonomi merupakan upaya strategis pemerataan kesempatan belajar. Namun di sisi lain, ketika sebuah sekolah didominasi siswa dari kelas atas, maka kondisi ini sebenarnya kurang menguntungkan bagi siswa miskin di sekolah yang tersebut.

Kata kunci: kekerasan simbolik; siswa miskin; sekolah; habitus

INCLUSIVE SCHOOL AS THE ARENA OF SYMBOLIC VIOLENCE

ABSTRACT. This research describe symbolic violence that occur at favourite school. When students from poor family are given the chance to study at school that majority come from high class, so low class students will know much high class habitus. Here is the begining of simbolic violence at school. This study describes how the poor students do social interaction at school although they have different habitus with the habit of majority students at school. The choosen school as the research location is the school that dominated high class students in Cilacap. This research uses qualitative method by interviewing some low class students at that school. The study shows that some students are inconfidence when they have to interact with high class students. They find difficulties to follow the habitus of their friends that come from high class, for examples: watching movie at cinema, strolling at mall, and so on. The other students don't care and not closed with their friends from differer class. The study conclusion says inclusive school that accomodate the students from many social economic group is an strategic effort of study chance equality. However, on the other side, when a school is dominated high class students, so this condition actually is unprofitable for the poor students at that school.

Keywords: symbolic violence; poor student; school; habitus

PENDAHULUAN

Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara untuk mengakses pendidikan berkualitas adalah tugas dan kewajiban negara. Kesempatan ini tidak hanya diberikan untuk golongan tertentu saja, melainkan untuk semua golongan masyarakat. Ini adalah bentuk meritokrasi untuk mewujudkan sistem pendidikan yang demokratis.

Dalam beberapa waktu terakhir biaya pendidikan meningkat secara signifikan. Akibatnya sekolah hanya dapat diakses golongan menengah ke atas saja. Kelompok masyarakat miskin sulit mengakses pendidikan berkualitas. Sekolah kemudian menjadi lembaga eksklusif yang dapat diakses segelintir orang saja. Sekolah mahal selalu menjadi momok yang sangat menakutkan bagi warga miskin dan menjadi bahan diskusi di mana-mana (Martono, 2014).

Untuk menanggapi pandangan miring mengenai sekolah mahal, pemerintah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis, terutama untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pemerintah berharap

dengan kebijakan ini warga miskin akan mudah mengenyam pendidikan (Martono, 2014). Pemerintah mengucurkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk membantu sekolah-sekolah agar mereka mampu meningkatkan kualitasnya. Harapannya adalah ada kesamaan akses bagi warga miskin ke sekolah-sekolah yang selama ini dianggap hanya milik siswa kaya. Sekolah pun diharapkan mampu menjadi lembaga inklusif yang terbuka untuk semua golongan.

Dalam praktiknya, meskipun sekolah adalah gratis, namun masih ada pengotak-kotakan tempat sekolah untuk si kaya dan si miskin. Ada sebagian sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga kaya, dan sebagian lain diisi siswa dari keluarga miskin. Sekolah gratis ternyata belum mampu menghapus dikotomi sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Sekolah favorit masih didominasi siswa kelas atas, sementara sekolah tidak favorit juga masih didominasi siswa dari kelas bawah. Sekolah gratis ternyata belum mampu mengeliminasi segregasi sosial dalam pendidikan di Indonesia.

Pada proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun 2017, selain menerapkan sistem PPDB

online, pemerintah melalui Kemendikbud mencoba menerapkan sistem zonasi. Sistem ini mengharuskan siswa memilih dan bersekolah di sekolah terdekat dengan domisilinya tanpa memperhatikan kualitas akademiknya. Dalam jangka panjang, sistem ini bertujuan menghapus dikotomi sekolah favorit dan tidak favorit. Sistem zonasi secara tidak langsung juga memiliki misi lain yaitu memberikan akses yang sama bagi siswa miskin yang selama ini tidak berkesempatan masuk di sekolah-sekolah favorit meskipun sekolah tersebut dekat dengan tempat tinggalnya.

Namun, secara sosiologis, pemberian akses yang sama bagi siswa miskin dan kaya dalam satu sekolah bukanlah sebuah solusi yang mampu mengatasi semua masalah ketimpangan sosial dalam pendidikan. Ketika siswa miskin dan siswa kaya bersekolah di sekolah yang sama, ada problem sosiologis yang muncul.

Pertama, berkaitan dengan masalah kemampuan akademik. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sekolah harus memprioritaskan siswa miskin jika ia memang berada pada zona yang dekat dengan sekolah. Pada tataran ini, siswa miskin dengan kualifikasi akademik tinggi tidak menghadapi masalah yang cukup berarti. Namun, bagi siswa miskin yang memiliki kualitas akademik rendah kemudian mereka harus bersaing dengan siswa kaya yang memiliki kualifikasi akademik tinggi, bagaimana mereka dapat menyamakan prestasinya? Masalah prestasi bukan semata karena ia mendapat materi yang sama, diajar guru yang sama di ruang kelas yang sama. Namun, ada faktor lain yang tidak diperoleh di sekolah dan sulit dimiliki siswa miskin. Misalnya: mengikuti les di lembaga bimbingan belajar serta fasilitas internet 24 jam.

Kedua, secara sosiologis ada hambatan saat berinteraksi yang dialami siswa miskin. Ini dapat ditemukan ketika mereka harus berinteraksi dengan siswa kaya di sekolah. Bourdieu (1973) menjelaskan bahwa siswa miskin dan siswa kaya memiliki “modal” dan habitus yang berbeda. Habitus merupakan budaya, gaya hidup, kebiasaan yang dimiliki sekelompok individu. Habitus setiap individu dan kelompok adalah berbeda, bergantung pada modal yang dimilikinya. Jadi, dengan perbedaan modal tersebut, Bourdieu pesimis siswa miskin akan mampu menyamai prestasi siswa kelas atas karena si miskin tidak mampu menyamai habitus si kaya.

Isu yang menarik dari tesis Bourdieu ini adalah bahwa siswa kaya dan siswa miskin memiliki modal dan habitus yang berbeda. Habitus ini akan berdampak pada proses interaksi yang dilakukan keduanya. Bagaimana mereka berinteraksi dengan habitus yang berbeda? Inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

Dalam contoh sehari-hari, hambatan interaksi karena perbedaan habitus ini adalah dalam “bahan percakapan” antara siswa kaya dan siswa miskin. Foucault (Martono, 2014a) menyatakan bahwa wacana (dalam hal ini adalah

isi percakapan) adalah berbeda menurut ruang dan waktu. Misalnya: wacana tentang asyiknya tamasya ke luar kota atau keseruan bermain *game online* hanya dapat dijumpai dalam wacana siswa kaya. Wacana ini tidak berkembang dalam lingkungan siswa miskin. Dengan habitus dan wacana yang berbeda tersebut, mampukah siswa miskin mengikuti atau menyesuaikan diri dengan budaya kelompok mayoritas, yaitu siswa kaya. Ketika mereka bercakap di ruang yang sama, apa yang akan diungkapkan si miskin?

Lebih lanjut, Bourdieu (1973) mengatakan bahwa habitus yang berkembang di sekolah adalah habitus kelas atas saja. Baginya, sekolah sebagai arena pertemuan si kaya dan si miskin ternyata tidak mengakomodasi habitus kelas miskin. Bourdieu menyebut gejala ini sebagai “kekerasan simbolik”, ketika kelompok minoritas dipaksa mempelajari dan mengikuti habitus kelas dominan (kelas atas).

Untuk itu, penelitian ini menganalisis bagaimana siswa miskin “menerima” habitus siswa kaya dalam interaksi sosial mereka di sekolah. Apa yang mereka rasakan ketika berinteraksi dengan siswa yang memiliki habitus berbeda tersebut?

Sekolah sebagai ruang inklusif

Sejatinya, sekolah adalah ruang publik yang dapat diakses semua kelompok masyarakat. Habermas (dalam Hardiman, 2010) menjelaskan bahwa ruang publik merupakan media tempat mengkomunikasikan berbagai informasi dan pandangan hidup seseorang. Ruang publik juga menyangkut ruang yang tidak saja bersifat fisik, akan tetapi juga ruang tempat proses komunikasi dapat berlangsung. Ruang publik yang tidak bersifat fisik ini adalah media massa.

Sekolah sebagai ruang publik menyiratkan makna bahwa siapapun sebenarnya dapat berinteraksi di sana. Sebagai ruang publik, sekolah menjadi tempat bebas tanpa belenggu kekuasaan. Di ruang tersebut, siswa dan guru seharusnya dapat berinteraksi satu sama lain tanpa batasan berarti.

Perkembangan kapitalisme kemudian masuk ke sekolah yang menyebabkan sekolah menjadi ruang eksklusif yang hanya dapat diakses segelintir orang. Para “penikmat” sekolah adalah kelompok *bourgeois* yang memiliki cukup modal untuk masuk ke sekolah. Kelompok kapitalis menggunakan sekolah sebagai sarana mewujudkan tujuannya: salah satunya menggunakan sekolah sebagai pabrik penghasil tenaga kerja (Bowles & Gintis, 1978).

Sekolah berubah menjadi sebuah lembaga eksklusif yang tidak bebas kepentingan. Sekolah menjadi tempat melakukan seleksi sosial. Sekolah juga menjadi manifestasi kekuasaan yang bertugas menentukan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan posisi sosial yang lebih baik daripada yang lain. Dalam dunia kerja,

peran ini mudah dijumpai ketika status pekerjaan tertentu hanya dapat diduduki individu tertentu. Dasar kualifikasi adalah tingkat pendidikan dan keterampilan yang berhasil dimiliki setelah melalui proses pendidikan di sekolah. Status atau tingkat pendidikan yang berhasil diraih individu akan menempatkannya dalam kelompok atau kelas tertentu. Artinya, status pendidikan menjadi dasar untuk menentukan status sosial individu dalam masyarakat. Bourdieu (1973) melihat status pendidikan yang diwujudkan dalam selebar ijazah sebagai sebuah bentuk modal budaya yang dimiliki seseorang yang berdampak pada modal ekonominya.

Menanggapi gejala ini, penganut teori konflik menyatakan bahwa masyarakat sebenarnya hanyalah arena atau tempat terjadinya “pertarungan sosial” (Sadovnik, et. al., 2016). Masyarakat adalah tempat individu dan kelompok yang berbeda saling bersaing mendapatkan sumber daya langka dan bernilai. Pertarungan inipun terjadi di sekolah. Dalam masyarakat modern, status pendidikan adalah “nilai” yang harus diperjuangkan. Pada akhirnya, sekolah menjadi sebuah komoditas mahal.

Para pengikut teori konflik menyatakan bahwa pada dasarnya kelompok-kelompok sosial di masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Meskipun kepentingan ini dikelola dengan baik dalam masyarakat modern, sebagian orang tetap lebih diuntungkan daripada lainnya. Sebagai sebuah arena pertarungan, sekolah memiliki fungsi politis: mempertahankan ideologi penguasa. Sekolah berfungsi mempertahankan dominasi kekuasaan. Pendidikan kapitalistik memfungsikan sekolah sebagai sarana mempertahankan posisi kelas atas agar posisi mereka tidak tergantikan individu kelas bawah yang berhasil memperbaiki posisinya. Dalam hal ini, fungsi sekolah sebagai sarana melakukan mobilitas sosial dihambat kaum kapitalis.

Sekolah sebagai “Arena” Kekerasan Simbolik

Ketika sekolah menjadi arena pertarungan kepentingan antaraktor, sekolah kemudian menjadi sarana pertarungan kekuasaan. Gejala ini menarik perhatian Bourdieu yang bertolak dari pandangan teori konflik. Kehidupan sosial masyarakat diwarnai ketimpangan sosial. Pada kondisi sosial ini, sekolah seharusnya berperan mengeliminasi ketimpangan tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya sekolah justru meningkatkan ketimpangan sosial tersebut.

Permasalahan ini dapat dianalisis dengan tesis Bourdieu. Bourdieu berhasil mengungkap sisi epistemologis di balik “budaya yang berkembang di sekolah” serta “bagaimana posisi kelas bawah di sekolah”. Secara sederhana ia menyatakan bahwa sekolah didominasi individu dari kelas atas sebagai kelompok dominan.

Menurut Bourdieu (1973), perbedaan kelas sosial berkaitan erat dengan masalah modal yang dimiliki

individu. Setidaknya, ia mengidentifikasi empat bentuk modal yang mampu membedakan posisi sosial individu satu dengan lainnya. Keempat modal tersebut adalah: modal budaya, modal ekonomi, modal sosial, dan modal simbolik. Modal ekonomi adalah segala sesuatu yang dapat dikonversikan menjadi uang. Ini berkaitan dengan perbedaan kemampuan ekonomi individu atau kemampuan dalam memiliki materi. Modal budaya berupa penguasaan informasi dalam segala bentuknya. Ini adalah pengetahuan, kode-kode budaya, serta etika yang berperan dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial yang dimiliki individu. Modal sosial adalah semua sumber daya yang didasarkan pada hubungan sosial dan keanggotaan dalam suatu kelompok. Candland (2000) menyebutkan bahwa kepercayaan seseorang dapat menjadi sebuah modal sosial bagi individu tersebut. Modal simbolik yaitu status yang diberikan kepada setiap modal tersebut apabila telah mendapat pengakuan dan penerimaan publik. Modal simbolik melekat dalam berbagai status yang dimiliki individu.

Perbedaan kemampuan memiliki (atau mendapatkan) modal tersebut merupakan kendala bagi sebagian besar individu untuk memasuki posisi kelas tertentu. Setiap kelas sosial memiliki modal berbeda. Perbedaan kepemilikan modal ini kemudian berimplikasi pada habitus yang dimiliki individu yang menempati kelas tersebut. Habitus merupakan serangkaian nilai, norma, gaya hidup, atau kecenderungan yang menuntun perilaku seseorang melalui sosialisasi (Wacquant, 2013). Habitus dimiliki dan mencerminkan posisi atau kelas sosial tertentu bagi pemiliknya karena kepemilikan modal mereka berbeda (Haralambos & Holborn, 2007). Dengan kata lain, modal yang dimiliki siswa miskin berbeda dengan modal yang dimiliki siswa kaya. Akibatnya, habitus yang dimiliki keduanya juga berbeda.

Kelas atas (atau kelas dominan) adalah kelas yang memiliki banyak modal. Dengan menggunakan kekuatan ini, kelas dominan berusaha agar posisinya tidak akan pernah tergantikan individu lainnya. Dominasi diwujudkan di sekolah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bagi Bourdieu sekolah tidak lain hanyalah sebuah arena atau tempat pertarungan. Sekolah hanya menjalankan proses reproduksi budaya (*cultural reproduction*), yaitu sebuah mekanisme untuk membantu mengabadikan ketidaksetaraan ekonomi antargenerasi (Giddens, 2006). Sekolah sebenarnya gagal mewujudkan kesetaraan sosial.

Cara yang ditempuh kelompok dominan mempertahankan posisinya adalah melalui apa yang dinamakan sosialisasi *habitus*. Dalam kenyataannya, meskipun habitus setiap kelas adalah berbeda, dan habitus bergantung pada kepemilikan modal, akan tetapi habitus dapat ditularkan dari kelas sosial yang satu ke kelas sosial lain. Penularan ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang berlangsung secara implisit, sehingga kelompok yang “meniru” habitus

sosial tersebut melakukan imitasi tanpa menyadarinya (Bourdieu, 1984).

Sosialisasi habitus dilakukan menggunakan instrumen bahasa untuk memengaruhi pengetahuan individu (Bourdieu & Passeron, 1977). Inilah yang kemudian dinamakan proses kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik salah satunya terjadi dalam praktik pendidikan di sekolah. Kekerasan simbolik dapat terjadi ketika ketika seorang guru menyatakan posisi dirinya lebih tinggi. Akibatnya siswa harus mematuhi.

Menurut Bourdieu (Bourdieu & Passeron, 1977), dalam praktiknya sekolah menjalankan fungsi reproduksi sosial dan sekolah lebih banyak melayani kebutuhan kelas atas atau kelas dominan. Kelas atas memosisikan dirinya sebagai kelas dominan, sementara kelas bawah diposisikan sebagai objek dominasi. Ketika kelas dominan mendapat "posisi terhormat" di sekolah, maka mereka pun semakin leluasan menyosialisasikan habitusnya. Mereka tidak hanya menyosialisasikan habitus, akan tetapi mereka juga memaksakan habitusnya pada kelompok lain.

Studi yang dilakukan Martono (2012) menunjukkan bagaimana materi pelajaran di sekolah sebagian besar hanya menyajikan habitus-habitus kelas dominan. Studi yang dilakukan dengan menganalisis isi BSE (buku sekolah elektronik) SD menunjukkan bahwa sebagian besar kalimat dan gambar yang dimuat dalam BSE memuat habitus kelas dominan (kelas atas). Ada beberapa mekanisme yang digunakan untuk menyosialisasikan habitus kelas atas melalui BSE. *Pertama*, menceritakan kebiasaan-kebiasaan kelas atas, misalnya: bertamasya, merayakan ulang tahun, menonton televisi, membaca koran, bermain PS di rumah, mengikuti les piano, serta mencuci mobil. *Kedua*, memperlihatkan atau menceritakan benda-benda yang biasa dimiliki kelas atas sebagai contoh, misalnya: televisi, kulkas, *kitchen set*, wastafel, mobil-mobilan (tamiya), mobil (mencuci mobil), garasi, *vacuum cleaner*, akuarium, serta rumah mewah. *Ketiga*, menggambarkan profil atau ciri-ciri kelas atas, misalnya: bekerja di kantor, memakai dasi, berangkat bekerja dengan naik mobil, bekerja membawa koper dan bersepatu. Habitus-habitus tersebut disajikan dalam materi pengantar (apersepsi), cerita, dan soal latihan.

Di sisi lain, habitus kelas bawah yang digambarkan dalam BSE jumlahnya sangat sedikit. Habitus kelas bawah digambarkan dalam BSE melalui mekanisme: *pertama*, menggambarkan karakter kelas bawah, misalnya: bekerja di sawah, bekerja sebagai petani, nelayan, penggembala, tukang batu, serta pemulung. *Kedua*, menceritakan aktivitas yang biasa dilakukan individu dari kelas bawah, misalnya: membajak sawah, menggembala, mencangkul, menanam padi, dan membantu orang tua mencari nafkah.

Ketika habitus kelas atas mendominasi praktik pendidikan, tentu saja secara tidak langsung telah mengeliminasi keberadaan kelas bawah di sekolah.

Keberadaan mereka seolah dianggap tidak ada, pasalnya habitus mereka jarang dan hampir tidak disosialisasikan di sekolah. Parahnya, siswa miskin juga menganggap hal ini sebagai sesuatu yang wajar. Mereka tidak menyadari bahwa budaya dan kebiasaannya sering menjadi bahan cemoohan di sekolah. Mereka juga mengamini bahwa budaya orang kaya adalah budaya yang sangat ideal, budaya yang baik, sehingga mereka pun ingin meniru kebiasaan teman-temannya tersebut (Martono, 2012).

Deskripsi secara jelas menunjukkan bahwa menyatukan siswa kelas atas dan kelas bawah di satu sekolah tidak menyelesaikan masalah secara sosiologis. Siswa miskin memang "bersyukur" dapat bersekolah di sekolah yang selama ini hanya dapat dimasuki orang-orang kaya. Namun sebenarnya keberadaan mereka di sekolah dianggap tidak ada. Sekolah kemungkinan tidak mengakomodasi latar sosial siswa miskin sehingga guru menggunakan standar tunggal, yaitu standar kelas dominan (siswa kelas atas). Akibatnya, siswa miskin dipaksa mengikuti cara kerja dan cara belajar siswa kelas atas, padahal keduanya memiliki kemampuan yang sangat berbeda.

Uraian ini menunjukkan bahwa Bourdieu telah berhasil menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah dominasi negara semata. Namun dalam praktiknya, peran kelompok kelas atas lebih dominan dan mereka berhasil mengatur segala hal yang terjadi di sekolah, termasuk membatasi apa saja yang dianggap layak atau tidak layak untuk dimasukkan dan dipelajari di sekolah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Ada beberapa alasan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini. *Pertama*, peneliti ingin menggambarkan bagaimana siswa memahami situasi sosial di sekolah ketika sekolah terdapat banyak siswa dari latar sosial yang berbeda, dan mereka masing-masing membawa habitus yang berbeda. *Kedua*, penelitian ini juga menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan siswa kelas bawah (siswa miskin) menghadapi dominasi habitus siswa kaya di sekolah. *Ketiga*, penelitian ini menggambarkan proses interaksi sosial siswa miskin dan siswa kaya di sekolah.

Subjek penelitian ini adalah siswa miskin yang bersekolah di sekolah favorit dengan mayoritas siswa kaya, yaitu dua SMA favorit di Kota Cilacap Jawa Tengah. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, pengumpulan data sekunder.

Untuk menganalisis data, studi ini menggunakan metode analisis komparatif konstan (*constant comparative*). Alasan dipilihnya metode analisis ini adalah peneliti ingin melakukan komparasi mengenai pengalaman-pengalaman yang dialami siswa miskin di sekolah favorit. Pengalaman ini juga mencakup pengalaman ketika mereka berinteraksi

dengan siswa kaya yang merupakan kelompok mayoritas di sekolahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bersekolah di sekolah favorit

Bersekolah di sekolah favorit, bagi golongan kelas menengah ke bawah bukanlah sebuah mimpi yang mudah diwujudkan. Sekolah favorit di banyak tempat adalah sekolah mahal. Untuk dapat masuk ke sekolah tersebut, modal kecerdasan otak tidaklah cukup sebagai modal utama. Namun, siswa miskin harus memutar otak lebih keras untuk mencari sumber dana agar berhasil diterima di sekolah favorit. Ini berbeda dengan siswa kaya yang dapat bebas memilih bersekolah di manapun.

Ada banyak cerita mengenai awal mula siswa-siswa miskin kemudian berhasil masuk ke “sekolah milik orang kaya”. Di beberapa media pun banyak cerita yang mengekspos perjuangan mereka, namun sayangnya, hanya sekian persen saja yang dapat melanjutkan mimpi-mimpi tersebut. Sebagian besar siswa kelas bawah gagal mendapatkan fasilitas pendidikan berkualitas, bukan sekedar bersekolah. Berikut beberapa cerita dari informan mengenai keberhasilannya “bersaing” dengan siswa kelas atas untuk masuk ke sekolah favorit.

ADT. ADT adalah anak kelima dari lima bersaudara. Kakaknya sudah menikah kecuali kakak keempatnya. Ayahnya berusia 60 an tahun, bekerja sebagai buruh petani kelapa, dan ibunya bekerja sebagai buruh tani membantu ayahnya. Jika melihat aktivitas kedua orang tuanya, ADT sulit mewujudkan mimpinya bersekolah di sekolah favorit.

Awalnya, sang kakak menyarankan ADT untuk masuk ke MAN (Madrasah Aliyah Negeri) yang dekat dengan tempat tinggalnya. Pertimbangan biaya menjadi alasan kakaknya menyarankan hal tersebut. Di sisi lain, ADT agak pesimis dapat mendaftar ke sekolah favorit karena nilainya pas-pasan. Faktor biaya juga menjadi pertimbangan berikutnya. Dari aspek biaya sekolah, MAN relatif lebih murah daripada SMA negeri di kota yang sama.

Meskipun pesimis, namun pada akhirnya ADT memutuskan mendaftar ke salah satu SMA favorit di Cilacap. Pada saat pengumuman hasil seleksi, ADT dinyatakan diterima, namun ia berencana mengurungkan niatnya untuk bersekolah di SMA tersebut karena pertimbangan biaya. Pada saat yang hampir bersamaan, ia bertemu dengan salah satu guru di SMA tersebut, yaitu JM. JM menyatakan akan membantu masalah biaya sekolah untuk ADT jika ia diterima di SMA tersebut.

ADT tinggal di masjid sekolah bersama keempat temannya karena rumahnya cukup jauh dari sekolah. Ia tinggal di masjid sekolah secara gratis. Iapun dibebaskan dari kewajiban membayar biaya sekolah.

RIK. RIK adalah salah satu siswa berprestasi SMA-

nya. Kakaknya kini sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri di Semarang. Ia tinggal di Kecamatan Karangreja, sekitar 60 km dari Kota Cilacap bersama dengan ayahnya yang bekerja sebagai penjahit merangkap petani. Ibu RIK sudah meninggal dunia karena sakit. Selama menempuh studi di Cilacap, RIK tinggal di masjid sekolah bersama dengan ADT. Awalnya RIK pun ragu dapat bersekolah di salah satu sekolah favorit di Cilacap.

Ketika SMP, RIK memang mendambakan dapat bersekolah di SMA tersebut karena berharap mendapatkan beasiswa dari bupati Cilacap. Namun sayangnya, ketika RIK lulus SMP, program beasiswa tersebut sudah tidak ada lagi. Ia pun mengurungkan niatnya bersekolah di Cilacap karena ketiadaan biaya. RIK berniat mendaftar di SMA yang dekat dengan rumahnya untuk menghemat biaya.

Namun, pada saat bersamaan, ia mendapat informasi beasiswa untuk masuk ke SMA favorit di Cilacap. Ia pun mendapat beasiswa atas bantuan dari salah satu guru di SMA tersebut. RIK mendapatkan pembebasan biaya SPP dan keringanan biaya pembangunan gedung, sehingga ia hanya membayar Rp 2.400.000 dari biaya yang seharusnya yaitu Rp 5.000.000.

Selama belajar di SMA tersebut, RIK berhasil menunjukkan prestasinya. Ia menjuarai beberapa kompetisi sampai tingkat provinsi dan nasional mewakili sekolahnya.

KRS. KRS adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Orang tuanya sudah bercerai, dan ia tinggal bersama ibu dan neneknya. Ibunya berjualan makanan kecil (*snack*) atau jajanan pasar yang ditiptkan di sekolah-sekolah di sekitar rumahnya, sedangkan neneknya adalah seorang buruh. Sementara KRS juga membantu ibunya berjualan makanan kecil di sekolah. Jadi, sambil bersekolah, KRS juga menawarkan dagangannya ke teman-temannya di sekolah.

Sama dengan RIK, KRS juga sudah mendambakan bersekolah di SMA favorit di Cilacap. Rumah KRS tidak jauh dari sekolah, sehingga setiap hari ia berangkat dari rumah ke sekolah yang berjarak kurang lebih enam kilometer.

Setelah lulus SMP, KRS langsung mendaftar ke SMA favorit di Cilacap dan dinyatakan diterima. Pada awalnya ia juga ragu bersekolah di SMA tersebut karena ketiadaan biaya. Akan tetapi, ia kemudian berhasil mendapatkan pembebasan biaya sekolah bulanan dan keringanan biaya pembangunan.

FIN. Di Cilacap FIN tinggal bersama bibi dan sepupunya, sedangkan orang tuanya tinggal di Karawang, Jawa Barat. Orang tua FIN bekerja sebagai buruh di Karawang, sementara bibinya berjualan *snack* buatan sendiri. Paman FIN bekerja sebagai nelayan dan pulang dua minggu sampai satu bulan sekali.

FIN diterima di salah satu SMA favorit di Cilacap dengan bekal nilai yang cukup memuaskan meskipun secara ekonomi cukup berat. Selama bersekolah, FIN mendapatkan keringanan SPP dan pengurangan biaya pembangunan gedung. Setelah dikurangi keringanan, FIN membayar SPP sebesar Rp 100.000/bulan dan biaya pembangunan sebesar Rp 3.750.000 yang dapat diangsur selama tiga tahun.

Perjuangan belum selesai, ternyata FIN tidak hanya mengeluarkan biaya untuk itu saja. Bersekolah ternyata tidak sekedar membayar biaya SPP dan pembangunan gedung saja, akan tetapi FIN masih dibebani biaya lain: biaya pembuatan jas untuk praktikum di laboratorium, serta seragam ekstrakurikuler jika ia mengikuti ekstrakurikuler tertentu. Menurut pengakuan FIN, semuanya bersifat wajib dan sulit untuk mewarisi seragam milik kakak kelas karena hampir setiap tahun warna seragam praktikum berbeda.

FKR. FKR adalah anak pertama dari dua bersaudara. Ia tinggal bersama ibu dan ayah tirinya karena ibunya telah bercerai dan ayah kandungnya sudah menikah lagi. Ibunya bekerja dengan menerima pesanan kue buatan sendiri, sementara ayah tirinya bekerja sebagai tenaga kontrak di perusahaan properti.

Sama seperti FIN, FKR juga langsung diterima di SMA favorit dengan bekal nilai yang mencukupi. Namun FKR berbeda dengan FIN karena FKR tidak mendapatkan keringanan SPP meskipun ia berasal dari keluarga tidak mampu. FKR mengaku telah mengajukan keringanan pembayaran SPP namun pihak sekolah belum memberinya keringanan. Akibatnya hampir setiap bulan FKR harus terlambat membayar SPP.

Itulah beberapa profil singkat siswa yang menjadi informan dalam penelitian ini. Penuturan kelimanya menunjukkan beberapa kesamaan. Pertama, mereka masuk ke SMA favorit dengan bermodal nilai masuk yang mencukupi. Kedua, mereka memiliki modal ekonomi yang pas-pasan bahkan kurang sehingga mereka harus mengajukan keringanan biaya bulanan dan biaya pembangunan gedung. Ketiga, orang tua mereka tidak memiliki penghasilan tetap sehingga sulit untuk memenuhi semua kebutuhan sekolah secara maksimal.

Bersekolah di sekolah favorit bukanlah sebuah perjuangan yang mudah. Mereka harus siap hidup sederhana dan prihatin. Dua informan (ADT dan RIK) memilih tinggal di masjid sekolah agar tidak perlu membayar kos. Mereka pun berupaya mengajukan keringanan SPP agar dapat bertahan hidup selama studi.

Informasi yang diperoleh dari informan tersebut menunjukkan bahwa sekolah favorit masih memiliki *image* sebagai sekolah mahal. Ini berakibat siswa miskin merasa was-was tatkala memberanikan diri mendaftar di sekolah favorit. Kecemasan bahwa dirinya akan kesulitan membayar biaya sekolah yang relatif sangat mahal terus

menghantui pikiran mereka. Bahkan, siswa yang relatif cerdas pun masih berpikir dua kali untuk mendaftar di sekolah favorit.

Meskipun ada dana BOS dari pemerintah pusat, namun nyatanya bantuan tersebut tidak membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa miskin. Sebut saja kasus FIN yang harus membayar Rp 3.750.000 yang dapat diangsur selama tiga tahun. Nominal ini belum termasuk komponen lainnya, seperti: seragam praktikum dan seragam ekstrakurikuler.

FIN menjelaskan:

“... ada banyak iuran... ya iuran buat beli baju... waktu itu harus beli jas lab, terus kalau ikut organisasi kan juga butuh jas blazer. Jas lab harganya 85 ribu, kalau blazer OSIS ada yang harganya 105 ribu sama yang 125 ribu...” (FIN, 10/2/2018)

Masalah seragam masih menjadi momok bagi siswa miskin. Pembelian seragam di luar seragam sekolah adalah di luar subsidi melalui dana BOS. Ini artinya mereka harus membayar sendiri di luar biaya SPP. FIN menjelaskan bahwa ketika ia mengikuti sebuah organisasi intrakurikuler di sekolah, berarti ia harus menyiapkan rupiah lebih banyak. Rupiah itu digunakan untuk membeli seragam organisasi intrasekolah; OSIS memiliki seragam sendiri, begitu pula Pramuka dan Rohis. Biaya di luar SPP memang sering kali memberatkan siswa kurang mampu. Biaya ini pun belum termasuk pembelian LKS (Lembar Kerja Siswa) sebagai pelengkap buku pelajaran yang bersifat wajib beli.

Menghadapi teman “beda habitus”

Berinteraksi dengan teman dari kelas sosial berbeda adalah salah satu risiko yang harus dihadapi siswa kurang mampu ketika memutuskan bersekolah di sekolah favorit. Sekolah mahal menyebabkan sekolah favorit didominasi siswa kaya. Dampaknya adalah siswa miskin menjadi minoritas. Sebagai minoritas, mereka pun secara tidak langsung dipaksa menyesuaikan diri dengan budaya yang dianut kelompok mayoritas.

Ada beragam pilihan yang harus diambil siswa miskin ketika beradaptasi di lingkungan sekolah tersebut. Mereka pun bebas menentukan sikap: antara hanyut dalam gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup kesehariannya, atau memilih menjaga jarak agar tetap menjadi diri sendiri dan mempertahankan budayanya. Bagi siswa miskin, hanyut dan terlibat dalam budaya kelas atas bukanlah tanpa konsekuensi.

Ada banyak sikap dan perasaan siswa miskin ketika mereka harus “berhadapan” dengan teman-temannya dari kelas atas.

FIN misalnya, ia merasa tidak dekat dengan teman-teman sekelasnya yang mayoritas siswa kaya. Ia hanya memaknainya sebagai teman biasa atau teman main saja,

dan FIN mengaku tidak pernah memosisikan temannya tersebut sebagai teman curhat. Satu kata yang berulang kali ia ucapkan adalah “minder”; minder ketika bergaul dengan teman-temannya di kelas. FIN menyatakan:

“Baik, cuman mmm...mungkin ... semua temen-temen itu orang berpunya ya...jadi saya agak minder sedikit.. Ya mungkin rasa malu juga ada, cuman ya gitu.. hehehe... Cuma waktu lihat ke sini-ke sininya temen-temen banyak yang dari anak berpunya...” (FIN, 10/2/2018)

Dalam wawancara dengan FIN, ia tidak secara jelas menjelaskan mengapa ia merasa minder. Ia hanya mengatakan “ya minder karena saya beda dengan mereka...” (FIN, 10/2/2018).

FIN berangkat sekolah dengan mengendarai sepeda sejauh lima kilometer dari rumahnya. Kadang kala ia baru tiba di rumah setelah maghrib karena ada kegiatan di sekolah. Sepulang sekolah ia membantu bibinya di rumah sehingga kadang tidak sempat belajar.

FIN memilih bersikap “menolak” bergabung dalam aktivitas teman sekolahnya. FIN menuturkan:

“... pernah diajak makan-makan bareng di mall tapi saya nolak.... Pernah juga diajak nonton bioskop... tapi ga mau...” (FIN, 10/2/2018)

Sementara, hingga memasuki kelas XI, FIN masih menjaga jarak dengan teman-temannya. Ini terlihat dari penolakannya ketika diajak bermain temannya. Ketiadaan biaya menyebabkan FIN memilih lebih sering di rumah daripada bermain dengan temannya.

Informan lain yaitu RIK, mengaku memilih tidak bergabung dengan teman-teman sekelasnya. Selama bersekolah di SMA, RIK hanya memiliki satu teman akrab karena sama-sama datang dari desa. RIK merasa tidak cocok dengan teman-teman sekelasnya. Bahkan, pada awal masa sekolahnya, RIK sempat meminta pindah sekolah karena merasa tidak cocok dengan lingkungan sosial di sekolah tersebut yang mayoritas “high class”.

RIK menuturkan:

“...saya kan juga bukan orang kota, saya orang desa, nah itu saya nggak punya laptop dan macem-macem, nah itu saya minder” (RIK, 26/1/2018)

“... Awal sekolah di sini saya memang minder. Sampai kalau nggak ditanya temen atau nggak disuruh ngomong sama guru, saya diem...” (RIK, 26/1/2018)

“Minder” adalah perasaan yang dialami RIK dan FIN ketika masuk ke sekolahnya. Suasana yang benar-benar baru dengan teman-teman yang berbeda kelas sosial membuat keduanya tidak percaya diri. Kepercayaan diri RIK tumbuh setelah ia mengikuti berbagai perlombaan dan berhasil mendapatkan juara sampai tingkat nasional. Menjadi juara adalah modal budaya yang menjadi kebanggaan diri RIK.

Meskipun lebih percaya diri, akan tetapi RIK memilih tidak terlalu dekat dengan teman sekelasnya yang menurutnya “high class”. Ia merasa tidak memahami isi pembicaraan teman-temannya.

“... Masalahnya kalau saya bergaul dengan orang-orang kota sini, orang Cilacap itu kalau kita bicara itu kadang nggak nyambung ... Misalnya kalau orang-orang desa itu kan bicaranya masalah-masalah sederhana. Mungkin ya, masalah main di rumah kayak apa, terus kalau olah raga, anak desa main bola ... tapi kalau anak kota itu membicarakannya hal yang lain kayak film bioskop lah, apalah itu, jadi kadang kalau saya mau bergaul kurang cocok dengan pembicaraan mereka, nggak nyambung kalau bicara...” (RIK, 26/1/2018)

Budaya yang berbeda menyebabkan RIK sulit bergabung dengan temannya. Ia sering tidak memahami apa yang sedang diperbincangkan temannya. Kutipan ini mengisyaratkan bahwa perbedaan budaya antara siswa miskin dan siswa kaya berpotensi menghambat proses interaksi di antara keduanya.

Minder juga dirasakan ADT. Berteman dengan teman kelas atas, bagi ADT memang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk ukurannya. Sering kali ia juga harus menolak ajakan temannya untuk sekedar nongkrong di café, ataupun nonton film di bioskop. ADT menuturkan:

“... Saya nggak pernah nonton ke bioskop... Saya mikir-mikir uangnya lebih enak buat makan daripada buat nonton Saya memberikan alasan yang sejujur-jujurnya...” (ADT, 26/2/2018)

Nonton bioskop, nongkrong di café adalah habitus kelas atas. Ketika mereka mengajak temannya yang berasal dari kelas bawah, sebenarnya di sini ada sebuah proses “mengajak teman untuk mengikuti habitusnya”. Ajakan ini menjadi sebuah hal yang sulit diterima karena habitus-habitus tersebut memerlukan modal ekonomi (memerlukan uang karena harus membayar), sementara dalam kasus FIN, RIK, ADT, mereka hampir tidak memiliki modal ekonomi tersebut.

Mereka merasa minder karena tidak mampu sehingga tidak dapat mengikuti habitus teman-temannya. Dalam hal kepemilikan perlengkapan sekolah pun mereka “berbeda”. Salah satu informan berinisial MNA mengatakan bahwa ia terpaksa harus belajar dengan temannya karena ia tidak memiliki laptop. Berikut kutipan wawancara dengan MNA:

“ ... Bikin minder ya.. paling irinya cuma karena temen-temen punya laptop, saya nggak punya. ... Ya rasanya kaya gitu bu.. nggak bisa dijelaskan. ... Biasanya ya.. misal kalau ada tugas yang butuh komputer ya harus ke warnet” (MNA, 26/2/2018)

Tidak memiliki laptop adalah penyebab MNA merasa minder. Kendala serupa juga dialami FIN. Sementara, RIK pada awalnya juga minder karena tidak memiliki laptop, namun pada akhirnya ia berhasil membeli laptop berkat keberhasilannya menjuarai kompetisi tingkat nasional. Hadiah kompetisi tersebut digunakan untuk membeli laptop.

Ketersediaan perlengkapan sekolah sering kali menjadi hambatan siswa miskin untuk mengejar ketinggalannya dengan siswa kaya. Sementara, beberapa sekolah favorit sering menyaratkan kepemilikan perlengkapan tersebut dalam rangka penyusunan tugas sekolah. Bagi siswa kaya hal ini bukanlah masalah besar, akan tetapi bagi siswa miskin ini adalah masalah serius. Untuk itu, usaha atau perjuangan siswa miskin untuk meraih prestasi di sekolah favorit memang tidak mudah. Mereka harus berkompetisi dengan siswa kaya dengan “modal” yang berbeda, namun mereka harus mencapai target yang sama.

Sekolah adalah arena pertemuan berbagai habitus. Namun dalam praktiknya sebagian sekolah justru dikuasai kelompok tertentu yang mendominasi habitus yang berlaku di sekolah tersebut. Sekolah favorit yang diposisikan masyarakat sebagai sekolah terbaik dalam kenyataannya dikuasai kelompok dominan, yaitu kelas atas. Bourdieu (1973) menyatakan bahwa sekolah hanya mengajarkan habitus kelas dominan. Dengan kata lain, habitus yang diterapkan di sekolah-sekolah (terutama sekolah favorit) adalah habitus kelas atas. Hasilnya adalah ketika ada siswa kelas bawah mencoba peruntungannya masuk ke sekolah favorit, secara tidak langsung mereka juga harus (baca: dipaksa) menyesuaikan habitusnya dengan habitus kelas atas.

Keduanya memiliki modal berbeda. namun dengan modal berbeda, mereka dikenai aturan atau standar yang sama. Situasi ini tentu lebih menguntungkan siswa yang memiliki modal lebih tinggi.

Sekolah negeri pada dasarnya merupakan sekolah inklusi yang menyatukan siswa dari berbagai latar belakang sosial. Ini bertujuan memberikan kesempatan yang sama pada semua siswa untuk mengakses pendidikan dengan kualitas yang sama. Namun di sisi lain, ini menjadi kesempatan yang “merugikan”. Siswa miskin dapat kehilangan eksistensinya karena mereka dipaksa melebur dengan siswa kaya, dan secara otomatis habitus kelas bawah pun akan hilang (dianggap tidak ada). Kalaupun eksistensi habitus kelas bawah ada, posisinya tetap tidak menguntungkan pemilik habitus tersebut.

Inilah efek dominasi kelas di sekolah yang digagas Bourdieu. Habitus siswa miskin sering kali dianggap sebagai habitus kuno, tidak gaul, kotor, jauh dari kemajuan atau ketinggal jaman, bahkan dianggap kampungan. Sementara, habitus kelas atas selalu diposisikan sebagai habitus yang baik, layak menjadi contoh, habitus modern dan maju sehingga harus diikuti dan dipertahankan.

Di sisi lain, keberhasilan segelintir siswa kelas bawah dalam memenangkan pertarungan dalam pendidikan di sekolah sering kali diklaim sebagai motivasi bagi masyarakat kelas bawah. Namun sebenarnya peluang keberhasilan tersebut hanya sepersekian persen dari keseluruhan siswa kelas bawah yang mencoba peruntungannya di sekolah-sekolah favorit.

Dalam salah satu tesisnya, Bourdieu menjelaskan bahwa kelas atas akan berupaya menghambat kelas bawah untuk menaikkan statusnya. Kelas atas menggunakan pendidikan di sekolah sebagai mekanisme mempertahankan statusnya. Ketika individu (siswa) kelas bawah pada akhirnya dapat masuk ke sekolah yang sama dengan kelas atas, maka kelas atas berupaya membuat siswa kelas bawah “tidak nyaman” berada di sekolah.

Hasil wawancara dengan RIK sebelumnya menunjukkan bagaimana ketika ia berada di sekolah sering kali tidak dapat menangkap topik pembicaraan teman-temannya yang mayoritas berasal dari kelas atas. RIK merasa tidak nyambung atau tidak mengerti apa yang sedang diperbincangkan teman-temannya. Ini disebabkan apa yang dibicarakan teman RIK bukanlah menjadi budaya keseharian RIK (baca: bukan habitusnya). Ketika RIK mencoba bergabung dalam obrolan tersebut, maka secara tidak langsung sebenarnya RIK dipaksa mengerti kehidupan keseharian teman-temannya mayoritas adalah kelas atas. Sementara, RIK dan hampir semua siswa kelas bawah tidak memiliki kesempatan untuk “menceritakan” bagaimana kehidupan keseharian mereka. Habitus mereka pun dianggap tidak ada atau bahkan hilang.

Selain itu, dalam kasus yang dialami MNA ia berhasil masuk ke sekolah favorit. Namun, ia tidak dapat mengimbangi kemampuan yang dimiliki teman-temannya, yaitu ia tidak mampu memiliki sebuah laptop yang menjadi “syarat” utama ketika mengerjakan tugas sekolah. Ia pun terpaksa mengerjakan di warnet ketika harus mengerjakan tugas yang pengerjaannya memerlukan internet atau laptop. Inilah modal ekonomi yang tidak dimiliki MNA yang membedakannya dengan temannya di sekolah.

Selain itu, beberapa informan terpaksa tidak mengikuti ajakan temannya untuk melakukan aktivitas bersama, misalnya nongkrong ataupun nonton bioskop. Mereka mengaku menolak ajakan temannya karena tidak memiliki uang cukup.

FIN harus membeli seragam ketika mengikuti kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Memang ia mendapat keringanan biaya sekolah, akan tetapi ia tetap diwajibkan membeli seragam praktikum, seragam organisasi sekolah (OSIS, Pramuka, Rohis, dan seragam ekstrakurikuler lainnya), membeli LKS dan perlengkapan lainnya di luar SPP. FIN juga masih dibebani biaya pembangunan sekolah yang harus diangsur selama tiga tahun.

Ketidakmampuan ini menjadi penyebab munculnya rasa minder ketika mereka berinteraksi dengan temannya. Rasa minder ini sebenarnya menunjukkan bahwa siswa kelas bawah gagal menyesuaikan diri dengan habitus kelas atas. Sementara, beberapa informan memilih menolak dengan sengaja karena mereka merasa tidak cocok dengan habitus kelas bawah. RIK menyatakan ingin fokus belajar sehingga ia membatasi waktu bermain dengan teman-temannya.

Inilah mekanisme kelas atas untuk menghambat kemajuan kelas bawah di sekolah. Kelas bawah memang diberi kesempatan masuk ke sekolah favorit namun di sekolah mereka dibuat tidak nyaman. Melalui kekerasan simbolik ini, kelas atas tetap dapat mempertahankan posisinya.

Temuan penelitian ini memberikan pembaruan dalam teori Bourdieu bahwa tesis Bourdieu ternyata tidak menggambarkan mengenai strategi bertahan siswa miskin di sekolah-sekolah publik ketika mereka harus berhadapan dengan siswa kaya sebagai mayoritas. Bagaimana kemudian ketika sekolah didominasi kelas atas. Memang habitus siswa miskin berbeda, namun meski berbeda mereka tetap harus dapat bertahan sampai mereka menyelesaikan sekolah. ada banyak usaha yang mereka lakukan: menghemat pengeluaran (memilih tinggal di masjid daripada pulang), atau menahan keinginan untuk bersenang-senang, dan memilih menggunakan uangnya untuk makan sehari-hari, membeli laptop, dan lainnya.

Berikutnya, hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bahwa ada banyak cara yang dilakukan siswa miskin untuk menghadapi dominasi kelas atas di sekolah. temuan dalam penelitian ini misalnya: memilih diam, menolak ajakan, dan memilih ikut jika “memiliki modal” yang diperoleh dengan cara menabung.

Siswa miskin memang “dipaksa” menerima habitus siswa kaya. Akan tetapi, siswa miskin masih memiliki opsi untuk menangkalkan paksaan tersebut dengan cara yang mereka pilih sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, siswa kelas bawah merasa minder ketika harus berinteraksi dengan temannya yang berasal dari kelas atas. Rasa minder ini muncul karena mereka merasa berbeda, tidak memiliki uang sebagai “modal ekonomi”. Ketiadaan modal ekonomi ini menyebabkan mereka membatasi aktivitas bersama temannya, misalnya: nongkrong di café, nonton bioskop, dan lainnya.

Kedua, mereka juga menghadapi kesulitan ketika tidak memiliki perlengkapan sekolah yang lengkap seperti yang dimiliki temannya. Misalnya: beberapa informan tidak memiliki laptop sehingga menghadapi kendala ketika mengerjakan tugas sekolah yang harus memanfaatkan laptop.

Perbedaan kepemilikan ini menunjukkan bahwa sekolah sebenarnya belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi sosial setiap siswa. Sekelompok siswa (kelas bawah) tetap menghadapi kesulitan menyesuaikan keadaan sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, P. (1973). Cultural Reproduction and Social Reproduction, in: *Knowledge, Education, and Cultural Change*. London: Tavistock.
- Bowles, S. & Gintis, H. (1978). *Schooling in Capitalist America*. New York: Basic Books.
- Candland, C.D. (2000). Faith as social capital: Religion and community development in Southern Asia. *Policy Science*, 33, 355-374..
- Giddens, A. (2006). *Sociology, 5th Edition*. Cambridge: Polity Pres.
- Haralambos, M. & Holborn, M. (2007). *Sociology: Themes and Perspectives*. London: Harper Collins Publisher.
- Hardiman, F.B. (2010). *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius.
- Martono, N. (2012). *Kekerasan Simbolik di Sekolah: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Martono, N. (2014). *Dunia Lebih Indah Tanpa Sekolah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Martono, N. (2014). *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sadovnik. (2016). *Exploring Education: An Introduction to the Foundations of Education*. New York: Routledge.
- Wacquant, L. (2013). Symbolic power and group-making: On Pierre Bourdieu's reframing of class. *Journal of classical sociology*, 13, (2), 274-291.

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA PERDESAAN DI LEBAKMUNCANG, KABUPATEN BANDUNG JAWA BARAT

Sam'un Jaja Raharja,¹ Arianis Chan¹ dan Michael Marbun²

¹Departemen Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

²Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Bisnis Fakultas, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

E-mail: s.raharja2017@unpad.ac.id,

ABSTRAK. Pariwisata, termasuk pariwisata perdesaan merupakan salah satu potensi bisnis yang masih dapat ditingkatkan dan dikembangkan. Untuk mengembangkan pariwisata perdesaan perlu disusun suatu strategi pengembangan sehingga pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi poin-poin penting dari pengembangan pariwisata perdesaan Lebakmuncang. Lebakmuncang terletak di antara Gunung Geulis dan Gunung Guruyung, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pariwisata perdesaan Lebakmuncang dikategorikan sebagai agrowisata dengan orientasi pendidikan sehingga dapat disingkat sebagai agroedukasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan. Data-data yang dihasilkan dari penelitian dianalisis dengan mengacu enam elemen teori/konsep Stanković & Đukić tentang pariwisata: atraksi atau obyek, aksesibilitas, fasilitas, paket wisata, aktivitas dan layanan tambahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa enam elemen pariwisata tersebut, yaitu atraksi atau obyek, aksesibilitas, fasilitas, paket yang tersedia, kegiatan, dan layanan tambahan telah terpenuhi. Dengan mengacu kepada elemen-elemen penting pengembangan pariwisata perdesaan, dapat disimpulkan bahwa pariwisata perdesaan Lebakmuncang saat ini telah berkembang dengan baik, meskipun masih ada beberapa aspek yang harus dibenahi. Disarankan agar pariwisata perdesaan Lebakmuncang menyusun strategi pengembangan pariwisata perdesaan yang lebih baik.

Kata kunci: Pengembangan pariwisata perdesaan; strategi; Lebakmuncang

THE STRATEGY FOR DEVELOPING RURAL TOURISM IN LEBAK MUNCANG, BANDUNG REGENCY-WEST JAVA

ABSTRACT. Tourism, including rural tourism, is one of the business potentials that can still be improved and developed. Rural tourism development needs to be developed strategically and sustainably. Tourism, including rural tourism, is one of the business potentials that can still be improved and developed. To develop rural tourism, a development strategy needs to be developed so that tourism can develop sustainably. This study aims to identify important points of Lebakmuncang rural tourism development. Lebakmuncang is located between Gunung Geulis and Gunung Guruyung, Ciwidey District, Bandung Regency, West Java. Lebakmuncang rural tourism is categorized as agro-tourism with an educational orientation so that it can be abbreviated as agro-education. The method used in this research is qualitative method. Data was collected through in-depth interviews with informants. The data generated from the study were analyzed by referring to the six elements of Stanković & Đukić's theories/concepts of tourism: attractions or objects, accessibility, facilities, tour packages, activities and additional services. The research findings show that the six elements of tourism, namely attractions or objects, accessibility, facilities, available packages, activities, and additional services have been fulfilled. By referring to the important elements of rural tourism development, it can be concluded that Lebakmuncang rural tourism is now well developed, although there are still some aspects that must be addressed. It is recommended that Lebakmuncang rural tourism develop a better rural tourism development strategy.

Key words: Rural tourism development; strategy; Lebakmuncang

PENDAHULUAN

Pariwisata Indonesia adalah bisnis yang paling penting. Potensi pengembangan pariwisata Indonesia adalah desa wisata (Ramli et al., 2016:55). Desa wisata adalah segmen dari total industri wisata yang sangat penting di Indonesia, negara yang memiliki banyak wisata alam yang spektakuler, tanpa pantai, gunung tinggi, hutan hujan atau kewan hewan eksotis. Namun, lanskap budaya yang menarik dengan desa-desa kecil, mata air panas, sungai dan danau, dikombinasikan dengan keramahan tradisional, dapat menawarkan pengalaman menyenangkan bagi jenis wisatawan yang mencari relaksasi dan rekreasi dalam suasana yang tenang (Edwards, 1989:168; Rasid et al., 2014:169). Di satu sisi, pengembangan desa wisata dapat

memainkan peran penting dalam diversifikasi pasokan wisata Indonesia dan dalam menciptakan citra negara yang lebih kompleks dan beragam (Darsono, 2015:16; Ramli et al., 2016:55)). Di sisi lain, desa wisata bukan hanya tujuan akhir, tetapi sarana untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, untuk meningkatkan kelangsungan hidup daerah tertinggal, dan untuk meningkatkan standar hidup penduduk lokal (Stanković & Đukić, 2009:25; Wirawan, 2017:5). Salah satu pariwisata perdesaan yang saat ini berkembang adalah pariwisata perdesaan Lebakmuncang di Ciwidey, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pariwisata perdesaan ini menawarkan keindahan alam yang indah dan agrowisata sebagai daya tarik wisata dan menjadi salah satu komoditas utama. Pengembangan objek pariwisata wisata menekankan pada prinsip-prinsip konservasi,

pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pariwisata perdesaan Lebakmuncang didukung oleh kondisi alam pegunungan, iklim yang sejuk, dan masyarakat lokal yang masih memiliki budaya Sunda.

Jika pariwisata perdesaan wisata ingin memenuhi semua prinsip-prinsip sebagaimana dikemukakan di atas, maka harus dikembangkan dengan cara yang memastikan keberlanjutan jangka panjang dari sumber daya dan kemajuan pembangunan itu sendiri (Akrivos et al., 2014:384; Hwang et al., 2012:331). Tapi apa cara pembangunan berkelanjutan untuk diterapkan pada pariwisata perdesaan? Bagaimana keberlanjutan dapat dipantau dan dipromosikan di destinasi pariwisata perdesaan? (Akrivos et al., 2014 : 384; Fowler, Taylor Damonte, et al, 2012 : 280; Rodríguez Del Bosque, et al, 200 : 141).

Tulisan ini ditujukan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk; *Pertama* mendeskripsikan kondisi dan potensi pariwisata perdesaan Lebakmuncang. *Kedua* menganalisis strategi pengembangan pariwisata perdesaan Lebakmuncang berdasarkan elemen-elemen teoritis yang relevan.

Pariwisata perdesaan merupakan gabungan fenomena lama dan baru yang terjadi pada saat bersamaan. Ketertarikan orang pada pariwisata perdesaan sudah mulai tumbuh di abad ke-19. Pemandangan dan suasana perdesaan banyak digambarkan sebagai suasana yang indah, tenang dan nyaman, sebagaimana banyak diungkapkan oleh para penyair dan seniman. Perusahaan kereta api mengangkut semakin banyak turis ke pedesaan (Hwang et al., 2012; Kloeze, 1994; Stanković & Đukić, 2009: 28). Namun, pariwisata perdesaan saat ini berbeda. Jumlah wisatawan telah meningkat secara signifikan dan pariwisata telah berkembang di semua jenis, tidak terbatas pada bidang keindahan pemandangan saja.

Ada beberapa penelitian tentang pariwisata secara umum maupun pariwisata yang mengangkat lokasi atau obyek “desa”. *Pertama* penelitian Ahmad (2018: 207-214) yang mengangkat citra destinasi sebagai faktor yang dapat mendorong seseorang berkunjung kembali. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa semakin tinggi citra kognitif akan meningkatkan keinginan berkunjung kembali wisatawan. *Kedua*, penelitian Saefudin et al (2019: 1-10). Penelitian ini mengangkat tema desa wisata pendidikan yang didasarkan konsep 3E yaitu *environmental factors, engagement* dan *exploration*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konsep 3E dirumuskan dalam enam strategi: partisipasi, kekhasan, kapasitas kelembagaan, media promosi, peningkatan sumberdaya manusia dan pendampingan. *Ketiga*, penelitian Ariyani et al. (2015: 47-67) yang meneliti pengembangan desa wisata di Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dimensi-dimensi pendukung pengembangan pariwisata

desa Kuwu adalah fenomena alam, potensi sosial budaya dan akses jalan (transportasi). *Keempat* penelitian Atmoko (2014: 146-154) yang meneliti strategi Pengembangan Potensi Desa Brajan Kabupaten Sleman. Salah satu hasil penelitiannya adalah perlunya perencanaan partisipatif sebagai strategi pengembangan potensi wisata. *Kelima*, penelitian Nalayani (2016: 189-198) tentang Evaluasi dan Strategi Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Badung Bali. Penelitian menyajikan pengelompokan potensi (alam, budaya dan buatan) dan berdasarkan tingkat perkembangan (sudah, sedang berkembang dan belum berkembang). Berdasarkan pengelompokan tersebut dibuat rencana strategis pengembangan dalam bentuk pengelolaan yang lebih profesional untuk yang sudah berkembang, diversifikasi produk untuk yang sedang berkembang dan penganeekaragaman atraksi dan peningkatan sarana transportasi untuk yang belum berkembang.

Berdasarkan kajian literatur primer penelitian tentang desa dan wisata, maka topik khusus yang meneliti pariwisata perdesaan belum ada. Dengan demikian, penelitian dengan topik pariwisata perdesaan memiliki kebaruan dan belum pernah diteliti peneliti lain

Untuk memahami pariwisata perdesaan, paparan berikut akan menyajikan secara singkat. Secara selintas, tampak sederhana untuk mendefinisikan pariwisata perdesaan sebagai “pariwisata yang terjadi di pedesaan.” Definisi ini tidak termasuk kompleksitas kegiatan dan berbagai bentuk dan makna yang dikembangkan di berbagai negara (Edwards, 1989:167; Gannon, 1994:54; Jimenez & Te Kloeze, 2014:65; Lordkipanidze, et al, 2005:791. Menurut definisi yang lebih luas,” pariwisata perdesaan mencakup berbagai kegiatan, layanan dan fasilitas yang disediakan oleh petani dan masyarakat pedesaan untuk menarik wisatawan ke daerah mereka untuk menghasilkan pendapatan tambahan untuk bisnis mereka” (Kloeze, 1994). Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan pariwisata perdesaan tidak hanya mencakup wisata pertanian atau agrowisata (yang umumnya merupakan arti desa wisata bagi kebanyakan orang), tetapi juga termasuk liburan alam, tur di daerah pedesaan dan pariwisata perumahan, dan layanannya lainnya seperti acara, perayaan, rekreasi luar ruangan, produksi dan penjualan kerajinan tangan dan produk pertanian, dan lain lain. Hal ini sejalan dengan Pariwisata perdesaan biasanya memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi tujuan wisata (Lee & King, 2019 : 78; Purbasari & Manaf, 2018 : 103).

Menurut Lee & King (2019: 79) kriteria untuk pengembangan pariwisata harus selalu melibatkan masyarakat lokal dan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat setempat, tidak merusak nilai-nilai sosial budaya masyarakat, dan tidak melebihi sosial. kapasitas

sehingga dampak negatif dapat diminimalisir. Kriteria ini menekankan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Berkaitan dengan pengembangan pariwisata perdesaan dijelaskan lebih lanjut tentang elemen-elemen yang harus ada dalam konsep pariwisata. Stanković & Đukić (2009 : 28), mendeskripsikan beberapa komponen pariwisata; (1) objek wisata seperti wisata alam dan budaya, fasilitas wisata yang dibangun untuk keperluan khusus acara khusus dan memiliki nilai sejarah; (2) aksesibilitas, artinya seluruh sistem transportasi mencakup rute, terminal, dan kendaraan yang tersedia; (3) fasilitas seperti akomodasi dan fasilitas makan untuk minum, ritel dan layanan pariwisata lainnya; (4) paket yang tersedia seperti berbagai paket yang sebelumnya telah diatur oleh perantara; (5) kegiatan seperti semua kegiatan tersedia di tempat tujuan, dan apa yang dapat dilakukan wisatawan selama kunjungan mereka; (6) layanan tambahan seperti berbagai layanan tambahan yang digunakan oleh wisatawan seperti bank, kios, rumah sakit.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mencapai tujuan penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan. Menurut Menurut Hair, *et al* (2015: 205) dan Musianto (2002 : 129) untuk penelitian kualitatif, proses pengumpulan data termasuk proses masuk dan bergaul di lokasi penelitian serta pencatatan data. Dalam proses pencatatan data, tiga jenis teknik dilakukan yaitu observasi partisipatif dan non-partisipatif dan wawancara mendalam.

Melalui wawancara mendalam, informasi atau pendapat dikumpulkan dari informan seperti wisatawan, masyarakat lokal di Lebakmuncang, dan aparat pemerintah. Adapun dokumentasi/studi pustaka, dokumen dan informasi yang dikumpulkan dalam bentuk foto, laporan, jurnal, serta dokumen resmi lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata perdesaan Lebakmuncang adalah kawasan wisata yang terletak di antara Geulis dan Gunung Guruyung, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pariwisata perdesaan Lebakmuncang dikategorikan sebagai agrowisata dengan orientasi pendidikan sehingga dapat ditingkatkan agrowidangan. Obyek pariwisata Lebakmuncang dikelola langsung oleh Kelompok Pekerja Lebakmuncang (POKJA) dan dibantu oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung (Dispopar). Wisata perdesaan Lebakmuncang berada di ketinggian ±1200meter dengan topografi dataran tinggi dan curah hujan 60 mm per tahun, dan memiliki suhu rata-rata 18-20 derajat Celcius

Ada dua versi penamaan Lebakmuncang. Versi pertama, asal kata “Lebakmuncang” dari kata “Lebak” berarti di bawah dan “Muncang” berarti kemiri yang dulunya disebut pohon Pecan. Versi kedua, ketika Belanda berada di Indonesia pada tahun 1619, datang membawa kemiri untuk kemudian diolah dan dibawa di Batavia

Bentuk kegiatan pariwisata perdesaan di Lebakmuncang seperti memperkenalkan tatacara bertanam sayur-sayuran, memetik stroberi langsung dari pohon. Para wisatawan selain bepergian untuk menikmati keindahan alam, mereka juga mempunyai pengalaman tersendiri mengenai pendidikan pertanian yang diajarkan langsung oleh petani lokal.

Setelah melakukan wawancara mendalam dengan informan, peneliti akan menganalisis data menggunakan metode deskriptif yang akan dijelaskan secara mendalam dengan pengumpulan data yang diperoleh selama penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan informan keseluruhan dari setiap kualitas elemen desa wisata seperti atraksi, aksesibilitas, fasilitas, paket yang tersedia, kegiatan, dan layanan tambahan, yang ditawarkan oleh Desa Wisata Lebak Muncang, sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi dan meningkatkan kualitas elemen desa wisata di Lebakmuncang, Ciwidey, Jawa Barat.

1. Aspek Atraksi

Objek wisata adalah objek atau objek wisata yang dimiliki oleh suatu destinasi wisata. Atraksi menjadi komponen yang sangat vital untuk menarik wisatawan, oleh karena itu tujuan wisata harus unik atau khas daerah tersebut. Atraksi dibagi menjadi dua, yaitu tempat wisata alam dan tempat wisata budaya.

Menurut keterangan dari informan, tempat wisata alam mengambil bentuk kegiatan pendidikan di sektor pertanian. Hal ini didasarkan dengan informasi sebagai berikut:;

“Disini menawarkan wisata edukasi pertanian, lalu penyambutan wisata tari lengser/upacara adat, tracking. Disinipun terdapat wisata yang menawarkan wisatawan merasakan langsung bagaimana menjadi masyarakat disini, yaitu dengan menyediakan guest house tinggal dirumah warga disini dan mengikuti kegiatan masyarakat disini”

Sementara itu berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, kegiatan utama masyarakat Lebakmuncang adalah bertani seperti pertanian hortikultura, sayuran organik, kopi, dan lainnya. Potensi alam yang dimiliki oleh desa wisata Lebakmuncang sangat indah dan unik.

Objek wisata alam di desa wisata Lebakmuncang memiliki keanekaragaman tanaman dan fauna yang besar

jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Daya tarik suatu destinasi wisata alam juga dipengaruhi oleh kualitas lingkungan alam yang memberikan daya dukung yang optimal bagi kawasan tersebut. Daya dukung lingkungan alam adalah ukuran kemampuan lingkungan yang mendukung beberapa koleksi atau populasi jenis makhluk hidup tertentu seperti tumbuhan, hewan dan manusia termasuk wisatawan untuk dapat hidup di lingkungan. Wisatawan akan merasa nyaman di lingkungan pedesaan.



Gambar 1. Pemandangan bukit dan perkebunan di Desa Lebakmuncang

Temuan penelitian menunjukkan atraksi wisata budaya sebagai daya tarik yang ditawarkan oleh wisata Lebakmuncang berupa kegiatan seni dan kerajinan yang melibatkan wisatawan. Wisatawan bisa mengenal dan belajar secara langsung. Selain kegiatan budaya melalui seni dan kerajinan yang dapat ditonton atau dilakukan secara langsung. Hal ini seperti informasi yang disampaikan warga yang mengatakan *“ada penampilan seni tari untuk penyambutan wisatawan saat pertama kali datang. Desa Wisata Lebakmuncang Ciwidey ini memiliki kelengkapan budaya seni dan kerajinan sehingga menjadi tempat yang cocok untuk belajar dan mencoba secara langsung budaya kesenian dan kerajinan.”*

Selain atraksi budaya secara langsung dalam bentuk aktivitas sebagaimana dikemukakan di atas, obyek menarik lainnya adalah bentuk bangunan berupa rumah peninggalan Belanda yang dijadikan *homestay*.



Gambar 2. Tempat wisata dalam bentuk musik tradisional dan budaya tari

Budaya masyarakat sehari-hari juga menarik bagi wisatawan. Mereka dapat berinteraksi langsung dengan kehidupan dan keramahan masyarakat

Desa Lebakmuncang. Keramahan masyarakat Lebakmuncang menjadi sesuatu yang juga disorot oleh wisatawan, karena mereka menganggap keramahan masyarakat tidak dapat ditemukan di setiap daerah.

2. Aspek Aksesibilitas

Keberadaan tujuan wisata selain menjadi daya tarik yang dapat menarik wisatawan, juga membutuhkan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk menunjang kenyamanan wisatawan. Salah satu bentuk kenyamanan yang dibutuhkan oleh wisatawan adalah kemudahan aksesibilitas pariwisata. Aksesibilitas dikatakan sebagai salah satu tolok ukur kenyamanan dalam arti infrastruktur terhubung dengan mudah dan tidak sulit bagi seseorang untuk mencapai lokasi yang ingin mereka jangkau dari sistem transportasi yang ada.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Desa Wisata Lebakmuncang berada di daerah perbukitan dengan kondisi jalan menanjak, melewati sawah, jembatan di bawahnya adalah sungai yang jernih. Ini membuat kondisi akses jalan menuju Lebakmuncang tidak terlalu besar, terbatas, dan melewati kawasan pemukiman, namun telah diaspal dan disemen.



Gambar 3. Akses jalan menuju desa wisata di Lebakmuncang, Ciwidey

Keberadaan Desa Wisata Lebakmuncang, yang berada di daerah pegunungan dan jauh dari jalan raya utama, mempersulit wisatawan untuk menggunakan transportasi umum karena transportasi umum sangat jarang dan tidak mencapai lokasi wisata. Untuk dapat mencapai Desa Wisata Lebakmuncang, wisatawan hanya dapat menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa alat transportasi seperti bus mini. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian, sebagaimana dikemukakan; *“Perlu adanya tambahan transportasi umum untuk menjangkau lokasi. Meskipun selama ini wisatawan tidak masalah dengan tidak adanya transportasi umum karena dapat menggunakan alternatif lain seperti mobil pribadi maupun sewaan”*

3. Aspek Amenitas

Aspek persahabatan adalah aspek pendukung desa wisata dalam bentuk fasilitas yang ditawarkan kepada wisatawan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, data di lapangan memperlihatkan bahwa komponen amenitas

atau fasilitas publik yang dimiliki oleh Desa Wisata Lebakmuncang ditawarkan kepada wisatawan sebagai berikut,

- a. *Homestay* di rumah warga, wisatawan akan tinggal di rumah penduduk dan akan mengambil bagian dalam kegiatan sehari-hari penduduk Desa Lebakmuncang.
- b. Hidangan makanan dan minuman yang telah disediakan oleh warga Desa Wisata Lebakmuncang kepada wisatawan, biasanya disajikan di sawah atau perkebunan.
- c. Pemandu wisata yang akan memandu wisatawan dari awal hingga akhir tur. Pemandu wisata bertugas memberikan bantuan, informasi dan interpretasi warisan budaya, serta sejarah.
- d. Toko cinderamata bagi wisatawan. Desa Wisata Lebakmuncang memiliki toko cinderamata di dekat lapangan dan tempat di dekat jalan yang memudahkan orang untuk mengetahuinya.
- e. Ketersediaan kebersihan lingkungan dan air, yaitu ketersediaan fasilitas seperti tangki pengumpul sampah di tempat-tempat tertentu dan *reservoir* air yang bersumber dari mata air.

4. Aspek Paket yang Tersedia

Paket yang ditawarkan oleh Desa wisata Lebakmuncang adalah paket yang dibuat untuk kenyamanan wisatawan dalam bepergian di Lebakmuncang. Ada dua jenis paket wisata di desa Lebakmuncang seperti: (1) paket wisata yang ditawarkan oleh POKJA desa wisata di Lebakmuncang, (2) paket wisata yang disediakan oleh agen perjalanan wisata dan biro perjalanan.

Paket wisata adalah produk perjalanan yang ditawarkan oleh agen perjalanan atau agen transportasi yang bekerja sama dengan penyedia tujuan wisata atau wisatawan yang akan bepergian. Paket wisata ini berupa harga paket wisata termasuk biaya perjalanan, transportasi, akomodasi, makan, minum, panjang waktu pariwisata dan tempat yang akan dikunjungi, serta makanan dan minuman yang telah ditentukan.

5. Aspek Aktifitas

Kegiatan wisata terkait dengan atraksi yang dinikmati oleh wisatawan dan apa yang dapat dilakukan wisatawan selama kunjungan mereka. Kegiatan ini mencakup semua kegiatan yang dapat dilakukan oleh wisatawan di tempat-tempat wisata yang ditawarkan dan atau berupa kegiatan yang hanya sekedar menikmati pemandangan. Sebagian besar objek wisata yang ditawarkan secara langsung berkaitan dengan kegiatan yang dapat dilakukan oleh wisatawan. Hal ini sesuai dengan karakteristik pariwisata perdesaan Lebakmuncang, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian awal, sebagai wisata edukasi. Aktivitas pariwisata perdesaan Lebakmuncang adalah

kegiatan dan pembelajaran bersama. Hal ini diperkuat oleh seorang pengunjung/wisatawan yang mengatakan:

“Aktivitas eksplorasi kebudayaan ini memberikan pengalaman tersendiri bagi wisatawan dalam memainkan kesenian dan membuat kerajinan budaya khas Jawa Barat atau budaya Sunda. Kemudian adanya interaksi yang dapat membaurkan wisatawan dengan masyarakat Desa Wisata Lebakmuncang, ini yang sangat mahal karena tidak semua desa yang melakukannya.”

Sementara itu hasil pengamatan lapangan, ditemukan bahwa wisatawan juga diundang untuk memproses hasil perkebunan kopi dan tanaman hortikultura lainnya. Dari pertanyaan yang dilemparkan pada saat wawancara dengan wisatawan, mereka menjawab bahwa mereka diundang untuk mengeksplorasi tanaman seperti kopi, belajar mengolah hasil ubi dalam bentuk keripik singkong, membuat jamur renyah, dan melihat pengolahan jamu yang dapat digunakan sebagai obat dan juga sebagai olahan makanan sehat.

6. Aspek Pelayanan Tambahan

Layanan tambahan adalah layanan sekunder yang mendukung fasilitas dan merupakan fasilitas penting untuk keberhasilan operasi semua bisnis pariwisata. Pariwisata perdesaan Lebakmuncang memiliki setidaknya 20 pemandu wisata yang bertugas mengarahkan dan menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan pariwisata di daerah tersebut kepada setiap wisatawan yang datang.

Di lokasi wisata tersedia Pusat Informasi Pariwisata atau yang biasa dikenal sebagai pusat layanan informasi. Layanan ini berfungsi sebagai wadah informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan wisata seperti informasi atraksi, fasilitas, dan harga. Namun yang terjadi adalah pusat layanan informasi ini masih sering tidak dijaga, sehingga semua layanan informasi diarahkan langsung ke rumah pengelola Desa Wisata Lebakmuncang. Hal ini diperkuat oleh tanggapan salah seorang wisatawan yang menyatakan bahwa tidak mengetahui layanan Pusat Informasi, jadi kami wisatawan langsung mendapat informasi dari masyarakat atau pemilik *homestay*.” Selain itu juga memiliki layanan keamanan dan layanan kesehatan. Layanan kesehatan disediakan untuk perawatan pertama sebelum pergi ke tempat-tempat kesehatan seperti rumah sakit.

SIMPULAN

Hasil pembahasan atas data-data dengan mengacu enam elemen teoritis pariwisata perdesaan menunjukkan pariwisata perdesaan Lebakmuncang memenuhi enam elemen tersebut. Hasil deskripsi dan analisis menunjukkan,

pariwisata perdesaan Lebakmuncang telah berkembang dengan baik dengan tetap membutuhkan pembenahan pada dua aspek prioritas yaitu aksesibilitas dan layanan tambahan.

Penelitian ini menghasilkan temuan baru berupa strategi pengembangan pariwisata perdesaan wisata melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti perusahaan transportasi (untuk meningkatkan aksesibilitas), perusahaan jasa pariwisata untuk penyediaan informasi paket perjalanan, dan kolaborasi dengan pusat pelayanan kesehatan untuk aspek layanan tambahan. Dalam bahasa lain kolaborasi adalah partisipasi pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Atmoko (2014: 146-154) yang menyatakan bahwa strategi untuk mengembangkan potensi desa wisata Brajan dengan perencanaan partisipatif

Pembenahan beberapa aspek tersebut disusun dalam suatu strategi pengembangan pariwisata perdesaan secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Bandung. Secara akademis perlu penelitian lanjut tentang topik ini berupa penyusunan indikator pariwisata perdesaan berkelanjutan di Indonesia sebagai rujukan bagi pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ab. (2018). Pengaruh Citra Destinasi Terhadap Intensi Wisatawan Berkunjung Kembali Di Destinasi Sulawesi Selatan Tahun 2014. *Sosiohumaniora*, 20, (3), 207-214. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i3.14050>
- Akrivos, C., Reklitis, P., & Theodoroyiani, M. (2014). Tourism Entrepreneurship and the Adoption of Sustainable Resources. The Case of Evritania Prefecture. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 148 (378–382). <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.056>
- Ariyani, N.I., Argyo, D. & Zuber, A. (2015) Habitus Pengembangan Desa Kuwu: Studi Kasus Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. *Jurnal Analis Sosiologi*, 4, (2), 47–67.
- Amir, A.F., Ghapar, A.A., Jamal, S.A. & Ahmad, K.N. (2015). Sustainable Tourism Development: A Study on Community Resilience for Rural Tourism in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 168 (116-122)
- Cheng-Fei Lee & King, B. (2019) Determinants of attractiveness for a seniors-friendly destination: a hierarchical approach, *Current Issues in Tourism*, 22 (1), 71-90, DOI: 10.1080/13683500.2016.1250725
- Damonte, L.T., Collins, M.D. & Megehee, C.M. (2012). Segmenting tourists by direct tourism expenditures at new festivals. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*, 6, (3), 279-286.
- Darsono, R. (2013). Pengaruh Kualitas Daya Tarik Wisata terhadap Tingkat Kepuasan Wisatawan, Studi Kasus di Waduk Jatiluhur Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 5, (2), 14-22. DOI: <https://doi.org/10.22146/jnp.6361>
- del Bosque, I. R., Martín, H. S., Collado, J., & del Mar García de los Salmones, M. (2009). A framework for tourist expectations. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*, 3, (2), 139-147.
- Edwards, J. (1998). Tourism in rural areas. in Swarbroke J (ed), 1998. Sustainable Tourism Management. New York. CABI Publishing
- Fowler, D.C., Taylor Damonte, L., Collins, M.D. & Megehee, C.M. (2012). Segmenting tourists by direct tourism expenditures at new festivals. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*, 6, (3), 279-286, <https://doi.org/10.1108/17506181211250613>
- Gannon, A. (1994). Rural tourism as a factor in rural community economic development for economies in transition. *Journal of Sustainable Tourism*. 2, (1), 51-60
- Hair, J. F, Arthur H. M, Phillip S., and Mike P. (2007) *Research Methods for Business*. Chichester: John Wiley and Sons
- Hwang, D., Stewart, W.P. & Ko, D. wan. (2012). Community behavior and sustainable rural tourism development. *Journal of Travel Research*. 51, (3), 328-341
- Jimenez, C., & TeKloeze, J. (2014). Analyzing the Peace through Tourism Concept: The Challenge for Educators. *Sociology and Anthropology*. 2, (3), 63-70. <https://doi.org/10.13189/sa.2014.020301>
- Kamisan, P.A., and Xiao, H. (2013). Challenges and community development: A case study of Homestay in Malaysia. *Asian Social Science*. 9, (5) 1-17, <https://doi.org/10.5539/ass.v9n5p1>
- Kloeze, J. W. (1994). The Benefits of Rural Tourism, the Role of the State, and the Aspects of Training and Co-operation. In Formal Speech held at the Central and East-European Federation for the Promotion of the Green-Soft-Rural Tourism Conference «Rural Tourism Development in Bulgaria and in the Balkan Countries», Karlovo- 1994.

- Lee, C.F. & King, B. (2019). Determinants of attractiveness for a seniors-friendly destination: a hierarchical approach, *Current Issues in Tourism*, 22, (1), 71-90, DOI: 10.1080/13683500.2016.1250725
- Lordkipanidze, M., Brezet, H. & Backman, M. (2005). The entrepreneurship factor in sustainable tourism development. *Journal of Cleaner Production*. 13, (8), 787-798.
- Musianto, L.S. (2002). Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian. *Jurnal Management Dan Kewirausahaan*. 4, (2), 123-136. DOI: <https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.%20123-136>
- Nalayani, N.N.A.H (2016). Evaluasi dan Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Badung, Bali. *Jurnal JUMPA*. 2, (2), 189-198
- Purbasari, N. & Manaf, A (2017). Karakteristik Elemen Sistem Pariwisata Ekowisata Desa Wisata Ngalanggeran dan Wisata Desa Pada Desa Wisata Pentingsari. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. 13, (1), 100-113. <https://doi.org/10.14710/pwk.v13i1.15151>
- Ramli, M., Rinanto, Y., Ariyanto, J., Mafruhah, I. & Praseptiangga, D. (2016). Rural Tourism in Ponorogo East Java Indonesia. *Journal of Asian Vocational Education and Training*. 9, 67-81
- Saefudin, E., Budiono, A. & Halimah, M (2019) Pengembangan Desa Wisata Pendidikan di Desa Cibodas Kabupaten Bandung Barat. *Sosiohumaniora*., 21, (1), 1-10. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19016>
- Stanković, L. & Đukić, S. (2009). Challenges of strategic marketing of tourist destination under the crisis conditions. *Facta Universitatis, Series: Economics and Organization*. 6,(1), 23-31.
- Wirawan, K. (2017). Wisata Sepeda Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan Di Sanur. *Jurnal Jumpa*. 2, (2), 1-16

EXPLORING THE USE OF MODAL AUXILIARY VERBS IN CORPUS OF CONTEMPORARY OF AMERICAN ENGLISH (COCA)

Meita Lukitawati Sujatna¹, Eva Tuckyta Sari Sujatna² dan Kasno Pamungkas²

¹Department of English, Faculty of Language, Universitas Widyatama

²Department of Linguistics, Faculty of Cultural Sciences, Universitas Padjadjaran

E-mail: sujatna.meita@widyatama.ac.id

ABSTRACT. *This paper deals with the frequent use of modal auxiliary verbs in Corpus of Contemporary of American English (COCA). The modal auxiliary verbs mentioned as the data are can, could, will, would, may, might, shall, should, and must. Each data collected are taken from COCA in <https://corpus.byu.edu/coca/>. The research method is descriptive analysis; the present writers describe every data related to their function in each clause. The findings are related to the highest frequency and the number of elements follow the modal auxiliary verbs. From the 6,008,840 data, it is found the verb would (1,301,269 data) is the most frequently used, it is followed by the verb can (1,228,608 data), the verb will (1,118,515 data), the verb could (885,835 data), the verb may (494,144 data), the verb should (435,903 data), the verb might (300,258 data), the verb must (223,936 data), and the verb shall (20,372 data). This study has also revealed the number of elements following each of modal auxiliary verbs found in the COCA. It is reported that the verb would has seven different types, will has five different types, could and should has four different types, can, may, must, and shall have three different types, and might has two different types as the least number of elements following the verb. From the data analyzed, it is also reported that the modal auxiliary verb would is not only has the highest number in data (as the highest frequency) but also has various number of elements follow the verb.*

Keywords: modal auxiliary verb; corpus; Corpus of Contemporary American English; central modals

MENEROKA PENGGUNAAN VERBA BANTU MODAL DALAM CORPUS OF CONTEMPORARY OF AMERICAN ENGLISH (COCA)

ABSTRAK. Tulisan ini mengenai frekwensi penggunaan verba bantu modal pada *Corpus of Contemporary of American English (COCA)*. Verba bantu modal yang digunakan sebagai data adalah *can, could, will, would, may, might, shall, should, dan must*. Setiap data yang digunakan, dikumpulkan dari pada COCA dalam <https://corpus.byu.edu/coca/>. Metode penelitian yang digunakan di dalam riset ini adalah metode deskriptif; para peneliti menggambarkan setiap data yang berhubungan dengan fungsi pada setiap klausa. Hasil penelitian menunjukkan frekwensi tertinggi dan jumlah elemen yang mengikuti verba bantu modal. Dari 6.008.840 data, ditemukan verba *would* (1,301,269 data) sebagai verba bantu yang paling sering digunakan, diikuti oleh verba *can* (1,228,608 data), verba *will* (1,118,515 data), verba *could* (885,835 data), verba *may* (494,144 data), verba *should* (435,903 data), verba *might* (300,258 data), verba *must* (223,936 data), dan *shall* (20,372 data). Hasil penelitian ini juga menunjukkan jumlah elemen yang mengikuti masing masing verba bantu yang ditemukan di dalam COCA. Dilaporkan juga verba *would* memiliki tujuh tipe elemen yang berbeda, verba *will* memiliki lima tipe yang berbeda, verba *could* dan *should* memiliki empat tipe yang berbeda, verba *can, may, must, dan shall* memiliki tiga tipe yang berbeda, dan verba *might* memiliki dua tipe yang berbeda sebagai jumlah elemen yang paling sedikit yang mengikuti kesembilan verba tersebut. Berdasarkan analisis data, dilaporkan bahwa verba bantu *would* bukan hanya memiliki jumlah data yang paling banyak (frekwensi yang paling tinggi), tetapi juga memiliki variasi jumlah elemen yang mengikuti verba tersebut yang paling banyak.

Kata kunci: verba bantu modal; korpus; Corpus of Contemporary American English; central modals;

INTRODUCTION

Many researchers do their research on Linguistics in most languages including English. It is limited research on specific Linguistic topic such as verb, especially, in modal auxiliary verbs. It is reported that Verstraete (2001), Hsieh (2005), and Mukundan & Khojasteh (2011) did their research on modal auxiliary verbs. Verstraete's research discusses the system of Modal Auxiliary in English. He concerned the difference of subjective and objective modality on English modal auxiliaries. Hsieh did his research on Chinese language concerning modal verbs and modal adverbs based on Semantic source. Mukundan & Khojasteh's research is on Malaysian

English textbooks concerning modal auxiliary verbs. They found that the distinctions of English language textbooks and real language use. Besides the three previous research mentioned, Kennedy (2002) did his research related to British National Corpus (BNC) as the source of the classification of modal verbs. He did his research to identify the distribution of modal verbs in it. He offered nine different types of pattern consisting modal verbs and he argued that the nine different patterns found in British National Corpus related to 14 different types of modal verbs. Further he concluded that the modal verb *will* accounts for almost 23% of all modal tokens, followed by *would, can, and could*. It is found that the modal verb *can* frequently found in spoken texts.

From the previous research described, many researchers do their research related on modal auxiliary verbs, but it is only one research on the frequent use of modal auxiliary verbs in English, especially in British National Corpus (BNC). This paper is a preliminary research, and the aims of the research are to describe the frequency and the order of the rank of modal auxiliary verbs found in the COCA and to describe the elements following each modal auxiliary verbs found in the COCA.

Based on the two aims of the research mentioned, the present writers collected and identified the data taken from the COCA in <https://corpus.byu.edu/coca/>. The data taken are limited on modal auxiliary verbs; they are *can, could, will, would, may, might, shall, should, and must* later called central modals. In Quirk et al. (1992), followed by Biber et al. (1999) and also mentioned by Kennedy (2002) that the 'central' modals are considered to be *will, would, can, could, may, might, shall, should, and must* or sometimes called as auxiliary modals. In line with Quirk et al. (1992), Kennedy (2002) mentioned in the nine central modals is found a small group of 'marginal modals'. The marginal modals are *ought to, need to, used to* and *dare* which can act like modals and sometimes seem like main verbs. There is another group of expression known as 'semi-modals', which function like modals – (*had better, (have) got to, be about to, be going to, and be supposed to*). This present paper only focuses on the nine 'central modals': *will, would, can, could, may, might, shall, should, and must*, and excludes both 'marginal modals' and 'semi-modals'.

RESEARCH METHOD

The research method applied in this research is descriptive analysis. The corpus that is referred as the data are obtained from COCA. It is reported in <https://corpus.byu.edu/coca/> that this COCA corpus has about 560 million words of text and 20 million words which were collected from the year 1990-2017. The corpus are divided into spoken, popular magazines, newspaper, fiction, and academic texts.

The data obtained in this present paper are limited on the clauses containing modal auxiliary verbs and every data collected is described one by one. The each data has different function from one to another, since it has different structure of each.

The modal auxiliary verbs used in this research are nine modal auxiliary verbs which categorized into 'central modals' as keywords. The nine keywords as the modal auxiliary verbs (*will, would, can, could, may, might, shall, should, and must*) are inputted one by one to application of COCA in <https://corpus.byu.edu/coca/>.

Jones & Walter (2015) offered the definition of corpus, they argued that corpus are searchable collection of texts electronically stored while the text could be spoken

or written in various length, although generally, it would be longer than a single utterance or a single written clause. The corpus could be measured by the number of words or the number of tokens found in every utterance or written clause.

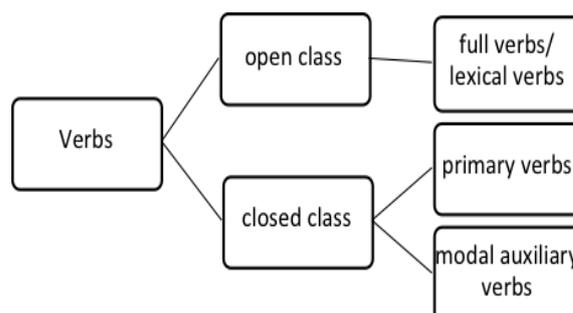
After collecting the data from COCA, the present writers identified 6,008,840 corpus one by one to classify the types of verbs and the element following the verb. Every keyword, as one of modal auxiliary verbs, is identified of each function in each clause. Then the collected corpus are presented as the data of the present research. After identifying, analyzing, and describing the data, the present writers counted and compared the frequent use of the modal auxiliary verbs in COCA. Then the present writers described each function of every keyword and describe the element following the verb.

RESULT AND DISCUSSION

1. English Modal Auxiliary Verb

Verb is the important parts in some languages including English. In the English clause, it always has a verb since the verb is the main part of clause. So that, every clause in English has, at least, one verb. The one verb in a clause is called main verb (sometimes called full verb or lexical verb) while the two verbs or more could be a main verb and the others are auxiliary verb(s). The auxiliary verb could be modals auxiliary verbs and primary verbs or sometimes called as semi auxiliary verbs as described by Quirk et al. (1992) that verbs is one of the class of words. Related to the function of each, the verbs could be classified into three different major categories. The three categories are named full verbs or is known as lexical verbs, the second one is primary verbs, and the last is modal auxiliary verbs. The full verbs or lexical verbs in English are such as *buy, make, and go* while the primary verbs are *be, have, and do* (the three verbs could be full verbs as *be* in *They are singers*, *have* in *They have a car*, and *do* in *They do it*). The modal auxiliary verbs as the focus of the present research are *will, would, shall, should, can, could, may, might, and must*.

To understand the definition deeper, in line with Sujatna (2012) who described the classification of the verbs above in the following Picture 1.



Picture 1. Verbs Classification

Kennedy (2002) argued that verbs constitute about 20 per cent are in written texts and about 8 per cent of all verb forms are typically constitute modal verbs. Modal auxiliary verbs have the important role in clauses, including English clauses, in line with Manaf (2007) in Mukundan & Khojasteh (2011). Mukundan & Khojasteh (2011) reported that Manaf (2007) argued that one of the important part of grammar and semantics of most languages including English is modal auxiliary verbs. He added that modal auxiliary verbs contribute to the semantics communication.

To understand more about modal auxiliary verbs, the present writers describe the characteristics of modal auxiliary verbs as argued by (Watkins, 1990); (1) go before not in negative sentence (e.g. He would not come.), (2) go before the subject in interrogative sentences (e.g. May I go home?), (3) go before forms of be and have in compound tenses (e.g. He may be coming or He may have come), and (4) do not have Infinitive or Gerund forms (we cannot say to *must* or **mighting*).

Mukundan & Khojasteh (2011) in line with Biber et al. (1999) explained that some particular modal verbs show dissimilarity for their combinations since the majority of modal verbs take place with marked voice or aspect. They also reported that the modal auxiliary verbs *can*, *could*, *should*, and *must* are commonly found in passive construction while *may*, *might*, *should*, and *must* are the most commonly used modal with perfect aspect construction.

Besides Biber et al. (1999) and Mukundan & Khojasteh (2011) who reported the usage of modal auxiliary verbs, the following Table 1 is the modal verb phrase structure mentioned by Kennedy (2002) in British National Corpus (BNC).

Modal auxiliary verbs have own function of each modal in every sentence, in this paper, English sentences

as Biber et al. (1999) mentioned that according to their meaning modals and semi-modals could be classified into three different major categories. The modal auxiliary verbs *can*, *could*, *may*, and *might* express permission/ possibility/ ability while the modal auxiliary verbs *must* and *should* express obligation/ necessity, and modal auxiliary verbs *will*, *would*, and *shall* express volition/ prediction.

2. Distribution of Modal Auxiliary Verbs in the COCA

Modal auxiliary verbs discussed in this present paper is ‘central’ modals; they are nine central modal verbs. The central modal verbs are *will*, *would*, *can*, *could*, *may*, *might*, *shall*, *should*, and *must*. From the collected data, totally the present writers found 6,008,840 data. The examples of the data are described in the following.

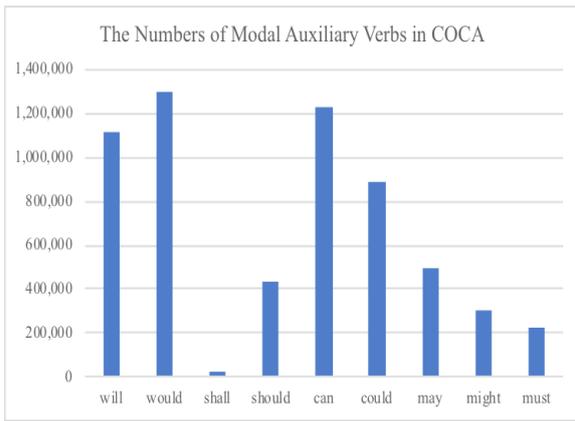
if they had not brought the harmful result that would otherwise subject them to heightened punishment # INTRODUCTION # In 2019, three
and completed crimes are already punished equally, our recommendation would therefore not have any effect on how such offenders are punished. # But
how such offenders are punished. # But our proposal would have far more dramatic implications with regard to the punishment of non-intentional offenses.
non-intentional offenses as abandoning a regime of differential punishment would almost always lead to a significant reduction in punishment for offenders of nonintentional crimes

Picture2. The usage of modal auxiliary modal in COCA

From the total number mentioned, the following is a description of the distribution of the nine modal auxiliary verbs in COCA as represented in the following Picture 3.

Table 1. The Usage of Modal Auxiliary Verbs

No	Types of Modal Auxiliary Verb	Modal in Clauses
1	Modal alone	Who will do? I <i>will</i> .
2	Modal + V-infinitive	Sam <i>can</i> sing. She <i>must</i> be angry. You <i>should have</i> gone. It <i>should</i> be done.
3	Modal + V-be + Past Participle (Modal with Passive)	
4	Modal + V-be + present participle (Modal with Progressive Aspect)	They <i>will</i> be arriving soon.
5	Modal + V-have + past participle (Modal with Perfect Aspect)	He <i>might</i> have gone. You <i>must</i> have been hungry.
6	Modal + V-be + being + past participle (or adjective) (Modal with perfect and Progressive Aspect)	It <i>might</i> be being sold tomorrow. He <i>could</i> be being disturbed.
7	Modal + have + been + past participle (Modal with Passive and Perfect Aspect)	It <i>should</i> have been written.
8	Modal + have + been + present participle (Modal with Perfect and Progressive Aspect)	He <i>must</i> have been lying.
9	Modal + have + been + being + past participle (or adjective) (Modal with Passive and Perfect and Progressive Aspect)	He <i>might</i> have been being blackmailed. They <i>must</i> have been being careless.



Picture 3. The Number of Modal Auxiliary Verbs in COCA

(i) Modal Auxiliary Verb: would

Verb *would* is also one of the modal auxiliary verbs and it is reported that it is the most frequent use in COCA. From the data collected, it is found 1,301,269 data from the total 6,008,860 data. The present writers figure out the elements follow the verb *would* as described in the following.

- would ... believe that an offender “ deserves more punishment for having killed a victim than he **would** if he had unsuccessfully tried to kill that victim “;
- would + V ..., but **would** attempt it again if the punishment for the two crimes was the same.
- would+ adverb + V #Applying our theory would significantly reduce the severity of many offenders’ punishments, helping to combat the problem
- would + not + V Significantly, this reduction in punishment **would** not come at the cost of any of the offender-facing justifications for punishment-
- would + not + Adv+ V ... in the metaphysical sense **would** not merely amount to widespread “ secondary victimizations. “ However, even if one
- would + PP ... the punishment of non-intentional crimes than it **would** for intentional offenses. This is because the difference in punishment between completed intentional offenses
- would + NP Why **would** Microsoft support any of this, right?

It is shown from the examples above that the modal auxiliary verb *would* has seven different types of elements following the verb *would*. Generally, the types of elements could be identified as the statement and negative forms. The statements, firstly, *would* only (there is ellipsis process); secondly, *would* + *V* (full verb or lexical verb); thirdly, *would* + *Adv* + *V* (full verb or lexical verb); fourthly, *would* + *PP* (Prepositional Phrase); and lastly, *would* +

NP (Noun Phrase) while the negative forms, firstly, *would* + *not* + *V* (full verb or lexical verb) and secondly, *would* + *not* + *Adv* + *V* (full verb or lexical verb).

(ii) Modal Auxiliary Verb: can

Verb *can* as one of the nine modal auxiliary verbs found in the data as the second frequent use in COCA. The number of the verb *can* usage is 1,228,608 data taken from the 6,008,860 data as the total number of data found in COCA. The following are the examples of the data containing modal auxiliary verb *can* and the elements follow the verb *can*.

- can + V ... differential punishment in many circumstances. # Therefore, to the extent that differential punishment **can** be justified at all, it can only be justified in reference to these....
- can + Adv + V #By punishing criminal offenders, the state **can** simultaneously accomplish two forms of deterrence.16 First, punishing an offender....
- can + not + V ... and her conduct-rather than on the occurrence of harm outside of the offender’s control-they **can** not provide adequate justification for the practice of differential punishment.

The examples of the data containing modal auxiliary verb *can* above shows that the verb *can* only has three different types of elements. The types generally divided into two types; the statement *can* + *V* (full verb or lexical verb) and *can* + *Adv* + *V* (full verb or lexical verb); and the other is negative *can* + *not* + *V* (full verb or lexical verb).

(iii) Modal Auxiliary Verb: will

Verb *will* is one of the nine of modal auxiliary verbs. This verb is the third frequent use in COCA. The number of the verb *will* usage is 1,118,515 data from 6,008,860 as the total number of data. The following are the examples of the data containing modal auxiliary verb *will* and the elements follow the verb *will*.

- will + V #However, we **will** show that victim-facing justifications for punishment are not available for every instance of criminal misconduct....
- will + not +V It assumes offenders are optimistic, which would imply that non-intentional offenders envision that they **will** not cause any harm, and would thus look primarily to the penalty for the....
- will + Adv + V Indeed, non-intentional offenders **will** generally be worse off by virtue of having caused an unintended harmful result- i.e.,....

will + not + Adv + V ... the Model Penal Code (“ MPC “), which stated: # Juries **will** not lightly find convictions that will lead to the severest types of sentences unless the....

will + PP ... at 1589 (“ It is statistically inevitable that those who have caused harm **will** on the average have created higher risks, in terms of circumstances of which they....

It is shown from the examples above that the modal auxiliary verb *will* has five different types of elements following the verb *will*. Generally, the types of elements could be identified as the statement and negative forms. The first category has three types: *will + V* (full verb or lexical verb); *will + Adv + V* (full verb or lexical verb); and *will + PP* (Prepositional Phrase) while the second category has two types: *will + not + V* (full verb or lexical verb) and *will + not + Adv + V* (full verb or lexical verb).

(iv) *Modal Auxiliary Verb: could*

Verb *could* is also one of the modal auxiliary verbs and the present writers found that it is the fourth modal verb frequent use in COCA. From the data collected, the number is 885,835 data from the total 6,008,860. The present writers figure out the elements follow the verb *could* as described in the following.

could ...more than ten times the number that a force of 2,500 Second World War fighter-bombers **could** “. # 25. Id. at 441 (describing the “ speed....

could + V ...punished at all, a man considering committing a crime, such as murder, **could** rest assured that either

could + Adv + V ...clearly articulating such views, crimes for which society is taken to be the victim **could** also include (1) particularly heinous offenses, such that the “ public at....

could + not + V That is, if Ray’s bullet had not killed Dr. King, he **could** not have been convicted of murder, no matter how evil his intentions; alternatively....

From the examples above, it is described that there are four types of the elements following the verb *could*. The category is divided into two general types: statement and negative form. The statement are, firstly, the verb *could* only since there is an ellipsis process; secondly, *could + V* (full verb or lexical verb); thirdly, *could + Adv + V* (full verb or lexical verb) while the negative form is *could + not + V* (full verb or lexical verb).

(v) *Modal Auxiliary Verb: may*

Verb *may* is one of the nine of modal auxiliary verbs. This verb is the fifth frequent use in COCA. The number

of the verb *may* usage is 494,144 data from 6,008,860 as the total number of data. The following are the examples of the data containing modal auxiliary verb *may* and the elements follow the verb.

may + V ... resentments caused by the infliction of important injuries have been aroused. Whatever abstract logic **may** suggest, a prudent legislator cannot disregard these facts of life....

may + adv + V ...am driving down the road at a reasonable speed while exercising reasonable diligence, I **may** nevertheless feel “ guilty “ if a child unexpectedly jumps in front of my car....

may + PP ...181 excusing the offender from punishment entirely. So while a victim’s unclean hands **may** in some cases diminish offender-facing justifications for punishment, a victim’s shared culpability for

The examples above describes that all the data found are in the statement forms. There are three different types of elements following the modal auxiliary verb *may*. They are: *may + V* (full verb or lexical verb); *may + Adv + V* (full verb or lexical verb); and *may + PP* (Prepositional Phrase).

(vi) *Modal Auxiliary Verb: should*

Verb *should* is also one of the modal auxiliary verbs and it is the sixth frequent use in COCA. From the data collected, the number of the verb *should* usage is 435,903 data from the total 6,008,860 data. The present writers figure out the elements follow the verb *should* as described in the following.

should + V ...have on their victims. These justifications are premised on the notion that the state **should** take the interests of victims into account when determining how severely....

should + not + V ...time three categories of offenses in regard to which all parties should agree differential punishment **should** not extend. # In those circumstances where differential....

should + Adv + V #In those circumstances where differential punishment is unwarranted, an offender **should** only be punished for culpable behavior within her control, and not....

should + NP # Why, then, in the words of H.L.A. Hart, “ **should** the accidental fact that... a harmful outcome has not occurred be a

From the examples above, it is described that there are four types of the elements following the verb *should*. The category is divided into two general types: statement and negative form. The statement are, firstly, *should + V* (full verb or lexical verb); secondly, *should + Adv + V* (full verb or lexical verb); thirdly, *should + NP* (Noun Phrase) while the negative form is *should + not + V* (full verb or lexical verb).

(vii) Modal Auxiliary Verb: might

Verb *might* is one of the nine of modal auxiliary verbs. This verb is the seventh frequent use in COCA. The number of the verb *might* usage is 300,258 data from 6,008,860 as the total number of data. The followings are the examples of the data containing modal auxiliary verb *might* and the elements follow the verb.

- might + Adv + V ...unauthorized entry into a building with intent to commit a felony therein,? one **might** reasonably think that the intended felony, and not the unlawful entry, is the....
- might + V ...severely as those convicted of vehicular homicide currently are.³⁴ Of course, such a regime **might** prove unsatisfactory to certain jury members-because they would think it too lenient on offenders that....

There are only two types of elements following the modal auxiliary verb *might*, as described in the examples above. The two types are both statements: firstly, *might + Adv + V* (full verb or lexical verb) and secondly *might + V* (full verb or lexical verb).

(viii) Modal Auxiliary Verb: must

Verb *must* is also one of the modal auxiliary verbs and it is the eighth frequent use in Corpus of COCA. From the data collected, the number of the verb *must* usage is 223,936 data from the total 6,008,860. The present writers figure out the elements follow the verb *must* as described in the following.

- must + V Moore, in order to avoid the “trap“ of moral skepticism, we **must** abandon the idea that causal determinism is incompatible with legitimate attributions of culpability and....
- must + Adv + V As Stephen Morse and others have pointed out, the system of criminal law **must** necessarily presuppose a “compatibilist”⁷¹ view with regard to free action.
- must + not + V ...condition punishment on whether harm befalls those victims. # The importance of this point **must** not be overlooked: while the reader may not accept as legitimate the....

From the examples above, it is described that there are three types of the elements following the verb. The category is divided into two general types: statement and negative form. The statements are, *must + V* (full verb or lexical verb) and *must + Adv + V* (full verb or lexical verb) while the negative form is *must + not + V* (full verb or lexical verb).

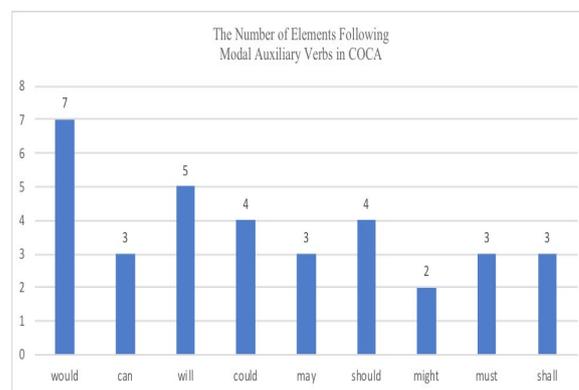
(ix) Modal Auxiliary Verb: shall

Verb *shall* is also one of the modal auxiliary verbs and the verb *shall* is the lowest frequent use in COCA. From the data collected, the number of the verb *shall* usage is 20,372 data from the total 6,008,860 data. The present writers figure out the elements follow the verb *shall* as described in the following.

- shall + V ... of imprisonment is to be imposed, in determining the length of the term, **shall** consider the factors set forth in section 3553(a) to the extent that they are applicable....
- shall + not + V Provided further, That the limitations contained in this section for the commencement of suits **shall** not bar any suit against the United States brought hereunder within one....
- shall + Adv + V ... force of history: “ In running over the pages of our history, we **shall** scarcely find a single great event of the last seven hundred years that has not....

There are three types of element following the modal auxiliary verb *shall*. It is divided into two general types: statement and negative forms. The statements are, *shall + V* (full verb or lexical verb) and *shall+ Adv + V* (full verb or lexical verb) while the negative form is *shall + not + V* (full verb or lexical verb).

The following is the Picture 4 as a picture of the types of element following the nine modal auxiliary verbs found in COCA.



Picture 4. The Numer of Elements Following Modal Auxiliary Verbs in COCA

Picture 4 describes that from the nine modal auxiliary verbs, the modal auxiliary verb *would* has the most various element following the verb *would* while the modal auxiliary verb *will* becomes the second, *could* and *should* becomes the third, *can*, *may*, *must*, and *shall* becomes the fourth, and the modal auxiliary verb *might* becomes the least types of modal auxiliary verb that has elements following the verb.

CONCLUSION

After collecting, identifying, and analyzing the data, the present writers, finally, could describe two different findings. The findings from the research uses of corpus-based have shown several valuable insights. The first conclusion is the frequency and the order of the rank of modal auxiliary verbs found in the COCA has been revealed. The data describes how many times modal auxiliary verbs are used in the COCA have been exposed to these modal auxiliary verbs in various degrees.

The second conclusion is this study has revealed the elements following each of modal auxiliary verbs found in the COCA. The modal auxiliary *would* has the most various element following the verb and *might* has the least. As an addition, from the data analyzed, it is also reported that the modal auxiliary verb *would* is not only has various number in frequency (as the highest frequency) but also has various number in the elements follow the verb (as the highest element types).

Based on the result of the research, those are the important information on the use of modal auxiliary verbs and their structure in real language since the data are collected from corpus.

REFERENCES

- Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S. & Finegan, E. (1999). *Longman Grammar of Spoken and Written English*. Harlow: Pearson Education Limited.
- Hsieh, C.L. (2005). Modal Verbs and Modal Adverbs in Chinese: An Investigation into Semantic Source. *University System of Taiwan Working Papers in Linguistics 1*, pp. 31-58.
- Jones, C. & Walter, D. (2015). *Corpus Linguistics for Grammar*. New York: Routledge .
- Kennedy, G. (2002). Variation in distribution of modal verbs in the British National Corpus. In R. Reppen, S. M. Fitzmaurice, & D. Biber, *Using Corpora to Explore Linguistic Variation*. Amsterdam: John Benjamin Publishing Company.
- Mukundan, J., & Khojasteh, L. (2011). Modal Auxiliary Verbs in Prescribed Malaysian English Textbooks. *English Language Teaching*, 4, (1), pp.79-89.
- Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., & Svartvik, J. (1992). *A Comprehensive Grammar of the English Language*. London: Longman .
- Sujatna, E. T. S. (2012). *Object Complements in English*. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
- Sujatna, E. T. S. (2013). *Understanding English Syntax*. Bandung: Unpad Press
- Verstraete, J.-C. (2001). Subjective and objective modality: Interpersonal and ideational functions in the English modal auxiliary system. *Journal of Pragmatic*, 33, (10), pp. 1505-1528.
- Watkins, M. (1990). *Practice Your Modal Verbs*. Singapore: Longman.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKSPOR DI INDONESIA

Uyat Suyatna

Pascasarjana Universitas Pasundan

E-mail: suyatnauyat5@gmail.com

ABSTRAK. Ekspor rendah dibandingkan dengan negara lain di dunia, disebabkan salah satunya oleh implementasi kebijakan yang belum sesuai dengan teori kebijakan publik. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu kasus, seperti kebijakan atau proses berdasarkan pandangan dari partisipan. Implementasi kebijakan ekspor dengan indikator organisasi, interpretasi, dan aplikasi kebijakan ditemukan hasil bahwa Indonesia kalah dengan sejumlah negara di Asia dalam hal volume ekspor. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2017), ekspor Indonesia pada tahun 2017 hanya mencapai 168,73 miliar. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa ekspor Indonesia belum bisa menyamai sejumlah negara di Asia, dan belum menuju produk ekspor yang berdaya saing.

Kata kunci: Implementasi; kebijakan; ekspor; organisasi; Indonesia.

EXPORT POLICY IMPLEMENTATION IN INDONESIAN

ABSTRACT. The Indonesian export still low, compared other countries in world, caused one of them by to policy implementation which is not appropriate with publik policy theory. And purpose of this study is to increase Indonesian export. This research used qualitative approach with case study method, which is conducted for explore and understand something case, policy as or process view base from partivican. Implementation of export policy with indicators of organization, interpretation, and application of policy found results of abuse of Indonesian lost to a number of countries in Asia, into export. Based on Badan Pusat Statistik 2017, Indonesian export value on 2017 reach only 168,73 billion. The results of this study, Indonesian export not able to match a number of countries in Asia, and not yet headed export product which is competitive.

Keywords: Implementation; policy; export; organization; Indonesian.

PENDAHULUAN

Kajian implementasi kebijakan dipahami bukan sebagai mekanisme parsial, akan tetapi merupakan pemahaman adanya korelasi yang bersifat kausalistik dan deterministik. Implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan dengan tujuan, sasaran, dan dampak hasil bagi masalah yang dihadapi.

Implementasi kebijakan didefinisikan “...encompasses those actions by public and private individual (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions” (Meter dan Horn, 1974:70). Itulah, kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari masyarakat, juga berhubungan dengan jaringan kerjasama dengan semua pihak terkait yang pada kondisi diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Implementasi kebijakan mencakup berbagai faktor, baik yang mencakup konten maupun konteks *implementation*, sebagai produk dari kebijakan, kemampuan organisasi, dukungan faktor lingkungan, dan keterlibatan semua *stakeholders*. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa banyak teori dalam implementasi kebijakan yang dapat menjelaskan implementasi kebijakan ekspor Indonesia, yang di dalamnya melibatkan berbagai

aktivitas dari implementasi kebijakan tersebut, sehingga akan terlihat masalah yang diteliti.

Model pemikiran ini, gambaran untuk kebijakan, tetapi dalam penerapannya suatu kebijakan terkadang tidak terdefiniskan secara baik. Dengan demikian, keberhasilan implementor mengimplementasikan suatu kebijakan, akan sangat tergantung pada kemampuannya dalam merealisasikan aktivitas *organization, interpretation, and application*.

1. **Organization (Organisasi)**

Organisasi menata kembali sumber daya, unit-unit, dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Organisasi yang dimaksudkan oleh Jones (1984: 20) adalah “menata kembali sumber daya dan metode-metode untuk menjadikan program berjalan”. dalam hal ini, untuk mencapai tujuan kebijakan, pemerintah perlu melakukan tindakan yang berupa penyediaan daya. Itu, input dalam organisasi yang implikasinya bersifat ekonomis, bertalian dengan biaya (*budget*) langsung yang dikeluarkan oleh organisasi dan merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *outputs*.

Dalam implementasi kebijakan, organisasi mencakup pola-pola wewenang formal dan informal, pembagian kerja di antara berbagai komponen, saluran-

saluran komunikasi di antara anggota organisasi. Dalam pembentukan organisasi memerlukan pertimbangan dan ketetapan dalam penentuan fungsi dan wewenang masing-masing unit, pengisian personil, pola hubungan antar unit dan lembaga terkait agar struktur yang ada mampu untuk merespon dan mengadaptasi dengan perkembangan lingkungan yang ada, serta memecahkan masalah, baik masalah yang berkaitan dengan organisasi maupun antar individu dalam organisasi.

2. Interpretation (Interpretasi)

Interpretasi (*interpretations*) merupakan kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Maksudnya, bahwa menafsirkan sesuatu yang dapat jelas dapat dilakukan. Dengan demikian, interpretasi merupakan proses menafsirkan program atau rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Pemerintah sebagai organisasi pelaksana perlu menginterpretasikan program agar benar-benar operasional serta siap untuk dilaksanakan. Interpretasi menentukan terhadap efektivitas implementasi terutama kepada pihak yang terlibat di dalamnya. Pemahaman, arahan, dan petunjuk yang lengkap serta jelas sangat diperlukan untuk mampu menginterpretasikan dengan tepat.

3. Application (Aplikasi)

Application merupakan penyediaan pelayanan secara rutin, bayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada (*rutine provision of service, payments, or other agree upon objectives or instrumens*). Maksudnya, merupakan pelaksanaan pekerjaan sesuai tujuan program dan perangkatnya. Implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan dengan aplikasi ini diharapkan muncul adanya respon masyarakat, apakah menerima atau menolak hasil kebijakan itu. Dunn (2000: 338) realitanya implementasi kebijakan tersebut tidak hanya mereka yang menjadi kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan, tetapi mungkin juga yang lainnya, yang disebut "*beneficiaries*" atau penerima manfaat.

Model-model ini, digunakan peneliti sebagai *guide* dalam penelitian implementasi kebijakan ekspor di Indonesia, dengan mempertimbangkan kepada aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam teori yang meliputi organisasi, interpretasi, dan aplikasi, dikaitkan dengan permasalahan yang ada dalam implementasi kebijakan ekspor di Indonesia. Di samping itu, peneliti akan memperoleh kejelasan mengenai masalah yang terjadi pada lokus penelitian, dengan melakukan analisis teori yang dijadikan *guidance*.

Ekspor adalah aktivitas transportasi barang-barang dari negara Indonesia ke negara lain. Aktivitas ini sering

digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai alasan utama untuk bersaing di tingkat negara-negara di dunia.

Aktivitas sering dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Strategi ekspor digunakan karena risiko lebih rendah, modal lebih kecil dan lebih mudah bila dibandingkan dengan strategi lainnya. Strategi lainnya yakni *franchise* dan akuisisi.

Aktivitas ekspor, diatur dalam dua peraturan teknis, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum ekspor dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 48 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Impor. Selanjutnya prosedur dan persyaratan ekspor dan impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) untuk masing-masing komoditas.

Pelaku usaha (*exporters*) diwajibkan untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur ekspor dan impor, termasuk mengenai peraturan yang selalu diperbaharui. Aturan yang wajib diperhatikan, terutama peraturan yang berhubungan dengan perdagangan internasional, kepabeanan, *shipping* maupun perbankan, yang semuanya ini saling berkaitan dan sering terjadi permasalahan di lapangan.

Umumnya, industri jasa menggunakan ekspor langsung, sedangkan industri manufaktur menggunakan keduanya, yakni ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Hal ini sudah lama dilakukan sejak Indonesia ekspor industri jasa dan ekspor industri manufaktur.

Indonesia kalah dengan negara-negara di Asia dalam hal volume ekspor. Badan Pusat Statistik (2017), Indonesia pada tahun 2017 hanya mencapai 168,73 miliar dollar Amerika Serikat. Meski naik 16,22 persen dibandingkan pada tahun 2016, namun tetap belum bisa menyamai sejumlah negara di Asia. Nilai ekspor Thailand per 2017 misalnya, menyentuh angka 236,69 miliar dollar Amerika Serikat. Sementara pada tahun yang sama, Malaysia berada pada angka 219,45 miliar dollar Amerika Serikat dan Vietnam mencapai nilai ekspor sebesar 213,77 miliar dollar Amerika Serikat.

Indonesia terhambat, dengan belum disepakatinya sejumlah kerjasama perdagangan dengan negara di dunia. Sementara, negara Asia lainnya, Vietnam misalnya telah menyepakati kerjasama tersebut. Seperti dengan Eropa dan Amerika, Vietnam sudah bagian dari TPP 11, sementara Indonesia dengan Eropa belum selesai. Kemudian, ekspor Indonesia juga kena bea masuk ke Eropa untuk *clothing, footwear* dan tekstil sebesar 22 persen.

Meski demikian, Kementerian Perindustrian akan terus mendorong peningkatan ekspor. Sejumlah langkah dilakukan, mulai dari perjanjian *free trade agreement* (FTA) dan regulasi internal. Selain itu, Indonesia juga

akan mengoptimalkan komoditas yang selama ini sudah diekspor, antara lain tekstil, *clothing*, dan *footwear*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu kasus, seperti kebijakan atau proses berdasarkan pandangan dari partisipan (Creswell, 2009: 58). Metode ini diharapkan dapat memandu peneliti mengikuti langkah-langkah sesuai dengan prosedur penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa informasi-informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bea dan Cukai, Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI), dan data-data mengenai kebijakan ekspor di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dibahas dengan teori yang di kemukakan oleh Jones (1984:166) bahwa dalam implementasi kebijakan publik (*public policy implementation*) dengan aktivitas, antara lain: *Organization, Interpretation, and Application*, yang ketiga-tiganya saling berkaitan dalam suatu sistem.

Organization: the establishment or rearrangement of resources, units, and methods for putting a policy into effect.

Organisasi merupakan penataan kembali pada semua sumber daya, unit-unit, dan metode untuk menempatkan dampak ke dalam suatu kebijakan. Aktivitas dalam organisasi kembali sumber daya (*resources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil (*output*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan (*goal*) dan sasaran kebijakan.

Organisasi dalam implementasi kebijakan ekspor Indonesia mencakup upaya penataan dan pembagian kerja di antara berbagai komponen, serta saluran komunikasi di antara anggota. Penataan organisasi ditujukan untuk memperbaiki struktur organisasi, mekanisme kerja, dan perbaikan perilaku, sehingga organisasi bersifat fleksibel dalam merespon perubahan eksternal dengan memanfaatkan kondisi internal, serta dapat meningkatkan kemampuan bersaingnya yang pada akhirnya dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik. Dengan hal tersebut, Indonesia berupaya melakukan penataan kembali kebijakan ekspornya.

Negara di dunia perlu melakukan aktivitas ekspor dan impor. Aktivitas ini didasari karakteristik daya, unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*). Sumber daya manusia yang jujur (*being honest with all people*) sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan ekspor.

Aktivitas ekspor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap negara. Tidak heran jika Indonesia selalu aktif terlibat dalam perdagangan negara-negara di dunia. Sinergitas antara Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan sangat dibutuhkan demi peningkatan ekspor Indonesia, juga perbaikan koordinasi antara Kementerian dan Lembaga Pemerintahan terkait hendaknya sinergi serta adanya perbaikan pengawasan di lapangan. Jika tidak, apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan ada artinya.

Kementerian Perdagangan menyelesaikan memangkas 45 jenis perizinan. Percepatan waktu menunjukkan kinerja yang lebih efektif, bagi Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Bea Cukai, dan Kementerian yang ada kaitannya dengan ekspor Indonesia.

Hasil penelitian yang merujuk pada teori kebijakan telah dilakukan dengan baik. Akan tetapi *implementors* kebijakan ekspor dan pelaku usaha (*exporters*) kurang memahami menginterpretasikan (*interpretation*) dan tidak mentaati kebijakan tersebut, sehingga ekspor Indonesia menurun, dari tahun 2014 sampai dengan Pebruari 2019. Di sini diperlukam jujur (*honest with all people*), disiplin keras (*being well disciplined*), dan kerja keras (*working harder than most people*).

Kementerian Perdagangan dengan teknologi digital, membuka *online* dengan menggunakan tanda tangan digital melalui situs *intrade* dalam kerangka *Indonesian National Single Window (INSW)*. Dengan *tagline* Cepat, Praktis, Tinggal Klik, layanan baru ini mempermudah para pelaku usaha (*exporters*) dalam pengurusan izin di Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, infrastruktur ekspor yang telah dibenahi dengan baik, maka di tahun 2019 harapan besar untuk peningkatan ekspor Indonesia yang lebih baik lagi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan kembali semua unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) untuk perkembangan ekspor Indonesia berdasarkan sektor Migas 9.07% dan Nonmigas 90.93%. Sektor industri terhadap ekspor sektor nonmigas 83.57% industri 16.43% lainnya. Dan sektor industri terhadap ekspor Indonesia 75.99% industri 24.01% lainnya. Untuk peningkatan ekspor migas dan nonmigas dibutuhkan yang memiliki kecakapan menjual ide-ide (*having an ability to sell my ideas*) kepada negara tujuan ekspor Indonesia.

Ekspor Indonesia pada saat ini, kebanyakan masih bersifat memenuhi pesanan atau *order*, atau pembeli datang. Sifatnya bukan menyerang atau *struggle* ke negara lain. Artinya, produk ekspor Indonesia belum menuju produk ekspor yang berdaya saing. Hal ini dipandang sebagai kelemahan ekspor Indonesia. Metode ekspor perlu dirubah menjadi menyerang (*struggle*) ke negara tujuan ekspor ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang.

Sepanjang penelitian ini dilakukan, ekspor Indonesia tidak lebih dari 1 persen *demand* dunia. Oleh karena itu perlu terobosan baru seperti bagaimana kita membuat kebijakan untuk mengembangkan dinamika pasarnya. Indonesia sendiri sebenarnya sudah punya daya pikat dan daya tarik untuk itu, tapi belum punya daya saing. Daya saing ekspor Indonesia kurang karena dari sisi *policy* saja beban regulasi yang ditanggung investor banyak. Padahal ada daya pikat dan daya tarik seperti letak geografis strategis dan populasi besar dengan keamanan yang stabil, ditunjang rating ekonomi yang baik. Indonesia sangat perlu memiliki daya saing dan beban regulasi yang ditanggung investor sangat perlu disesuaikan, jangan menjadi beban baginya. Investor banyak masuk ke Indonesia, ekspor akan dapat ditingkatkan.

Namun, ekspor Indonesia kalah oleh Vietnam, karena di Vietnam pelabuhannya sudah ada *direct call* dengan negara investor dan sudah menerapkan untuk jadi *supply chain*. Sementara pelabuhan Indonesia masih sekedar naik turun barang. Infrastruktur pelabuhan perlu diperbaiki, sesuai dengan kebutuhan naik turun barang yang akan diekspor. Untuk mendorong ekspor, sebenarnya sudah ada respon kebijakan seperti simplikasi kebijakan berupa diskon tarif hingga penurunan harga gas sejak 2015. Kepastian berbisnis juga dijamin dengan penerbitan paket kebijakan hingga paket 15. Juga dilakukan tata niaga impor, bagi barang-barang yang tidak ada di Indonesia.

Perlu adanya sejumlah terobosan agar ekspor Indonesia meningkat. Misalnya, dengan inovasi produk (*value creation*) ekspor sehingga nilainya meningkat. Hal ini dilakukan dengan menerapkan standar produk ekspor kelas dunia. Kemudian, meningkatkan industrialisasi produk unggulan komparatif Indonesia seperti produk turunan kayu manis, akar wangi dan sebagainya. Juga, mengoptimalkan pemanfaatan berbagai skema fasilitas perdagangan untuk meningkatkan produk global *value chain*. Untuk meningkatkan produk global diperlukan adanya semacam penyuluhan atau pelatihan di setiap provinsi yang ekspornya kurang yaitu di 31 provinsi di Indonesia.

Juga diperlukan untuk mengembangkan temuan baru produk ekspor, memperluas pasar melalui perluasan perjanjian kerja sama internasional dan penguatan kelembagaan seperti penguatan infrastruktur pelabuhan. Sebelumnya, Joko Widodo (2018) kurang senang dengan capaian ekspor Indonesia. Sebab meski jumlah sumber daya manusia Indonesia jauh lebih besar dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara, namun volume sekaligus nilai ekspor mereka jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. Kita ini negara besar, dengan sumber daya manusia besar. Masa ekspor Indonesia kalah dengan Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Ini sebenarnya malu terutama tertuju pada Menteri Perdagangan, Menteri

Perindustrian, dan akhirnya pada Menteri Koordinator Perekonomian.

Daerah harus berani mereformasi besar-besaran untuk mempermudah iklim usaha dan iklim investasi. zamanya sudah berubah, ujar Joko Widodo (Rabu, 28 Maret 2018) dalam pidatonya di acara Rapat Kerja Pemerintah bersama Bupati dan Walikota se-Indonesia di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat. Peneliti sangat setuju dengan pernyataan ini, karena akan dapat mendongkrak peningkatan ekspor Indonesia. Bangkitlah para gubernur dari 34 provinsi di Indonesia, agar ekspor di mata dunia internasional menjadi nomor satu demi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Yusuf Kalla (Selasa, 4 September 2018) mengatakan, bahwa ekspor Indonesia lebih ditingkatkan untuk menurunkan rupiah dari Rp. 14,800,- menjadi sebesar Rp. 12.750,-. Kemudian impor harus diturunkan, seperti barang Mobil Mewah, Tas-Tas, dan Parfum. Juga jangan lupa barang-barang yang ada di Indonesia, tidak harus diimpor dari negara lain. Hal ini perlu disikapi oleh pelaku usaha (*exporters*), Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian, yang di bawah pengawasan langsung Menteri Koordinator Perekonomian.

Selain itu, tahun 2017 dan 2018 terakhir ini, terhadap bahan baku dan barang modal impor untuk industri masih sangat tinggi. Dengan komposisi impor Indonesia didominasi oleh bahan baku sebesar 75 persen. Kemudian barang modal 16 persen dan 9 persen barang konsumsi. Ketergantungan ini tidak baik dan harus dihilangkan dengan cara mengembangkan sektor industri, baru hasil industri diekspor ke negara lain. Ini tugas utama Kementerian Perindustrian dan pelaku usaha (*exporters*).

Jika dikembangkan, ketergantungan bahan baku terhadap industri akan sangat tinggi. Sektor industri dari hulu hingga hilir harus segera dibenahi dan ditingkatkan. Kemudian, untuk meningkatkan produk global diperlukan adanya semacam penyuluhan atau pelatihan di setiap provinsi yang ekspornya kurang yaitu di 31 provinsi di Indonesia. Supaya hasil industri terhadap total ekspor hasil industri, menjadi meningkat keberadaannya.

Interpretation: the translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.

Interpretasi (*interpretation*) ke dalam perencanaan yang dapat dikerjakan dengan mudah dan dapat diterima. Setiap kebijakan yang akan diimplementasikan, perlu diinterpretasikan secara baik dan benar. Interpretasi suatu kebijakan bertujuan agar sasaran kebijakan yang mengatur ekspor Indonesia dapat dipahami serta didukung oleh semua implementor yang terlibat dalam implementasi kebijakan ekspor. Agar ekspor Indonesia menjadi tidak terkalahkan oleh negara lain, minimal di negara Asean.

Interpretasi berkaitan erat dengan implementor harus mereka kerjakan sesuai dengan yang seharusnya. Pentingnya pemahaman di dalam implementasi dan penerimaan dengan penuh kesadaran oleh masyarakat, terhadap kebijakan dan konteks implementasi (*context of implementation*), akan menentukan keberhasilan kebijakan itu (Grindle, 1980: 11).

Translation of language into acceptable and feasible plans and directives sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan ekspor di Indonesia. Dan "*translation*" (Barrett, 2004: 251) *attracted more attention, as policies seemed to lag behind policy expectations*. Karena itu, Pemerintah yang dalam hal ini, Kementerian Koordinator Perekonomian organisasi pelaksana perlu menginterpretasikan program agar benar-benar untuk dilaksanakan. Interpretasi menentukan terhadap efektivitas terutama kepada pihak yang terlibat di dalamnya. Pemahaman, arahan, dan petunjuk yang lengkap serta jelas sangat diperlukan untuk mampu menginterpretasikan dengan tepat dan jelas.

Interpretasi kebijakan (*policy interpretation*) sangat perlu merespon permintaan Joko Widodo (2018) agar ekspor Indonesia tidak kalah dari Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Oleh karena itu, membuat semua *stakeholders* saat ini berupaya mendorong ekspor Indonesia. Pemerintah sendiri berupaya mendorong pengembangan ekspor untuk industri padat karya seperti minuman, tembakau, barang dari kulit, industri mainan anak, tekstil dan pakaian jadi, industri alas kaki serta industri furniture. Sayangnya, ekspor Indonesia kebanyakan masih bersifat memenuhi pesanan atau order, atau pembeli datang. Sifatnya bukan menyerang atau *struggle* untuk masuk ke negara lain. Artinya, produk ekspor Indonesia belum menuju produk ekspor yang berdaya saing. Hal ini dipandang sebagai kelemahan ekspor Indonesia.

Hasil penelitian merujuk pada teori kebijakan. Ternyata, interpretasi kebijakan ekspor yang dilakukan *implementors*, tidak dengan yang lebih operasional dan mudah dipahami, serta tidak sesuai dengan harapan pelaku usaha (*exporters*) dan masyarakat, sehingga ekspor Indonesia melemah terus menerus.

Pelaku usaha (*exporters*) perlu mengetahui bahwa Indonesia punya beban Hutang Rp. 4.363 triliun terhitung per Agustus 2018. Untuk menyikapi hal ini yaitu dengan ekspor perlu ditingkatkan, impor dikurangi, dan Warga Negara Indonesia jangan menyimpan uang di Bank Negara lain. Di tahun 2016 Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa ada lebih Rp. 11 triliun uang milik pengusaha dan perusahaan Indonesia yang disimpan di luar negeri. Jumlah ini 5 kali besar dari Pendapatan Belanja Negara (PBN) Indonesia tahun 2016. Ini penyimpangan yang sangat besar, perlu ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Untuk mendongkrak nilai ekspor, Indonesia tak perlu ragu lagi menandatangani *Free Trade Agreement*

(*FTA*) dengan berbagai pihak, baik dengan satu negara maupun dengan organisasi bertaraf internasional. Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Vietnam dengan mudah memasuki pasar Eropa karena adanya *Free Trade Agreement (FTA)*. Selain memperbanyak FTA, Indonesia juga harus melakukan perbaikan di berbagai bidang. Inilah *resources, units, and methods* yang harus segera dibenahi agar ekspor Indonesia menjadi lebih baik.

Pengaruh elit politik dan persepsi aktor kebijakan dalam aktivitas sosial perlu membantu untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Elit politik dapat membantu peningkatan ekspor dengan cara meringan beban pelaku usaha (*exporters*) dalam perizinan. Sedangkan aktor kebijakan membantu peningkatan ekspor dalam interpretasi, perencanaan, pengarahan, dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam implemetasi kebijakan ekspor.

Pemerintah Indonesia dan Turki resmi memulai perundingan *Comprehensive Economics Partnership Agreement (CEPA)* setelah sempat tertunda sejak tahun lalu. Perundingan pertama antara kedua pihak membahas tentang implementasi ekspor supaya cepat dilakukan. Perundingan *Comprehensive Economics Partnership Agreement (CEPA)* akan dilakukan secara bertahap. Fokus awalnya adalah kesepakatan di bidang perdagangan barang yang ditargetkan selesai dan diakhir tahun 2018. Tujuannya untuk mempercepat implementasi ekspor sehingga pelaku usaha (*exporters*) Indonesia dapat segera memanfaatkan *Comprehensive Economics Partnership Agreement (CEPA)*.

Perjanjian dagang dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di Turki. Permasalahan utama yang dihadapi produk Indonesia di pasar Turki adalah tarif bea masuk yang lebih tinggi dan tambahan bea lainnya dibandingkan dengan negara pesaing Indonesia yang telah memiliki perjanjian dengan Turki. Perjanjian dagang dengan Turki perlu ditempuh dengan satu syarat dapat meningkatkan ekspor Indonesia.

The translation of language, berkaitan dengan aktor pelaksana (*implementors*) harus mereka kerjakan sesuai dengan yang seharusnya. Pentingnya pemahaman semua pihak terhadap kebijakan (*policy*) dan konteks implementasinya (*context of implementation*). Juga, dapat diketahui bagaimana aktor pelaksana (*implementors*) mampu memahami tujuan, tugas pokok dan fungsi, dukungan masyarakat, dan tindak lanjut perbaikan. *A few studies also singled out the decision making environments* (Van Horn, 1979a). Jadi, beberapa penelitian juga memilih lingkungan pengambilan keputusan. untuk menentukan keberhasilan implementasi.

Interpretasi kebijakan ekspor yang dilakukan *implementers*, perlu dengan yang sangat mudah dipahami, agar sasaran kebijakan dapat diterima oleh pelaku usaha (*exporters*) dan masyarakat. Apalagi ekspor Indonesia

dalam keadaan melemah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sekarang ini. Hal ini bisa terjadi karena menginterpretasikannya tidak dengan bahasa yang operasional, perencanaan yang tidak *feasible*, and *directives*, tidak mungkin kebijakan ekspor dapat diimplementasikan.

Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, dan lembaga terkait, sangat perlu menginterpretasikan dengan tepat dan benar untuk kebijakan ekspor Indonesia, *the process of "translating policy into action"* (Barrett 2004: 251) *attracted more attention, as policies seemed to lag behind policy expectations*. Sementara itu, pelabuhan Indonesia masih sekedat naik turun barang. Jadi Infrastruktur Pelabuhan perlu diperbaiki, sesuai dengan kebutuhan naik turun barang yang akan diekspor, supaya ekspor menjadi stabil dan bahkan In Shaa Allah dapat meningkatkan ekspor Indonesia.

Application: the routine provision of service, payments, or other agree upon objectives or instruments.

Aplikasi (*application*) merupakan ketetapan rutin dari pelayanan, bayaran, atau lainnya yang disesuaikan pada tujuan atau instrument. Jadi, "pelayanan, bayaran lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program". Oleh karena itu, aplikasi mengacu pada pekerjaan barang dan jasa. Dalam kebijakan publik aplikasi merupakan salah satu faktor, yang di dalamnya ada tujuan program dan perangkatnya.

Artinya, merupakan pelaksanaan pekerjaan yang dengan tujuan program dan perangkatnya. Implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan dengan ini diharapkan muncul adanya respon dari masyarakat, apakah menerima atau menolak hasil dari kebijakan itu. Dunn (1994: 338) dalam realitanya implementasi kebijakan tersebut tidak hanya mereka yang menjadi kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan, tetapi mungkin juga yang lainnya, yang disebut "*beneficiaries*" atau penerima manfaat.

Implementasi kebijakan ekspor yang dilakukan dengan aplikasi ini, maka dapat diketahui bagaimana respon dari pelaku usaha (*exporters*) terhadap kebijakan itu. Kekuatan ekonomi sebuah negara ditentukan oleh ekspor. Negara dengan nilai ekspor yang besar akan kuat menghadapi tekanan eksternal. Mata uangnya tak mudah digoyang dan didera depresiasi. Laju pertumbuhan ekonominya melaju lebih cepat, lapangan pekerjaan terbuka lebih luas, dan pengangguran dapat dikurangi.

Hasil penelitian yang merujuk pada teori kebijakan menunjukkan bahwa implementor dan pelaku usaha (*exporters*) benar-benar sedang mendongkrak meningkatkan ekspor Indonesia, dengan metode-metode (*methods*) yang digunakan.

Grindle (1990: 197) menyatakan, *...the implementor are key actors in the achieving program*

success, as this was defined in the introductory chapter. Begitu pentingnya implementor dalam implementasi kebijakan ekspor Indonesia. Implementor di sini: Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Aparat Bea-Cukai, Pelaku Usaha (*exporters*), dan GINSI. Harus dapat prestasi sukses dalam meningkatkan ekspor Indonesia.

Besarnya ekspor tak selamanya berbanding lurus dengan wilayah yang besar dan sumber daya alam yang besar. Contohnya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Indonesia. RRT adalah contoh negara besar yang sukses di bidang ekspor, sedangkan Indonesia adalah contoh sebaliknya. RRT saat ini salah satu kekuatan ekonomi dunia. Amerika Serikat dibuat kelimpungan oleh Negeri Tirai Bambu itu. Indonesia perlu mencontoh dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) agar sukses dalam bidang ekspor. Apa Indonesia bisa! Bisa asalkan Indonesia bersih dari pungli, korupsi, dan sejenisnya.

Masyarakat Eropa pun sudah tergantung pada produk RRT yang murah namun kualitasnya terus membaik. Pada tahun 2017, surplus perdagangan RRT USD 422 miliar, hasil ekspornya yang mencapai USD 2,260 triliun dan impor yang hanya USD 1,840 triliun. Nah ini kelihatan kan! Jadi ekspor harus lebih tinggi dibandingkan dengan impor. Jangan sampai ribut terus antara Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), bahkan juga dengan Petani Indonesia. Maka Menteri Koordinator Perekonomian perlu mengatasi masalah ini dengan bijak, agar ekspor Indonesia dapat ditingkatkan dari bulan ke bulan berikutnya.

Bagaimana Indonesia, negeri yang juga besar dan kaya sumber daya alamnya? Pada tahun 2017, ekspor Indonesia USD 168,7 miliar, sedangkan impor USD 156,9 miliar. Neraca perdagangan surplus USD 11,8 miliar. Ekspor Indonesia pernah mencapai USD 203,5 miliar tahun 2011 akibat lonjakan harga komoditas perkebunan dan pertambangan. Tapi, setelah itu, ekspor menurun seiring dengan turunnya harga komoditas perkebunan, pertambangan, dan pertanian. Hal ini perlu dipertahankan oleh Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan pelaku usaha (*exporters*), agar ekspor Indonesia lebih tinggi dibanding impor.

Ekspor Indonesia Januari 2018 turun 2,8 persen sementara impornya naik tipis 0,26 persen dibanding bulan sebelumnya. Pada Kamis 15 Pebruari 2018 ekspor Indonesia turun 2,81 persen menjadi USD 14,46 miliar dari Desember tahun lalu akibat turunnya ekspor nonmigas sebesar 1,45 persen. Namun, jika dibanding dengan Januari 2017, nilai ekspor masih tumbuh 7,86 persen (*year on year*). Mengapa demikian, perlu ada studi yang sangat mendalam tentang menurunnya ekspor Indonesia. Ekspor Indonesia Februari 2018 mengalami penurunan sebesar 10,03 persen dibandingkan Januari

2018. Nilai ekspor Indonesia pada Februari 2018 tercatat sebesar USD 12,53 miliar. Nilai ekspor hasil minyak dan gas turun pada Februari yaitu sebesar USD 1,09 miliar. Hal yang sama juga terjadi pada produk nonmigas. Nonmigas tercatat sebesar USD 11,44 miliar. Pergerakan ekspor dari bulan ke bulan yang 2018 *patternnya* Februari selalu menurun dibanding Januari. Itu karena jumlah hari dalam Februari selalu lebih pendek dibanding bulan sebelumnya (Suhariyanto, Jumat 15 Maret 2018).

Dalam dua bulan pertama 2018, ekspor Indonesia naik tipis dibanding periode yang sama tahun 2017. Tapi neraca perdagangan justru defisit USD 872 juta akibat besarnya impor. Dalam 6 tahun terakhir, perdagangan Indonesia tidak mengalami defisit, yakni pada tahun 2012-2014. Jika tidak ada peningkatan ekspor signifikan, tahun ini kemungkinan neraca perdagangan Indonesia juga defisit. Untuk hal ini, tugas dan fungsi, Menteri Keuangan, dan lembaga terkait sangat perlu menginterpretasikan dengan tepat dan benar untuk kebijakan ekspor Indonesia, Sementara itu, pelabuhan Indonesia masih sekedar naik turun barang. Jadi Infrastruktur Pelabuhan perlu diperbaiki, sesuai dengan kebutuhan naik turun barang yang akan diekspor, supaya ekspor menjadi stabil dan bahkan In Shaa Allah dapat meningkatkan ekspor Indonesia.

Neraca perdagangan yang negatif akan memperparah neraca transaksi berjalan. Karena untuk mengurangi neraca transaksi berjalan, harapan terbesar ada pada neraca perdagangan yang surplus. Neraca jasa Indonesia hingga saat ini masih selalu negatif. Setiap kali terjadi peningkatan neraca transaksi berjalan, nilai tukar rupiah melemah. Pukulan terhadap rupiah kian bertambah dahsyat jika neraca modal juga negatif akibat *capital outflow*. Mengatasi defisit neraca transaksi berjalan, tidak ada lain kecuali peningkatan ekspor dan impor harus ditekan lebih rendah, maka neraca perdagangan akan terjadi surplus.

Ekspor Indonesia sudah disalip Vietnam sejak tahun 2015. Ketika ekspor Indonesia USD 203,5 miliar tahun 2011, ekspor Vietnam baru USD 79,9 miliar. Namun, berkat keberanian mengimplementasikan *Free Trade Agreement (FTA)*, ekspor melesat. Pada tahun 2015, ekspor Vietnam USD 162 miliar, sedangkan Indonesia USD 150,4 miliar. Maka Indonesia perlu ada keberanian mengimplementasikan *Free Trade Agreement (FTA)*, agar ekspor Indonesia meningkat setiap bulannya. Ini bagaimana kinerja Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan pelaku usaha (*exporters*).

Dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, apalagi Singapura, Indonesia sudah lama tertinggal. Pada tahun 2017, ekspor Malaysia USD 217,5 miliar, Thailand USD 236,7 miliar, dan Singapura USD 372,9 miliar, sedangkan Indonesia hanya USD 168,7 miliar. Ketika nilai ekspor sulit didongkrak, neraca perdagangan Indonesia diterpa

impor yang besar. Salah satu negara asal produk impor terbesar adalah Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Jika pada tahun 2013, impor dari RRT baru sebesar USD 29,85 miliar, pada tahun 2017 sebesar USD 35,77 miliar. Defisit dengan RRT naik dari USD 7,25 miliar menjadi USD 12,72 miliar. Kenyataan ini jangan diabaikan, perlu menetapkan dan menata kembali sumberdaya (*resources*) ekspor Indonesia, dari penyediaan pelayanan secara rutin (*routine provision of service*) menurun. Bayaran atau lainnya tidak sesuai dengan tujuan (*payments, or other agree upon objectives*) dan sasaran kebijakan yang ada (*or instruments*).

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di level 5 persen selama empat tahun terakhir, dan kemungkinan masih terjadi tahun ini dan tahun 2019, antara lain, disebabkan oleh rendahnya ekspor. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih sangat tergantung pada ekspor komoditas atau produk primer, yakni produk perkebunan dan pertambangan yang belum diolah. Oleh karena itu, ekspor Indonesia harus ditingkatkan terutama sektor migas dan nonmigas.

Ke depan, Indonesia perlu memiliki strategi yang tepat dan komprehensif untuk mendongkrak nilai ekspor dan menekan impor agar surplus neraca perdagangan membesar. Pemerintah sudah menggulirkan *Making Indonesian 4,0* dengan memfokuskan pembangunan ekonomi pada lima sektor utama, yakni makanan dan minuman (*mamin*), tekstil dan produk tekstil (TPT), otomotif, kimia, dan elektronik. Hal ini sangat baik, pelaku usaha (*exporters*), Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan lembaga terkait, perlu mengimplimentasikannya dengan ikhlas bahwa ini tugas pokok dan fungsinya.

Kelima sektor ini harus memiliki nilai tambah tinggi. Meski volume kecil, nilai ekspor harus tinggi dan itu hanya mungkin jika produk yang diekspor bernilai tambah tinggi. Kita berharap, dengan *roadmap* (peta jalan) yang sudah jelas, pemodal berlomba-lomba membangun industri berorientasi ekspor. Kecuali untuk produk primer yang memang sulit untuk digantikan seperti batu bara dan gas, ekspor lainnya mesti produk yang sudah diolah. Pelaku usaha (*exporters*) sangat perlu mendorong pembangunan industri berorientasi ekspor, dengan cara memberikan modal atau insentif lainnya, demi peningkatan ekspor Indonesia. Untuk program ini harus menjadi tanggung jawab Menteri Perindustrian.

Nilai ekspor Indonesia naik 6,14 persen (*year on year*) dengan nilai USD 15,58 miliar. Nilai ekspor secara bulanan tumbuh 10,24 persen ekspor nonmigas tumbuh 11,77 persen sementara ekspor migas turun 3,81 persen. Ekspor produk pertanian meningkat hingga 20,01 persen. Didorong oleh ekspor sarang burung dan aromatik (Suhariyanto, Senin 16 April 2018). Untuk industri manufaktur secara

bulanan naik 9,17 persen. Didorong oleh ekspor besi-baja, tembaga, tekstil, dan pulp. Untuk pertambangan, secara bulanan naik 22,66 persen. Didorong oleh batubara 24 persen, dan biji tembaga yang naik 36 persen. Sementara ekspor untuk timah secara bulanan mengalami penurunan hingga 45 persen. Menetapkan dan menata kembali sumberdaya (*resources*) ekspor Indonesia menunjukkan dari penyediaan pelayanan secara rutin (*routine provision of service*) menurun. Bayaran atau lainnya tidak sesuai dengan tujuan (*payments, or other agree upon objectives*) dan sasaran kebijakan yang ada (*or instruments*). Hal ini bisa terjadi karena kelalaian Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan pelaku usaha (*exporters*).

Ekspor 2018 mencapai USD 14,24 miliar, naik dibanding Februari 2018. Demikian juga dibanding ekspor nonmigas Maret 2017 naik 8,16 persen. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Maret 2018 mencapai USD 44,27 miliar atau meningkat 8,78 persen dibanding periode yang sama tahun 2017, sedangkan ekspor nonmigas mencapai USD 40,21 miliar atau meningkat 9,53 persen. Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Maret 2018 terhadap Februari 2018 terjadi pada bahan bakar mineral sebesar USD 358,9 juta (18,58 persen), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada timah sebesar USD 92,5 juta (45,25 persen). Ini kinerja yang sangat baik antara pelaku usaha (*exporters*), Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian, yang di bawah pengawasan Menteri Koordinator Perekonomian.

Ekspor mencapai USD turun 7,19 persen dibanding ekspor Maret 2018 yakni sebesar USD 15,58 miliar. Jika dibandingkan 2017 juga. Ekspor nonmigas April 2018 mencapai USD 13,28 miliar, turun 6,8 persen dibanding Maret 2018 yakni sebesar USD 14,25 miliar. Juga ekspor nonmigas April 2017 naik 8,55 persen. Dilihat dari penyediaan pelayanan secara rutin (*routine provision of service*) turun. Bayaran atau lainnya tidak sesuai dengan tujuan (*payments, or other agree upon objectives*) dan sasaran kebijakan yang ada (*or instruments*). Hal ini bisa terjadi karena kelalaian Menteri Perdagangan dan pelaku usaha (*exporters*).

Ekspor Indonesia Januari-April 2018 mencapai 8,77 persen dibanding periode yang sama tahun 2017, sedangkan ekspor nonmigas mencapai USD 53,30 miliar atau meningkat 9,27 persen. Penurunan terbesar ekspor nonmigas April 2018 terhadap Maret 2018 terjadi pada bahan bakar mineral sebesar USD 416,4 juta (18,18 persen), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada kendaraan dan bagiannya sebesar USD 72,5 juta (12,5 persen). Penanganan ekspor Indonesia, perlu campur tangan Kepala Daerah (gubernur, bupati, dan walikota) untuk setiap provinsi.

Ekspor Januari–April 2018 berasal dari Jawa Barat dengan nilai USD 10,03 miliar (17,08 persen), diikuti Jawa

Timur 10,75 persen dan Kalimantan Timur USD 5,94 miliar (10,11 persen). Ini dari 34 provinsi di Indonesia, artinya yang 31 provinsi masih di bawah USD 5,94 miliar (10,11 persen), jadi ekspor Indonesia masih sangat rendah. Untuk masalah ini, Menteri Koordinator Perekonomian sangat perlu menyampaikan teguran atau sanksi kepada gubernur ke 31 provinsi yang ada di Indonesia.

Ekspor Januari–April 2018 naik 5,32 persen dibanding periode yang sama 2017, demikian juga ekspor hasil tambang dan lainnya naik 33,38 persen. Sementara, ekspor hasil pertanian turun 5,05 persen. Ekspor nonmigas Maret 2018 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu USD 1,82 miliar, disusul Amerika Serikat USD 1,43 miliar dan Jepang USD 1,39 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 34,95 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropah (28 negara) sebesar USD 1,39 miliar. Ekspor nonmigas hasil industri pengolahan, perlu dikembangkan dan ditingkatkan, jangan sampai terjadi penurunan, agar neraca perdagangan menjadi surplus.

Sebelumnya, neraca perdagangan April 2018 diperkirakan mengalami surplus sekitar USD 591 juta. Faktor utama pendorong surplus karena adanya peningkatan laju ekspor di bulan ke empat ini. Ekspor Indonesia Juni 2018 mencapai USD 13,00 atau menurun 19,80 dibanding ekspor Mei 2018. Sementara dibanding Juni 2017 meningkat 11,47 persen. Pendorong surplus, karena adanya peningkatan laju ekspor April 2018 ini, perlu dipertahankan keberadaannya. Supaya ekspor Indonesia meningkat artinya, ini menunjukkan bahwa penyediaan pelayanan secara rutin (*routine provision of service*) ada peningkatan dengan benar.

Juni 2018 mencapai USD 11 miliar, turun 22,57 dibanding Mei 2018. Sementara dibanding ekspor nonmigas Juni 2017, naik 8,61 persen. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Juni 2018 mencapai USD 88,02 miliar atau meningkat 10,03 persen dibanding periode yang sama tahun 2017, sedangkan ekspor nonmigas mencapai USD 79,38 miliar atau meningkat 9,66 persen. Ini menunjukkan bahwa penyediaan pelayanan secara rutin (*routine provision of service*) ada peningkatan. Bayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan (*payments, or other agree upon objectives*) dan sasaran kebijakan yang ada (*or instruments*). Hal ini bisa terjadi karena kinerja yang baik Menteri Perdagangan dan pelaku usaha (*exporters*).

Ekspor nonmigas Juni terhadap Mei terjadi pada kendaraan dan bagiannya sebesar USD 241,1 juta 36,21, sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada bahan bakar mineral sebesar USD 119,0 juta (6,11 persen). Penurunan terbesar ekspor nonmigas ini, perlu dicari penyebabnya kemungkinan dari bayaran atau lainnya tidak sesuai dengan tujuan (*payments, or other agree upon objectives*) dan sasaran kebijakan yang ada (*or instruments*). Hal ini

bisa terjadi karena kinerja yang kurang baik dari Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan pelaku usaha (*exporters*).

Juni 2018 naik 5,35 persen dibanding periode yang sama tahun 2017, demikian juga ekspor hasil tambang dan lainnya naik 36,16 persen, sementara ekspor hasil pertanian turun 7,68 persen. Ekspor nonmigas Juni 2018 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu USD 2,05 miliar, disusul Jepang USD 1,23 miliar dan Amerika Serikat USD 1,13 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 39,16 persen, sementara ekspor ke Uni Eropa (28 negara) sebesar USD 1,17 miliar. Ekspor hasil pertanian turun 7,68 persen, perlu ditindaklanjuti oleh Menteri Pertanian, atas teguran dari Menteri Koordinator Perekonomian.

Indonesia terbesar pada Januari-Juni 2018 dari Jawa Barat dengan nilai USD 14,63 miliar (16,62 persen), diikuti Jawa Timur USD 9,23 miliar (10,49 persen) dan Kalimantan Timur USD 9,10 miliar (10,34 persen). Ini dari 34 provinsi di Indonesia, artinya yang 31 provinsi masih di bawah USD 9,10 miliar (10,34 persen), jadi ekspor Indonesia masih sangat rendah. Untuk masalah ini, Menteri Koordinator Perekonomian sangat perlu menyampaikan teguran atau sanksi kepada gubernur ke 31 provinsi yang ada di Indonesia.

Indonesia tercatat USD 16,24 miliar. Angkanya naik 19,33 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan secara bulanan (*month to month*) ekspor ini juga naik 25,19 persen dibandingkan Juni 2018. Selain itu, naiknya harga komoditas, seperti batu bara, nikel dan tembaga juga menjadi penyumbang kenaikan nilai ekspor. Ini menunjukkan bahwa penyediaan pelayanan secara rutin (*routine provision of service*) ada peningkatan. Bayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan (*payments, or other agree upon objectives*) dan sasaran kebijakan yang ada (*or instruments*). Hal ini bisa terjadi karena kinerja yang baik Menteri Perdagangan dan pelaku usaha (*exporters*).

Impor nasional per Juli 2018. Hasilnya, neraca perdagangan kembali tekor alias defisit. Defisit tersebut dikarenakan nilai impor lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor yang terjadi sepanjang Juli 2018. Dalam catatan BPS, neraca perdagangan Indonesia pada bulan ke tujuh ini pun menjadi defisit yang paling tinggi kedua setelah defisit yang terjadi di Juli 2013. Peneliti kebingungan melihat kenyataan ini, apa yang dikerjakan oleh Menteri Perdagangan, dan pelaku usaha (*exporters*). Hal ini menunjukkan bahwa, *translation of language into acceptable and feasible plans and directives* sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan ekspor di Indonesia. Juga *resources, units, and methods* tidak digunakan secara maksimal.

Ekspor Indonesia 15,81 miliar dollar Amerika Serikat. Angka tersebut turun 2,9 persen jika dibandingkan pada bulan Juli 2018 dengan total nilai ekspor sebesar 16,29

miliar dollar Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa penyediaan pelayanan secara rutin (*routine provision of service*) tidak ada peningkatan. Bayaran atau lainnya tidak sesuai dengan tujuan (*payments, or other agree upon objectives*) dan sasaran kebijakan yang ada (*or instruments*). Hal ini bisa terjadi karena kinerja yang kurang baik Menteri Perdagangan dan pelaku usaha (*exporters*).

Ekspor nonmigas turun dari 14,86 miliar dollar Amerika Serikat di bulan Juli 2018 menjadi 14,43 miliar dollar Amerika Serikat di bulan Agustus 2018. Adapun untuk migas, persentase penurunan ekspor sebesar 3,27 persen dari 1,43 miliar dollar Amerika Serikat menjadi 1,38 miliar dollar Amerika Serikat. Ini dikarenakan penyediaan pelayanan secara rutin (*routine provision of service*) tidak ada peningkatan. Bayaran atau lainnya tidak sesuai dengan tujuan (*payments, or other agree upon objectives*) dan sasaran kebijakan yang ada (*or instruments*). Hal ini bisa terjadi karena kinerja yang kurang baik Menteri Perdagangan dan pelaku usaha (*exporters*) serta pengawasan yang lemah dari Menteri Koordinator Perekonomian.

Lebih lanjut, Suhariyanto (Senin, 17 September 2018) menyatakan, ekspor lantaran turunnya jumlah ekspor kopi, tanaman obat, aromatik, rempah-rempah, dan buah-buahan serta lada putih. Kontribusi tertinggi disumbang oleh industri pengolahan sebesar 74,47 persen. Sedangkan pertanian hanya sebesar 1,9 persen. Hal ini perlu ada peningkatan hasil pertanian dan ini tanggung jawab dari Menteri Pertanian.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kamis 15 November 2018 mencatat, ekspor Indonesia 15,80 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 5,87 dibanding ekspor 2017. Demikian juga dibanding Oktober 2017 meningkat 3,59 persen. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Oktober 2018 mencapai 150,88 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 8,84 persen dibanding periode yang sama tahun 2017, sedangkan ekspor nonmigas mencapai 136,65 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 8,73 persen. Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Oktober 2018 terhadap September 2018 terjadi pada perhiasan sebesar 294,1 juta dolar Amerika Serikat, terjadi pada bijih, kerak, dan abu logam sebesar 199,4 juta dolar Amerika Serikat atau 42,03 persen. Hal ini harus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan demi ekspor Indonesia, untuk periode Januari 2019.

Nilai ekspor Indonesia telah menunjukkan bahwa penyediaan pelayanan secara rutin (*routine provision of service*) ada peningkatan. Bayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan (*payments, or other agree upon objectives*) dan sasaran kebijakan yang ada (*or instruments*). Hal ini bisa terjadi karena kinerja yang baik Menteri Perdagangan dan pelaku usaha (*exporters*). Dan juga tidak terlepas control dari Menteri Koordinator Perekonomian.

Badan Pusat Statistik (BPS) Selasa 18 Desember 2018, merilis Tiongkok masih menjadi pasar utama Indonesia periode Januari-November 2018 mencapai 22,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp.329 triliun, naik 18,52 persen dari yang sama tahun sebelumnya. Juga, ekspor nonmigas Indonesia periode Januari-November 2018 mencapai 150,15 miliar dolar Amerika Serikat dari yang sama tahun sebelumnya hanya sebesar 139,72 miliar dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, Tiongkok menjadi pasar utama, harus menjadi tolok ukur peningkatan ekspor Indonesia periode Januari-Desember 2018.

Kadaan ini menunjukkan ketidakcermatan penyediaan pelayanan secara rutin (*routine provision of service*) tidak ada peningkatan. Bayaran atau lainnya tidak sesuai dengan tujuan (*payments, or other agree upon objectives*) dan sasaran kebijakan yang ada (*or instruments*). Hal ini bisa terjadi karena kinerja yang kurang baik Menteri Perdagangan dan pelaku usaha (*exporters*). Dan juga tidak terlepas control dari Menteri Koordinator Perekonomian.

Badan Pusat Statistik, ekspor tumbuh 6,65 persen sebesar USD 180,06 miliar. Pada 2017, ekspor hanya tercatat USD 168,83 miliar. Ini ada peningkatan, menunjukkan bahwa implementor kebijakan berusaha membenahi ekspor Indonesia menjadi menyerang (*straggle*) masuk pada negara lain, termasuk kepada negara maju seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Akan tetapi penyediaan pelayanan secara rutin (*routine provision of service*) ada peningkatan. Bayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan (*payments, or other agree upon objectives*) dan sasaran kebijakan yang ada (*or instruments*). Hal ini bisa terjadi karena kinerja yang baik Menteri Perdagangan dan pelaku usaha (*exporters*). Dan juga tidak terlepas control dari Menteri Koordinator Perekonomian.

Peningkatan nilai ekspor Indonesia 6,65 persen pada Januari-Desember 2018 masih jauh kalau dibandingkan dengan tahun 1997-1998 mencapai 60 persen. Hal ini menunjukkan kinerja Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Koordinator Perekonomian masih kekurangan unit-unit (*units*), dan metode-metode untuk memaksimalkan ekspor Indonesia.

Ekspor Januari-Desember 2018 naik 3,86 persen dibanding periode yang sama tahun 2017, demikian juga ekspor hasil tambang dan lainnya naik 20,47 persen, sementara ekspor hasil pertanian turun 6,40 persen. Indonesia harus surplus hasil pertanian, supaya dapat meningkatkan ekspor hasil pertanian yang maksimal. Oleh karena itu, penyediaan pelayanan secara rutin (*routine provision of service*) ada peningkatan. Bayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan (*payments, or other agree upon objectives*) dan sasaran kebijakan yang ada (*or instruments*). Hal ini bisa terjadi karena kinerja yang baik Menteri Perdagangan dan pelaku ekspor (*exporters*).

Dan juga tidak terlepas control dari Menteri Koordinator Perekonomian

Badan Pusat Statistik (BPS) Sabtu 15 Desember 2018, ekspor Januari-November 2018 mencapai USD 165,81 miliar lebih rendah dari impor USD 173,32 miliar yang menyebabkan neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit Terdalam Sepanjang Sejarah. Jadi perdagangan Indonesia 2018 defisit USD atau setara Rp 109 triliun dengan kurs Rp 14.500/dolar Amerika Serikat. Sementara neraca perdagangan Desember 2018 defisit USD 1,1 miliar. Dengan demikian, defisit perdagangan sepanjang 2018 tercatat sebesar USD 8,57 miliar. Hal ini mencerminkan kinerja perekonomian yang kurang baik karena produktivitas rendah dan ketergantungan terhadap impor tinggi. Produktivitas rendah, artinya industri harus dibenahi dari hulu sampai ke hilir, agar Indonesia kaya hasil industri, otomatis ekspor akan melonjak tinggi.

Rasio ekspor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode tersebut, yakni awal tahun 1990-an, sekitar 35 persen. Pertumbuhan ekspor sempat melonjak tinggi pada tahun 1997 dan 1998 mencapai 60 persen terhadap PDB, didorong oleh krisis ekonomi serta pelemahan nilai tukar mencapai RP 15.000 dari yang sebelumnya Rp 2.300. Krisis ekonomi perlu dicermati dan pelemahan nilai tukar rupiah karena akan merusak semua tatan kehidupan masyarakat. Akhirnya kembali lagi kepada ekspor yang harus melonjak tinggi dan impor perlu ditekan serendah-rendahnya.

Sekarang, ekspor justru lebih rendah, yaitu sekitar 20 persen terhadap PDB. Di satu sisi, ketika ada kenaikan ekspor, impor pun akan tumbuh lebih tinggi lagi karena porsi sebagian besar impor merupakan baku dan barang modal yang digunakan untuk produksi oleh industri dalam negeri.

Selama ini kenapa mineral diekspor mentah-mentah, padahal ada investasi besar. Peneliti perhatikan, dia bisa mengolah (bahan baku) sehingga *value added* lebih besar, ekspor lebih tinggi. Untuk bahan baku, Indonesia memang masih lemah. Ekspor merupakan satu dari sekian pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan pemerintah. Meski begitu, secara keseluruhan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik, namun tetap harus waspada, terutama dari faktor eksternal.

Bayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada (*rutine provision of service, payments, or other agree upon objectives or instrumens*). Jadi, merupakan pelaksanaan pekerjaan yang dengan tujuan program dan perangkatnya. Implementasi kebijakan yang dilakukan dengan *resources* aplikasi ini diharapkan muncul adanya respon dari masyarakat, apakah menerima atau menolak hasil dari kebijakan itu.

Model implementasi kebijakan ini mudah dituliskan dalam kertas, akan tetapi sulit untuk diterapkan oleh

implementor pada ekspor Indonesia ke negara lain di dunia. Itulah kenyataan menunjukkan bahwa ekspor Indonesia kebanyakan masih bersifat memenuhi pesanan atau *order*, atau pembeli datang. Sifatnya bukan menyerang atau *struggle* atau masuk ke negara lain. Artinya, produk ekspor Indonesia belum menuju produk ekspor yang berdaya saing. Hal ini dipandang sebagai kelemahan ekspor Indonesia. Kelemahan ekspor Indonesia, harus ditingkatkan dengan metode produk ekspor yang berdaya saing tinggi, yang sifatnya *struggle* untuk masuk ke negara lain. Hal yang tepat dinyatakan, Yusuf Kalla (Selasa, 6 November 2018) mengatakan, ekspor dan impor sangat perlu ditingkatkan. Indonesia melakukan ekspor dan diimbangi dengan impor. Akan tetapi untuk bahan pangan tidak perlu impor karena Indonesia masih surplus (Prabowo Subianto). Di samping itu, pernyataan Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia pada triwulan ke tiga November 2018 sebesar 5,17 persen. Pernyataan ini sangat perlu diperhatikan oleh Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Pelaku Usaha (*exporters*). Juga, yang sangat khusus kepada Menteri Koordinator Perekonomian.

Realita menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak semudah apa yang diucapkan, akan tetapi sulit untuk didefinisikan secara baik. Karena itu, keberhasilan implementor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, akan sangat tergantung pada kompetensinya dalam merealisasikan aktivitas organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Jadi, implementasi kebijakan ekspor sangat perlu diteliti, karena masalah nasional yang harus menjadi perhatian warga negara Indonesia.

SIMPULAN

Organisasi (*organization*) yang nyata menunjukkan bahwa pemerintah memangkas peraturan, menyederhanakan perizinan, mengurangi persyaratan yang tidak relevan, serta menghilangkan pemeriksaan yang tidak perlu, deregulasi ini juga berlanjut bahkan sampai ketinggian daerah, perizinan yang menghambat kelancaran ekspor di Indonesia mencakup 2.278 jenis barang.

Hasil interpretasi (*interpretation*) berdasarkan pada teori yang digunakan dalam implementasi kebijakan ekspor Indonesia. Sayangnya, ekspor Indonesia kebanyakan

masih bersifat memenuhi pesanan atau *order*, atau pembeli datang. Sifatnya bukan menyerang atau *struggle* atau masuk ke negara lain. Artinya, produk ekspor Indonesia belum menuju produk ekspor yang berdaya saing. Hal ini dipandang sebagai kelemahan ekspor Indonesia.

Aplikasi (*application*) dari hasil ekspor, dapat menunjang ekonomi Indonesia pada triwulan dua tahun 2018. Oleh karena itu, syarat untuk menjadi negara industri produk yang berkualitas adalah tersedianya tenaga kerja berproduktivitas tinggi. Mereka harus memiliki pendidikan dan keterampilan yang baik, dan mampu bekerja dengan etos kerja yang baik. Berbagai kemudahan investasi perlu diberikan. Tanpa investasi, tak ada kegiatan produksi. Tanpa produksi, tidak ada ekspor.

DAFTAR PUSTAKA

- Barret, S. (2004). *Implementation Studies. Time fore a Revival? Personal Reflections on 20 Year of Implementation Studies. Public Administration*, 82, 249-262.
- Creswell, J.W. (2009) *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage Publications.
- Dunn, W.N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction Public Policy*. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs.
- Grindle, M.S. (1990). *Politics and Policy Implementation In The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Jones, C.O. (1984). *An Introduction to the Study of Public Policy*, Belmont, California: Wadsworth, Inc.
- Harder, M.A & Palumbo, Dennis J. (1981). *Implementing Public Policy*, New York: Lexington Book.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Ekspor dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Impor.
- Van Horn, & C.E. (1979b). *Policy Implementation In the Federal System: National Goals and Local Implementors*. Lexington, Mass.: D. C. Heath.

PENGEMBANGAN *MINING TOURISM* DI KAWASAN PERTAMBANGAN SAWAHLUNTO

Rudy Anarta¹, Santun R P Sitorus², Widiatmaka³, Siti Nurisjah⁴, dan Hartrisari Hardjomidjojo⁵

¹ Prodi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor

² Prodi Perencanaan Wilayah Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

³ Prodi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor,

⁴ Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Institut Pertanian Bogor

⁵ Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor

E-mail: rudyanarta@gmail.com

ABSTRAK. Industri pertambangan di Indonesia menghasilkan pendapatan bagi negara, tapi di balik itu ada juga isu lingkungan, ekonomi dan sosial yang terjadi selama dan setelah kegiatan penambangan berlangsung. Masalah lingkungan yang terjadi secara umum adalah kerusakan lahan karena tidak dilakukan reklamasi dengan benar pasca tambang ditutup. Selain sumber daya pertambangan dieksploitasi bahan tambang, juga memiliki potensi wisata. Di Indonesia, pemerintah daerah yang telah menjadikan daerah pertambangan menjadi kota wisata adalah Sawahlunto. Daerah pertambangan batubara Sawahlunto dan sekitarnya memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah Mine Tour, namun belum dikelola dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik dan merumuskan model pengembangan pariwisata pertambangan di wilayah pertambangan batubara. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab tujuan-tujuan ini adalah deskripsi analisis, melalui pendekatan sistem dinamik. Hasil penelitian untuk merumuskan model pengembangan pariwisata tambang di kawasan pertambangan batubara, yaitu dengan manajemen pengunjung, partisipasi masyarakat dan ekonomi. Pengembangan dilakukan dengan dua skenario yang ada dan skenario alternatif.

Kata kunci: Tambang Batubara; Sistem Dinamik; Wisata Tambang; Sawahlunto

DEVELOPMENT OF MINING TOURISM IN THE MINING SAWAHLUNTO

ABSTRACT. Mining industry in Indonesia generate income for the country, but behind it there is also the issue of environmental, economic and social that occurred during and after mining activities take place. Environmental problems that occur in general is the destruction of the land because it is not done correctly the post-mining reclamation is closed. Besides mining resources are exploited mine material also has potential for tourism. In Indonesia, local governments have been pursuing mining district into a tourist town is Sawahlunto. Sawahlunto coal mining area and surrounding areas have the potential to be developed as an area of Mine Tour; but has not been managed properly. The purpose of this research is to identification characteristic and preferention tourism, and formulate a model of mining tourism development in the coal mining areas. The method of analysis used to answer these objectives is description and the dynamic system approach. The results of research to formulate mine tourism development model in the coal mining region, namely with visitor management, community participation and economic. Development is done by two scenarios existing and alternative scenarios.

Keywords: Coal Mining; Systems Dynamic; Mining Tourism; Sawahlunto

PENDAHULUAN

Kepulauan Indonesia secara geologi terbentuk oleh hasil tumbukan tiga lempeng tektonik besar yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik dan Lempeng Hindia Australia dan satu Lempeng Tektonik Kecil yaitu Lempeng Filipina (Katili 1975). Indonesia mengalami pentahapan tektonik yang kompleks sehingga selain menjadi daerah yang labil dan rawan bencana alam juga menghasilkan rangkaian bentang alam yang indah dengan komposisi batuan yang beragam dan menghasilkan kekayaan bahan mineral dan energi yang tak ternilai.

Potensi kekayaan keanekaragaman bentang alam dan sumberdaya mineral dan energi inilah yang harus dimanfaatkan dan dikelola untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah. Dunia pertambangan di Indonesia menghasilkan pemasukan devisa bagi negara, namun dibalik itu juga ada persoalan lingkungan, ekonomi dan sosial yang terjadi selama dan setelah kegiatan pertambangan berlangsung.

Sumber daya daerah yang kaya sering dipandang hanya sebagai tempat untuk ekstraksi sumber daya yang berharga ekonomis dan setelah jumlah sumberdaya menurun, setelah fase akhir ekstraksi selanjutnya daerah tersebut di abaikan atau ditinggalkan (Markey et.al 2008). Masyarakat pertambangan menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Banyak daerah dengan geografis kecil dan terpencil, dengan masalah pencemaran lingkungan dan stigma negatif pertambangan yang melekat (Mc Allister, 2008). Meskipun penutupan tambang adalah proses alami yang merupakan hasil dari proses penambangan, namun proses ini jarang di antisipasi dari awal (Mayer dan Greenberg, 2001).

Persoalan lingkungan yang terjadi umumnya adalah rusaknya lahan karena tidak dilakukan reklamasi dengan benar pasca pertambangan tersebut tutup. Millikarjun dan Pathak (2005) mengidentifikasi sejumlah tekanan yang umum terjadi pada saat penutupan tambang dan keterkaitan antara faktor-faktor yang mempengaruhinya,

yang menggambarkan efek luas penutupan tambang pada masyarakat.

Dari segi ekonomi dan sosial tutupnya pertambangan menyebabkan hilangnya pendapatan daerah dan masyarakat yang bergantung dari usaha pertambangan tersebut, sehingga menimbulkan dampak sosial berupa meningkatnya angka pengangguran. Dampaknya adalah hilangnya dan pengurangan tenaga kerja dan upah, yang mengarah ke migrasi keluar dan standar hidup berkurang (Millikarjun dan Pathak, 2005). Penurunan dari pendapatan masyarakat yang bergantung dengan pertambangan telah sering dianggap sebagai langkah yang relatif tak terelakkan dalam model siklus hidup masyarakat sumber daya, terutama yang mengekstraksi sumber daya mineral tak terbarukan. Penurunan ini sering diperparah oleh respon yang lambat untuk mengurangi efek negatif seperti kehilangan pekerjaan, krisis ekonomi dan laju migrasi keluar (Mayer & Greenberg, 2001).

Perlunya upaya diversifikasi yang proaktif sementara operasi pertambangan masih beroperasi dan sebelum peristiwa besar memicu penurunan ekonomi (Mayer dan Greenberg, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi dapat dilakukan melalui mencari industri sumber daya lainnya, pindah ke sektor layanan pemerintah, meningkatkan kehadiran industri dan bergerak fokus pada pariwisata (Halseth dan Sullivan, 2002). Sumberdaya pertambangan selain dieksploitasi bahan tambangnya juga memiliki potensi pariwisata. Selain itu lanskap pertambangan merupakan hal yang menarik, lanskap pertambangan adalah penghubung yang sangat baik dari hubungan masa lalu dan masa sekarang dan wilayah pertambangan yang menjaga jejak warisannya baik buatan dan alami juga dapat menceritakan kisah tentang memori industri. (Tilley, 1999).

Di Indonesia, pemerintah daerah yang telah mengupayakan daerahnya menjadi kota wisata tambang adalah Kota Sawahlunto. Pada tahun 2001 Pemerintah Kota Sawahlunto membuat Visi dan Misi Kota Sawahlunto yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 yaitu menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya pada tahun 2020. Penjabaran dari visi tersebut adalah dalam bentuk misi yang salah satunya adalah situs wisata tambang yang potensial digali, ditumbuhkan, dikembangkan, dilestarikan dan dikemas sebagai paket wisata.

Perwujudan misi ini dikembangkan ke dalam sebuah agenda mewujudkan kota wisata tambang yang berbudaya (Agenda 2002-2020) dengan menetapkan empat faktor kebijakan yang perlu dikembangkan (Pemda Sawahlunto, 2001), yaitu: Kapasitas institusi, kerjasama antardaerah, peningkatan kualitas kota dan peningkatan kualitas produk dan kawasan wisata.

Secara potensi, kawasan pertambangan batubara Sawahlunto sangat sesuai jika dikembangkan sebagai

kawasan Wisata Tambang. Namun kondisi yang terjadi adalah bahwa pengembangan wisata kawasan pertambangan batubara Sawahlunto belum mendapatkan hasil yang optimal, karena jumlah kunjungan wisatawan pada hari-hari biasa sedikit dan hanya ramai pada tempat-tempat wisata masal seperti waterboom dan taman satwa.

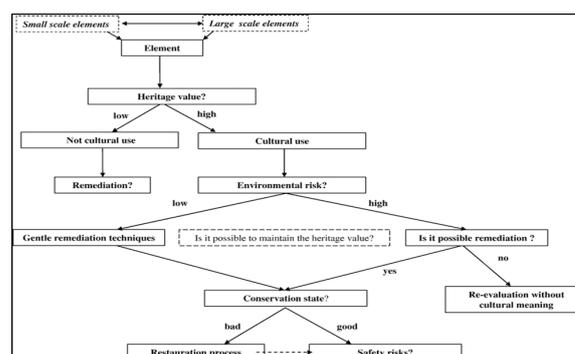
Kawasan pertambangan batubara Sawahlunto dan sekitarnya memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai kawasan Wisata Tambang namun belum dikelola dengan baik. Potensi kawasan pertambangan batubara secara ekonomi dapat dikembangkan secara produktif, jika dilakukan identifikasi geofisik, identifikasi sosial budaya dan identifikasi sosial ekonomi serta memanfaatkan media komunikasi secara optimal sebagai promosi kepariwisataan. Media komunikasi yang tidak dimanfaatkan secara optimal membuat promosi kepariwisataan menjadi tidak optimal (Mingkid, 2015).

Dicanangkan Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang telah berkembang selama hampir dua belas tahun serta cukup tingginya aktivitas wisata di Sawahlunto maka perlu dilakukan suatu kajian studi terhadap pengelolaan Wisata tambang di kawasan pertambangan batubara tersebut. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat optimal dari pengelolaan kegiatan Wisata tambang, dengan harapan kelestarian sumber daya alam geologi pertambangan di kawasan ini dapat terus mendukung aktivitas wisata tambang dan bisa memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan pertambangan tersebut.

Penelitian ini akan mengidentifikasi dan mendeskripsikan obyek wisata eksisting dan yang berpotensi dikembangkan di kawasan pertambangan dan bekas tambang di Sawahlunto serta merumuskan model ekonomi pengembangan wisata tambang (*mining tourism*) pada kawasan pertambangan batubara dan mengetahui dampak ekonomi yaitu peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar pertambangan sawahlunto dan pengelola wisata tambang.

METODE

1. Analisis Obyek Situs Pertambangan.



Gambar 1. Tahapan Analisis Situs Pertambangan (Conesa et al., 2007)

2. Pendekatan Sistem

Metode pendekatan sistem dilakukan dengan tujuan menghasilkan sebuah model operasional dari pengembangan wisata tambang. Beberapa tahapan analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam pendekatan sistem di antaranya adalah; analisis kebutuhan, formulasi masalah, identifikasi sistem, pembuatan model, verifikasi dan validasi model serta penerapan model. Serta mendeskripsikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan tambang bari skenario model yang ditawarkan.

Penelitian dilakukan di kawasan pertambangan dan bekas pertambangan batubara di Kota Sawahlunto serta situs-situs geologi yang ada di Kota Sawahlunto. Letak Kota Sawahlunto berada antara 0,34^o-0,46^o Lintang Selatan dan 100,4^o-100,50^o Bujur Timur, tercatat memiliki luas 27.344,7 ha atau sekitar 0,65 persen dari luas Propinsi Sumatera Barat. Sebagian besar lahan merupakan tanah ulayat yaitu sebesar 63,95 persen dan 32,99 persen milik Kuasa Pertambangan PT. Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin (PT. BA UPO). Penelitian dilakukan sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan April 2015.

Heritage adalah warisan kita dari masa lalu, apa yang kita punya hari ini dan apa yang kita berikan kepada generasi mendatang (UNESCO 2008). Definisi warisan secara umum sudah menyiratkan betapa kompleks konsep heritage tourism yang didefinisikan dengan cara lain oleh National Trust for Historic Preservation (NTHP) sebagai perjalanan untuk mengalami tempat dan kegiatan yang otentik mewakili cerita dan orang-orang dari masa lalu dan kini dan termasuk sumber daya tak tergantikan sejarah, budaya dan alam .

Pariwisata warisan industri merupakan kategori yang mendasari yang terletak dalam bidang yang lebih luas dari wisata *heritage*, seperti Edwards dan Coit (1996) menunjukkan definisi mereka tentang wisata warisan industri: kegiatan wisata di situs buatan manusia, bangunan dan lanskap yang berasal dari proses industri dari periode sebelumnya. Pertambangan khususnya, dan potensi untuk pengembangan pariwisata telah menjadi beberapa studi akademis tentang konsep wisata pertambangan atau pariwisata warisan industri (Edwards dan Coit, 1996; Rudd dan Davis, 1998; Jonsen dan Verbeke, 1999; Wanhill, 2000; Pretes, 2002; Cole, 2004; Ballesteros dan Ramirez, 2007; Conlin dan Jolliffe 2010).

UU No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata; wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata; pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Yoeti (1990) mendefinisikan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain dengan suatu maksud tertentu dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pengertian lain dikemukakan oleh Gunn (1994), yaitu suatu pergerakan manusia yang bersifat sementara dari tempat tinggal atau pekerjaannya menuju satu tujuan tertentu, dimana aktifitas dilakukan di tempat tersebut serta disediakan fasilitas untuk mengakomodasi keinginan mereka.

Newsome dan Dowling (2010) menyebutkan lokasi tambang tua, seperti bekas tambang batubara, tambang emas, tambang timah dan lain-lain dapat memberikan pilihan pariwisata yang berkaitan dengan isu seputar pentingnya geologi dalam kehidupan manusia dan juga untuk aspek kerusakan lingkungan.

Wisata obyek pertambangan sangat cocok di daerah pertambangan, dimana setelah tambang ditutup, membuat semua pihak mencari alternatif ekonomi selain pertambangan. Pada saat yang sama, ancaman perubahan masyarakat lokal mulai dari kehilangan pekerjaan, *emigrasi* dan melemahnya ekonomi. Dalam konteks ini, perkembangan wisata tambang dipahami tidak hanya sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi dan alternatif sosial untuk menggantikan industri pertambangan yang sudah tidak aktif, tetapi juga sebagai solusi dari pertambangan yang berkelanjutan.

Conlin dan Jolliffe (2010), menyatakan bahwa di seluruh dunia, pertambangan telah menjadi dasar bagi pengembangan masyarakat industri. Sekarang ada yang baru dalam dunia pertambangan yaitu konversi pertambangan untuk keperluan industri dengan nilai pertambangan dari aspek peninggalan tambang dan aspek pariwisata. Sebagai nilai-nilai sosial dan masyarakat yang terkait dengan perubahan pertambangan, aspek baru yang terkait dengan industri pariwisata warisan telah dikembangkan termasuk penciptaan atraksi pengunjung yang berkaitan dengan pertambangan.

Hartrisari (2007) menjelaskan bahwa sistem adalah gugus atau kumpulan dari komponen yang saling terkait dan terorganisasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau gugus tujuan tertentu, dimana suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem. Pengertian lain, sistem adalah keseluruhan interaksi antar unsur dari sebuah obyek dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan (Muhammadi *et al.*, 2001).

Kenyataan yang mendasar dari persoalan yang dihadapi adalah kompleksitas. Oleh sebab itu, penyelesaian masalah yang kompleks tidak mungkin dengan menggunakan satu atau dua metode spesifik saja. Dalam hal ini, teori sistem mempertanyakan bahwa kesisteman adalah suatu metadisiplin, dimana proses dari keseluruhan disiplin ilmu dapat dipadukan. Pemikiran sistem selalu mencari keterpaduan antar bagian melalui pemahaman

yang utuh, maka diperlukan suatu kerangka pikir baru yang terkenal sebagai pendekatan sistem (*system approach*) (Eriyatno, 1999).

Pendekatan sistem merupakan cara pandang yang bersifat menyeluruh atau holistik yang memfokuskan pada integrasi dan keterkaitan antar komponen dimana pendekatan ini dapat mengubah cara pandang dan pola berpikir dalam menangani permasalahan dengan menggunakan model yang merupakan penyederhanaan dari sebuah sistem (Hartrisari, 2007).

Eriyatno (1999) menegaskan bahwa dalam pendekatan sistem, pengkajian suatu permasalahan sebaiknya memenuhi karakteristik: 1). Kompleks, dimana interaksi antar elemen cukup rumit; 2) dinamis, dalam arti faktornya ada yang berubah menurut waktu dan ada pendugaan ke masa depan; 3) probabilistik, yaitu diperlukannya fungsi peluang dalam inferensi kesimpulan maupun rekomendasi.

Dijelaskan juga bahwa dalam aplikasi manajemen, teknik sistem dipersyaratkan menggunakan beberapa teori dasar yang bersifat kuantitatif yang meliputi: 1) model matematika; 2) analisis fungsi terhadap model matematika yang digunakan; 3) teori kontrol; 4) teori estimasi dan 5) teori keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Kawasan Pertambangan Dan Bekas Tambang Di Sawahlunto

Kawasan pertambangan batubara Sawahlunto yang memiliki banyak situs-situs pertambangan baik yang masih beroperasi dan sudah di tutup karena cadangan yang sudah habis memiliki potensi untuk dikembangkan pada *lifecycle* kedua pertambangan yaitu menjadi kawasan wisata tambang (*mining tourism*).

Kawasan pertambangan ini memenuhi unsur dengan kriteria cukup sebagai kawasan wisata tambang (*mining tourism*) yang di dalamnya mengandung unsur pendidikan, pengalaman, konservasi maupun keunikan disamping keunggulan lain. Berdasarkan data di lapangan menunjukkan bahwa kondisi potensi pengembangan pariwisata tambang sawahlunto sebagian sudah ada yang dikembangkan walau-pun belum secara optimal mampu menarik wisatawan dan memberikan dampak kepada masyarakat sekitar.

Objek Wisata Yang Sudah Dikembangkan

Objek wisata pada wisata tambang Sawahlunto yang sudah dikembangkan yaitu:

Lubang Mbah Soero

Di kota lama terdapat beberapa tunnel (terowongan tambang) sisa penambangan yang telah ditutup sejak zaman kolonial sekitar tahun 1930-an berdasarkan keterangan

dari salah seorang saksi sejarah kota Sawahlunto, tunnel ini ditutup berkaitan dengan status penajahan di Indonesia akan digantikan oleh Jepang. Tunnel-tunnel ini tersebar di sekitar kota lama yang jumlahnya belum diketahui secara pasti. Namun saat ini Pemerintah Kota Sawahlunto sedang melakukan pendataan mengenai hal ini. Diyakini bahwa tunnel-tunnel ini saling berhubungan antar satu dengan yang lainnya, karena dalam metoda penambangan batubara akan dikenal sebuah tunnel yang disebut pintu utama (*main gate*) dan tunnel belakang (*tail gate*).

Museum Tambang

Aneka ragam peralatan tambang terbuka dan tambang dalam serta dokumentasi berupa foto-foto dipamerkan di museum ini, baik di dalam ruangan maupun di halaman museum. Museum ini didirikan atas kerjasama PT.BA UPO dengan Dinas Pariwisata Sawahlunto. Museum Tambang Batu Bara Ombilin menjadi pelengkap rentetan museum yang dihadirkan Sawahlunto sebagai kota warisan tambang kolonial yang kini berwawasan wisata sejarah tambang. Museum ini baru saja diresmikan pada Juni 2014 dan diharapkan menjadi bagian penting tujuan wisata yang dapat disambangi di Sawahlunto.

Tiga Silo Batubara

Tiga bangunan silo (bangunan seperti menara berbentuk silinder) dengan ketinggian masing-masing 40 meter adalah milik PT Bukit Asam Unit Penambangan Ombilin (PT. BAUPO). Silo yang berdiri kokoh merupakan bagian dari kawasan bengkel utama dan tempat pencucian dan penyaringan batubara. Di bagian atas silo adalah akhir dari jaringan ban berjalan (*belt conveyor*) yang langsung dari tempat pemerosesan (*prosessing plant*) di Sawah Rasau. Silo ini berkaitan juga dengan proses pemuatan batubara ke kereta api, dimana kereta api akan berada di bawah silo dan batubara akan dikucurkan dari dalam silo dengan sistem *feeder*.

Museum Kereta Api Sawahlunto

Di Kota Sawahlunto terdapat sebuah stasiun kereta api yang dibangun masa kolonial Belanda. Stasiun ini dibangun pada tahun 1887 karena peningkatan produksi batubara sehingga diperlukan pengangkutan ke Pelabuhan Teluk Bayur Padang dalam jumlah besar. Sejak tahun 2000 pengangkutan batubara ke Teluk Bayur tidak lagi menggunakan kereta api dengan alasan biaya operasional yang tidak layak. Saat ini stasiun kereta api dimanfaatkan sebagai Museum Kereta Api Sawahlunto. Di sini terdapat benda-benda peninggalan sejarah kereta api Sawahlunto seperti lokomotif tua serta alat pemutar rel kereta api. Lahan disekitar stasiun kereta api ini juga dimanfaatkan sebagai taman bermain (*play ground*) dan dilengkapi dengan fasilitas kereta wisata.

Museum Goedang Ransoem

Museum Goedang Ransoem merupakan bangunan tua yang pada zaman kolonial yang digunakan sebagai dapur umum untuk kebutuhan makanan para pekerja tambang. Di sini diperlihatkan berbagai perlengkapan dan peralatan memasak dalam kondisi aslinya. Juga dapat disaksikan dokumentasi kondisi penambangan pada zaman kolonial.

Gudang Ransum memiliki sejarah tersendiri. Gudang Ransum atau dapur umum untuk orang rantai (pekerja paksa) merupakan bagian tidak terpisahkan dari prosesi pertambangan. Tempat ini melayani kebutuhan makanan ribuan buruh tambang yang berasal dari Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Dapur umum ini mampu menyediakan sekitar 65 pikul makanan setiap hari atau setara dengan 3.900 kg nasi. Peralatan masaknya berukuran “raksasa” dengan jumlah pekerja dapur sekitar 100 orang setiap harinya. Merupakan sebuah momen objek wisata dan juga sebagai sarana pendidikan mengetahui proses penambangan pada masa kolonial. Di bagian belakang Gudang Ransum ini juga terdapat sebuah bangunan yang dulunya digunakan sebagai pabrik batu bata.

Kawasan Wisata Kandi

Kawasan wisata kandi merupakan sebuah kawasan wisata yang dibuat dengan memanfaatkan lahan reklamasi bekas penambangan terbuka PT. BA UPO seluas 400 Ha, lahan ini telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sawahlunto. Kawasan ini terletak di Kecamatan Talawi yaitu sekitar 12 km dari pusat kota Sawahlunto dengan akses jalan utama Sawahlunto - Talawi. Pada kawasan wisata ini terdapat bermacam-macam jenis objek wisata yaitu danau wisata, taman satwa, arena *road race*, arena pacu kuda dan pemandangan yang indah.

Kawasan ini terdiri dari: Taman Satwa Kandi, Pembangunan objek ini ditujukan sebagai objek wisata yang bisa dikunjungi tiap hari dan merupakan tahap awal dari rencana untuk pembangunan objek yang lebih besar lagi yaitu Taman Safari Kandi.

Sarana yang terdapat pada objek ini sudah cukup memadai, dan Danau Kandi, fasilitas yang ada berupa dermaga permanen yang biasanya digunakan sebagai tempat rekreasi keluarga oleh pengunjung yang datang ke sana. Pemandangan sangat indah, karena danau ini bersebelahan dengan Batang Ombilin. Danau ini terbentuk akibat jebolnya tanggul yang membatasi sungai dari Batang Ombilin ke tambang terbuka yang dikelola oleh sub kontraktor dari PT. BA-UPO yaitu PT. AIC.

Waterboom

Tempat ini pada masa dulu merupakan tempat pemandian orang-orang Belanda dan keluarganya.

Hingga akhirnya pemda mengembangkannya menjadi objek wisata air yang berlokasi di Muaro Kalaban lebih kurang 6 km dari pusat kota Sawahlunto. Objek ini memiliki aksesibilitas yang sangat baik yaitu dilalui oleh jalan lintas sumatera antara Padang dan Sijunjung. Objek wisata ini menyediakan berbagai fasilitas wisata air seperti kolam renang, seluncuran dan lain-lain. *Waterboom* ini dibangun pada lahan seluas ± 7000 m² milik Pemda Kota sawahlunto.

Potensi Obyek Wisata Tambang Yang Belum Dikembangkan

Bekas Pertambangan Sungai Durian dan Bekas Sekolah Pertambangan. Tempat ini merupakan daerah tambang batubara pertama di Sawahlunto dan sekarang telah dijadikan tempat Pendidikan dan Pelatihan dengan nama OMTC (Ombilin Mine Training College). Di bagian belakang terdapat tunnel bekas tambang batubara. Tunnel ini dibangun tahun 1892 dengan panjang sekitar 800 meter. Terowongan yang dibuat membelah bukit ini dibangun oleh orang rantai atau orang hukuman.

Konon, orang-orang hukuman didatangkan dari Pulau Jawa, untuk membangun jalan dan penggali tambang batubara. Terowongan ini ditutup pada tahun 1993 karena mengeluarkan gas metan. Jarak dari pusat kota Sawahlunto sekitar 2 km dan dilewati oleh jalan utama Sawahlunto-Talawi. Saat ini fasilitas yang ada adalah sebuah komplek pendidikan dan pelatihan yang lengkap dengan kantor, ruang belajar, asrama, laboratorium dan sarana praktek yang merupakan milik Kementerian ESDM sebagai tempat diklat dan pelatihan tambang bawah tanah.

Pertambangan Plat Tengah. Pertambangan plat tengah adalah sebuah tempat proses penambangan sampai ke tingkat pemerosesan. Dapat dilihat sebuah tunnel bekas tambang yang terakhir digunakan sebagai lubang angkut batubara dari dalam ke tempat pemerosesan. Di sinilah terletak Lubang Sawah Rasau yang merupakan tambang kedua setelah Sungai Durian. Juga terdapat *processing plant* PT. BA UPO yang hampir tidak beroperasi lagi, namun semua peralatan dan perlengkapan masih berada pada tempatnya.

Belt conveyor yang ada di sini tembus sampai ke dalam lubang produksi, dan setelah di olah batubara kembali di angkut oleh jaringan *belt conveyor* sampai ke silo yang berada di Kota Sawahlunto untuk dimuat ke kereta api. Sarana yang ada disini masih lengkap sebagai sebuah tunnel batubara dan processing plant. Objek ini belum dilakukan pembenahan sama sekali karena masih merupakan milik PT. BA UPO.

Di masa yang akan datang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai sebuah daya tarik wisata karena para pengunjung akan dapat mengetahui dan menyaksikan langsung bagaimana batubara di angkut dari dalam lubang

serta proses pengolahannya. Keduanya ini dapat dikemas sedemikian rupa dalam bentuk sebuah daya tarik wisata tambang.

Tambang Dalam Sawahluwung. merupakan tambang dalam milik PT. BA UPO yang sampai sekarang masih beroperasi walaupun produksinya menurun dikarenakan terbatasnya dana dan teknologi tambang dalam. Namun tambang dalam ini walaupun masih beroperasi justru merupakan nilai daya tarik wisata tambang. Perlu dilakukan kajian bersama dengan PT BA UPO untuk merancang wisata tambang di tambang dalam yang masih aktif dengan tetap memperhatikan segi keselamatan wisatawan dan pekerja tambang itu sendiri.



Gambar 2. Potensi wisata tambang aktif Sawahluwung

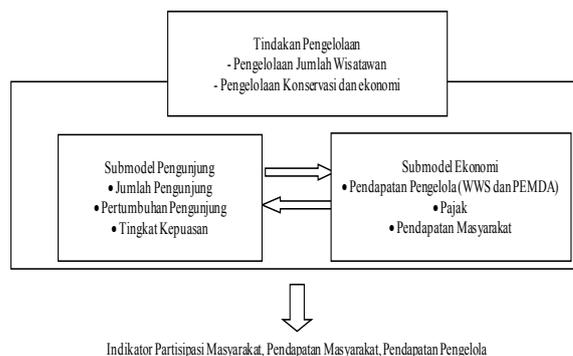
Tambang Terbuka dan Tambang Dalam Parambahan PT. AIC. Kawasan pertambangan terbuka yang izin pertambangannya dimiliki oleh PT AIC merupakan kawasan yang sangat menarik. Saat ini aktifitas tambang terbuka sudah berhenti dikarenakan sudah tidak memungkinkan untuk ditambang secara terbuka karena sudah tidak ekonomis. Saat ini PT.AIC sedang merintis tambang dalam yang sebenarnya dulu sempat mereka lakukan, namun dikarenakan kendala biaya dan teknis akhirnya lama berhenti dan saat ini mulai dirintis kembali.

Kawasan bekas tambang terbukanya sendiri belum direklamasi seluruhnya. Hal ini sebenarnya kenyataan yang sangat baik karena jika hendak dikembangkan menjadi obyek wisata tambang yang sesungguhnya maka endapan bahan tambang dalam hal ini batubara harus tetap dipertahankan sebagian yang dinilai memiliki struktur geologi yang menarik secara ilmu pengetahuan.

Model Pengembangan Wisata Tambang (Mining Tourism) pada Kawasan Pertambangan Batubara

Pengembangan wisata tambang diarahkan pada kegiatan wisata yang tidak bersifat *mass tourism*. Model sistem dinamis yang dikembangkan pada penelitian ini dibatasi pada hal-hal yang terkait dengan interaksi antara masyarakat, wisatawan, pengelola wisata tambang dan kebijakan pengelolaan bekas tambang oleh pemerintah. Skenario memberikan ilustrasi antara tingkat pertumbuhan wisatawan dan manfaat ekonomi.

Skenario yang dibuat untuk tindakan koreksi pengelolaan kawasan wisata tambang Sawahlunto merupakan tindakan pengelolaan jumlah wisatawan dan pengelolaan konservasi serta pertumbuhan ekonomi. Tindakan pengelolaan konservasi adalah dengan mengembangkan situs tambang geologi menjadi obyek wisata. Skenario tersebut digunakan untuk mencari upaya penyebaran wisatawan dan peningkatan jumlah wisatawan yang dapat menghasilkan indikator pertumbuhan ekonomi sebagai kawasan konservasi dan tujuan wisata.



Gambar 3. Dinamika Sistem Pengelolaan Kawasan Wisata tambang Sawahlunto

Spesifikasi Model

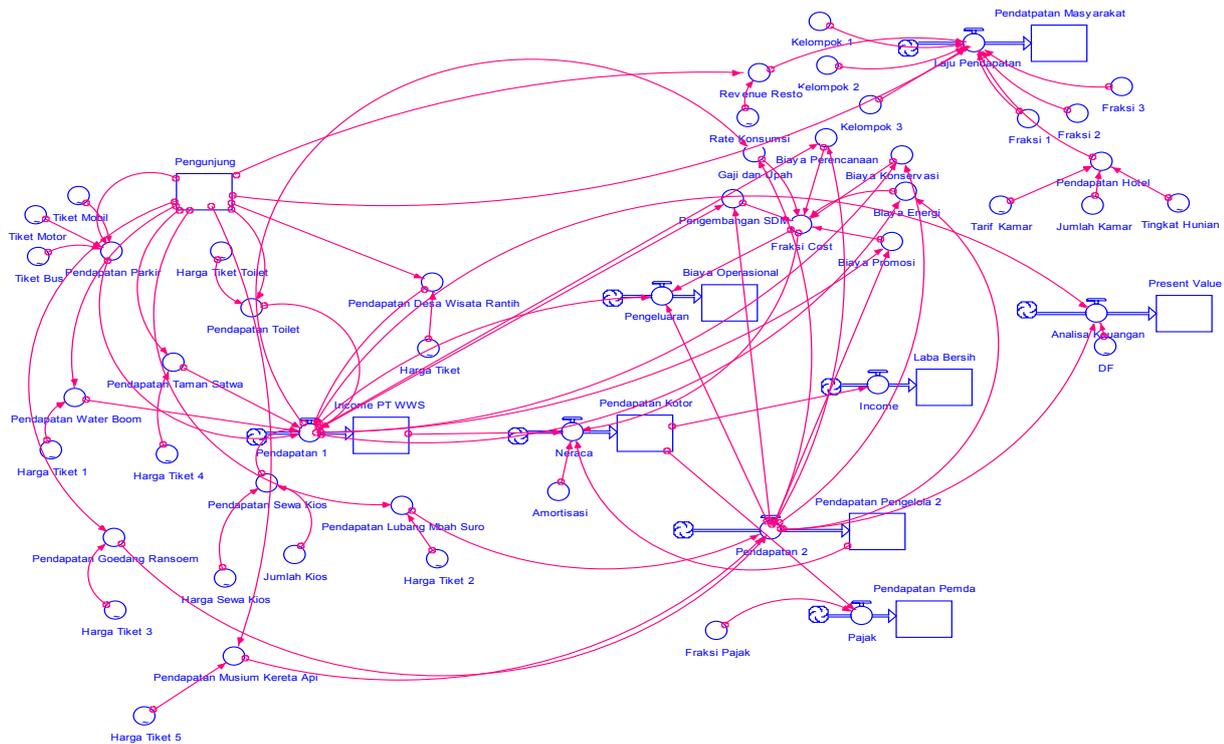
Dinamika model atau model konseptual dirinci menjadi diagram *stock* dan *flow*. Pada tahapan model ini dalam stock dan flow dikuantifikasi sehingga dapat disimulasikan dengan komputer menggunakan bantuan software sistem dinamik.

Model ekonomi

Tujuan dari pengembangan kegiatan wisata pada kawasan wisata tambang Sawahlunto salah satunya adalah memberikan dampak berupa peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar kawasan.

Peningkatan kesejahteraan disebabkan oleh adanya aktivitas ekonomi di kawasan wisata tambang Sawahlunto sehingga masyarakat akan mempunyai peluang usaha dan memperoleh pendapatan dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan wisata di kawasan wisata tambang Sawahlunto. Selain itu pihak pengelola yaitu PT WWS dan pemerintah daerah akan mendapat keuntungan berupa pendapatan bagi pengelola. Pendapatan untuk pemerintah daerah selain dari pendapatan sebagai pengelola juga pendapatan dari pajak.

Dari model Skenario pengelolaan kawasan wisata tambang Sawahlunto dikembangkan berdasarkan konseptual model. Pada konseptual model terdapat dua tindakan pengelolaan yaitu pengelolaan pengunjung. Berdasarkan tindakan pengelolaan tersebut, maka dikembangkan 2 skenario sebagai optimasi tindakan pengelolaan. Kedua skenario tersebut adalah skenario eksisting dan skenario alternatif.



Gambar 4. Model Ekonomi Pengembangan Wisata tambang Sawahlunto

Model Pengelolaan Peningunjung dengan Skenario Eksisting

Skenario Eksisting adalah skenario yang dibangun dengan asumsi bahwa pengelolaan dilakukan sesuai dengan kondisi yang terjadi sekarang. Skenario eksisting dapat digunakan sebagai referensi pembandingan terhadap skenario-skenario tindakan pengelolaan yang lainnya. Kondisi tindakan pada skenario eksisting yaitu dengan pengelolaan pengunjung.

Daya tarik wisata yang ditawarkan berupa produk wisata sesuai dengan kondisi yang terjadi sekarang. Aspek obyek wisata yang ditawarkan dan atraksi yang ditawarkan terdiri dari Musium Goedang Ransoem, Musium Kereta Api, Pemandian Water Boom, Resort Wisata Kandi, Lubang Mbah Suro dan Galeri Info Box, Kereta Api Wisata, Desa Wisata Rantih. Amenitas sebagai sarana dan prasarana pendukung wisata berada pada kualitas cukup baik, tidak dilakukan penambahan fasilitas, yang dilakukan hanya berupa pemeliharaan. Aspek aksesibilitas tidak dilakukan upaya yang sistematis dan progresif untuk penyampaian informasi tentang produk dan cara menuju kawasan wisata tambang Sawahlunto.

Jumlah pengunjung dan distribusi pengunjung dalam pengelolaannya tidak dilakukan secara khusus. Dampak yang terjadi adalah adanya penumpukan pengunjung pada akhir pekan atau hari libur dan penumpukan di obyek wisata tertentu yang menjadi tempat favorit di kawasan wisata tambang Sawahlunto. Dampak dari penumpukan pengunjung adalah adanya menurunnya tingkat kepuasan pengunjung akibat kepadatan pengunjung.

Implikasi dari skenario eksisting dari pengelolaan yang dilakukan yang paling mungkin terjadi adalah berdasarkan hasil analisis model bahwa skenario eksisting akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan pengunjung dan menyebabkan peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan pendapatan pengelola yaitu PT. WWS dan Pemerintah Daerah serta peningkatan pendapatan Pemerintah Daerah melalui peningkatan penerimaan pajak, meskipun tingkat pertumbuhan pendapatan semakin menurun, lebih detilnya disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Implikasi Skenario Eksisting

Tahun	Pendapatan (Juta Rupiah)			
	Pendapatan PT. WWS	Pendapatan Pengelola II (Pemda)	Pendapatan Masyarakat	Pajak
2011	7475	173	131838	660
2012	13278	325	216044	3053
2013	20125	504	315408	8867
2014	28205	716	432658	20091
2015	33054	842	503059	39521
2016	38775	992	586133	68567
2017	46723	1217	684160	109776
2018	56100	1481	799831	162463
2019	61728	1640	869234	232878
2020	68471	1828	951190	321653
2021	76427	2049	1047898	430750
2022	87206	2366	1152013	562350

2023	93675	2556	1230483	720195
2024	101308	2780	1311276	906171
2025	110314	3044	1406693	1122504
2026	120941	3356	1519262	1371821
2027	129143	3575	1586810	1657729
2028	135640	3836	1665516	1992231
2029	145666	4143	1760569	2348108
2030	158633	4504	1871634	2259109

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa dengan skenario eksisting terjadi peningkatan pendapatan. Baik peningkatan pendapatan pengelola yang dalam hal ini yaitu PT. WWS dan Pemerintah daerah setempat, serta terjadi peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan wisata tambang sawahlunto. Pendapatan Pemerintah Daerah setempat juga berasal dari penerimaan pajak yang meningkat hal ini pada akhirnya akan memberikan multiplier efek terhadap kesejahteraan masyarakat pada wilayah sawahlunto secara keseluruhan dan peningkatan pendapatan ini menunjukkan bahwa jika skenario eksisting diterapkan maka akan membawa dampak positif kesejahteraan.

Skenario Alternatif

Skenario alternatif dibangun berdasarkan asumsi bahwa pengelola mempunyai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan dengan melakukan pengembangan kawasan wisata tambang Sawahlunto dengan meningkatkan konservasi dan pertumbuhan ekonomi dan mendukung kebijakan pengembangan sebagai kawasan wisata dengan konsep pariwisata berkelanjutan.

Pengembangan kawasan dilakukan dengan menganalisa potensi pengembangan obyek wisata dan pengembangan atraksi. Hal ini sejalan dengan temuan (Conesa & others, 2010) pada wisata tambang di La Union yaitu adanya festival di kawasan wisata tambang mampu meningkatkan jumlah pengunjung lebih banyak dibandingkan jika tidak ada festival.

Pengembangan obyek wisata yaitu dengan meningkatkan konservasi yaitu dengan membuka obyek wisata tambang aktif dalam dan luar. Tambang aktif tersebut telah ada di kawasan wisata tambang Sawahlunto, namun sampai dengan saat ini belum dijadikan obyek wisata. Pengembangan obyek wisata tambang aktif dalam dan luar merujuk pada keberhasilan pengelolaan wisata tambang di Potosi Bolivia. Pengembangan wisata tambang di Potosi Bolivia dalam meningkatkan jumlah pengunjung yaitu dengan mejadikan area tambang yang masih beserta penambangnya memberika narasi sendiri yang ternyata justru lebih diminati oleh pengunjung (Pretes, 2002).

Pengembangan atraksi dilakukan dengan menambah atraksi di obyek wisata yang telah ada, yaitu dengan *camping ground* pada obyek wisata desa rantih. Sampai saat ini obyek wisata desa wisata rantih belum atau tidak dikenakan tiket masuk. Pengembangan atraksi *camping ground* diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Pengembangan lain yaitu melalui peningkatan informasi, sarana dan prasarana menuju kawasan wisata tambang Sawahlunto.

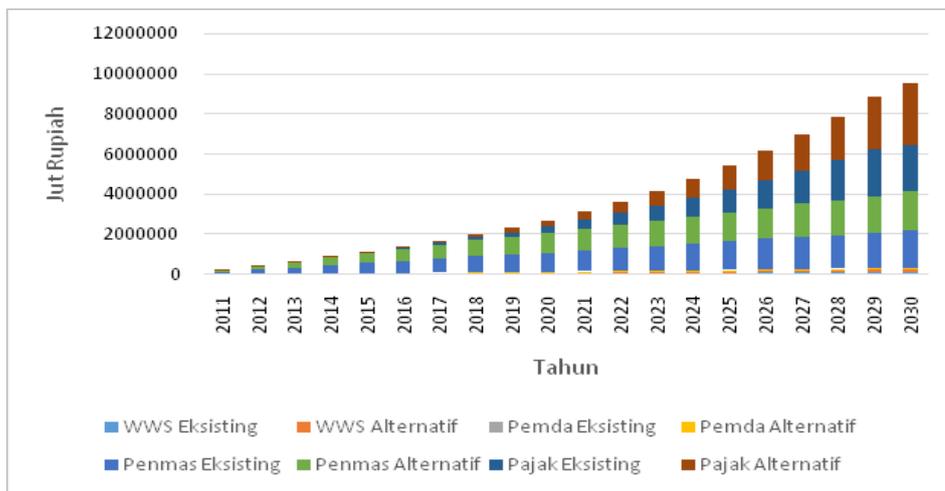
Skenario alternatif ini juga melakukan tindakan pengelolaan yang dilakukan berupa pengelolaan jumlah pengunjung. Tujuan dilakukan pengelolaan tersebut agar tidak terjadi penumpukan pengunjung di akhir pekan dan libur saja dan juga supaya tidak terjadi sebaran distribusi pengunjung pada berbagai obyek wisata pada kawasan wisata tambang Sawahlunto yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kepuasan pengunjung. Pengelolaan pengunjung dapat meningkatkan pertumbuhan pengunjung sampai dengan 30 persen pertahun.

Tabel 2. Implikasi Skenario Alternatif

Tahun	Pendapatan (juta rupiah)			
	Pendapatan PT. WWS	Pedapatan Pengelola 2 (Pemda)	Pendapatan Masyarakat	Pajak
2011	9156	173	131838	321
2012	16023	325	216044	711
2013	24119	504	315408	3601
2014	33665	716	432658	10887
2015	39408	842	503059	25183
2016	46179	992	586133	50453
2017	55358	1217	684160	88550
2018	66181	1481	799831	141466
2019	72692	1640	869234	212119
2020	81256	1847	959525	304945
2021	92377	2115	1076902	421873
2022	99926	2311	1147328	565453
2023	110283	2565	1238883	740101
2024	123736	2895	1357903	947948
2025	131824	3093	1429368	1192186
2026	142326	3351	1522272	1478458
2027	157439	3744	1643047	1809256
2028	166984	3980	1715513	2187574
2029	179373	4287	1809717	2619619
2030	195612	4686	1932273	3108400

Dampak Ekonomi Kawasan Sekitar Tambang

Berdasarkan dua skenario yang ditawarkan yaitu skenario eksisting dan skenario alternatif dalam model



Gambar 5. Perbandingan Simulasi Skenario Pendapatan

ekonomi pengelolaan kawasan wisata tambang terlihat dampak ekonomi untuk masyarakat dan pengelola dari masing-masing skenario.

Perbandingan kinerja sistem hasil simulasi skenario merupakan bahan pertimbangan bagi pengelola untuk menentukan strategi pengelolaan kawasan wisata tambang yang tepat. Dampak ekonomi dari kedua skenario tersebut dapat dibandingkan berdasarkan pendapatan yang merefleksikan tingkat kesejahteraan.

Skenario eksisting terlihat mampu meningkatkan pendapatan namun peningkatan tersebut masih kecil dibandingkan dengan skenario alternatif yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lebih besar. Pendapatan masyarakat didapatkan dari jasa lainnya yang bisa ditawarkan oleh masyarakat sekitar kawasan. Selain itu juga terlihat pada skenario alternatif pendapatan pemerintah daerah dari pajak lebih besar dibandingkan dengan skenario eksisting hal ini *multiplier efeknya* adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang maupun masyarakat lain yang berada disawahlunto.

Peningkatan pendapatan pada kedua skenario disajikan pada gambar 5 merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola.

Pengembangan pilihan obyek wisata tambang aktif untuk tambang dalam dan luar berbeda pengelola selain PT. WWS. Untuk tambang aktif dalam dikelola oleh pemilik tambang dalam yaitu PT. BAUPO. Sedangkan pengelolaan tambang luar atau tambang terbuka dikelola oleh pemilik tambang yaitu PT, AIC. Namun dalam pengelolaan tetap menjalin kemitraan dengan pengelola PT. WWS. Pada skenario ini pengelolaan dibagi 50 persen pendapatan untuk PT. WWS dan 50 persen lagi pendapatan untuk PT. BAUPO dan PT. AIC dengan komposisi masing-masing yaitu 25 persen. Sedangkan pengelola obyek wisata lainnya (Lubang Mbah Suro, Gudang Ransoem, dan Musium Kereta Api) yaitu Pemerintah Daerah tidak bermitra.

SIMPULAN

Potensi Kawasan pertambangan batubara Sawahlunto yang memiliki banyak situs-situs pertambangan baik yang masih beroperasi dan sudah ditutup karena cadangan yang sudah habis layak untuk dikembangkan pada *lifecycle* kedua pertambangan yaitu menjadi kawasan wisata tambang (*mining tourism*). Kawasan pertambangan ini memenuhi unsur dengan kriteria cukup sebagai kawasan wisata tambang (*mining tourism*).

Model pengembangan wisata tambang (*mining tourism*) pada kawasan pertambangan batubara yaitu dengan pengelolaan ekonomi. Pengembangan wisata tambang Sawahlunto merupakan kegiatan wisata yang diarahkan kegiatan wisata yang tidak bersifat mass tourism. Pengembangan dilakukan dengan dua skenario Eksisting dan skenario Alternatif.

Dampak Ekonomi dari model pengelolan dengan skenario eksisting dan skenario alternatif mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan pengelola baik PT. WWS maupun pemerintah daerah serta memberikan multiplier efek terhadap masyarakat sawahlunto secara keseluruhan dari peningkatan pajak yang diterima oleh pemerintah dari wisata tambang. Dampak ekonomi tersebut pada skenario alternatif lebih besar dibandingkan pada skenario eksisting baik pendapatan pengelola maupun pendapatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto. (2012). Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sawahlunto 2012-2032.
- Ballesteros, E.R. & Ramirez, M.H. (2007). Identity and Community – Reflections on the Development of Mining Heritage Tourism in Southern Spain. *Tourism Management*, 28, (3), p. 677-687

- Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto. (2014). Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2014.
- Cole, D. (2004). Exploring the Sustainability of Mining Heritage Tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 12, (6), 480-494
- Conesa, H.M., Schulin, R. & Nowack, B. (2008). Mining landscape: A cultural tourist opportunity or an environmental problem? The study case of the Cartagena-La Unión Mining District (SE Spain). *Ecological Economics*, 64, (4), 690-700
- Conesa, H.M. (2010). The difficulties in the development of mining tourism projects: the case of La Unión Mining District (SE Spain). *Pasos: Revista de Turismo Y Patrimonio Cultural*, 8, (4), 653-660.
- Conlin, M. & Jolliffe, L. (2010), Mining Heritage Tourism: A Global Synthesis, Florence: Routledge
- Edwards, J.A. & Coit, J.C.L. (1996). Mines and Quarries: Industrial Heritage Tourism. *Annals of Tourism Research*, 23, (2), 341-363
- Eriyatno. (2003). Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektifitas Manajemen. Bogor: IPB Press
- Gunn, C.A. (1994). Tourism Planning : Basics, Concepts and Cases. Washington: Taylor and Francis.
- Hardjomidjojo, H. (2007). Sistem Dinamik, Konsep Sistem dan Pemodelan untuk Industri dan Lingkungan. Bogor: SEAMEO.
- Jonsen-Verbeke, M. (1999). Industrial Heritage: A nexus for sustainable tourism development, *Tourism Geographies*, 1, (1), 70-85
- Mayer, H. J., & Greenberg, M. R. (2001). Coming Back From Economic Despair: Case Studies of Small and Medium-Sized American Cities. *Economic Development Quarterly*, 15, (3), 203-216.
- McAllister, M. L. (2008). Shifting Foundations in a Mature Staples Industry: A History of Canadian Mineral Policy. In M. Howlett, & K. Brownsey, Canada's Resource Economy in Transition: The Past, Present and Future of Canadian Staples Industries (pp. 145-166). Toronto: Emond Montgomery Publications Limited.
- Millikarjun R.P. & Pathak, K. (2005). Socio-Economic Impacts of Mine Closure: A Case Study Using Satellite Imagery. *International Journal of Environmental Studies*, 62, (5), 555-570.
- Mingkid, E. (2015). Penggunaan Media Komunikasi Promosi Pariwisata Oleh Pemerintah Kota Manado, *Sosiohumaniora*, 18, (3), 188-192.
- Newsome, D. & Dowling, R.K. (2010). Geotourism: The Tourism of Geology and Landscape. Oxford: Goodfellow Publishers..
- Newsome, D., Dowling, R. & Leung, Y.F. (2012). The nature and management of geotourism: A case study of two established iconic geotourism destinations. *Tourism Management Perspectives*.
- PT. Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin. (2003). Rencana penutupan tambang terbuka PT.BA (Persero) Tbk UPO April 2003. Sawahlunto (Indonesia). PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Unit Pertambangan Ombilin.
- Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto. (2001). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi, Misi Kota Sawahlunto.
- Pretes, M. (2002). Touring mines and mining tourists. *Annals of Tourism Research*, 29, (2), 439-456.
- Rudd, M.A. & Davis, J.A., 1998. Industrial Heritage Tourism at the Bingham Canyon Copper Mine. *Journal of Travel Research*, 36, (3), 85-89
- [UNESCO] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, (2008). World Heritage Centre, Information Kit
- Wanhill, S., 2000. Mines-A Tourist Attraction: Coal Mining in Industrial South Wales. *Journal of Travel Research*, 39, (1), 60-69
- Yoeti, A.O.K. (1997). Pemasaran Pariwisata. Bandung: Penerbit Angkasa

EFFISIENSI FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI USAHATANI KEDELAI

Eti Suminartika, Lies Sulistiyowati dan Kuswarini Kusno

Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran

E-mail: eti.suminartika@unpad.ac.id

ABSTRAK. Dominanya ketergantungan kedelai impor berdampak kurang baik dalam menjaga keamanan pangan, karena banyaknya impor kedelai menyedot devisa negara. Di sisi lain jika terjadi penurunan nilai tukar rupiah maka berdampak pada kesetabilan harga kedelai nasional dan mengganggu kesetabilan proses produksi olahan kedelai. Oleh karena itu diperlukan upaya megembangkan kedelai lokal. Untuk mengembangkan kedelai lokal, pengelolaan penggunaan faktor produksi yang tepat dan efisien diperlukan untuk meningkatkan produksi dan menjaga keberlanjutan usaha. Penggunaan faktor produksi yang efisien berdampak pada penggunaan input produksi yang sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan produksi yang optimal. Pada umumnya petani dalam menggunakan faktor produksi tidak optimal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai dan untuk menganalisis tingkat efisiensi harga dari faktor-faktor produksi kedelai. Penelitian dilaksanakan di desa Sukaselamet kecamatan Kroya kabupaten Indramayu. Metoda yang digunakan adalah metoda survey, data yang digunakan terdiri data primer (dari petani) dan data sekunder. Data dianalisis menggunakan analisis ekonometrik (model produksi kedelai) dan analisis matematik. Hasil penelitian menunjukkan, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai adalah penggunaan benih, pupuk urea dan pupuk SP36, faktor produksi tersebut berpengaruh karena penggunaannya masih dibawah standar dosis anjuran. Penggunaan benih, pupuk urea dan pupuk SP36 oleh petani kondisinya belum efisien sehingga perlu ditambah penggunaannya, sementara penggunaan NPK sudah tidak lagi efisien sehingga penggunaannya perlu dikurangi.

Kata kunci: kedelai; efisiensi; produksi; faktor produksi.

EFFICIENCY OF INPUT FACTOR OF SOYBEN FARM

ABSTRACT. Imported of soybean is quite increasing every year, high dependency on imported soybean indeed become serious problem to Indonesian in maintaining her food security, therefore local production of soybean must be developed. To develop local soybean, soybean farm itself must be efficient; therefore it is timely to undertake a research work to analyse the efficiency of soybean input factor. This study use survey method, primary and secondary data is conducted in this study, the data is obtained from farmer sample, the sample to be found by using simple random sampling, the data was analysed by mathematic and econometric analyse, the study is located at Sukaselamet village, Kroya sub district, Indramayu district, West Java. The result shows, seed, Ureum and SP36 fertilizer are significant effect to production, and these input are low efficient, therefore these inputs factor must be increased by farmer, meanwhile NPK fertilizer is in-efficient, so that this input must be reduced.

Keywords: soybean; efficiency; production; input factor.

PENDAHULUAN

Kedelai merupakan sumber bahan pangan utama bagi masyarakat Indonesia. Konsumsi kedelai terus meningkat, kenaikan permintaan kedelai disebabkan peningkatan konsumsi per capita dan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1970, konsumsi per capita kedelai hanya 3,7 kg/cap/tahun, saat ini telah mencapai lebih dari 11,5 kg/cap/tahun (Kementerian Pertanian, 2017).

Sebanyak 60 persen dari suplay kedelai digunakan untuk konsumsi dalam pembuatan tahu dan tempe karena kedelai di Indonesia merupakan sumber protein ketiga setelah ikan dan ayam. Kedelai menyumbang 10 persen kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Lebih jauh harga kedelai merupakan sumber protein murah dan terjangkau masyarakat. Dengan demikian kedelai memegang peranan penting untuk ketahanan dan keamanan pangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Untuk menjaga ketahanan pangan, dari segi kuantitas, maka domestik supply harus dipelihara. Pada kenyataannya impor kedelai diatas produksi nasional,

sekitar 60 persen kedelai berasal dari impor dan 40 persen berasal dari produksi nasional (Kementerian Per-tanian, 2017). Tingginya permintaan kedelai impor juga didukung oleh preferensi permintaan industri tahu dan tempe terhadap kedelai impor tersebut. Menurut Suminartika (2012), pengrajin tahu menggunakan kedelai impor karena kontinuitas kedelai impor yang terjamin, sedangkan perajin tempe lebih memilih kedelai impor karena butirannya lebih besar, seragam dan berwarna kuning cerah, sehingga tempe yang di hasilkan lebih baik tampilannya.

Meskipun kedelai impor banyak digunakan oleh produsen tahu tempe (dengan komposisi sekitar 70% kedelai impor dan 30% kedelai lokal) namun kedelai lokal memiliki banyak keunggulan. Kedelai lokal lebih *fresh* karena tidak terlalu lama disimpan, sehingga kedelai lokal juga digunakan perajin tahu. Kedelai lokal sendiri masih diperlukan sebagai cita rasa yang banyak disukai, disamping itu memiliki rendemen yang lebih tinggi (Suminartika, 2010). Dengan demikian, kedelai lokal memiliki keunggulan tersendiri dari segi kualitas, namun dari segi kuantitas dan kontinuitas masih memerlukan

perbaikan, oleh karena itu pengembangan produksi kedelai lokal perlu dikembangkan untuk mendukung pasokan bahan baku industri pengolahan kedelai, dan turut menjaga keamanan dan ketahanan pangan nasional.

Untuk mengembangkan kedelai lokal maka pengelolaan penggunaan faktor produksi yang tepat dan efisien diperlukan untuk dapat meningkatkan produksi serta menjaga kelanjutan usahatani kedelai. Peningkatan produksi kedelai yang efisiensi merupakan pilihan yang tepat. Dengan efisiensi, petani dapat menggunakan input produksi secara efisien guna mendapat produksi yang optimal (Irawan *et. al.*, 2006). Pada umumnya petani menggunakan faktor produksi tidak optimal, sehingga pemeliharaan aktivitas usahatani tidak memadai (Dewi, 2012). Usahatani dengan menggunakan faktor produksi secara efisien akan meningkatkan keuntungan yang maksimum (Soekartawi, 2003). Petani kedelai diharapkan memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai pengelolaan penggunaan faktor produksi secara efisien untuk meningkatkan keuntungan usahatani kedelai. Permasalahan dalam penelitian adalah: (1) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi produksi kedelai dan (2) bagaimanakah tingkat efisiensi faktor-faktor produksi kedelai di desa Sukaselamet kecamatan Kroya kabupaten Indramayu

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda survey. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh dari responden petani dengan cara wawancara langsung. Data sekunder di peroleh dari studi literatur kepustakaan, dokumen instansi terkait, seperti kantor desa, Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian.

Dalam penelitian ini penentuan responden dilakukan dengan menggunakan sistem penarikan *simple random sampling*. Roscow dalam Sugiyono (2010) memberikan saran-saran tentang jumlah sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500 sampel. Menurut Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kelautan (BP3K) kecamatan Kroya (2017), jumlah petani kedelai di desa Sukaselamet kecamatan Kroya kabupaten Indramayu sebanyak 210 petani kedelai. Berdasarkan jumlah data tersebut, jumlah sampel diambil menggunakan rumus Solvin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Ukuran Populasi

e = Batas kekeliruan yang dikehendaki tidak lebih dari 10%

Perhitungan:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{210}{1 + 210(0,10)^2} = 69,7 \sim 70$$

Berdasarkan perhitungan di atas, jumlah sampel petani kedelai yang diambil sebanyak 70 industri

Definisi Variabel

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah; Produksi Kedelai (Y) adalah jumlah kedelai yang dihasilkan oleh petani dan dihitung dalam kuintal

Bibit (X1) adalah jumlah bibit yang digunakan dalam satu musim tanam dan diukur dengan kilogram

Urea (X2) adalah jumlah pupuk urea yang digunakan dalam satu musim tanam dan diukur dengan kilogram

NPK (X3) adalah jumlah pupuk NPK yang digunakan dalam satu musim tanam dan diukur dalam kilogram

SP36 (X4) adalah jumlah pupuk SP36 yang digunakan dalam satu musim tanam dan diukur dalam kilogram

Analisi data

Data dianalisis dengan menggunakan analisis matematik dan ekonometrik. Analisis matematik digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi faktor-faktor produksi kedelai. Analisis ekonometrik digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai digunakan fungsi produksi, fungsi produkai menggambarkan hubungan fisik antara input dan output. Fungsi produksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah fungsi produksi yang mengikut hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang (*law of diminishing return*), hal tersebut memiliki kesesuaian dengan produksi kedelai petani. Untuk itu digunakan fungsi produksi *Cobb-Douglas*. Fungsi produksi *Cobb-Douglas* adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, yang secara matematik dapat dituliskan sebagai berikut (Soekartawi, 2003.):

$$Y = aX_1^{b_1}, X_2^{b_2}, X_3^{b_3}, \dots, X_n^{b_n} e$$

Fungsi produksi model *Cobb-Douglas* dalam penyelesaian selalu dilogaritmakan dan diubah bentuknya menjadi fungsi linear, sebagai berikut:

$$\text{Log } Y = \log a + b_1 \log X_1 + b_2 \log X_2 + b_3 \log X_3 + b_4 \log X_4 + e$$

dimana:

Y = Produksi kedelai (kw)

X₁ = Benih (kg)

X₂ = Pupuk Urea (kg)

X₃ = Pupuk NPK(kg)

X₄ = Pupuk SP36 (kg)

Selanjutnya untuk mengetahui keragaan variabel Y diterangkan oleh variabel X digunakan koefisien determinasi (R) dengan rumus sebagai berikut

$$R^2 = \frac{JK \text{ reg}}{\sum Y_i^2}$$

Nilai R^2 semakin mendekati satu maka semakin baik variabel benih, pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk Sp36 dalam menjelaskan keragaan produksi kedelai, namun demikian sebagian kecil keragaan produksi kedelai dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Untuk melihat pengaruh secara serempak variabel bebas terhadap variabel terikat, maka digunakan uji F:

$$F_{hit} = \frac{R^2/K}{(1-R^2)/(n-K-1)}$$

Kaidah pengambilan keputusan adalah :

Jika $F_{hit} > F_{tabel}$, maka terima H_a tolak H_o

Jika $F_{hit} < F_{tabel}$, maka terima H_o tolak H_a

H_o : Penggunaan faktor-faktor produksi secara serempak tidak berpengaruh secara nyata

H_a : Penggunaan faktor-faktor produksi secara serempak berpengaruh secara nyata

Sedangkan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan variabel terikat, digunakan uji t yang rumusnya sebagai berikut:

$$t_{hit} = \frac{b_1}{Sb_1}$$

Kaidah pengambilan keputusan adalah :

Jika $t_{hit} > t_{tabel}$, maka terima H_a tolak H_o

Jika $t_{hit} < t_{tabel}$, maka terima H_o tolak H_a

H_o : $b = 0$

H_a : $b \neq 0$

Untuk menguji apakah penggunaan faktor produksi sudah mencapai tingkat efisien atau belum, hal tersebut dapat dilihat dari rasio NPM_x / P_x . Menurut Soekartawi (2003), efisiensi alokatif/harga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaku usaha dalam usahanya untuk mencapai keuntungan maksimum, dimana efisiensi harga dicapai pada saat nilai produk dari masing-masing input sama dengan biaya marjinalnya. dapat dituliskan sebagai berikut:

$$NPM_x = P_x \text{ atau } NPM_x / P_x = 1$$

$$NPM_x = P_x \text{ atau } \frac{NPM_x}{P_x} = 1$$

$$\frac{b.Y.P_y}{X} = P_x \text{ atau } \frac{b.Y.P_y}{X.P_x} = 1$$

Keterangan:

NPM_x = Nilai produk marjinal kedelai

b = Koefisien regresi

Y = Jumlah produksi kedelai

X = Rata-rata jml input kedelai

P_y = Harga kedelai

P_x = Harga input kedelai

Terdapat tiga kemungkinan yang didapat dari hasil perhitungan tersebut, yaitu:

$\frac{NPM_x}{P_x} > 1$ Artinya, penggunaan input x belum efisien dan perlu menambah input.

$\frac{NPM_x}{P_x} = 1$ Artinya, sudah efisien.

$\frac{NPM_x}{P_x} < 1$ Artinya, penggunaan input x tidak efisien dan perlu mengurangi input.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Petani dan Usahatani Kedelai

Keadaan umum petani kedelai meliputi umur, pekerjaan, pengalaman dan pendidikan. Rentang umur petani kedelai adalah 37-51 tahun dengan rata-rata umur 44,9 tahun. Pendidikan petani kedelai umumnya adalah tamat sekolah dasar dengan presentase 77 persen, sisanya 23 persen tamat sekolah menengah pertama. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Hayati dkk (2015) yang menyatakan bahwa karakteristik petani adalah lemah dengan pendidikan formal dan non formal. Pekerjaan utama petani kedelai adalah petani, hanya sebagian kecil petani kedelai yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai pedagang sebanyak 6 persen. Rata-rata pengalaman berusaha kedelai relatif baru yaitu rata-rata selama 3,2 tahun. Berdasarkan keadaan umum responden tersebut maka dapat disimpulkan bahwa petani kedelai di kabupaten Indramayu berusia produktif, pendidikannya rendah, pengalaman berusaha kedelai belum lama, mereka umumnya bekerja sebagai petani.

Keadaan usahatani kedelai meliputi sistem penanaman dan luas lahan (kebun kedelai, kebun non kedelai dan lahan sawah). Sistem tanam yang dilakukan petani kedelai di kabupaten Indramayu lebih bersifat monokultur, tanaman lain seperti jagung ditanam di pinggir kebun kedelai. Demikian pula hasil kedelai petani merupakan hasil utama dari kebun mereka. Sistem tanam monokultur ini mencerminkan, petani mengandalkan tanaman kedelai sebagai tanaman utama dan sebagai sumber pendapatan.

Rata-rata luas lahan yang dimiliki petani sekitar 3,573 hektar, dimana sekitar 1,821 hektar merupakan lahan kedelai, rata-rata luas lahan sawah petani kedelai 1,527 ha dan dikerjakan oleh 88,6% petani kedelai. Dengan demikian petani kedelai merangkap menjadi petani padi. Lahan kedelai yang diusahakan petani berstatus milik sebanyak 44 persen, berstatus lahan perhutani 26 persen, petani kedelai yang mengusahakan lahan kedelai berstatus milik dan lahan perhutani sebanyak 30 persen. Dengan demikian sebagian besar petani mengusahakan lahan perhutani (56 persen petani) untuk menanam kedelai.

Berikut output dan input usahatani kedelai. Hasil produksi tanaman kedelai (output) cukup tinggi karena varietas yang ditanam petani merupakan varietas yang tingkat produktivitasnya tinggi. Input yang digunakan petani lebih banyak menggunakan pupuk kimia dari pada pupuk organik, mengingat banyak petani yang menanam lahan perhutani yang sebelumnya belum ditanami kedelai, menurut petani bahwa penggunaan pupuk organik kurang diperlukan karena tekstur tanah masih baik. Tabel

1 menyajikan hasil produksi dan penggunaan input per hektar dan per 1,7 hektar (rata-rata luas lahan usahatani kedelai)

Tabel 1. Input dan Output Usahatani Kedelai

Input, output dan harga	Per Hektar	Per 1,7 Ha
Hasil produksi (kw)	16,53	29,47
Harga kedelai (Rp/kw)	677.140	677.140
Rata-rata lahan (ha)	1	1,7
Bibit (kg)	50,92	89,50
Urea (kg)	116,03	223,37
NPK(kg/ha)	149,93	191,66
SP36 (kg)	99,75	190,71
Tenaga kerja (HOK)	80,94	139,15

Sumber: Data Primer (diolah)

Dari tabel 1 terlihat, hasil produksi kedelai per hektar berada di atas hasil produksi kedelai rata-rata Jawa Barat, sementara penggunaan faktor produksi (benih dan pupuk) masih berada pada kisaran dosis anjuran (50 kilogram benih per hektar dan 100 kilogram pupuk per hektar) kecuali penggunaan pupuk NPK yang sudah melebihi dosis anjuran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Indramayu (100 kilogram per hektar)

Hasil Estimasi Fungsi Produksi

Seperti telah diuraikan dimuka, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai digunakan fungsi produksi *Cobb-Douglas* yang selanjutnya digunakan untuk menentukan efisiensi penggunaan faktor produksi. Fungsi produksi *Cobb-Douglas* tersebut dalam penyelesaiannya diubah bentuknya dalam bentuk logaritma sehingga menjadi fungsi linear.

Sebelum dilakukan estimasi koefisien regresi, model dilakukan pengujian sehingga memenuhi kriteria ekonomi, statistik dan ekonometrik. Kriteria ekonomi menyangkut tanda dan besaran, kriteria statistik menyangkut uji statistik seperti uji R^2 , uji F dan Uji t, kriteria ekonometrik menyangkut asumsi yang digunakan, hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan variabel terbebas dari multikolinearitas, bersifat homoskedastisitas dan data menyebar secara normal.

Nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,949 artinya keragaan produksi kedelai dapat dijelaskan oleh variabel bibit, Urea, NPK dan SP36 sebanyak 94,9 persen, sisanya 5,9 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model seperti iklim, kesuburan tanah, curah hujan, dll, yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Dari hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 300,966, sementara F tabel =2,210, dengan demikian nilai F hit > F tabel, maka tolak H_0 dan terima H_a , artinya penggunaan faktor -faktor produksi (bibit, urea, NPK dan SP36) secara serempak berpengaruh secara nyata terhadap produksi kedelai.

Hasil uji t menunjukkan, bibit, urea dan SP36 berpengaruh nyata terhadap produksi kedelai pada taraf nyata

1 persen dan sebaliknya untuk penggunaan pupuk NPK, hasil estimasi fungsi produksi secara rinci disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Estimasi Fungsi Produksi Kedelai

Faktor produksi	Koefisien regresi	t hitung	Prob.
Konstanta	-1,566	-9,631	0,000
Bibit	0,261	2,834***	0,006
Urea	0,554	7,572***	0,000
NPK	-0,194	-2,835	0,006
SP36	0,364	5,477***	0,000
F hitung	= 300,966		
F tabel (95%)	= 2,210		
t tabel (99 %)	= 2,576		
R^2	= 0,949		
α 0,01	= ***		

Sumber: Data Primer (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, maka hasil estimasi diperoleh fungsi produksi linier sebagai berikut:

$$\text{Log } Y = -\log 1,566 + 0,261 \log X_1^{***} + 0,554 \log X_2^{***} - 0,194 \log X_3 + 0,364^{***} + \log X_4 + e$$

Dimana:

- Y = Produksi kedelai (kw)
- (X_1) = Benih (kg)
- (X_2) = Pupuk Urea (kg)
- (X_3) = Pupuk NPK (kg)
- (X_3) = Pupuk SP36 (kg)

Pada persamaan di atas terlihat bahwa nilai b_1, b_2, b_3 adalah tetap walaupun variabel yang terlibat telah diubah menjadi bentuk logaritma, hal tersebut karena b_1, b_2, b_3 pada model fungsi *Cobb-Douglas* sekaligus menunjukkan nilai elastisitas X terhadap Y (Soekartawi, 2003). Elastisitas produksi usahatani kedelai secara keseluruhan adalah kurang dari satu yaitu 0,985 (merupakan penjumlahan dari b_1, b_2, b_3) namun lebih besar dari nol ($0 < e < 1$), artinya usahatani kedelai berada pada daerah rasional, petani kondisinya rasional bila berproduksi pada daerah ini dimana PM semakin menurun tapi masih positif.

Dari hasil pendugaan fungsi produksi kedelai ternyata benih (X_1) secara signifikan berpengaruh (pada taraf nyata 1 persen) terhadap hasil produksi kedelai, kenaikan penggunaan benih 1 persen akan meningkatkan produksi kedelai 0,261 persen. Peningkatan penggunaan benih berpengaruh nyata terhadap produksi kedelai karena jumlah benih yang digunakan masih pada standar dosis anjuran dan benih yang digunakan adalah benih varietas unggul. Hasil temuan tersebut sejalan dengan penelitian Kuntariningsih Apri dan Joko Mariyono (2013), penggunaan benih berpengaruh signifikan terhadap produksi kedelai dengan nilai elastisitas 0,28.

Pupuk urea (X_2) secara signifikan berpengaruh (pada taraf nyata 1 persen) terhadap hasil produksi kedelai, kenaikan penggunaan pupuk urea 1 persen akan

meningkatkan produksi kedelai 0,554 persen. Hal tersebut karena penggunaan pupuk urea masih dibawah dosis anjuran. Pupuk NPK (X_3) berpengaruh tidak secara signifikan terhadap hasil produksi kedelai, kenaikan penggunaan pupuk NPK 1 persen akan menurunkan produksi kedelai 0,194 persen. Peningkatan penggunaan NPK menurunkan produksi kedelai karena penggunaan NPK oleh petani kedelai sudah melebihi kebutuhan (diatas dosis anjuran).

Pupuk SP36 (X_4) secara signifikan berpengaruh (pada taraf nyata 1 persen) terhadap hasil produksi kedelai, kenaikan penggunaan pupuk SP36 sebanyak 1 persen akan meningkatkan produksi kedelai 0,364 persen. Hal tersebut karena penggunaan pupuk SP36 (36% Phospor) masih dibawah dosis anjuran. Hasil penelitian Ardiansyah N(2018) menyimpulkan bahwa pupuk TSP(46% Phospor) berpengaruh signifikan terhadap produksi kedelai dengan nilai elastisitas 0,259 di kabupaten Pandeglang.

Effisiensi Alokatif dari Faktor-Faktor Produksi

Menurut Soekartawi (2003), efisiensi harga (alokatif) menggambarkan hubungan antara tingkat penggunaan faktor produksi untuk mencapai keuntungan maksimum dengan memperhatikan harga-harga faktor produksi dan harga produk (*output*). Agar efisiensi harga dapat tercapai, hal tersebut dapat ditempuh dengan membeli faktor produksi pada saat harga yang murah dan menjual hasil produksi pada saat harga relatif tinggi sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal.

Untuk menguji apakah penggunaan faktor produksi sudah mencapai tingkat efisien atau belum maka digunakan analisis efisiensi alokatif. Menurut Soekartawi (2003), untuk menguji apakah penggunaan faktor produksi sudah mencapai tingkat efisien atau belum, hal tersebut dapat dilihat dari nilai rasio NPM_x / P_x . Efisiensi harga (alokatif) tercapai pada saat nilai produk dari masing-masing *input* sama dengan biaya marjinalnya. Situasi seperti ini akan terjadi apabila petani mampu membuat suatu upaya agar nilai produk marginal (NPM) untuk satu *input* sama dengan harga *input* (P_x) yang ditulis sebagai berikut: $NPM_x = P_x$ atau $NPM_x / P_x = 1$.

Menurut Sukirno (2004), NPM_x merupakan perkalian PM_x dengan harga output (kedelai), di sisi lain PM_x dibagi produk rata rata (PR) merupakan elastisitas produksi (yaitu nilai dari koefisien fungsi produksi *Cobb Douglass*). Nilai elastisitas produksi ditunjukkan oleh nilai koefisien b pada fungsi produksi *Cobb Douglass*, dari pendugaan fungsi produksi kedelai diperoleh nilai elastisitas produksi untuk benih adalah $b_1 = 0,261$. Sedangkan nilai PR dihitung dari rasio antara hasil produksi kedelai dengan jumlah masing-masing faktor produksi yang digunakan. Untuk menghitung PR benih diperoleh dengan cara merasiokan rata-rata hasil produksi kedelai (16,53 kuintal per hektar)

dengan rata rata penggunaan benih per hektar (50,92 kilogram per hektar), maka nilai PR untuk benih adalah $16,53/50,92 = 0,329$ artinya tiap satu kilogram benih akan menghasilkan kedelai sebanyak 0,329 kuintal.

Setelah diperoleh nilai PR maka selanjutnya dapat dihitung nilai PM yang merupakan perkalian nilai b_i dan PR (Agustiar, 2012). Nilai b_i yaitu 0,261 dikali dengan nilai PR yaitu 0,329 sehingga diperoleh nilai PM diperoleh nilai 0,086, artinya setiap penambahan satu kilogram benih akan meningkatkan produksi kedelai sebanyak 0,086 kuintal. Demikian perhitungan yang sama dapat dilakukan untuk input pupuk urea, pupuk NPK dan SP36. Nilai elastisitas produksi, PM dan PR dari masing-masing faktor produksi kedelai dapat dilihat di tabel 3.

Tabel 3. Elastisitas Produksi Kedelai

Faktor produksi	Produk Rata-rata	Elastisitas produksi	Produk marginal
X_1	0,329	0,261	0,086
X_2	0,132	0,554	0,073
X_3	0,154	-0,194	-0,029
X_4	0,155	0,364	0,056

Sumber: Data Primer (diolah)

NPM_x merupakan perkalian PM_x dengan harga output, dimana harga kedelai (output) adalah Rp. 677.140 per kuintal. Dengan demikian nilai NPM benih adalah 0,086 dikali 677.140 sama dengan 58.193,71. Nilai NPM tersebut digunakan untuk perhitungan efisiensi harga dari pemakaian faktor-faktor produksi (X_1, X_2, X_3), efisiensi harga tersebut merupakan perbandingan NPM dengan harga input P_x (Mufriantje, dkk, 2014). Efisiensi harga (alokatif) benih adalah 58.193,71. dibagi dengan 15.000,00 sama dengan 3,879. Nilai efisiensi faktor produksi lainnya dihitung dengan cara yang sama sehingga diperoleh hasil seperti di tabel 4.

Tabel 4. Effisiensi Faktor Produksi Tempe

Faktor produksi	NPM	P_x	Effisiensi
X_1	58.193,71	15.000,00	3,879
X_2	49.492,97	1.762,86	28,075
X_3	-20.199,00	2.485,71	-8,126
X_4	38.087,86	2.178,60	17,482

Sumber: Data Primer (diolah)

Effisiensi harga (alokatif) untuk pemakaian faktor produksi tercapai pada saat nilai nilai perbandingan NPM / P_x sama dengan satu. Dari tabel 4 terlihat bahwa nilai efisiensi ekonomi benih (X_1), pupuk urea (X_2) dan Pupuk Sp36 X_4 lebih besar dari satu artinya benih, pupuk urea dan pupuk SP36 pemakaiannya belum efisien, sehingga penggunaan faktor produksi tersebut perlu ditambah, karena penggunaan ke tiga faktor produksi tersebut saat ini relatif masih dibawah dosis anjuran. Penelitian tentang efisiensi penggunaan faktor produksi kedelai yang dilakukan oleh

Matakena (2012) menemukan penggunaan benih dan pupuk pada usahatani kedelai di distrik Makimi adalah belum efisien. Di sisi lain, nilai efisiensi untuk faktor produksi NPK kurang dari satu artinya tidak efisien, sehingga penggunaan NPK perlu dikurangi. Hal tersebut dikarenakan penggunaan pupuk NPK oleh petani telah melebihi dosis anjuran menurut standar Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Indramayu.

Untuk mengetahui tingkat efisiensi usahatani kedelai secara keseluruhan maka, dilakukan penjumlahan nilai efisiensi dari masing-masing faktor produksi (Muzdalifah, 2011). Dari hasil perhitungan maka diperoleh nilai sebagai berikut:

$$EH = \frac{NPM_1 + NPM_2 + NPM_3 + NPM_4}{4} = 10,32$$

Nilai 10,32 menunjukkan usahatani kedelai secara keseluruhan belum efisien (karena nilai efisiensi secara keseluruhan lebih besar dari 1), dengan demikian penggunaan faktor-faktor produksi kedelai adalah belum efisien sehingga penggunaannya faktor-faktor produksi harus ditambah. Apabila kita lihat dari nilai elastisitas produksi usahatani kedelai secara keseluruhan sebesar 0,985 menunjukkan bahwa usahatani kedelai berada pada daerah rasional (daerah II), dimana penambahan faktor produksi masih meningkatkan hasil produksi walaupun penambahan hasil produksi sudah menurun (PM menurun) tetapi masih positif.

SIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai adalah benih, pupuk urea dan pupuk SP36, karena penggunaannya masih dibawah standar dosis anjuran. Penggunaan benih, pupuk urea dan pupuk SP36 kondisinya belum efisien sehingga penggunaannya perlu ditambah, sementara penggunaan NPK sudah tidak lagi efisien sehingga penggunaannya perlu dikurangi. Usahatani kedelai secara keseluruhan belum efisien sehingga perlu penambahan faktor-faktor produksi (benih dan pupuk). Dengan kata lain peningkatan produksi kedelai dapat dilakukan dengan cara intensifikasi yaitu dengan penambahan/perbaikan penggunaan benih dan pupuk. Hal tersebut dikarenakan lahan kedelai di lokasi penelitian masih merespon dengan baik penggunaan benih dan pupuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, N., Slamet, H. & Suryantini, A. (2018). Technical Efficiency of Soybean in Pandeglang Regency. *Agro Ekonomi*, 29, (1), 1-17.
- Agustiar. (2012). Analisis Produksi Optimum pada Industri Keripik Singkong. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 16, (3), 209-217.
- BP3K. (2017). Programa. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan. Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu
- Dewi, I.G.A.C. (2012). Analisis efisiensi usahatani padi sawah studi kasus di Subak Pacung Babakan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, 1, (1), 1-10.
- Hayati., Siti, A., Aida, V. & Prabowo. (2015). Kemampuan Perempuan Tani dalam Mendukung Ketahanan Pangan Rumah Tangga. *Sosiohumaniora*. 17, (3), 29-235.
- Irawan, S.B., Siregar H. & Kurnia U. (2006). Evaluasi Ekonomi Lahan Pertanian: Pendekatan Nilai Manfaat Multifungsi Lahan Sawah dan Lahan Kering. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 11, (3), 32-41.
- Kementrian Pertanian (2017). Statistik Tanaman Pangan. Jakarta: Kementan.
- Kuntariningsih, A. & Mariyono, J. (2013). Dampak Pelatihan Petani terhadap Kinerja Usahatani Kedelai di Jawa Timur. *Sosiohumaniora*, Vol 15 (2), 139-150
- Matakena, S. (2012). Efisiensi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Guna Meningkatkan Produksi Usahatani Kedelai di Distrik Makimi Kabupaten Nabire. *Jurnal Agribisnis Kepulauan*, 1, (1), 43-60
- Mufriantje, F. & Anton. (2014). Analisis Faktor Produksi dan Efisiensi Alokatif Usahatani Bayam (*Amaranthus sp*) Di Kota Bengkulu. *Jurnal AGRISEP*, 15, (1), 31-37
- Muzdalifah. 2011. Analisis Produksi dan Efisiensi Usahatani Padi di Kabupaten Banjar. *Jurnal Agribisnis Perdesaan*, 1, (4), 40-49
- Soekartawi. 2003. *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Cetakan ke-7, Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno S. (2004). Pengantar Teori Mikroekonomi (Edisi ketiga). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suminartika, E. (2010). Kemampuan Perajin (Tahu-Tempe) di Kabupaten Sumedang dalam Mengembangkan Usaha. Bandung: LPPM Unpad.
- Suminartika. (2012). Productivity of Soybean Farming in Indonesia. Proceeding: Producer Agency in the Global Market. Bandung: Unpad.

APLIKASI MODEL ORGANISASI PADA STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Ani Martini¹, M. Irwan Tahir² dan Halilul Khairi³

¹Program Studi Politik Pemerintahan, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

²Program Studi Magister Terapan, Studi Pemerintahan Pascasarjana, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

³Program Studi Kebijakan Pemerintahan, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: animartini@ipdn.ac.id

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model organisasi yang efisien dan efektif bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Penelitian dilakukan pada 5 (lima) provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Bengkulu, Kalimantan Timur, Aceh dan Maluku, serta 6 (enam) kabupaten/kota yaitu Kab. Bogor, Kab. Panajam Paser Utara, Kab. Maluku Tengah, Kab. Aceh Besar, Kota Sabang dan Kota Bengkulu. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan melalui aplikasi model penyelenggaraan pemerintahan dengan teknik pengumpulan data melalui teknik pengumpulan data FGD terhadap kepala perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan. Aplikasi model merujuk kepada model yang dikemukakan oleh Goldsmith dan Eggers yang mengembangkan 4 (empat) model yaitu: 1) hierarkhis; 2) kerjasama; 3) alih daya dari pihak luar; serta 4) berbasis pada jejaring (Goldsmith & Eggers, 2004). Model penyelenggaraan pemerintahan tersebut kemudian dikombinasikan dengan model organisasi menurut Stanford, antara lain struktur fungsional, divisional berdasarkan produk, divisional berdasarkan wilayah geografis, divisional berdasarkan proses kerja, divisional berdasarkan segmentasi pelanggan, struktur matriks, organisasi jejaring (*network*), struktur klaster (*cluster*); dan struktur organisasi "life-form" (Stanford, 2007). Adapun besaran perangkat daerah ditentukan berdasarkan besarnya beban urusan pemerintahan masing-masing yang jumlah strukturnya ditentukan sesuai dengan model perangkat daerah setiap urusan pemerintahan.

Kata kunci: Model organisasi; perangkat daerah; urusan pemerintahan.

ORGANIZATIONAL MODEL APPLICATION ON LOCAL AGENCY ORGANIZATIONAL STRUTURE

ABSTRACT. This study aimed to formulate an effective organizational model for regional authorities in organizing governmental affairs which were their authority. The study was conducted in 5 (five) provinces namely West Java, Bengkulu, East Kalimantan, Aceh and Maluku, as well as 6 (six) residence/cities, Kab. Bogor, Kab. Panajam Paser Utara, Kab. Central Maluku, Kab. Aceh Besar, Kota Sabang and Kota Bengkulu. The research design used was field research through applying model of governance implementation and FGD method to collect data from chief of local agencies, referring to the model proposed by Goldsmith and Eggers who developed 4 (four) models namely: 1) hierarchical; 2) cooperation; 3) outsourcing from outside parties; and 4) based on networks (Goldsmith & Eggers, 2004). The governance model was then combined with the organizational model according to Stanford, including functional structures, divisional based on products, divisional based on geographical area, divisional based on work processes, divisional based on customer segmentation, matrix structure, network organization, cluster structure; and "life-form" organizational structure (Stanford, 2007). The magnitude of the local agencies is determined by the magnitude of the burden of their respective governmental affairs whose number of structures is determined according to the model of local agency for each government affairs.

Keywords: organizational design; local agency; government affairs.

PENDAHULUAN

Model organisasi perangkat daerah yang digunakan silih berganti dimulai dari era orde baru hingga saat ini. Meskipun modelnya silih berganti, namun yang tidak berubah adalah paradigma penyeragaman pola antardaerah dan antarurusan pemerintahan. Pada masa orde baru, pola perangkat daerah nyaris sama antar semua daerah baik jenisnya maupun ukurannya, dimana dinas daerah umumnya hanya terdiri dari perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan pangkal dan hanya sedikit sekali daerah yang diberikan kewenangan tambahan di luar kewenangan pangkal.

Pada masa reformasi, sebagian besar urusan pemerintahan di serahkan kepada daerah yang dimulai

dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dengan beralihnya urusan pemerintahan ke daerah, diikuti pula oleh perubahan format organisasi perangkat daerah. Pada masa awal reformasi, Kepala organisasi perangkat daerah mengalami perubahan yang sangat drastis dan fundamental, dimana eselon kepala perangkat daerah dinaikkan eselonnya dari eselon III/b menjadi eselon II/b, juga dibentuk jabatan wakil kepala dinas. Sejak masa orde reformasi pola organisasi perangkat daerah telah beberapa kali mengalami perubahan. Pola pertama diatur dalam PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya diubah dengan PP No 8 tahun 2003. Perubahan UU No 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah juga membawa perubahan terhadap pedoman organisasi perangkat daerah, yaitu dengan diterbitkannya PP Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang mencabut PP Nomor 84 Tahun 2000 beserta perubahannya.

Terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga berdampak pada perubahan pola organisasi perangkat daerah. Tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut telah dibentuknya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah mengubah pola pembentukan perangkat daerah dari prinsip pengelompokan klasifikasi daerah, menjadi prinsip pengelompokan klasifikasi urusan pemerintahan. Dalam PP No 41 Tahun 2007, daerah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu Daerah besar (A), daerah sedang (B) dan daerah kecil (C). Setiap klas daerah ditentukan batas maksimal jumlah dinas dan lemtekd yang diperbolehkan untuk dibentuk. Sedangkan pola menurut PP Nomor 18 Tahun 2016 adalah bahwa setiap urusan pemerintahan diklasifikasikan ke dalam 3 tipe yaitu tipe A, tipe B dan tipe C. Setiap tipe mempunyai besaran struktur unit kerja yang berbeda-beda. Untuk membatasi jumlah perangkat daerah, PP Nomor 18 Tahun 2016 membolehkan beberapa urusan pemerintahan digabung ke dalam satu dinas dengan maksimal penggabungan 3 (tiga) urusan pemerintahan.

Meskipun pola/model perangkat daerah sudah mengalami beberapa kali perubahan, namun kesan bahwa perangkat daerah belum sesuai dengan kebutuhan dan beban nyata di lapangan masih sangat terasa. Adanya ketidaktepatan pola/model ini dapat dilihat dari adanya

perbedaan besaran perangkat daerah yang tajam antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kepala daerah yang berpikiran kuat untuk melakukan perampingan telah menetapkan jumlah perangkat daerah yang sangat kecil baik jenis maupun struktur unit kerjanya. Sebaliknya terdapat daerah yang membentuk perangkat daerah dengan batasan maksimal, sehingga baik jenis maupun struktur unit kerjanya sangat gemuk. Perbedaan yang tajam ini memberikan "signal" bahwa pola pembentukan perangkat daerah yang ditetapkan belum sepenuhnya menggambarkan beban nyata sesuai dengan realitas. Tidak tepatnya pola yang ada saat ini dikarenakan adanya penyeragaman jenis dan pola struktur unit kerja pada perangkat daerah serta adanya pola penyeragaman jenis dan susunan perangkat daerah antar daerah di Indonesia.

Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kecenderungan terjadi pembengkakan jumlah perangkat daerah. Hasil kajian Kompas pada akhir tahun 2016 menunjukkan bahwa terjadi penambahan jumlah perangkat daerah pada 17 (tujuh belas) kabupaten/kota di Indonesia yang telah menata susunan organisasinya. Sumber: <https://www.kompasiana.com/fransdionesa>

Terjadinya pembengkakan jumlah organisasi perangkat daerah, sudah barang tentu berimplikasi terhadap kebutuhan jumlah pegawai dan jumlah anggaran. Namun kebijakan perubahan organisasi yang cenderung membengkak tersebut tidak diikuti dengan kebijakan penerimaan pegawai mengingat kebijakan kepegawaian merupakan ranah Pemerintah Pusat dimana 6 (enam) tahun terakhir terjadi pertumbuhan minus (*minus growth*), dari jumlah pegawai sebanyak 4.732.472 pada tahun 2010,

Tabel 1. Penambahan Jumlah OPD pada 17 Kab/Kota di Indonesia Pasca Penerapan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

No	Kab/Kota	Prov.	Hasil Pemetaan Urusan Menurut Tipologi					Proyeksi Jmlh OPD	Eksisting Jmlh OPD	Selisih	Ket
			A	B	C	Bid	Sie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kab. Badung	Bali	8	22	5	2	3	35	27	8	Bertambah
	Kab. Bandung Barat	Jabar	10	18	10	1	1	38	24	14	Bertambah
	Kab. Banjarnegara	Jateng	12	12	11	3	2	35	23	12	Bertambah
	Kab. Banyumas	Jateng	20	11	5	1	3	36	25	11	Bertambah
	Kab. Barito Utara	Kalteng	6	14	14	4	2	34	24	10	Bertambah
	Kab. Bekasi	Jabar	15	16	4	2	3	35	25	10	Bertambah
	Kab. Boalemo	Goron-talo	6	13	5	9	7	24	21	3	Bertambah
	Kab. Kulonprogo	DIY	4	21	9	2	4	34	23	11	Bertambah
	Kab. Morowali	Sulteng	4	12	12	7	5	28	26	2	Bertambah
	Kab. Dharmasraya	Sumbar	7	11	14	5	3	32	23	9	Bertambah
	Kab. Karangasem	Bali	14	17	5	0	4	36	28	8	Bertambah
	Kab. Karo	Sumut	7	16	10	3	4	33	28	5	Bertambah
	Kab. Wajo	Sulsel	20	10	6	2	2	36	29	7	Bertambah
	Kab. Sabu Raijua	NTT	0	10	15	8	7	25	21	4	Bertambah
	Kota Ambon	Maluku	10	12	10	5	3	32	28	4	Bertambah
	Kota Dumai	Riau	9	10	11	7	3	30	23	7	Bertambah
	Kota Salatiga	Jateng	3	13	16	2	6	32	20	12	Bertambah
	JUMLAH							555	418	137	

3. Model organisasi matriks;
4. Model organisasi jejaring (*network*);
5. Model organisasi kluster (*cluster*); dan
6. Model organisasi "life-form". (Stanford, 2007)

Berkaitan organisasi perangkat daerah, secara normatif diatur pada Pasal 208 Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa perangkat daerah adalah organisasi pada pemerintah daerah, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing susunan pemerintahan. Pada daerah propinsi perangkat daerah yang dibentuk meliputi: sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan. Sedangkan pada daerah kabupaten/kota perangkat daerah yang dibentuk antara lain meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan serta kecamatan. Spesifikasi tugas yang diemban setiap organisasi dapat lebih jelas menggambarkan jenis organisasi perangkat daerah. Berikut penjelasan maksud kedudukan masing-masing organisasi perangkat daerah.

Sekretariat Daerah memiliki tugas membantu kepala daerah dalam rangka penyusunan kebijakan serta pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelayanan administratif. Sekretaris DPRD mempunyai tugas: menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi bidang keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Adapun Inspektorat memiliki tugas membantu kepala daerah membina serta mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh masing-masing perangkat daerah.

Selanjutnya perangkat daerah yang berbentuk Dinas, disusun sebagai organisasi yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun perangkat daerah ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga) tipe berdasarkan beban kerja yang diurus, yaitu Dinas Tipe A, Tipe B dan Tipe C. Dinas tipe A dibentuk dalam rangka mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan kriteria beban kerja yang besar. Selanjutnya dinas tipe B dibentuk dalam rangka mewadahi urusan pemerintahan dengan kriteria beban kerja yang sedang, serta untuk dinas tipe C dibentuk dalam rangka mewadahi urusan pemerintahan dengan kriteria beban kerja yang kecil.

Organisasi perangkat daerah berikutnya adalah Badan, dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan

fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Organisasi ini pun diklasifikasikan dalam bentuk 3 (tiga) tipe, yakni Badan tipe A, tipe B dan tipe C. Badan dengan tipe A dibentuk dalam rangka mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan kriteria beban kerja yang besar. Kemudian Badan dengan tipe B dibentuk dalam rangka mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan kriteria beban kerja sedang, serta Badan tipe C dibentuk dalam rangka mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja kecil.

Regulasi yang mengatur pembentukan perangkat daerah yang selama ini menjadi acuan bagi daerah, ternyata belum mampu membangkitkan semangat otonomi yang memberikan kewenangan bagi daerah dalam rangka mengembangkan inovasi berdasarkan visi dan misi (Tahir, 2016). Organisasi perangkat daerah yang dibentuk umumnya tidak dalam posisi sebagai pusat penyelenggaraan visi dan misi dari pemerintah daerah, akan tetapi hanya didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*rule driven organization*). Sesuai ketentuan PP No. 18 Tahun 2016, besaran dan struktur organisasi yang dibentuk tersebut selama ini hanya berdasarkan perhitungan *scoring* dan sangat berpengaruh dalam menentukan apakah suatu unit perlu dipertahankan, diubah, atau dihapuskan. Padahal menurut Stanford (2007), mendesain organisasi merupakan hasil dari penyesuaian semua komponen organisasi menuju pencapaian misi atau tujuan yang disepakati.

Ada kecenderungan saat ini ketidaksesuaian antara besaran struktur organisasi yang dibentuk dengan visi/misi organisasi yang ditetapkan. Hal ini akan menjadi penyebab penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berjalan dalam jalur rutinitas belaka sehingga cenderung tidak mampu berdampak pada perubahan yang mendasar di daerah sesuai visi yang telah ditetapkan. Organisasi perangkat daerah yang dibentuk seringkali tidak memberikan kontribusi maksimal bagi pengembangan pembangunan daerah. Padahal Osborne dan Gaebbler sudah mengingatkan perlunya mengubah filosofi membentuk organisasi pemerintahan, dari organisasi yang berorientasi peraturan (*rule driven organization*) ke organisasi yang berorientasi pada misi organisasi (*mission driven organization*) (Osborne & Gaebbler, 1995).

Berdasarkan pertimbangan dan penjelasan di atas, maka untuk mendesain organisasi perangkat daerah yang tepat sesuai dengan arah dan tujuan pemerintahan daerah, dilakukan analisis desain organisasi perangkat daerah yang ditentukan oleh karakteristik urusan pemerintahan daerah

kewenangan, tugas dan fungsinya dikerjasamakan, dialih dayakan atau memanfaatkan jejaring (network) dengan pihak luar pemerintahan. Sebaliknya diberikan penilaian rendah apabila kurang dari 50% penyelenggaraan kewenangan, tugas dan fungsinya dikerjasamakan, dialih dayakan atau memanfaatkan jejaring (network) dengan pihak luar pemerintahan. Adapun kemampuan manajemen jejaring dinilai dengan kriteria tinggi apabila pemerintah daerah telah menerapkan manajemen pengelolaan barang dan jasa melalui pembentukan unit kerja pengelolaan barang/jasa pemerintah (UKPBJ) atau unit layanan pengadaan (ULP) secara mandiri. Sebaliknya diberikan penilaian rendah apabila daerah belum membentuk unit kerja pengelolaan barang/jasa pemerintah (UKPBJ) atau

unit layanan pengadaan (ULP) masih dilaksanakan secara *ex-officio* pejabat struktural lain. Hasil dari konfirmasi di lapangan menunjukkan hasil sebagaimana tabel 2 berikut.

Berdasarkan karakteristik urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan tersebut di atas, dapat disusun model dan struktur organisasi perangkat daerah sebagai berikut:

1. Model Organisasi Fungsional

Hasil pengumpulan data dan FGD terhadap kelompok urusan pemerintahan ketertiban umum dan linmas, statistik, kearsipan, perpustakaan, fungsi pendukung inspektorat, fungsi penunjang keuangan, perencanaan, kepegawaian dan diklat serta penelitian dan pengembangan memiliki karakteristik:

Tabel 2. Checklist Kriteria Model Pengelolaan Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan/Fungsi penunjang	Kriteria (Tinggi/Rendah)		Rekomendasi Model Pengelolaan Urusan
		Kolaborasi Pemerintah-Swasta	Kemampuan Manajemen Jejaring	
	Kehutanan	Rendah	Rendah	Hierarkhi
	Pertanian	Rendah	Tinggi	Joined-up
	Kesehatan	Rendah	Tinggi	Joined-up
	Tenaga Kerja	Rendah	Rendah	Hierarkhi
	Transmigrasi	Rendah	Rendah	Hierarkhi
	Arsip	Rendah	Rendah	Hierarkhi
	Perpustakaan	Rendah	Tinggi	Joined-up
	Pendidikan	Rendah	Tinggi	Joined-up
	Lingkungan Hidup	Tinggi	Tinggi	Jejaring
	Pemuda dan Olah Raga	Tinggi	Rendah	Outsourcing
	Kebudayaan	Rendah	Tinggi	Kerjasama
	Sosial	Rendah	Tinggi	Kerjasama
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rendah	Tinggi	Kerjasama
	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Tinggi	Rendah	Outsourcing
	Koperasi dan UMKM	Tinggi	Tinggi	Jejaring
	Perhubungan	Tinggi	Tinggi	Jejaring
	Trantibum dan Linmas	Rendah	Rendah	Hierarkhi
	Pemukiman dan perumahan	Tinggi	Rendah	Outsourcing
	Perindustrian	Tinggi	Tinggi	Jejaring
	Perdagangan	Tinggi	Tinggi	Jejaring
	Kelautan dan Perikanan	Rendah	Tinggi	Joined-up
	perhubungan (kepulauan)	Rendah	Rendah	Hierarkhi
	Kependudukan dan Capil	Rendah	Rendah	Hierarkhi
	Ketahanan Pangan	Rendah	Tinggi	Joined-up
	Komunikasi dan Informatika	Tinggi	Tinggi	Jejaring
	Pariwisata	Tinggi	Rendah	Outsourcing
	ESDM	Tinggi	Rendah	Outsourcing
	pertanahan	Rendah	Tinggi	Joined-up
	Penanaman modal	Tinggi	Tinggi	Jejaring
	Pengendalian Penduduk dan KB	Rendah	Tinggi	Jejaring
	Pemberdayaan Perempuan dan PA	Rendah	Tinggi	Joined-up
	Statistik	Rendah	Rendah	Hierarkhi
	Persandian	Rendah	Rendah	Hierarkhi
	Perencanaan	Tinggi	Tinggi	Jejaring
	Kepegawaian dan diklat	Tinggi	Tinggi	Jejaring
	Keuangan	Rendah	Rendah	Hierarkhi
	Penelitian dan pengembangan	Tinggi	Rendah	Outsourcing
	Inspektorat	Rendah	Rendah	Hierarkhi
	Sekretariat Daerah	Rendah	Rendah	Hierarkhi
	Sekretariat DPRD	Rendah	Rendah	Hierarkhi

Sumber: Diolah dari hasil FGD berdasarkan model Goldsmith dan Eggers, 2004.

menjadi 4.348.698 pada tahun 2016 atau berkurang sekitar 383.000 orang pegawai selama 6 tahun.

Dari aspek keuangan, penambahan struktur organisasi berdampak juga terhadap penambahan anggaran. Data Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan laporan realisasi APBD tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat 6 (enam) daerah kab/kota di Indonesia yang memiliki rasio jumlah belanja aparatur yang melebihi 50% dari besaran total APBD-nya, daerah tersebut antara lain Kab. Limapuluhkota, Kota Binjai, Kota Pematangsiantar, Kota Bukittinggi, Kota Bengkulu, dan Kota Kendari. Hal tersebut ditengarai sebagai akibat dari bertambahnya jabatan dalam struktur organisasi perangkat daerah. Data selanjutnya yang menunjukkan masih rendahnya kinerja birokrasi pemerintah daerah pada umumnya di Indonesia adalah nilai Indeks Efektivitas Pemerintah berdasarkan penilaian *World Bank* pada tahun 2016, dimana Indonesia menduduki rangking 113 dunia, atau masih berada di bawah negara-negara ASEAN seperti Singapura (rangking 1), Malaysia (rangking 49), Thailand (rangking 72), Philipina (rangking 89) dan Vietnam (rangking 94).

Karakter yang abstrak dari organisasi menyebabkan organisasi dapat didefinisikan melalui berbagai macam cara, sesuai sudut pandang serta latar belakang dari masing-masing peneliti. Sebuah organisasi adalah sistem perserikatan yang formal dari 2 (dua) orang atau lebih yang saling bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Hasibuan, 2013). Adapun pendapat dari Robbins bahwa organisasi adalah sebuah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan batasan relatif dapat diidentifikasi, dan bekerja di atas dasar yang relatif terus menerus dalam rangka mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Robbins, 1994).

Berdasarkan fungsi dan peranannya, secara umum organisasi dibagi menjadi tiga kategori yaitu organisasi pencari keuntungan (*profit*), organisasi publik, dan organisasi nirlaba (*nonprofit*). Organisasi dengan ciri pencari keuntungan biasanya berbentuk organisasi swasta atau organisasi bisnis yang dibentuk dengan tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan (Pynes, 2009). Organisasi publik merupakan organisasi birokrasi pemerintahan yang dibentuk dengan tujuan utama memberikan pelayanan publik. Sedangkan organisasi nirlaba yang biasa disebut lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan, organisasi kemasyarakatan, umumnya dibentuk dalam rangka memberikan pendampingan, maupun bantuan sosial dan kemasyarakatan.

Khusus untuk organisasi pemerintahan atau organisasi publik, Goldsmith dan Eggers mengembangkan empat model organisasi sebagai hasil perpaduan antara kemampuan manajemen jejaring dan kolaborasi antara

sektor publik dengan privat. Keempat model tersebut yaitu: 1) pola hirarkhi (*hierarchy*); 2) kerjasama dengan pihak ketiga (*joined-up*); 3) alih daya dari pihak luar (*outsourcing*); serta 4) jejaring (*network*) (Goldsmith & Eggers, 2004). Pola hirarkhi merujuk pada organisasi dengan ciri penggunaan kewenangan melalui jalur komando sebagaimana di dunia militer (Laegaard, 2006). Pengalihdayaan mengacu pada kontrak kegiatan yang perlu dilakukan secara teratur, yang jika kegiatan tersebut tidak akan dilakukan dalam suatu organisasi (Child, 2015). Organisasi jejaring merupakan konstelasi unit bisnis yang biasanya saling bergantung, mengandalkan satu sama lain untuk keahlian dan pengetahuan kritis dan memiliki hubungan yang erat dengan pusat organisasi (Oden, 1999)

Pemahaman disain organisasi menurut Kates dan Galbraith merupakan proses yang disengaja untuk mengkonfigurasi proses, struktur, sistem penghargaan dan praktek untuk menciptakan organisasi yang efektif yang mampu mencapai strategi bisnis organisasi (Kates & Galbraith, 2007). Sedangkan menurut Stanford, desain organisasi adalah seluruh rangkaian pekerjaan yang menghasilkan penyelesaian visi/misi, nilai, prinsip operasi, strategi, tujuan, taktik, sistem, struktur, orang, proses, budaya dan ukuran kinerja untuk memberikan hasil yang diperlukan dalam konteks operasional organisasi, ibaratnya dalam balap mobil, memenangkan kejuaraan ditentukan oleh lebih dari sekedar struktur mobil (Stanford, 2007).

Kajian tentang desain organisasi sebagai bagian dari kajian teori organisasi, mengalami perkembangan melalui berbagai penelitian. Beberapa kajian terdahulu tentang struktur organisasi (Ahmady, Mehrpourb, & Nikooravesh, 2016; Lunenburg, 2012), desain struktur organisasi untuk pengembangan strategi organisasi (Gurianova & Mechtcheriakova, 2015), model budaya organisasi (Hogan & Coote, 2014; Upadhaya, Munir, Blount, & Su, 2018) values and norms, artifacts and behaviors, model inovasi organisasi (Anzola-Román, Bayona-Sáez, & García-Marco, 2018), dan model organisasi perangkat daerah (Tahir, 2016).

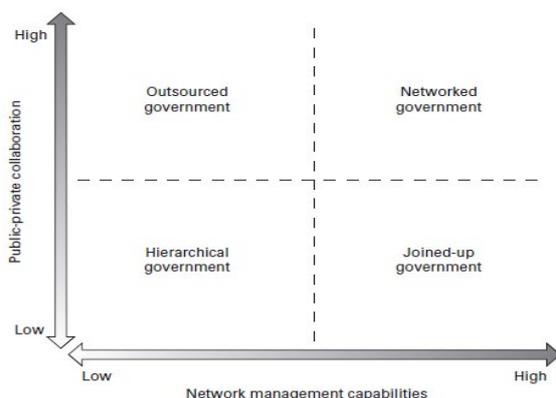
Salah satu tujuan desain organisasi adalah untuk mewujudkan tingkat pengendalian yang semestinya atas kegiatan organisasi (Sadler, 1994). Untuk itu lebih lanjut Stanford mengelompokkan model struktur organisasi berdasarkan fokusnya antara lain:

1. Model organisasi fungsional;
2. Model organisasi divisional, terdiri dari:
 - a. Model organisasi divisional berdasarkan produk;
 - b. Model organisasi divisional berdasarkan wilayah geografis;
 - c. Model organisasi divisional berdasarkan proses kerja;
 - d. Model organisasi divisional berdasarkan segmentasi pelanggan.

yang menjadi kewenangan daerah serta karakteristik daerah itu sendiri. Dengan demikian setiap daerah dan setiap urusan pemerintahan dapat berbeda desain dan struktur organisasi perangkat daerahnya, tetapi tetap berkinerja maksimal untuk pencapaian tujuan pemerintahan daerahnya. Menurut pandangan Stanford, ada 5 (lima) kesepakatan untuk mendesain organisasi (*Five rules of thumb for design*) yaitu 1) susun desain ketika ada alasan kuat, 2) kembangkan pilihan-pilihan sebelum menentukan desain, 3) pilih waktu yang tepat untuk mendesain, 4) cari petunjuk bahwa segala sesuatunya belum tentu selaras, dan 5) tetap waspada terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan (Stanford, 2007). Kelima pedoman di atas menjadi acuan penyusunan organisasi, dimulai dari adanya alasan yang tepat, kemudian mengembangkan pilihan-pilihan sebelum memutuskan satu rancangan, memilih waktu yang tepat untuk membuat rancangan organisasi perangkat daerah, melihat gejala adanya hal-hal di luar rencana, serta perkiraan masa depan.

METODE

Desain penelitian yang digunakan adalah aplikasi model pemerintahan merujuk kepada model yang dikemukakan oleh Goldsmith dan Eggers (Goldsmith & Eggers, 2004) dan desain model organisasi (Stanford, 2007). Goldsmith dan Eggers mengembangkan 4 (empat) model pemerintahan sebagai hasil perpaduan antara kemampuan manajemen jejaring dan kolaborasi antara sektor publik dengan privat. Keempat model tersebut yaitu: 1) hierarkhis; 2) kerjasama; 3) alih daya dari pihak luar; serta 4) berbasis pada jejaring. Model tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Pemerintahan Sumber: Goldsmith dan Eggers (2004)

Analisis selanjutnya dilakukan dengan membandingkan pola produksi/layanan pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah mengacu kepada pendapat Goldsmith dan Eggers (Goldsmith & Eggers, 2004) tersebut dengan rancangan struktur organisasi yang tepat sesuai pendapat Stanford (Stanford, 2007). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui FGD

terhadap kepala-kepala perangkat daerah dari masing-masing urusan pemerintahan (32 urusan pemerintahan dan 4 fungsi penunjang urusan), dokumentasi dan daftar isian yang berikan kepada organisasi perangkat daerah pelaksana dan penunjang urusan pemerintahan pada 5 (lima) provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Bengkulu, Kalimantan Timur, Aceh dan Maluku, serta 6 (enam) kabupaten/kota yaitu Kab. Bogor, Kab. Panajam Paser Utara, Kab. Maluku Tengah, Kab. Aceh Besar, Kota Sabang dan Kota Bengkulu. Rentang waktu penelitian selama 6 (enam) bulan antara bulan April-Oktober 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

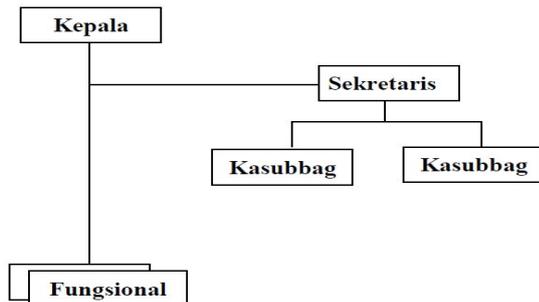
Unsur-unsur perangkat daerah yang ada saat ini dikelompokkan berdasarkan 5 (lima) elemen dasar organisasi meliputi *strategic apex*, *middle line*, *operating core*, *technostructure*, dan *supporting staff* (Mintzberg, 1983). *Strategic apex* diperankan oleh Kepala daerah sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretaris Daerah berperan sebagai *middle line* dengan kedudukannya sebagai permus kebijakan pemerintahan daerah dan pejabat pembina ASN, *operating core* diperankan oleh Dinas sebagai pelaksana urusan pemerintahan, *technostructure* diperankan oleh Badan sebagai fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, serta *supporting staff* diperankan oleh Sekretariat Daerah dan Sekreatariat DPRD yang melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan. Landasan utama pembentukan perangkat daerah menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah oleh perangkat daerah dalam prakteknya berdasarkan beberapa model pemerintahan.

Merujuk kepada pendapat Goldsmith dan Eggers tentang kerangka model pemerintahan (Goldsmith & Eggers, 2004), selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap aspek kemampuan kolaborasi publik-swasta dan kapasitas kemampuan manajemen jejaring dalam pengelolaan setiap urusan pemerintahan. Dari hasil identifikasi tersebut dapat diketahui desain organisasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah dalam mengelola urusan pemerintahannya. Melalui pendalaman terhadap kewenangan, tugas dan fungsi, dklasifikasi model pengelolaan urusan berdasarkan penilaian tinggi atau rendahnya aspek kolaborasi pemerintah-swasta dan aspek tingkat kemampuan manajemen jejaring dari perangkat daerah.

Kolaborasi pemerintah-swasta dinilai dengan kriteria tinggi apabila 50% atau lebih dari penyelenggaraan

- a. Spesialisasi rendah
- b. Pelaksanaan fungsi inti dilakukan oleh fungsional yang mandiri dan ahli;
- c. Tidak memerlukan dukungan sarana dan prasarana kerja yang kompleks.
- d. lingkungan kerja bersifat rutin (terstandarisasi).

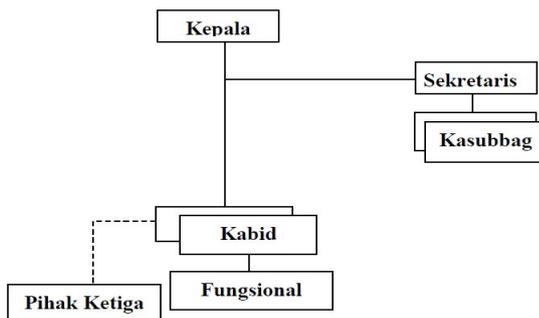
Dengan karakteristik penyelenggaraan urusan dan fungsi penunjang tersebut tersebut maka struktur organisasi yang sesuai adalah model organisasi fungsional (Burton, Desanctis, & Keller, 2011; Hatch, 2006), dengan desain bagan struktur sebagai berikut:



Gambar 2. Desain Organisasi Fungsional Perangkat Daerah

Besaran organisasi perangkat daerah dari model organisasi fungsional ini dibedakan berdasarkan jumlah kasubbag pada sekretariat. Kelompok fungsional dapat dibentuk secara permanen dan dapat pula untuk dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus yang bersifat *ad hoc*.

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan ditemukan bahwa pelaksanaan fungsi inti dilakukan oleh fungsional yang mandiri dan ahli, namun dalam hal terdapat keterbatasan tenaga fungsional untuk sebagian pekerjaan yang memerlukan keahlian yang tinggi atau kompleks, maka penyelenggaraan urusan atau fungsi penunjang tersebut dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Karakteristik ini ditemukan pada penyelenggaraan urusan dan penunjang urusan pemerintahan antara lain keuangan, perencanaan serta kepegawaian dan diklat. Desain organisasi untuk model ini adalah pengembangan model organisasi fungsional dengan kombinasi jejaring. Adapun desain struktur organisasi untuk model organisasi fungsional jejaring ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Model Organisasi Fungsional Jejaring Perangkat Daerah

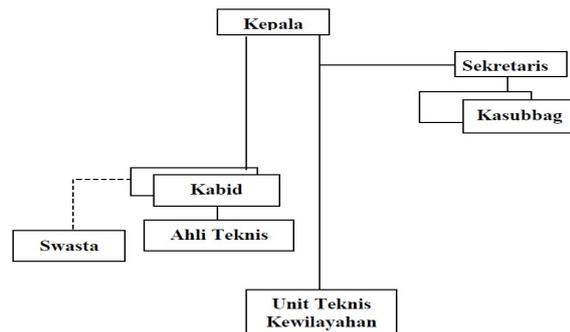
Adapun besaran organisasi perangkat daerah dari model organisasi fungsional jejaring ini dibedakan berdasarkan jumlah subbagian pada sekretariat dan jumlah Bidang.

2. Model Organisasi Divisonal Produk

Pada urusan dan penunjang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pendidikan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan serta urusan kelautan dan perikanan, ditemukan karakteristik sebagai berikut:

- a. Spesialisasi sedang atau tinggi
- b. Pelaksanaan fungsi inti dilakukan oleh unit kerja pelaksanaan teknis yang otonom. Sebagian pekerjaan dikerjasamakan dengan pihak ketiga terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana.
- c. Memerlukan dukungan sarana prasarana kerja yang kompleks serta sumberdaya manusia yang besar.
- d. Lingkungan kerja bersifat dinamis (standarisasi rendah atau sedang).

Model organisasi yang sesuai dengan karakteristik tersebut di atas adalah model organisasi divisional produk (Stanford, 2007), dengan desain struktur sebagai berikut:



Gambar 4. Model Organisasi Divisonal Produk Perangkat Daerah

Besaran organisasi perangkat daerah dari model organisasi Divisonal sederhana ini dibedakan berdasarkan jumlah kabid. Unit teknis fungsional dibentuk sesuai dengan beban tugas.

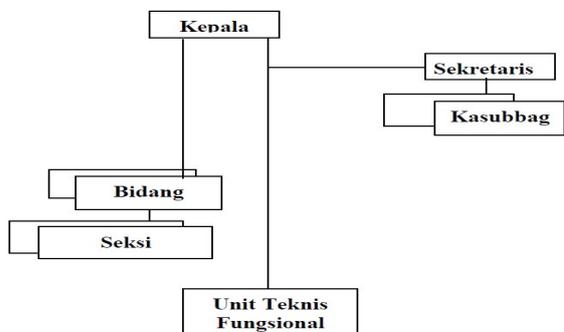
3. Model Organisasi Divisonal Proses

Untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan perumahan dan kawasan permukiman, sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, pengendalian penduduk dan KB, penanaman modal, koperasi, usaha kecil, dan menengah, pertanian, perdagangan serta perindustrian, ditemukan karekteristik sebagai berikut:

- a. Spesialisasi sedang atau tinggi
- b. Pelaksanaan fungsi inti dilakukan seimbang oleh fungsional dan oleh struktural. Masih mungkin sebagian pekerjaan ada yang dilaksanakan oleh unit

- pelaksana teknis berbasis fungsi, bukan berbasis kewilayahan (divisional wilayah).
- c. Lingkungan kerja relatif rutin dan sebagian dinamis.

Adapun struktur organisasi yang sesuai dengan karakteristik tersebut adalah model organisasi divisional proses (Stanford, 2007) dengan desain model sebagai berikut:



Gambar 5. Model Organisasi Divisional Proses Perangkat Daerah

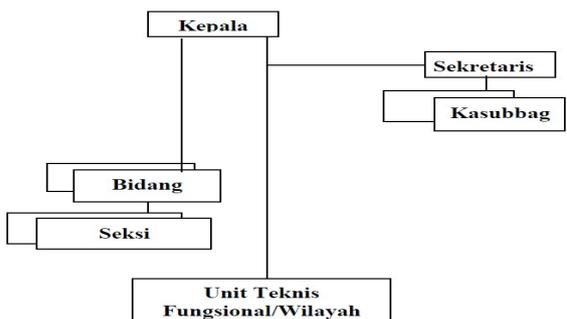
Sedangkan sesaran organisasi perangkat daerah dari model organisasi birokrasi masih sederhana ini dibedakan berdasarkan jumlah jumlah kabid. Jumlah Seksi pada model ini maksimal 2 (dua) Seksi pada setiap Bidang.

4. Model Organisasi Divisional Wilayah

Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan pemadam kebakaran dan urusan perhubungan, teridentifikasi karekteristik sebagai berikut:

- a. Spesialisasi tinggi
- b. Pelaksanaan fungsi inti dilakukan oleh struktural. Sebagian pekerjaan dilaksankan oleh unit pelaksana teknis berbasis fungsi, dan unit pelaksana teknis berbasis kewilayahan (divisional wilayah).
- c. Pengambilan keputusan sebagian besar dari pimpinan tertinggi atau sentralistik.
- d. Lingkungan kerja relatif rutin dan sebagian dinamis.

Berdasarkan karakteristik tersebut di atas, maka desain yang sesuai adalah model organisasi divisional wilayah (Stanford, 2007), dengan desain sebagai berikut:



Gambar 6. Model Organisasi Divisional Wilayah Perangkat Daerah

Besaran organisasi perangkat daerah dari model organisasi birokrasi mesin sederhana ini dibedakan berdasarkan jumlah jumlah kabid dan jumlah Kasi pada setiap setiap kabid.

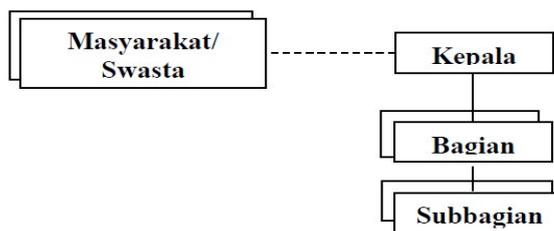
5. Model Organisasi Jejaring

Dalam penyelenggaraan urusan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, serta Pariwisata, diidentifikasi beberapa karekteristik sebagai berikut:

- a. Spesialisasi rendah atau sedang
- b. Pelaksanaan fungsi inti oleh organisasi masyarakat atau pelaku usaha. Fungsi perangkat daerah lebih banyak sebagai *enabler*.
- c. Lingkungan kerja relatif dinamis dan standarisasi rendah.

Upaya mengikutsertakan peran swasta atau pihak ketiga dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, khususnya pelayanan publik dan pembangunan bahwa swastanisasi adalah salah satu cara terbaik dalam menunjang ekonomi pasar dan untuk mengurangi defisit anggaran pemerintah (Nurasa, 2013).

Berdasarkan karakteristik tersebut maka model organisasi jejaring yang didesain untuk menyelenggarakan beberapa urusan di atas adalah:



Gambar 7. Desain Organisasi Jejaring (Network) Perangkat Daerah

Besaran organisasi perangkat daerah dari model jejaring ini adalah dibedakan berdasarkan jumlah jumlah Subbagian pada sekretariat.

6. Model Organisasi Cluster

Pada daerah provinsi dan kabupaten/kota terdapat beberapa urusan pemerintahan yang karena beban tugas dan fungsinya sangat kecil karena sedikitnya kewenangan yang diserahkan kepada daerah tersebut. Desain Organisasi yang cocok untuk urusan pemerintahan yang kecil ini adalah model organisasi *cluster* (Stanford, 2007). Adapun urusan pemerintahan yang tidak dapat dibentuk perangkat daerah adalah kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, persandian dan urusan transmigrasi.

SIMPULAN

Model organisasi perangkat daerah saat ini bersifat seragam antar semua urusan pemerintahan dan penunjang

urusan pemerintahan. Perbedaannya hanya terletak pada tipe yang diukur pada besaran beban kerja. Perbedaan tipe hanya membedakan jumlah struktur horizontal pada tingkat bidang. Hal ini dalam beberapa hal menunjukkan ketidakefisienan dan ketidak efektifan dalam penyelenggaraan urusan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah mempunyai karakteristik urusan pemerintahan yang berbeda-beda, baik dari kompleksitas, desentralisasi, standarisasi maupun lingkungan organisasinya. Dalam penyelenggaraan urusan dan fungsi penunjang tersebut ada yang dilakukan secara mandiri (*hierarchy*), kerjasama (*joined up*), alih daya (*outsourcing*) atau jejaring (*networked*)

Sebagai saran, perlu pengelompokan model perangkat daerah merujuk pada pendapat Stanford (2007) dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan fungsi pada masing-masing urusan pemerintahan maupun pada penunjang dan pendukung urusan pemerintahan sebagaimana dikemukakan oleh Goldsmith dan Eggers (2004). Adapun besaran perangkat daerah pada daerah besar, sedang dan kecil ditentukan berdasarkan besarnya beban urusan pemerintahan masing-masing yang jumlah strukturnya ditentukan sesuai dengan model perangkat daerah setiap urusan pemerintahan.

Terima kasih disampaikan kepada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi atas dukungan fasilitasi dan pembiayaan penelitian tentang desain organisasi perangkat daerah ini pada tahun anggaran 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmady, G. A., Mehrpour, M. & Nikooravesh, A. (2016). Organizational Structures. *Research Management: Europe and Beyond*, 230, (May), 89–107. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805059-0.00004-3>
- Anzola-Román, P., Bayona-Sáez, C. & García-Marco, T. (2018). Organizational innovation, internal R&D and externally sourced innovation practices: Effects on technological innovation outcomes. *Journal of Business Research*, 91, (June), 233–247. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.06.014>
- Burton, R.M., Desanctis, G. & Keller, T.F. (2011). *Organizational Design*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Child, J. (2015). *Organization: Contemporary Principles and Practice* (2nd ed.). Cornwall UK: Wiley and Sons Ltd.
- Goldsmith, S. & Eggers, W.D. (2004). *Governing by Network: the new shape of the public sector*. Washington: Brookings Institution.
- Gurianova, E., & Mechtcheriakova, S. (2015). Design of Organizational Structures of Management According to Strategy of Development of the Enterprises. *Procedia Economics and Finance*, 24, (July), 395–401. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00695-4](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00695-4)
- Hasibuan, M.P. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hatch, M. J. (2006). *Organization Theory*. New York: Oxford University Press.
- Hogan, S.J. & Coote, L.V. (2014). Organizational culture, innovation, and performance: A test of Schein's model. *Journal of Business Research*, 67, (8), 1609–1621. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.09.007>
- Kates, A. & Galbraith, J.R. (2007). *Designing Your Organization: Using the Star Model to Solve 5 Critical Design Challenge* (1st Editio). New York: JoseyBass Publisher.
- Laegaard, J. (2006). *Organizational Theory*. Mille Bindslev & Ventus Publishing.
- Lunenburg, F. C. (2012). Studies in learning and memory. *International Journal of Scholarly, Academic, Intellectual Diversity*, 14, (1), 1–8.
- Mintzberg, H. P. (1983). *Structure in Fives: Designing Effective Organization*. New York: Prentice Hill.
- Nurasa, H. (2013). Analisis Organisasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Sebuah Sistem Terbuka. *Sosiohumaniora*, 15, (1), 80–90.
- Oden, H.W. (1999). *Transforming the Organization: A Social-Technical Approach*. Westport, Connecticut; London: Quorum Books.
- Osborne, D. & Gaebler, T. (1995). *Mewirusahaakan Birokrasi (Reinventing Government) – How The Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Jakarta: Pustaka Bina Pressindo.
- Pynes, J.E. (2009). *Human Resourcement Management for Public and Non Profit Organization* (3rd ed.; Jossey-Bass, Ed.). San Fransisco.
- Robbins, S.P. (1994). *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan.
- Sadler, P. (1994). *Mendesain Organisasi (Terjemahan: Designing Organization: The Foundatuion for Excellent)*. Jakarta: Pustaka Bina Pressinde.
- Stanford, N. (2007). *Guide to Organisation Design, Creating Hight-Performing and Adaptable Enterprises*. London: Profile Books. Ltd.

- Tahir, M. I. (2016). Analisis Kritis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. *Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara*, 6, (6), 153–168.
- Upadhaya, B., Munir, R., Blount, Y., & Su, S. (2018). Does organizational culture mediate the CSR – strategy relationship? Evidence from a developing country, Nepal. *Journal of Business Research*, 91, (May), 108–122. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.05.042>
- Website: <https://www.kompasiana.com/fransdionesa/57998fc562afbda00e156d95/pp-18-tahun-2016-berpotensi-menggemukkan-birokrasi-pemda>

KONSTRUKSI MASKULINITAS SUNJAYA PURWADISASTRA (Perwira TNI AD dan Bupati Cirebon)

Ahmad Fauzan, Reiza Dienaputra dan Hazbini

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran

E-mail: Fauzanahmad083@gmail.com

ABSTRAK. Penulis akan menggambarkan sosok salah satu pemimpin kepala daerah di Kabupaten Cirebon yang bernama Sunjaya Purwadisastra (2013-2018). Beliau salah satu pemimpin yang mempunyai dua latar belakang berbeda yaitu sebagai militer dan sebagai pemimpin sipil. Saat menjadi seorang bupati tentunya ada perbedaan konsep dan gaya kepemimpinan yang berbeda apakah nilai maskulin lebih cenderung mengedepankan sisi militer ataukah justru sebaliknya. Untuk mengamati hal tersebut tentunya harus didukung dengan berbagai analisis baik secara teori maupun secara lapangan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan kajian budaya sebagai dasar pengamatan melalui teori maskulinitas untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih valid sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pengetahuan baru dalam hal menjadi seorang pemimpin tatkala di berbagai macam multidisiplin ilmu atau setidaknya dapat belajar cara atau gaya jika hendak menjadi pemimpin. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif sebagaimana sebatas gambaran sosial masyarakat yang memiliki hal yang bersifat alami tanpa adanya suatu percobaan bahkan lebih menekankan makna. Penelitian ini akan mendapatkan suatu makna maskulinitas dari suatu kebijakan seorang pemimpin,

Kata kunci: Gaya kepemimpinan; militer dan sipil; maskulin

CONSTRUCTION OF THE MASCULINITY OF SUNJAYA PURWADISASTRA (as an army officer AD and Regent of Cirebon)

ABSTRACT. The researcher will analyze to the leader of Cirebon that is name Sunjaya Purwadisastra in this period. Construction of masculinity will be easily analyzed to the cultural studies by the reseacher. One analysis of masculinity in leadership of Sunjaya as Cirebon regent in this time (2013-2018) is the leadership style of Sunjaya that displayed in each leads. In this case, Sunjaya has a masculinity and intelligence. This research focus on the construction of Sunjaya's masculinity has a personal characteristics or leadership Sunjaya's style both military and civilian. The research has found there are constructions of masculinity to Sunjaya from several moments contained in the background, policies. The researchers also found differences and similarities in the managing subordinates Sunjaya's attitudes. It influences to performance of the institution as masculinity. Leadership style of Sunjaya is ideal masculine man. If the people who wants to be a leader, he has to be able to good image through the construction of masculinity. The results of this study also found to be a leader study and it was built through private intelligence thus a positive impact for myself and others.

KeyWords: Leadership; Military and Civil; Masculinity

PENDAHULUAN

Di era globalisasi semakin banyak kemajuan dalam hal berekspresi di segala bidang. Khususnya dalam pembahasan ini mengenai sosok kepemimpinan yang semakin berkembang. Berkembang dalam arti dari berbagai macam latar belakang untuk menjadi seorang pemimpin semuanya berhak, namun permasalahannya apakah berpengaruh pada anggotanya terhadap gaya kepemimpinan seseorang berdasarkan latar belakang atau tidak sama sekali. Termasuk anggota TNI yang sedang menjabat ataupun pensiunannya mereka berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin sipil. Padahal dari dulu sampai sekarang seorang TNI dan Polri harus bersifat netral dalam menentukan hak pilihnya bahkan tidak diperkenankan untuk memilih calon pemimpin siapapun. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik antar aparat keamanan sebagaimana fungsi mereka adalah pengabdian dan mengayomi masyarakat seutuhnya tanpa ada pandangan sebelah pihak. Dengan demikian, tidak mudah dalam berekspresi untuk mereka karena perannya dibatasi hanya untuk kedaulatan bangsa dan Negara. Di sisi

lain, saat berbicara mengenai kekuasaan dan berpolitik, tidak sedikit juga yang rela meninggalkan kesetiaan sebagai prajurit TNI dan Polri yang hendak berlomba-lomba menjadi pemimpin terutama para pensiunan militer, bahkan yang belum pensiun pun mereka rela meninggalkan jabatan di militer hanya demi memimpin masyarakat sipil yang notabene adalah multidisiplin ilmu. Dengan kepemimpinan yang berbeda tentunya harus memiliki strategi yang tepat supaya pemimpin tersebut mendapat kepercayaan masyarakat termasuk kesetiaan dari jajaran dinas.

Dengan fenomena tersebut, peneliti mencoba mengambil salah satu kepala daerah yang mempunyai latar belakang militer, ini untuk mendapatkan data apakah mempunyai pengaruh besar dalam gaya kepemimpinannya pada masyarakat, apakah tetap cenderung kemiliteran. Selain itu, peneliti berharap ada sebuah strategi atau pengetahuan baru dalam gaya kepemimpinan terhadap masyarakat sehingga pemimpin tersebut dicintai oleh masyarakat atau dapat disebut pemimpin yang mampu menyesuaikan pada tempatnya. Sedangkan untuk mengamati gaya kepemimpinan tersebut, peneliti

menganalisis lewat sisi konstruksi maskulinitasnya supaya lebih memahami makna dari setiap kebijakan maupun kepribadiannya termasuk sejarah hidupnya. Untuk mengetahui makna, maka peneliti menggunakan teori representasi dan maskulinitas. Sehingga muncul pertanyaan mendasar yaitu kenapa Sunjaya Purwadisastra dapat menjadi seorang militer dan bupati. Serta apakah kepemimpinannya lebih mengarah pada gaya konstruksi militer apakah memang beliau mampu menyesuaikan situasi dengan masyarakat sekaligus nilai konstruksi yang dimilikinya.

Melihat gambaran diatas. Jika lebih mempertahankan kemiliterannya khawatir ada kesan unsur pemaksaan layaknya jaman kolonial, di jaman kolonial seakan seorang pemimpin adalah orang yang berkuasa sesuai kehendaknya, hal ini yang dapat mengakibatkan hancurnya ekonomi rakyat serta menimbulkan pergolakan masyarakat (Zakaria, 2011). Sebaliknya apabila Sunjaya Purwadisastra lebih cenderung sipil maka seakan beliau bukan orang yang tegas dan berwibawa, atau dapat juga kurang disebut sebagai pemimpin yang maskulin atau dapat juga disebut "*mantan militer ko gak tegas*". Secara tidak langsung, pemimpin militer lebih memiliki konstruksi maskulin karena tegas, berani, kuat jiwa dan raganya. Menurut Hall (1997) yang membentuk maskulinitas adalah kebudayaan yang disesuaikan dengan lingkungan bukan pada hasil dari perbuatan orang menjadi baik dan dikatakan langsung sebagai maskulin dan kehidupan militer secara budaya memang dididik sebagai laki-laki yang maskulin bahkan lebih dari sekedar laki-laki. Artinya budaya yang membentuk seseorang itu menjadi apa baik maskulin maupun feminin.

Secara umum, berbicara maskulinitas sama halnya dengan berbicara femininitas. Maskulin merupakan sebuah bentuk konstruksi kelekakian terhadap laki-laki. Laki-laki tidak dilahirkan begitu saja dengan sifat maskulinnya secara alami karena maskulinitas dibentuk oleh kebudayaan. Sebagaimana menurut Hall (1997) bahwa yang menentukan atau memengaruhi sifat laki-laki dan perempuan adalah kebudayaan. Di sisi lain, maskulinitas tradisional menganggap tinggi nilai-nilai yaitu kekuatan, kekuasaan, ketabahan, aksi, kendali, kemandirian, kepuasan diri, dan kesetiakawanan sedangkan yang dipandang rendah adalah kemampuan verbal, kelembutan, komunikasi, perempuan, dan anak-anak. Konstruksi maskulinitas seseorang itu diciptakan oleh lingkungan dan budaya, bukan atas dasar kehendak diri sendiri untuk sebagai apa, militer, ustadz, guru, entertainer dan sebagainya. Mereka dibentuk oleh masing-masing budaya turun temurun dan dikuatkan oleh lingkungan sehingga mereka mempunyai penyesuaian sesuai dengan kenyamanan.

Peneliti akan mengkaji seorang kepala daerah yang bernama Sunjaya Purwadisastra yang memiliki

latar belakang militer. Beliau salah satu prajurit TNI AD yang mendadak pensiun sebelum masa pengabdianannya, namun pengabdian tersebut dilanjutkan yang lebih luas dan menantang yaitu memimpin masyarakat Cirebon. Tidaklah mudah manajemen kepemimpinan di ranah kepala daerah karena permasalahan yang dihadapi multi kompleks bahkan tidak mengenal waktu demi masyarakat. Berbagai macam permasalahan masyarakat seperti ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pembangunan dan kerjasama dengan jenis multidisiplin ilmu pada bawahannya "jajaran kepala dinas". Semuanya harus ditanggung oleh pemimpin kepala daerah walaupun aplikasinya dibantu oleh jajaran kepala dinas terkait. Permasalahannya jajaran kepala dinas memiliki multidisiplin ilmu yang berbeda atau pemimpin harus bisa "*the right man on the right job*" sehingga program dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Sisi inilah yang sering dijadikan alasan seorang pemimpin terkadang tidak sesuai dengan janjinya sehingga berdampak mengurangnya tingkat kepercayaan masyarakat.

Peneliti akan lebih memfokuskan pada sisi strategi baik dalam kebijakan maupun dalam penyikapan masalah. Sisi tersebut yang dimaksud adalah nilai maskulinitas yang dimiliki Sunjaya Purwadisastra baik saat menjadi militer maupun bupati Cirebon. Dengan demikian timbulah suatu permasalahan yaitu apakah Sunjaya Purwadisastra lebih cenderung gaya kepemimpinan militer atau menyesuaikan dengan sipil, untuk mengamati pertanyaan tersebut, maka peneliti mencari data-data yang valid selama beliau menjabat sebagai bupati Cirebon. Data tersebut dapat berupa kebijakan, komunikasi, serta kegiatan yang berlangsung. Data-data tersebut akan dihubungkan dengan teori representasi dan maskulinitas yang akan menghasilkan konstruksi maskulinitas Sunjaya Purwadisastra.

Di sisi lain penelitian ini akan menggambarkan strategi khusus Sunjaya Purwadisastra dalam menghindari *image* seorang militer yang tegas dan disiplin. Apakah nilai maskulin tersebut memang benar-benar tepat dalam permasalahan yang tepat juga ataukah justru bersimpangan dengan pandangan para anak buahnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui sosok pemimpin yang tulus ataukah ada unsur kesengajaan pada masyarakat. Di sisi lain penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemerintahan daerah yang begitu beragam dan berkelanjutan. Berkelanjutan di sini yaitu pergantian antar pemimpin. Oleh karena itu penting penelitian ini dilakukan supaya masyarakat lebih cerdas dalam memilih pemimpin, jangan mudah karena uang atau program yang diberikan tetapi melihat dari sisi jejak maupun bukti yang telah diberikan masyarakat sesuai harapan semua.

Supaya masyarakat tidak salah pilih, maka mereka harus mengetahui asal usul calon pemimpinnya terlebih

dahulu. Untuk itu peneliti harus memiliki kerangka berfikir dari perkembangan ide yang berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antar bagian-bagian informasi yang tersimpan dari suatu fenomena. Sebagaimana menurut Kadir (2012) kerangka berfikir adalah pondasi bagi setiap pemahaman-pemahaman selanjutnya. Oleh karena itu untuk mengetahui pemahaman selanjutnya, peneliti mengawali dari segi latar belakang fenomena tersebut termasuk latar belakang objek penelitian ini. Peneliti mengambil sisi maskulinitas dari setiap kegiatan atau kebijakan yang dimiliki oleh Sunjaya Purwadisastra untuk mengetahui fondasi permasalahan sehingga ia mampu memimpin sipil. Salah satu melihat fondasi adalah dari segi latar belakang permasalahan termasuk *trad record* nya supaya mendapatkan data yang lebih valid bahwa benar atau tidak beliau seorang pemimpin yang maskulin.

Adapun penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, peneliti akan mengidentifikasi bagaimana kepemimpinan Sunjaya Purwadisastra ditampilkan baik di militer maupun di sipil dari data-data yang valid. Kedua, peneliti akan mengidentifikasi bagaimana konstruksi maskulinitas Sunjaya Purwadisastra dengan teori representasi dan maskulinitas yang ada. Ketiga, peneliti akan menyimpulkan berbagai konstruksi maskulinitas mengenai gaya kepemimpinan Sunjaya Purwadisastra baik di militer maupun di sipil.

METODE

Penelitian berbasis pada informasi yang diperoleh dari sistem pengamatan melalui metode pengamatan atau yang disebut dengan metode non-eksperimen. Peneliti lebih mengarahkan pada pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, baik secara historis maupun langsung (Ikbar, 2014:104). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati (Moleong, 2004:3). Kualitatif untuk melihat kajian konstruksi maskulinitas objek yang dianalisis. Penelitian lebih cenderung untuk memahami situasi keberadaan objek. Secara historis, peneliti menggambarkan sosok Sunjaya Purwadisastra yang dapat mengarahkan bahwa ia sosok laki-laki yang maskulin. Sedangkan secara langsung, penelitian tersebut melalui kegiatan berlangsung "pengamatan" saat peneliti mengikuti kegiatan Sunjaya Purwadisastra termasuk segala kebijakan dan gaya kepemimpinannya. Di sisi lain, peneliti untuk memperkuat data yaitu dengan menggunakan metode wawancara dengan orang-orang pernah menjalani hidup bersama Sunjaya Purwadisastra.

Pendekatan ini menggunakan *cultural studies*, sebagai multidisiplin ilmu di berbagai bidang. salah satu kajian dalam *cultural studies* adalah maskulinitas

dan representasi karena keduanya merupakan alat untuk membedah makna dari gaya kepemimpinannya. Maskulinitas lebih mengarah pada pembentukan karakter kepribadian seseorang. Pembahasan sosok maskulinitas seorang pemimpin dimana pemimpin adalah sosok pusat perhatian oleh anggotanya. Seolah-olah pemimpin bisa merepresentasikan dirinya dengan penuh pencitraan yang baik. Konsep maskulinitas dipakai untuk mengidentifikasi konstruksi maskulinitas dari setiap data-data yang dimiliki berupa kebijakan, komunikasi dan kegiatan berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sunjaya Purwadisastra lahir pada tanggal 1 Juni 1965, di desa Beberan Palimanan Cirebon. Sunjaya anak dari anggota TNI AD, dan ibunya adalah seorang petugas desa Beberan (Sukarna, 2014:4). Tentunya Sunjaya tidak mungkin di asuh penuh oleh kedua orang tuanya, Sunjaya langsung diambil alih oleh pembantunya yang bernama Mbok Jenah. Sunjaya diasuh Mbok Jenah sejak tiga hari setelah lahir hingga usia kelas enam SD. Selama diasuh oleh mbok Jenah, Sunjaya didik untuk mandiri dan tanggung jawab seperti berjualan es lilin, mengaji, dan patuh pada ucapan mbok jenah layaknya sudah menganggap orang tua kandung sendiri. Hal tersebut bagian dari alasan kemaskulinitasnya seorang sunjaya saat kecil dimana ia harus berjuang langsung dengan orang lain, sehingga Sunjaya Purwadisastra mampu melewati kesulitan ekonominya dengan penuh kekuatan dan ketenangan. Sunjaya Purwadisastra berusaha untuk merepresentasikan bahwa dirinya sebagai laki-laki yang kuat maka harus dapat menemukan cara untuk menolong Mbok Jenah.

Gambaran latar belakang tersebut adalah bentuk pondasi Sunjaya akan memiliki konstruksi bagaimana, di sini dapat dilihat dari sisi perjuangannya sehingga ia kuat dengan keadaannya. Demi menghindari hal yang tidak dimiliki oleh perempuan, maka Sunjaya terkesan mempunyai "*laki-laki ko cengeng*". Maka dari itu Sunjaya berusaha merepresentasikan dirinya sebagai laki-laki yang kuat. Sebagaimana menurut Moose (1996:14) mengatakan bahwa konstruksi sosial yang membentuk dominasi peran laki-laki. Laki-laki dinilai memiliki sifat rasional, aktif, superior, dan berkuasa, sedangkan perempuan memiliki sifat lembut dan perannya dibatasi dalam keluarga. Dengan demikian, laki-laki sering disebut kaum yang paling mendominasi dalam segala bidang (Barker, 2009:35). Dalam masyarakat secara umum (patriarkal) melihat laki-laki lebih pantas untuk memimpin dalam segala hal karena dinilai sebagai orang yang lebih kuat. Lebih kuat dalam arti kecenderungan orang melihat secara umum bahwa laki-laki dapat mengatasi permasalahan secara

kuat akan jiwanya dan raganya sesuai dengan gambaran maskulinitas secara umumnya.

Setelah Peneliti menganalisis sekilas perjalanan hidup Sunjaya, peneliti akan lebih fokus pada kepemimpinan Sunjaya di militer dan sebagai bupati Cirebon. Dengan kepemimpinan yang Sunjaya terapkan tentunya karena ada pembentukan mengenai dirinya sehingga menjadi kebiasaan dan ciri khas Sunjaya saat memimpin. Hal itulah yang akan dijadikan fokus bagi peneliti untuk mencari konstruksinya bukan mengarah pada makna atau gaya kepemimpinannya. Hal-hal yang membangun dirinya sebagai karakter khusus kepemimpinan Sunjaya, secara tidak langsung apakah ada gaya yang berbeda dalam memimpin militer dan sipil secara konstruksi maskulinitasnya.

Selain itu, peneliti akan menganalisis konstruksi maskulinitas hanya sebatas kepemimpinan Sunjaya saat di militer yaitu sebagai kolonel dengan jabatan Ditajenpandiaga (Direktur Jenderal Penyediaan Tenaga) yang bertugas sebagai penerimaan calon anggota prajurit TNI AD di Markas besar TNI AD Jakarta. Sebagai kolonel, Sunjaya selalu mengedepankan sikap ketegasan dan patuh menjalankan tugas TNI yaitu "*sapta marga*" patuh terhadap atasan dan peraturan TNI AD. Sunjaya dipercaya sebagai pemimpin yang menyediakan tenaga calon anggota TNI AD. Tugas tersebut tidaklah mudah karena harus bertanggung jawab penuh pada negara untuk menyediakan tenaga sesuai dengan standar peraturan TNI. Pada dasarnya tugas tersebut merupakan tugas yang benar-benar paham dengan karakter dan kesehatan orang baik jasmani maupun rohaninya sesuai dengan aturan TNI AD. Sunjaya menjabat seorang kolonel sekitar dua tahun dan beliau telah menjalani tugasnya di berbagai daerah termasuk daerah pelosok nusantara maupun daerah rawan konflik.

Peneliti mengambil salah satu contoh maskulinitas dalam militer yaitu Sunjaya Purwadisastra. Tentunya prajurit militer memiliki jiwa nasionalisme karena setiap calon prajurit TNI harus ditanamkan jiwa nasionalisme yaitu setia pada bangsa dan Negara diatas setia segalanya. Dalam penelitian militer tentunya tidak akan ada keraguan dalam sisi maskulinitasnya karena dasar dan kepribadian harus kuat, nasionalis dan berkepribadian yang baik, semuanya adalah bentuk konstruksi maskulinitas. Kemudian Sunjaya Purwadisastra telah menjalankan tugas dengan penuh kesiapan dan tantangan bahkan beliau berhasil membantu perdamaian di daerah rawan konflik. Sebagaimana nilai maskulin menurut Mosse (1996) maskulinitas ideal adalah sikap seseorang layaknya berani, kuat dan mempunyai jiwa nasionalisme. Sunjaya Purwadisastra berusaha menjadi laki-laki yang maskulin ideal baik dalam tugas militernya maupun kebijakannya.

Ketika seseorang telah mencapai sebuah kesuksesan, maka timbulah berbagai pengandaian dengan ukuran latar belakang dan ekonomi yang kuat. Dalam teori maskulinitas dapat juga disebut dengan hipermaskulinitas, hipermaskulinitas lebih mengedepankan rasa kegagahan dan kepercayaan diri yang kuat. Sunjaya Purwadisastra saat menjadi prajurit TNI AD, beliau merasa kurang puas dengan jabatan militer, sehingga beliau terdorong rasa hipermaskulin untuk menjadi bupati Cirebon. Contohnya, ketika Sunjaya Purwadisastra telah mengundurkan diri sebagai prajurit TNI, kemudian beliau memberanikan diri sebagai bakal calon bupati. Sisi ini adalah bagian dari representasi laki-laki yang hipermaskulin. Hal demikian hampir mirip dengan jaman orde baru, dahulu Bapak Soeharto sebagai jenderal TNI kemudian menjadi presiden. Oleh karena itu, hal yang paling di khawatirkan adanya suatu hipermaskulin dalam kepemimpinan yaitu adanya ancaman gejolak masyarakat. Sebagaimana dalam jurnal (Santosa, 2010) ancaman terbesar bagi integrasi nasional cenderung datang dari akumulasi kekecewaan.

Pada tahun 2008, Sunjaya berniat untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati Cirebon dari non partai "independent" yang berpasangan dengan Abdul Muhyi pada tahun 2008-2013 namun ia langsung kalah dengan *incumbent*. Sunjaya selalu berusaha keras untuk mejadi seorang bupati Cirebon selama menunggu periode berikutnya tahun 2013-2018. Sunjaya maju kembali pada periode tersebut dan Sunjaya masuk partai politik dan langsung ditunjuk sebagai bakal calon bupati Cirebon. Sunjaya berpasangan dengan ketua PDIP kabupaten Cirebon yaitu Tasiyah Soemadi Al Gotas. Sunjaya bisa mengalahkan lawan-lawannya dengan dua kali putaran, bahkan bisa menang cukup besar yaitu 53 % . Sunjaya lolos sebagai bupati Cirebon. Sunjaya dilantik sebagai bupati Cirebon pada tanggal 19 maret 2014 oleh gubernur jawa barat (Sukarna, 2014). Sunjaya diuntungkan dengan latar belakang yang memiliki perjuangan yang berbeda dimana ia paham tentang strategi kemenangan saat menjadi prajurit TNI AD.

Dengan mencalonkan sebagai Bupati Cirebon, beliau berusaha menjadi laki-laki lebih dari sekedar laki-laki yang biasa. Hipermaskulinitas selalu mengedepankan puas dan lebih puas dengan apa yang belum dimilikinya sehingga ia mampu untuk menjadi hegemoni maskulinitas. Pemimpin lebih cenderung memiliki hipermaskulin karena merasa dirinya lebih puas sebagai penguasa atau disebut dengan *hegemoni maskulinitas*. Maskulinitas diidentikkan dengan laki-laki harus dapat bersaing, laki-laki harus kuat, tidak cengeng, laki-laki harus dapat yakin dari apa yang kurang memungkinkan karena laki-laki dianggap kaum superioritas (Cornwall,1997:21). Sunjaya Purwadisastra memutuskan dirinya sebagai anggota TNI, seakan ingin menjadi laki-laki yang mampu bersasing

bahkan seakan menunjukkan beliau sebagai laki-laki yang superior. Oleh karena itu, beliau memberanikan pensiun demi kompetisi Bupati, kemudian beliau mampu menjadi sebagai pemenang pesta demokrasi di kabupaten Cirebon. Akhirnya terasa lengkap dalam hidupnya karena sudah melalui tahap beberapa menjadi laki-laki yang lebih dari laki-laki atau di sebut dengan hegemoni maskulinitas “bupati Cirebon”.

Di sisi lain, ini memiliki pengetahuan tentang bagaimana dalam memilih calon pemimpin dari segi kebaikan yang alamiah atau hanya sebatas pencitraan semata. Untuk menjawab demikian maka diperlukan dengan kajian budaya yaitu teori representasi dalam pembahasan maskulinitas. Budaya untuk melihat sisi proses pembentukan calon pemimpin dapat menjadi apa dan bagaimana gaya kepribadiannya. Sedangkan representasi untuk melihat setiap *moment* atau kebijakan yang diberikan sebatas pencitraan atau tidak. Salah satu kegiatan berlangsung beliau yaitu saat adanya suatu demonstrasi di depan Kantor Bupati, kemudian ia langsung menemui dan mengklarifikasi. Mungkin jarang atau banyak pemimpin yang melakukan demikian namun setidaknya berjalan sendiri dan menghadapinya langsung adalah hal cukup sulit buat seorang pemimpin karena akan diawatirkan membahayakan keselamatannya saat berlangsung orasi. Peneliti memandang kejadian ini adalah bukan representasi yang didapat karena bersifat *urgent* dan beralasan. Sehingga kasus tersebut merupakan bagian dari konstruksi maskulinitas yang dimiliki Sunjaya Purwadisastra karena adanya suatu latar belakang yang dahulu serba kekurangan ekonomi maka ia berusaha keras untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan terbiasa hal demikian, saat ia mencalonkan diri sebagai prajurit TNI AD, beliau tidak langsung diterima karena belum memiliki kualifikasi yang tepat pada seleksi TNI AD. Sunjaya selalu berusaha mencari cara baik melalui tes maupun dengan berusaha mendekati jajaran TNI AD supaya ia dapat dikasih kepercayaan oleh mereka dengan modal nekad. Saat mencalonkan sebagai bupati Cirebon, ia tidak langsung menang dalam kompetisi pemilihan kepala daerah. Dalam periode berikutnya Sunjaya mencalonkan kembali lewat partai politik, kemudian ia berhasil memenangkan pesta demokrasi di kabupaten Cirebon.

Sunjaya Purwadisastra dapat dibalang mengemas sebagai pencitraan yang murni karena proses gaya kepemimpinannya dengan sebab akibat, contohnya saat ia menghadapi para pendemo langsung menemuinya dengan berani melawan isu saat itu juga segera klasifikasi. Beliau merepresentasikan diri sebagai laki-laki yang mampu menghegemoni suatu keadaan pada dirinya dengan situasi dan alasan yang tepat. Berbeda dengan tipe pemimpin yang lebih mengarah pada pencitraan yaitu saat pemimpin tersebut dengan hal yang berbau mendadak da nada kesan

“simpatik” seakan duduk bersama dengan masyarakat, jajan bareng, dan seakan peduli dengan suatu keadaan saat ada celah memungkinkan untuk masuk sebagai pencitraan bahkan dapat dibalang tanpa sebab akibat. Artinya seorang pemimpin yang maskulin, selain mempunyai latar belakang yang positif tetapi juga saat sebelum dan sedang menjadi pemimpin ia selalu mengedepankan kepentingan umum dan memberikan contoh teladan beserta bukti-bukti yang dimiliki tanpa harus dengan ekspos media, ataupun maksud untuk mengambil hati masyarakat.

Oleh karena, itu peneliti menganggap penting untuk dilakukan karena di jaman demokrasi sangatlah rentan dengan representasi pencitraan semata ataukah memang benar ketulusan pengabdian masyarakat. Banyak masyarakat tidak mengetahui calon pemimpinnya, enatah karena memang tidak mau tau atau memang kurang adanya sosialisasi yang dalam mengenai program dan *trad record* yang dimilikinya. Untuk melakukan kegiatan tersebut dibutuhkannya suatu strategi dalam politik sehingga dapat memenangkan kompetisi. Terkadang calon pemimpin terlepas dari *trade record* baik atau tidak, pemimpin tersebut bermain spekulasi dan cara instant yaitu dengan money politik yang akan menghasilkan citra pada masyarakat seakan “yang kasih uang yang dipilih oleh masyarakat”. Hal ini yang akan dijadikan pondasi ketertarikan dalam penelitian ini sehingga masyarakat cerdas dalam memilih baik lingkup lokal maupun nasional. Dengan demikian, peneliti akan mengkaji suatu kepemimpinan regional yang berbasis daerah supaya lebih mudah dalam mencari data dan proses dilapangnya

SIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa nilai pengaruh atau tidak, pengetahuan baru dan sebagai pencitraan atau tidak. Semua akan peneliti simpulkan secara singkat sesuai dengan teori yang gunakan yaitu representasi dan maskulinitas. Peneliti dalam kepengaruhan peneliti melihat dari sisi berbagai kebijakan yang ada yaitu lebih cenderung masih pengaruh dengan kehendak pribadi lebih kuat dibandingkan pertimbangan lain. Seakan hegemoni dalam militer masih berlaku dan seakan sempurna sebagai laki-laki yang maskulin dengan ketegasannya dan keberaniannya untuk menciptakan hal baru. Sedangkan dalam pengetahuan barunya adalah beliau mempunyai strategi khusus dalam memimpin sipil yaitu memanfaatkan masyarakat saat beramasalah dengan dirinya dengan menemui langsung dan berani menghadapi dengan tegas tanpa memikirkan akibatnya, secara tidak langsung beliau menunjukkan bahwa ia pemberani dan langsung ada masalah cepat tanggap, hal ini bagian dari nilai hipermaskulinitas. Sedangkan untuk menjawab yang terakhir yaitu sebagai pencitraan atau tidak, peneliti melihat dari representasi yang ada yaitu

seorang pemimpin sayogianya harus memiliki citra yang kuat di masyarakat, namun harus berlandaskan tingkat kewajaran dan beretika. Sunjaya lebih mengarah pada citra pada sisi ketegasan di jajaran dinas namun lebih cenderung pada hal menunjang untuk beliau dan pemerintahannya. Singkatnya sedikit yang mengarah pada sosok Sunjaya sebagai pemimpin yang mempunyai pencitraan semata. Sisi lain, apabila dikaji secara perjalanan maskulinitasnya, beliau banyak memiliki konstruksi maskulinitas dimana maskulinitas adalah segala hal-hal yang dimiliki oleh laki-laki tapi tidak untuk perempuan (Coates, 2003:23). Semua jenis pertanyaan tadi sebagai dasar menjawab pertanyaan bagaimanakah konstruksi maskulinitas dalam kepemimpinan Sunjaya Purwadisastra. Sunjaya adalah laki-laki yang selalu berusaha menjadi laki-laki yang seutuhnya, dengan beberapa tahapan untuk menjadi laki-laki yang maskulin. Dari mulai sejarah hidupnya sampai menjadi bupati Cirebon, peneliti hanya mengambil beberapa contoh yang didapat melalui metode yang digunakan yaitu inforamsi pengamatan sekitar objek yang diteliti sehingga konstruksi Sunjaya Purwadisastra telah mudah didapatkan.

Dalam prinsip dasar militer bahwa profesional militer memiliki nilai atau konstruksi maskulinitas terhadap jiwa nasional yang dimiliki. Sebagaimana menurut Kaelan (2003) bahwa nasionalisme adalah warga Negara yang memiliki rasa dan tindakan kebangsaan sebagai kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung pada bangsa dan Negara (Kaelan, 2003: 44). Salah satu nilai utama dalam militer adalah mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Militer harus bisa siap dalam menjalankan tugasnya baik di medan perang dengan misi perdamaian maupun membantu kegiatan sosialisasi masyarakat. Perang berarti siap akan segala risikonya yaitu keberanian dan kematian. Sebagaimana menurut Mosse (1998), “*the ideal masculinity was invoked on all sides as a symbol of personal and national regeneration*”. Maskulin ideal terdapat identitas diri pribadi yang memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi. Dalam militer selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi

Secara historis, Sunjaya Purwadisastra telah memiliki laki-laki yang maskulin yang terdapat pada kekuatan dalam menghadapi hidup bersama orang yang membesarkannya yang tergolong orang tidak mampu, kemudian Sunjaya berjualan es lilin. Ia hanya menunjukkan bahwa dirinya mampu sebagai laki-laki ya harus kuat. Dalam maskulinitas laki-laki tidak boleh cengeng, kuat dan berwibawa. Sedangkan saat menjadi prajurit TNI, Sunjaya mampu menjadi laki-laki yang hipermaskulin, dimana laki-laki lebih dari sekedar laki-laki. Representasi tersebut melalui tugas yang penuh tantangan dan mampu melewatinya serta saat hendak menjadi bakal calon bupati, beliau

memberanikan diri untuk pensiun hanya karena demi sebagai bupati Cirebon. Padahal pencalonannya belum tentu ia menjadi pemenang hanya karena ingin menjadi laki-laki lebih dari sekedar laki-laki. Terakhir, saat menjadi Bupati Cirebon, beliau seakan menunjukkan sebagai laki-laki yang mampu menghegemoni semua jajaran dinas dan masyarakat Cirebon. Melalui gaya kepemimpinannya yang cenderung tegas dan berani dalam menghadapi situasi, yang direpresntasikan saat beliau menghadapi para pendemo langsung di lapangan seakan beliau laki-laki yang kuat dan paling mendominasi. Seakan sebagai hegemoni maskulinitas karena telah mampu melewati dari berbagai tahapan baik di militer maupun sebagai bupati Cirebon. Semua itu hanya sebatas strategi yang dimiliki Sunjaya Purwadisastra dengan penuh perjuangan dan kecerdasannya sehingga ia mampu menjadi pemimpin di militer dan bupati Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Barker, C. (2009). *Cultural Studies*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Coates, J. (2003). *Men Talk, Story in the making of masculinities*. Blackwell Publishing. LTD.
- Cornwall, A. (1997). “*Men, masculinity and gender in development.*” *Men and Masculinity*. Ed. Caroline Sweetman. Oxford: Oxfam
- Hall, S. (1997). *Representation Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage Open University.
- Ikbar, Y. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Kaelan, (2003). *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma
- Kadir, A (2008). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Bandung :PT. Citra AdityaBakti
- Moleong, L.J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mosse, George L. (1996). *Introduction: The Masculine Stereotype In The Image of Man: The Creation of Modern Masculinity*. New York: Oxford University Press
- Sukarna, U. (2014). *Sunjaya Anak Desa*. Yogyakarta: Writing Revolution.
- Zakaria, M.M (2011). Dinamika Sosial Ekonomi Priangan Abad 19. *Sosiohumaniora*, 13, (1) 98-99
- Santosa, P. (2010) Disintergrasi, Pemerintah Lokal dan Dana Perimbangan Pusat dan Daerah. *Soiohumaniora*, 12, (1) 15-16

EFISIENSI ALOKATIF INPUT FAKTOR PADA USAHATANI BAWANG (*Allium ascolonicum L*) DI KABUPATEN MAJALENGKA, JAWA BARAT

Nurul Risti Mutiarasari¹, Anna Fariyanti², dan Netti Tinaprilla²

¹Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Siliwangi, Jl. Siliwangi No 35 Kota Tasikmalaya

²Fakultas Ekonomi dan dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Jl. Raya Darmaga, Kabupaten Bogor.

Email : nurulristim@gmail.com

ABSTRAK. Tujuan dari penelitian ini ialah (a) menganalisis input faktor apa saja yang berpengaruh terhadap produksi bawang merah (b) menganalisis tingkat alokatif (efisiensi harga) dari input faktor yang digunakan dalam berusahatani bawang merah di Majalengka. Responden petani ditentukan secara sensus yaitu 37 petani lokal bawang merah di Kabupaten Majalengka. Pengumpulan data dilakukan dari bulan September 2015 sampai dengan bulan April 2016. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis fungsi produksi *stochastic frontier* Cobb-Dougllass dan efisiensi alokatif dengan menggunakan pendekatan produk marginal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lahan, jumlah bibit, dan pestisida merupakan input faktor yang berpengaruh secara nyata terhadap produksi bawang merah. Untuk hasil analisis efisiensi alokatif menunjukkan bahwa rata-rata petani bawang merah di Kabupaten Majalengka masih belum efisien, namun dari kelima faktor produksi yang digunakan oleh responden terdapat satu input faktor produksi yang secara alokatif tidak efisien yaitu tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam meningkatkan efisiensi alokatif yang berhubungan dengan harga faktor produksi, maka petani perlu diberikan pendampingan untuk dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan pendapatan.

Kata kunci: bawang merah; efisiensi; produk marginal; *stochastic frontier*; usahatani,

ABSTRACT. This research are aimed (1) to analyzed factors that affected shallots farming in Majalengka, (2) to analyzed the farming efficiency of shallot in Majalengka allocatively. The respondents of shallots farmers is determined purposively. The number of respondents which is used for this research are 37 shallots farmers in Majalengka. The data collection time for this research was conducted on September 2015 till April 2016. Analytical method which is used in this research are production function of Cobb-Dougllass *stochastic frontier* and allocative efficiency are analyzed using marginal product approach. The research result showed factors that affected the shallot farming in Majalengka are land, seeds and pesticides. Then, the result of allocative efficiency showed that shallots farming in Majalengka was still inefficient. Therefore, it needs the efficiency improvement which need accompaniment from goverment by promoting counseling program.

Keywords: efficiency; farming; marginal product; shallots; *stochastic frontier*

PENDAHULUAN

Bawang merah (*Allium ascolonicum L*) adalah satu dari beberapa komoditas strategis yang menjadi penyumbang inflasi dalam negeri selain dari beras, cabai merah, daging ayam, dan daging sapi. Bawang merah juga merupakan komoditas hortikultura unggulan yang secara intensif diusahakan oleh petani yang telah memberikan kontribusi tinggi terhadap perkembangan wilayah serta potensi pasar yang baik. Selain itu, komoditas bawang merah merupakan kelompok rempah tidak bersubsitusi

fungsinya sebagai bumbu penyedap makanan serta bahan obat tradisional (Kementerian Pertanian, 2015). Berdasarkan hasil penelitian HF Aldila, A. Fariyanti, N. Tinaprilla (2017) di 3 (tiga) sentra produksi bawang merah di Indonesia, menunjukkan bawang merah masih memiliki keunggulan kompetitif.

Perkembangan usahatani bawang merah di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada Tabel 1. Telah terjadi peningkatan produksi bawang merah sebesar 4,5 persen per tahun dan peningkatan produktivitas bawang merah rata-rata sebesar 1,66 persen per tahun.

Tabel 1. Perkembangan Usahatani Bawang merah di Indonesia Pada Tahun 2010-2014

Tahun	Luas Panen		Jumlah Produksi		Produktivitas	
	Hektar	Persen/tahun	Ton	Persen/tahun	Ton/ha	Persen/tahun
2010	109 634		1 048 934		9,57	
2011	93 667	-15,28	893 124	-15,12	9,54	-0,33
2012	99 519	5,6	964 221	6,80	9,69	1,56
2013	98 937	-0,56	1 010 773	4,52	10,22	5,36
2014	120 704	20,83	1 233 984	21,67	10,22	0,07
Rata-rata	104 492	2,65	1 030 207	4,5	9,85	1,66

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura (2015, diolah)

Berdasarkan Tabel 1 nampak bahwa produktivitas bawang merah di Indonesia mencapai 9,85 ton per hektar. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi yang digunakan. Menurut Sall (1997), Hoppe R.A. (2001) tingkat produksi pertanian secara umum, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi lingkungan dan struktural serta karakteristik petani. Namun demikian, menurut Sasmito (2010), kurang maksimalnya produktivitas bawang merah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah belum meratanya pengetahuan mengenai teknik budidaya yang tepat untuk digunakan, faktor lingkungan yang tidak dapat terkontrol seperti perubahan iklim serta hama dan penyakit tanaman.

Provinsi Jawa Barat merupakan pusat produksi bawang merah ke 3 di Indonesia setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Rata-rata kontribusi hasil produksi bawang merah dari tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah 11.24 persen. Terdapat beberapa wilayah sentra produksi bawang merah yang tersebar Provinsi Jawa Barat, salah satunya ialah Kabupaten Majalengka.

Kontribusi Kabupaten Majalengka terhadap Provinsi Jawa Barat dalam produksi bawang merah sebesar 23.52 persen, berada pada urutan ketiga setelah Kabupaten Cirebon (33.32 persen) dan Kabupaten Bandung (25.13 persen). Kondisi usahatani bawang merah di Majalengka tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Usahatani Bawang Merah di Majalengka Tahun 2009 - 2013

Uraian	Thun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Luas Panen (ha)	2 727	2 562	1 917	1 842	2 150
Produksi (ton)	37 338	22 879	18 642	20 636	23 683
Produktivitas (ton/ha)	13.69	8.93	9.72	11.20	11.01

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Pusat Statistik (2015)

Berdasarkan Tabel 2, produktivitas bawang merah di Kabupaten Majalengka mengalami fluktuasi. Produktivitas pada tahun 2010 menjadi salah satu produktivitas terendah, hal tersebut terjadi karena adanya penurunan luas panen dan produksi, Selanjutnya terjadi kenaikan produktivitas kembali pada tahun 2011 dan 2012. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2013 produktivitas menurun, padahal luas panen serta produksi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012. Penurunan produktivitas di Kabupaten Majalengka diduga terjadi karena penggunaan input yang belum efisien.

Keterbatasan kepemilikan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan menjadi salah satu kendala petani dalam menjalankan usahanya, namun di sisi lain petani juga ingin meningkatkan produksi dan produktivitas usahatani

yang dijalankannya. Oleh karena itu dalam pengelolaan usahatani petani dituntut, untuk menggunakan input faktor yang dimilikinya secara efisien. Untuk mengetahui efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi usahatani salah satunya adalah dengan menghitung efisiensi alokatif. Salah satu penduga efisiensi alokatif yang diamati dalam fungsi *Cobb-Douglas* adalah variable harga input dan harga output, (Rachman, H.P.S, 1986).

Indikasi dari penggunaan input yang tidak optimal dapat dilihat dari produk penerimaan marginal tidak sebanding dengan biaya marginal input yang digunakan. Pada gilirannya hal ini akan berpengaruh pada produktivitas usahatani. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis mengenai efisiensi alokatif input faktor usahatani bawang merah di Kabupaten Majalengka serta faktor yang mempengaruhinya dalam rangka memenuhi kebutuhan bawang merah dan untuk meningkatkan pendapatan petani bawang merah.

METODE

Penelitian ini berlokasi di Majalengka. Penentuan dari lokasi penelitian dipilih secara *purposive* dengan alasan lokasi penelitian adalah sentra pengembangan bawang merah di Jawa Barat. Selain itu, Majalengka juga merupakan salah satu kawasan pembangunan sayuran seiring dengan adanya Program Pengembangan Kawasan Hortikultura Terintegrasi Dengan Pendampingan Intensif.

Data utama penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT) IPB pada tahun 2015. Petani bawang merah yang menjadi responden ditentukan secara *purposive* yaitu petani bawang merah yang berasal dari Kabupaten Majalengka. Hal ini dilakukan karena populasi petani bawang merah masih belum terdata secara keseluruhan karena sebagian besar lahan di Kabupaten Majalengka disewa oleh petani dari daerah lain terutama pada saat musim kemarau, dimana lahan sawah beralih fungsi menjadi lahan bawang merah. Responden yang dipilih dalam penelitian ini sebanyak 37 petani bawang merah yang merupakan warga lokal dari Kabupaten Majalengka. Jenis data yang digunakan mencakup data kuantitatif dan data kualitatif.

Analisis Faktor Produksi

Faktor produksi yang mempengaruhi usahatani bawang merah dianalisis menggunakan fungsi produksi *Stochastic Frontier Cobb-Douglas*. Penetapan fungsi *Stochastic Frontier Cobb-Douglas* sebagai alat pendekatan, disebabkan pertimbangan bahwa fungsi produksi *Stochastic Frontier Cobb-Douglas* dapat meminimalkan terjadi multikolinearitas yang bersifat homogen. Rumus matematis pengukuran efisiensi teknis usahatani bawang merah adalah:

$$Y = \beta_0 X_1^{\beta_1} X_2^{\beta_2} X_3^{\beta_3} X_4^{\beta_4} X_5^{\beta_5} e^{v_i - u_i}$$

dalam bentuk linier menjadi:

$$\ln Y_i = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1,i} + \beta_2 \ln X_{2,i} + \beta_3 \ln X_{3,i} + \beta_4 \ln X_{4,i} + \beta_5 \ln X_{5,i} + v_i - u_i$$

Dimana :

- Y = Produksi bawang (kg)
 X1 = Luas lahan garapan (ha)
 X2 = Jumlah bibit (kg)
 X3 = Jumlah pupuk yang digunakan (kg)
 X4 = Jumlah tenaga kerja yang digunakan (HOK)
 X5 = Pestisida/obat yang digunakan (liter)
 β_0 = konstanta
 β_j = koefisien parameter penduga ke-j, dimana j = 1,2,3,4,5
 v_i = kesalahan pengganggu
 u_i = efek inefisiensi teknis dalam model

Bila koefisien $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_5 > 0$ berarti hasil pendugaan fungsi produksi *stochastic frontier* nilainya positif. Nilai koefisien parameter dugaan yang bernilai positif artinya bahwa peningkatan input akan meningkatkan nilai produksi usaha.

Analisis Efisiensi Alokatif

Sebuah usahatani dapat dikatakan berhasil mencapai efisiensi alokatif, apabila bisa mengalokasikan biaya input yang ada secara minimum. Menurut Nicholson (2002), efisiensi alokatif bisa tercapai jika komparasi Marginal Value of Product (NPM) masing-masing input sama dengan harga inputnya (P_x), yang bisa dirumuskan berikut ini:

$$NPM_x = P_x$$

$$\frac{NPM_x}{P_x} = 1$$

$$\frac{bY P_x}{X} = P_x \text{ atau } \frac{bY P_x}{X P_x} = 1$$

keterangan:

- b = Elastisitas
 Y = Out put
 P_y = Harga out put Y
 X = Jumlah input X
 P_x = Harga input X

Pada kenyataannya NPM_x tidak selalu sama dengan P_x , dan yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

- $NPM_x / P_x > 1$ mengartikan bahwa penggunaan dari input X tidak efisien, untuk mencapai efisien, maka X perlu ditambah.
- $NPM_x / P_x < 1$ mengartikan bahwa penggunaan dari input X tidak efisien, maka untuk mencapai efisien, X perlu dikurangi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi adalah kegiatan mengkombinasikan berbagai input atau masukan untuk menghasilkan output (Joelson dan Fathorrozi, 2003). Untuk menghasilkan

output tertentu dalam suatu proses produksi diperlukan kombinasi penggunaan sumber daya input (faktor produksi) yang terbaik. Penggunaan faktor-faktor produksi tersebut dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap efisiensi. Jika penggunaan faktor produksi tersebut berpengaruh positif, maka akan meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta dapat meningkatkan keuntungan bagi pelaku usaha, dalam hal ini adalah petani. Sebaliknya, jika faktor produksi tersebut bernilai negatif, maka mengakibatkan hasil efisiensi rendah, hal ini memperlihatkan telah terjadi penggunaan faktor produksi yang tidak tepat yang berpengaruh terhadap penurunan produktivitas dan keuntungan. Faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mengukur efisiensi usahatani, yaitu luas lahan, bibit, pupuk, tenaga kerja, dan pestisida.

Pengaruh luas lahan untuk komoditas bawang merah masing-masing di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Bantul, berpengaruh nyata terhadap produksi bawang merah (Waryanto, 2015 dan Lawalata dkk, 2015). Faktor produksi selanjutnya adalah bibit, pada hasil penelitian Waryanto (2015) dan Saptana (2011) menunjukkan bahwa bibit berpengaruh nyata terhadap produksi dan efisiensi usahatani. Selanjutnya adalah faktor produksi pupuk. Jenis pupuk yang biasa digunakan oleh petani dibagi menjadi dua, diantaranya adalah pupuk organik dan pupuk anorganik (pupuk kimia). Pada penelitian Waryanto (2015) menunjukkan bahwa penggunaan pupuk anorganik (pupuk kimia) berpengaruh nyata terhadap produksi. Namun pada penelitian Saptana (2011), menunjukkan bahwa penggunaan pupuk anorganik (pupuk kimia) tidak berpengaruh terhadap peningkatan produksi. Pada penelitian Waryanto (2015) dan Saptana (2011) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh nyata terhadap penggunaan pupuk organik namun nilainya sangat kecil. Meski begitu, pemakaian pupuk organik sudah menjadi prioritas pemerintah, karena kemampuan pupuk organik memperbaiki sifat tanah yang sudah jenuh sebagai akibat pemakaian pupuk anorganik dalam jangka panjang. Input produksi lain yang sering digunakan petani adalah pestisida. Pestisida digunakan bertujuan untuk mengendalikan serangan OPT, namun demikian ternyata residu pestisida pada tanah dan air berkorelasi positif dengan residu pestisida dalam produk (Harsanti, 2007)

Selanjutnya untuk mengestimasi fungsi produksi dilakukan melalui dua tahap sebagai berikut: a) melakukan pendugaan dengan metode Ordinary Least Square (OLS); dan b) melakukan pendugaan dengan metode *Maximum Likelihood Estimators (MLE)*. Berdasarkan hasil pengujian asumsi normalitas data, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi dengan menggunakan metode OLS hasilnya telah memenuhi syarat uji asumsi klasik, sehingga langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis fungsi produksi *Stochastic Frontier*

Cobb-Douglass dengan metode *Maximum Likelihood Estimation (MLE)*. Pendugaan dengan metode *MLE* dapat menggambarkan kinerja terbaik dari pelaku usaha pada tingkat teknologi yang ada. Dari hasil output pendugaan dengan metode *MLE* dapat diketahui pengaruh input-input yang digunakan (faktor produksi) terhadap nilai produksi. Hasil pendugaan fungsi produksi *stochastic frontier Cobb-Douglass* dengan menggunakan metode *MLE* dapat dilihat pada Tabel 3. Hasilnya menggambarkan nilai varian atau *sigma-square* (Σ^2) dan parameter *gamma* (γ) bawang merah di Majalengka. Nilai *sigma-square* (Σ^2) menunjukkan distribusi dari *error term* inefisiensi (*ui*), dimana nilai *sigma-square* (Σ^2) yang dihasilkan pada metode *MLE*, yaitu 0.108. Nilai tersebut termasuk pada nilai yang kecil atau mendekati nol, artinya *error-term* inefisiensi (*ui*) menyebar normal. Adapun untuk nilai *gamma* (γ) yang dihasilkan adalah 0.648 yaitu mendekati satu. Nilai *sigma square* (Σ^2) dan γ yang dihasilkan menunjukkan bahwa *error term* mayoritas sebagai akibat inefisiensi (*ui*) dan hanya sedikit yang berasal sebagai akibat *noise* (*vi*). Jika nilai γ mendekati nol, maka sebagian besar *error term* adalah sebagai akibat dari *noise* (*vi*), yaitu iklim, cuaca, penyakit, dan lain sebagainya yang bukan akibat dari inefisiensi. Selain itu, nilai *LR-test* pada *MLE* adalah 19,22 yaitu lebih besar dari nilai X_2 restriksi dari Tabel Kodde dan Palm (1986) sebesar 16,274 pada taraf nyata 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efek inefisiensi pada model. Nilai *Log-likelihood MLE* yang dihasilkan adalah sebesar 2,838, lebih besar dibandingkan nilai *Log-likelihood OLS* (-0.677). Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi produksi dengan menggunakan metode *MLE* sesuai dengan kondisi lokasi penelitian dalam penggunaan faktor-faktor produksi.

Dari Tabel 3, nampak bahwa peubah luas lahan (x_1) dan jumlah benih (x_2) berpengaruh secara nyata terhadap produksi bawang merah pada taraf nyata 5 persen. Adapun peubah pestisida (x_5) berpengaruh nyata terhadap produksi bawang merah pada taraf nyata 20 persen. Sementara itu, peubah jumlah pupuk (x_3) dan tenaga kerja (x_4) berpengaruh tidak nyata terhadap produksi bawang merah. Penjabaran masing-masing peubah diuraikan sebagai berikut:

Luas lahan (x_1)

Luas lahan merupakan peubah yang berpengaruh nyata terhadap produksi bawang merah. Jika terdapat penambahan luas lahan sebesar 10 persen, maka produksi masih dapat ditingkatkan 2,77 persen, ceteris paribus. Dalam melakukan produksi bawang merah, rata-rata penggunaan luas lahan petani bawang merah di Kabupaten Majalengka adalah 0.721. Hasil penelitian ini sejalan dengan Lawalata (2013), Rosdiantini (2013), Waryanto (2015), dan Siata (2016). Oleh karena itu, untuk

meningkatkan produksi, petani masih rasional jika ingin menambahkan luas lahan walaupun pengaruhnya masih relatif kecil serta peningkatan luas lahan bawang merah harus diikuti dengan penggunaan input yang tepat dan sesuai dengan prinsip manajemen yang baik.

Tabel 3. Hasil Pendugaan Fungsi Stokastik Frontier Dengan Metode Maximum Likelihood Estimation (MLE)

Variabel	Koefisien	t-statistik
Konstanta	5.23	7.171
Luas lahan (x_1)	0.277**)	2.924
Jumlah bibit (x_2)	0.445**)	4.497
Jumlah pupuk (x_3)	0.103	0.909
Tenaga Kerja (x_4)	0.054	0.598
Pestisida (x_5)	0.051*)	1.470
<i>Sigma-square</i> (Σ^2)		0.108
<i>Gamma</i> (γ)		0.648
<i>Log-likelihood OLS</i>		-0.677
<i>Log-likelihood MLE</i>		2.838
<i>LR test of the one-side error</i>		19.22

Keterangan:

***) nyata pada $\alpha = 5\%$ (t-tab=1.6905), *) nyata pada $\alpha = 20\%$ (t-tab=1.3065)

Jumlah bibit (x_2)

Jumlah bibit menjadi salah satu faktor produksi yang paling responsif terhadap produksi bawang merah. Jika terdapat penambahan jumlah bibit 10 persen maka produksi masih dapat ditingkatkan 4,45 persen, asumsi input lainnya tetap. Sejalan dengan hasil penelitian Rosdiantini (2013) dan Waryanto (2015) yang menghasilkan nilai koefisien untuk peubah bibit berpengaruh signifikan terhadap produksi bawang merah di Bantul dan Nganjuk. Dalam penggunaan bibit, jumlah bibit yang dianjurkan adalah 2-3 ton per hektar bibit dalam bentuk umbi. Namun penggunaan rata-rata bibit umbi oleh petani bawang merah di Majalengka hanya 1 ton per hektar. Penggunaan jumlah bibit umbi tersebut masih belum sesuai dengan anjuran karena adanya keterbatasan persediaan bibit. Hal ini menjadi salah satu penyebab produktivitas bawang merah di Kabupaten Majalengka menurun. Oleh karena itu, penggunaan jumlah bibit umbi harus diperhatikan juga didukung dengan penggunaan mutu bibit atau benih yang berkualitas.

Jumlah pupuk (x_3)

Nilai koefisien elastisitas yang dihasilkan untuk jumlah penggunaan pupuk adalah 0,103, yang dapat diartikan bahwa untuk setiap peningkatan penggunaan pupuk sebesar 10 persen, maka akan meningkatkan produksi bawang merah dengan penambahan produksi sebesar 1,03 persen, ceteris paribus. Petani responden menggunakan pupuk organik dan pupuk kimia. Secara

keseluruhan, penggunaan pupuk kimia yang dianjurkan adalah 50-500 kilogram per hektar. Namun rerata jumlah pupuk kimia yang digunakan oleh petani responden di Kabupaten Majalengka adalah 700-1000 kilogram per hektar. Hal ini memperlihatkan adanya kelebihan penggunaan pupuk yang seharusnya digunakan oleh petani bawang merah, berlebih. Petani bawang merah menggunakan pupuk bertujuan untuk meningkatkan produksi bawang merah sampai pada tingkat maksimum. Padahal pada kenyataannya penggunaan pupuk kimia telah melebihi dosis anjuran sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi lingkungan, baik terhadap lahan maupun air. Pada pemakaian pupuk organik, dosis yang dianjurkan untuk bawang merah sebesar 6 ton per hektar untuk pupuk organik yang terbuat dari kotoran ayam (Sumarni dan Hidayat 2005). Adapun menurut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian anjuran penggunaan pupuk organik secara keseluruhan adalah 10-20 ton per hektar. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pupuk organik pada komoditas bawang merah di Kabupaten Majalengka masih sangat sedikit digunakan yaitu 998 kilogram per hektar, bahkan terdapat beberapa petani yang tidak menggunakan pupuk organik dalam proses produksi bawang merah. Hal tersebut terjadi karena adanya kesulitan dalam memperoleh pupuk organik.

Tenaga kerja (x4)

Nilai elastisitas penggunaan tenaga kerja mencapai 0,054, artinya tenaga kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi bawang merah di Kabupaten Majalengka. Pada lokasi penelitian, penambahan tenaga kerja biasanya dilakukan pada aktivitas pengolahan dan pemeliharaan seperti pengendalian hama dan penyakit serta penyiangan. Hal tersebut terjadi karena bawang merah termasuk pada tanaman yang rentan terhadap penyakit, sehingga pemeliharaan dalam pengendalian hama dan penyakit sangat diperlukan.

Pestisida (x5)

Hasil penelitian terhadap produksi bawang merah di Kabupaten Majalengka menunjukkan nilai koefisien untuk peubah pestisida adalah 0,0512 dan berpengaruh

terhadap produksi bawang merah secara nyata. Jika dilakukan penambahan sebanyak 10 persen pestisida, maka akan meningkatkan produksi sebanyak 0,512 persen, ceteris paribus. Penambahan produksi bawang merah jika penggunaan pestisida ditingkatkan memiliki persentase yang sangat kecil dibandingkan dengan variabel input lainnya. Pada penelitian ini penggunaan pestisida termasuk cukup besar dan melebihi dosis anjuran. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Waryanto (2015) di Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu, walaupun variabel pestisida berpengaruh nyata, namun dalam proses penambahan tersebut harus tetap pada dosis anjuran.

Analisis Efisiensi Alokatif

Efisiensi alokatif dapat tercapai apabila mampu jika dapat mengalokasikan biaya secara minimum dari input yang tersedia. Faktor produksi yang dianalisis adalah faktor produksi fisik yang dapat dinilai dengan rupiah. Berikut ini Tabel 4 menunjukkan rasio NPM dan Px pada faktor-faktor produksi bawang merah di Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan Tabel 4, nampak bahwa penggunaan dari faktor-faktor produksi aktual dan rasio NPM dan Px pada produksi usahatani bawang merah di Kabupaten Majalengka. Dari perbandingan antara NPM dan Px memperlihatkan bahwa masing-masing faktor produksi tidak sama dengan satu. Faktor produksi luas lahan, jumlah bibit, jumlah pupuk, dan pestisida memiliki nilai efisiensi alokatif lebih dari satu yang berarti faktor-faktor produksi tersebut yang ditinjau dari sisi harga masih belum mencapai efisien. Faktor produksi tenaga kerja memiliki nilai efisiensi alokatif dibawah dari satu, yang berarti faktor produksi tenaga kerja termasuk tidak efisien. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkat keuntungan maksimum maka penggunaan tenaga kerja harus dikurangi.

SIMPULAN

Input faktor yang berpengaruh pada produksi bawang merah di Kabupaten Majalengka adalah luas lahan, jumlah bibit, dan pestisida. Adapun berdasarkan hasil analisis efisiensi alokatif, diperoleh hasil bahwa usahatani bawang merah di Kabupaten

Tabel 4. Nilai Produk Marginal (NPM), Harga Input Faktor (Px) Usahatani Bawang Merah di Majalengka

Faktor Produksi	Input Aktual	Koefisien Regresi	NPM	Px	NPM/Px
Luas lahan	0.721	0.277	4 561 431 2.7	6 125 881	7,45
Jumlah bibit	1 269.595	0.455	41 597.4	23 129	1,79
Jumlah pupuk	996.662	0.103	12 264.8	6 018	2,03
Tenaga kerja	316.145	0.054	20 271.1	111 892	0,18
Pestisida	24.588	0.051	246 158.9	77 179	3,19
Efisiensi rata-rata					2,93
Efisiensi terendah					0,18
Efisiensi tertinggi					7,45

Majalengka belum efisien. Hal tersebut terjadi karena variabel alokasi harga yang tidak tepat dari setiap faktor produksi, sehingga biaya yang dikeluarkan belum sesuai dengan pendapatan. Oleh karena itu agar usahatani bawang merah efisien, maka penggunaan input yang perlu diperhatikan adalah luas lahan, jumlah bibit, dan pestisida dan untuk meningkatkan nilai efisiensi alokatif yang berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan petani dan penggunaan biaya input produksi tenaga kerja dapat diminimumkan dengan mengurangi jumlah tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldila, HF., Fariyanti, A & Tinaprilla, N. (2017). Daya saing Bawang Merah di Sentra Produksi di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 14, (1), 43-53.
- Badan Pusat Statistik (2015). Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas serta Perkembangan Kebutuhan Bawang Merah Tahun 2010-2014. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. (2015). Draft Petunjuk Umum: Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Tahun 2015. Jakarta.
- Harsanti, E. (2007). Dampak Penggunaan Pestisida Kualitas Lingkungan Fisik dan Produk Bawang Merah serta Perilaku Petani dalam Usahatani Bawang Merah. Yogyakarta: Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Hoppe, R.A. (2014). Structural and Financial Characteristic of U.S. farms, Family Farm Report, Economic Research Service Economic Information Bulletin, Number 132
- Joesron dan Fathorrozi. 2003. Teori Ekonomi Mikro. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Pertanian (2015). Outlook Bawang Merah. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Kodde, D & Palm, F. (1986). Wald Criteria for Jointly Testing Equality and Inequality Restrictions. *Econometrica*, 54, (5), 1243-1248.
- Lawalata, M., Darwanto, D.H. & Hartono, S. (2015). Efisiensi Relatif Usahatani Bawang Merah di Kabupaten Bantul dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Ilmu Pertanian* 18, (1), 1-8.
- Nicholson, W. (2002). Ekonomi Intermediate dan Aplikasinya Edisi Kedelapan. Terjemahan IGN Bayu Mahendra dan Abdul Aziz. Jakarta: Erlangga.
- Rachman, H.P.S. (1986). Pendugaan Fungsi Keuntungan dan Analisis Efisiensi Ekonomi Relatif Usahatani Padi Sawah (Studi pada Beberapa Desa di Jawa Barat). Bogor: Tesis Magister Sains pada Fakultas Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Rosdiantini, R. (2013). Efisiensi Usahatani Bawang Merah di Kabupaten Bantul Yogyakarta: Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Sall, S. (1997). A Characteristics, Problems, and Significance of Small Farmers in Nigeria, in: Proceeding of The Annual Conference of The Nigerian Economic Society, Ibadan, Nigeria, pp. 45-76.
- Saptana, A Daryanto, Heny K Daryanto, Kuntjoro. (2011). Analisis Efisiensi Produksi Komoditas Cabai Merah Besar dan Cabai Merah Keriting di Provinsi Jawa Tengah: Pendekatan Fungsi Produksi Frontier Stokastik. *Forum Pascasarjana*, 34, (3), 173-184.
- Sasmito (2010). Aplikasi Pakan Untuk Simulasi Diagnosa Hama dan Penyakit Tanaman Bawang Merah dan Cabai Menggunakan Forward Chaining dan Pendekatan Berbasis Aturan. Tesis. Undip. Semarang
- Siata, Ratnawaty. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Petani Dalam Penerapan Benih Padi Varietas Cihayang Di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu. *Sosiohumaniora*, (18), (3), 240-247:.
- Sumarni, N dan Hidayat A (2005). Budidaya Bawang Merah. Lembang, Bandung: Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Waryanto, B. (2015). Analisis Keberlanjutan Usahatani Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bogor: Disertasi. IPB.

PERUBAHAN BUDAYA ORGANISASI DARI UNIVERSITAS PEMBELAJARAN KE UNIVERSITAS PENELITIAN DI UNIVERSITAS LAMPUNG

Feni Rosalia, dan Lilih Muflihah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung

E-mail: feni.rosalia@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK. Universitas Lampung (Unila) berproses dari Universitas Pembelajaran ke Universitas Penelitian, namun masih mengalami kendala dalam jumlah penelitian dan publikasi penelitian. Untuk menjadi Universitas Penelitian Unila dituntut untuk menyediakan keunggulan kompetitif yang strategis terkait budaya meneliti. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui budaya organisasi di Unila serta mengetahui proses perubahan budaya, dari Universitas Pembelajaran kepada Universitas Penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan statistik inferensi karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai variasi yang muncul dari perubahan budaya organisasi dari universitas pembelajaran ke universitas penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Tenaga Pendidik Universitas Lampung, dengan sampel berjumlah 90 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner. Teknik analisis data menggunakan analisis *univariat* (analisis per variabel) dan analisis *bivariat* (analisis dua variabel). Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi Universitas Lampung sudah mengarah pada perubahan budaya dari Universitas Pembelajaran ke Universitas Penelitian. Namun budaya riset yang terbangun masih bersifat personal, karena kebutuhan pribadi bukan digerakkan secara masif oleh perguruan tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari komparasi antara manajemen perguruan tinggi dan budaya riset. Prakarsa dan konsistensi didominasi oleh keinginan pribadi dan publikasi belum membudaya akibat lemahnya dosen menjangkau akses kepada publikasi tersebut. Saran penelitian adalah komitmen pemimpin yang tinggi, baik dari kebijakan yang dikeluarkan dan dukungan pendanaan, sarana dan prasarana. Budaya research tidak hanya mementingkan personal saja tetapi *research* dilaksanakan secara kelembagaan dan diyakini sebagai kebutuhan bersama.

Kata kunci: budaya; universitas pembelajaran; universitas penelitian

CHANGE IN ORGANIZATIONAL CULTURE FROM TEACHING UNIVERSITY TO RESEARCH UNIVERSITY AT LAMPUNG UNIVERSITY

ABSTRACT. *University of Lampung (Unila) is one of the State Universities in Indonesia that has a vision to be 10 (ten) best universities in Indonesia in 2025. From Teaching University to Research University, Unila is required to have a clear organizational culture. As an organization, in carrying out, Unila activities cannot be separated from the change of culture. If it leads to a culture of research, Unila is required to provide a strategic competitive advantage related to the culture of the research. Unila should expand researches or scientific publications to get to Research University. The goal to be achieved in this research is to know the organizational culture in Unila and to know the process of cultural transformation, from Teaching University to Research University. The method used in this study is quantitative descriptive because this study aims to explain the various conditions, situations, or variables arising from the object of research. Population and sample in this research are Lampung University Lecturers. Data collection techniques are questionnaires. Data analysis technique using univariate (per variable analysis) and bivariate analysis (two variables analysis) obtained from the result of questionnaire. The results showed that the organizational culture of the University of Lampung has led to cultural changes from teaching University to research University. However, the changes have not been reached maximally, because the organizational culture in terms of leadership, policies, facilities, infrastructures, and funding are still experiencing many obstacles. Although the research culture of lecturers is not yet comprehensive, it is limited to only a few faculties. The research team recommended the change of organizational culture as the spearhead of maximum research culture at the Lampung University.*

Keywords: culture, teaching university, research university

PENDAHULUAN

World Class University (WCU) adalah pengakuan internasional bagi Perguruan tinggi. Kriteria dapat diakui sebagai WCU diantaranya adalah karya penelitian dosen, baik dalam aspek publikasi karya ilmiah pada jurnal-jurnal yang dibaca dan dikutip oleh akademisi mancanegara, jumlah kutipan, pendapatan universitas dari penelitian inovatif untuk membantu dunia industri, baik penelitian evaluatif, pengembangan maupun penelitian untuk temuan-temuan inovasi baru baik dalam aspek teknologi, sistem maupun manajemennya. Untuk dapat bersaing di tingkat global PT harus menjadi *research university*, yaitu

universitas yang memiliki misi memperbesar jumlah penelitian, dengan perluasan pada seluruh bidang ilmu dan kerjasama dengan industri, serta memperbesar jumlah alumni *graduate studies*, baik pada jenjang program magister maupun doktor. Universitas riset berfokus pada penelitian. Produktivitas penelitian lebih mudah diukur dari pada jenis pekerjaan akademis lainnya, dan publikasi dan ranking merupakan bagian kecil dari sistem akademik. (Altbach, 2015:6). Bersamaan dengan itu, universitas juga mengurangi jumlah dan volume mahasiswa pada program sarjana (*Shaugnessy*, 2011). Universitas dituntut dituntut memiliki sumber daya yang handal. Kemampuan melakukan penelitian dan pengembangan

ilmu dan pendidikan pengajaran yang dicirikan tingginya kemampuan dalam:

- a. Membimbing mahasiswa dalam kegiatan seminar mahasiswa laporan ilmiah, pembuatan makalah serta kegiatan akademik lainnya.
- b. Merancang dan mengadakan penelitian baik secara kelompok maupun mandiri
- c. Membuat laporan karya ilmiah ataupun penelitian secara tepat berdasarkan syarat ilmiah
- d. Menyajikan karya tulis dalam diskusi ilmiah, seminar jurusan, fakultas, regional maupun tingkat nasional internasional
- e. Membimbing penelitian mahasiswa
- f. Mengkaji bahan-bahan ilmiah mutakhir seperti hasil – hasil penelitian. (Setiawati, 2009:4)

Pada konteks PT di Indonesia sebagian besar PT mengadopsi sebagai Universitas Pembelajaran atau *Teaching University*. Banyak Universitas di Indonesia memiliki program doktor/S-3 tapi masih berfokus pada pada pembelajaran lanjutan program tingkat sarjana, padahal sangat potensial dikembangkan menjadi *research university*. Banyak karya ilmiah atau hasil penelitian hanya sebatas seminar dan prosiding dan tidak dipublikasikan ke jurnal nasional atau jurnal internasional. Universitas Lampung (Unila) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia melalui visi menjadi 10 (sepuluh) perguruan tinggi terbaik di Indonesia pada tahun 2025 berkomitmen untuk bertransformasi dari *teaching university* kepada *research university*.

Hasil evaluasi Diri Unila tahun 2016 (Unila dalam angka, 2016) menunjukkan bahwa kelemahan Unila dalam penelitian adalah banyaknya dosen Unila tidak mempublikasikan hasil penelitiannya di dalam jurnal Internasional Terakreditasi. Walaupun tahun 2016 Unila sudah mempublikasikan hasil penelitian di Jurnal Internasional terindektasi mencapai 45 artikel, dan menempatkan Unila di posisi ke 17 dari 50 institusi PT/PTN dalam produktivitas jurnal indeks scopus. Hal ini masih jauh di dibandingkan dengan PT yang berada di Pulau Jawa seperti UI, UNPAD dan UGM yang rata-rata mempublikasikan hasil penelitiannya lebih dari 50 judul ke jurnal internasional terakreditasi.

Dalam perspektif manajemen strategik, problem ketertinggalan Unila dengan PT di Jawa dapat dikurangi, karena berdasarkan evaluasi dari Kemenristekdikti tahun 2016 pencapaian visi Unila menempati posisi peringkat ke 22 dari lebih dari 3000 PT di Indonesia. Pada tahun 2016 Unila memperoleh akreditasi institusi dengan predikat A. Unila saat ini memiliki SDM yang yang berkualitas, profil mahasiswanya sangat beragam, dan memiliki *brand image* sebagai PT yang berkelas khususnya di luar Pulau Jawa. Menurut data Unila dalam angka tahun 2016, tahun

akademik 2014-2015 jumlah dosen sebanyak 1.158 dan memiliki rasio dosen dan mahasiswa sudah ideal yaitu 1:20,7. Jumlah dosen tetap di Unila 30% bergelar S-3, 65% bergelar S-2, dan 5% bergelar S-1 (sedang menempuh S-2) selain itu asal mahasiswa/wi yang kuliah di Unila sudah tersebar dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa selain kekurangan yang ada, ternyata Unila memiliki kelebihan sebagai faktor pendukung *research university*.

Untuk mewujudkan PT berskala *research university* diperlukan perubahan pola pikir perguruan tinggi yang berorientasi pada penciptaan suatu budaya organisasi yang lebih dinamis, kompetitif, dan produktif. Budaya organisasi di perguruan tinggi menggambarkan hubungan lingkungan yang memberikan pengaruh atau efek bagi seluruh civitas akademika yang ada pada perguruan tinggi tersebut baik itu mahasiswa, dosen serta karyawan. Budaya organisasi perguruan tinggi merupakan kepercayaan dan perilaku yang dikerjakan seluruh civitas akademika yang ada pada perguruan tinggi tersebut dan diyakini. bersamasama membentuk organisasi dan menentukan batasan-batasan di dalamnya. Budaya organisasi perguruan tinggi merupakan pemahaman dan kesepakatan antara komponen yang ada pada perguruan tinggi tersebut yang membentuk respon terhadap tuntutan internal dan eksternal. Budaya organisasi terefleksikan pada perencanaan, kerjasama, komunikasi, pelatihan dan pengembangan, imbalan, pengambilan keputusan, pengambilan resiko, praktik manajemen, motivasi bekerja, keikhlasan, disiplin dan menghargai waktu, semangat egalitarian, dan ketertiban dalam melaksanakan beribadah terhadap kinerja dosen yang terefleksikan pada kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta kegiatan penunjang. (Sangadji, 2009:64). Unila terus berkembang dan harus mempertahankan posisi organisasi dalam jangka waktu yang lama. Untuk bertransformasi dari *Teaching University* ke *Research University* Unila harus memiliki budaya organisasi yang jelas. Jika mengacu pada visi Unila menjadi *research university* maka budaya organisasi Unila sudah selayaknya mengarah pada budaya yang mendukung pencapaian *Research University*.

Budaya Organisasi di perguruan tinggi harus unik dan sesuai dari organisasi tersebut agar budaya organisasi tersebut tidak sama dan tidak dapat diduplikasi oleh organisasi yang lain serta menjadi ciri khas dari suatu organisasi tersebut. Budaya organisasi harus mendorong anggota untuk bekerja. Budaya organisasi yang kurang memotivasi atau mendukung karyawannya akan menurunkan kinerja karyawan (Sulistyaningsih, 2012:100). Budaya organisasi akan menumbuhkan komitmen kerja. Komitmen kerja meliputi kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan, adanya kemauan untuk bekerja lebih baik, loyalitas terhadap organisasi, dan kepatuhan terhadap nilai dan tujuan organisasi. (Sudiro, 2009:90).

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pertanyaan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah budaya organisasi di Universitas Lampung? dan (2) Bagaimanakah variasi budaya dalam proses transformasi dari *teaching university* ke *research university* di Universitas Lampung?

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif dengan statistik inferensi karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai variasi yang muncul dari perubahan budaya organisasi dari universitas pembelajaran ke universitas penelitian. Penelitian dilaksanakan di Universitas Lampung. Alasan pemilihan lokasi karena Universitas Lampung memiliki visi menjadi 10 (sepuluh) perguruan tinggi terbaik di Indonesia pada tahun 2025. Berdasarkan Unila dalam angka tahun 2017, Universitas Lampung memiliki SDM dengan jumlah memadai (1107 tenaga pendidik dan 613 tenaga kependidikan, dengan pendidikan tenaga pendidik jenjang S2 dan S3 sebanyak 1071 orang. Jumlah mahasiswa peminat Unila pada tahun akademik 2017/2018 adalah 70.465 dengan daya tampung hanya 7854 orang. Profil mahasiswa juga beragam dari berbagai provinsi Indonesia. Penelitian ini memiliki variabel budaya organisasi dan *research university* dengan indikator budaya organisasi dalam konteks manajemen Perguruan Tinggi meliputi: Visi misi Perguruan Tinggi, Kepemimpinan (komitmen pemimpin), Kebijakan Perguruan Tinggi, Fasilitas/sarana prasarana, dan Pendanaan. Sementara indikator budaya riset (*research university*) meliputi: Prakarsa/cipta, Mitra kerjasama, Konsistensi dan independensi, Regenerasi, Sarana, dan Publikasi.

Populasi penelitian ini adalah seluruh dosen Universitas Lampung pada tahun 2017 yang tidak sedang menempuh pendidikan. Jumlah dosen 1107 orang (Unila dalam angka, 2017), dan yang sedang menempuh pendidikan dalam dan luar negeri 154 orang, sehingga total populasi adalah 953 orang (FEB = 89; FH = 83; FKIP = 184; FP = 2FK = 48).

Selanjutnya penentuan jumlah sampel diambil dengan rumus slovin,

$$n = \frac{N}{N (\alpha^2) + 1}$$

Keterangan:

N = Jumlah Populasi

n = jumlah sampel

α = derajat kesalahan

Sampel penelitian berjumlah 90 orang, selanjutnya penarikan sampel dengan teknik *stratified random sampling*, dengan rumus $i = N/n$, sehingga diperoleh dosen dari setiap fakultas yaitu : FEB = 8; FH = 8; FKIP

= 17; FP = 20; FT = 14; FISIP = 9; MIPA = 9; FK = 5. Pengambilan akhir sampel adalah dengan metode arisan. Teknik pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertutup serta menggunakan lima pilihan dalam model skala Likert. Pengukuran dengan skala likert dipilih karena teknik ini dapat diukur sikap, pendapat, dan persepsi dosen yang menjadi sampel.

Dari hasil Likert di buat tabulasi yang kemudian di cari reratanya untuk mengetahui kecenderungan jawaban. Setelah itu disajikan dalam bentuk grafik yang kemudian di analisis.

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban responden diberi nilai skor : sangat setuju diberi skor 5, selanjutnya setuju diberi skor 4, kurang setuju 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Analisa univariat untuk mendeskripsikan variabel usia, pendidikan, pekerjaan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dsb. Sedangkan analisa bivariat untuk menganalisis variabel Budaya Organisasi (Manajemen Universitas Lampung) dan Budaya Research. Pengolahan data dari kuisisioner selanjutnya dianalisis secara deskriptif sehingga lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Universitas Lampung

Budaya organisasi dalam penelitian ini lebih menekankan pada manajemen perguruan tinggi tingkat universitas maupun di tingkat fakultas.

Visi dan Misi Perguruan Tinggi

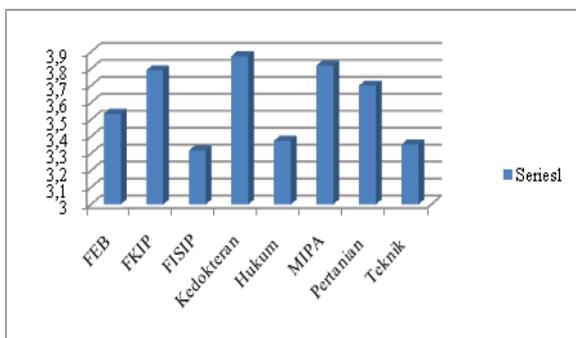
Unila dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Unila 2005-2025 telah ditetapkan visi Unila yaitu: "Pada Tahun 2025 Unila Menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik di Indonesia.". Sejalan dengan misi pembangunan pendidikan nasional serta kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Unila telah menetapkan misi dalam RPJP Unila 2005-2015 dan dokumen Renstra 2007-2011 sbb :

1. Menyelenggarakan tridarma PT yang berkualitas dan relevan;
2. Menjalankan tata pamong organisasi Unila yang baik (*good university governance*);
3. Menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi;
4. Menjalani kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) paling berkomitmen untuk mencapai visi dan misi Unila dengan nilai 4,03. Sementara komitmen FMIPA dan FT untuk mencapai visi dan misi Unila memperoleh nilai 3,94 kemudian FK, FP, FKIP dengan nilai 3,86, dan FISIP dengan nilai 3,72 sedangkan Fakultas Hukum (FH) yang terendah dengan nilai 3,44. Komitmen mencapai

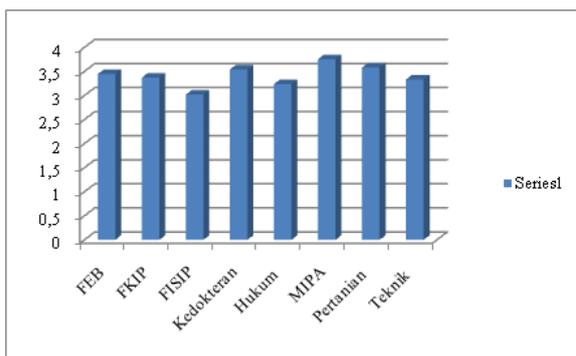
visi dan misi berpengaruh pada manajemen organisasi, jika komitmen tinggi organisasi cenderung membangun manajemen organisasi yang baik. Pada FEB yang memiliki manajemen yang baik, hampir 90 persen program studi dari tingkat diploma hingga pascasarjana berakreditasi A. FEB juga mendapatkan berbagai ISO dari dalam dan luar negeri.

Kepemimpinan (Komitmen Pemimpin)



Gambar 1. Kepemimpinan

Cerminan sebuah organisasi salah satunya adalah pemimpin. Komitmen pemimpin menjadi sangat penting dalam manajemen organisasi. Jika pemimpin tidak berkomitmen maka organisasi tidak akan berjalan. Di Universitas Lampung, Fakultas Kedokteran (FK) memiliki komitmen kepemimpinan tertinggi dengan nilai 3,87. Hal tersebut wajar karena FK merupakan fakultas dengan sumber pemasukan dari mahasiswa tertinggi di Unila sehingga dituntut untuk memberikan yang optimum kepada mahasiswa. FK lebih terkenal terbukti banyaknya peminat, sehingga butuh komitmen kepemimpinan yang tinggi.



Gambar 2. Kebijakan Perguruan Tinggi

1. Kebijakan Perguruan Tinggi

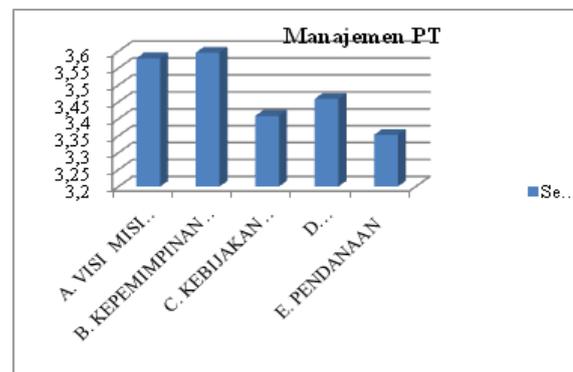
Untuk mencapai visi dan misinya unila membutuhkan aturan main yang kuat dan jelas dalam bentuk berbagai kebijakan. Penerapan kebijakan unila cenderung relatif merata di setiap fakultas, meskipun ada gap tetapi relatif kecil dan tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semua fakultas di Unila sudah menunjukkan komitmen yang relatif sama untuk menjalankan berbagai kebijakan Universitas Lampung.

2. Fasilitas/ Sarana dan Prasarana

Pengelolaan keuangan melalui BLU menjadikan universitas mandiri. Sarana dan prasarana menjadi tanggungjawab universitas untuk menjamin proses perkuliahan di kampus. Fakultas bidang ilmu eksakta relatif memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik, yaitu FK dengan nilai 3,78 dan FMIPA dengan nilai 3,91. FK memiliki pemasukan dengan nominal yang besar sehingga harus memberikan fasilitas terbaik. FMIPA sebagai pusat bidang eksakta sarana dan prasarananya lengkap khususnya dalam pengadaan dan pengelolaan laboratoriumnya. Namun, fakultas bidang ilmu sosial seperti FISIP dan FH yang masing-masing bernilai 3,15 dan 3,11 cenderung memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas rendah. Kemudian FEB 3,61, FKIP 3,45, FP 3,43, dan FT 3,23.

3. Pendanaan

Pendanaan berbanding lurus dengan fasilitas, sarana serta prasarana. Semakin tinggi tuntutan fasilitas, sarana dan prasarana maka pendanaan juga semakin tinggi. FK dan FMIPA memiliki pendanaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan fakultas lain, dengan masing-masing nilai 3,77 dan 3,73. Begitu juga dengan FISIP dan FH yang pendanaannya relatif lebih sedikit, dengan nilai 3,18 dan 3,04. Semua pendanaan tergantung fasilitas serta sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan oleh setiap fakultas. FEB dengan nilai 3,42, FKIP dengan nilai 3,30, FP 3,27, dan FT 3,1. Secara umum, perbandingan indikator manajemen Universitas Lampung adalah sebagai berikut:

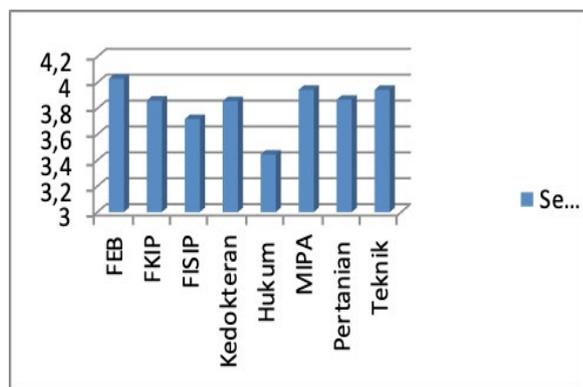


Gambar 3. Perbandingan Manajemen Universitas Lampung

Kepemimpinan urutan teratas dalam manajemen di Unila, dan berbanding lurus dengan visi misi yang baik di setiap fakultas karena pucuk pimpinan memiliki komitmen yang baik. Ketersediaan sarana dan prasarana juga makin membaik. Namun tingginya kepemimpinan tidak menjamin banyaknya kebijakan yang dibuat, khususnya kebijakan terkait riset.

Budaya Riset Universitas Lampung (Culture Research Lampung University)

1. Prakarsa / Cipta



Gambar 4. Prakarsa / Cipta

Prakarsa dan cipta berkaitan dengan produktifitas membuat tulisan ilmiah sesuai dengan bidang ilmu. FEB memiliki prakarsa dan cipta tertinggi di unila. Hal tersebut sesuai dengan fakta dengan akreditasi jurusan di FEB yang hampir semua berakreditasi A. FMIPA, FP, dan FT juga memiliki prakarsa dan cipta yang relatif tinggi, karena penelitian-penelitian eksakta peluangnya lebih banyak dan didukung laboratorium yang memadai.

2. Mitra Riset

Kecenderungan unik dalam mitra riset yakni FISIP seolah mewakili ilmu sosial dan FMIPA mewakili ilmu eksakta. FISIP dengan nilai 4,08 dan FMIPA 4,15. Kedua fakultas melaksanakan berbagai riset baik secara individu maupun bermitra. FMIPA yang memang memiliki lab memadai memiliki mitra riset, tidak hanya melakukan riset secara *partnership* tetapi pihak dari luar juga bisa menggunakan jasa lab FMIPA untuk riset, hal tersebut saja sudah disebut mitra riset. FISIP dengan kajian ilmu yang luas juga memiliki mitra riset yang baik, tidak hanya dalam lingkup lembaga tetapi *person to person* antara tenaga pengajar. Bahkan karena lingkup ilmu yang luas FISIP memiliki potensi mitra riset yang sangat luas juga tidak terbatas satu daerah saja. Sementara itu FEB dengan nilai 4,03, FKIP 3,61, FK 3,77, FH 3,63, FP 4,01, dan FT 3,94.

3. Independent dan Konsisten

Independensi dan konsistensi fakultas berbanding lurus dengan komitmen untuk melakukan riset. Fakultas yang memiliki konsistensi dan independensi baik adalah fakultas yang memiliki komitmen riset yang baik, yakni FEB dengan nilai 3,96, FMIPA dengan nilai 3,83, FK dengan nilai 3,93, dan FISIP dengan nilai 3,95. Dalam hal riset keempat fakultas tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Berbanding terbalik dengan FH yang memang komitmen riset fakultas tersebut rendah, berbanding lurus dengan independensi dan konsistensi yang relatif rendah juga, hanya 3,37.

4. Regenerasi

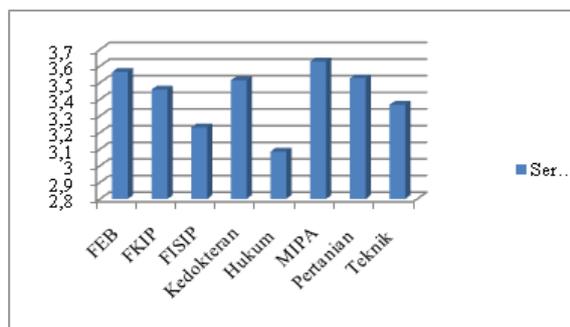
Regenerasi berlangsung baik jika memiliki kerangka dasar yang kuat. Komitmen kepemimpinan

berdampak pada tingginya komitmen manajemen organisasi. Komitmen yang tinggi akan mempengaruhi seluruh struktur organisasi. Jika terjadi regenerasi maka tidak akan berdampak apapun pada sistem yang telah bangun. FK dengan nilai 4,09, memiliki regenerasi yang baik karena memiliki komitmen yang sama dari pemimpin hingga anggota paling bawah, regenerasi tidak akan berdampak pada apapun. FH dengan nilai 3,59 memiliki regenerasi yang rendah karena komitmen pemimpin dan manajemennya relatif paling rendah dibandingkan yang lain. Sementara nilai regenerasi FMIPA 4,07, FISIP 4,02, FEB 4,00, FKIP 3,94, FP 3,93, dan FT 3,89.

5. Sarana Riset

Sebagai sebuah fakultas dengan jumlah mahasiswa terbanyak di Unila, FKIP memang dituntut memiliki sarana riset yang baik dengan nilai 4,17. Tren sama juga terjadi pada fakultas dengan ilmu eksakta seperti FK dengan nilai 4,00, FMIPA dengan nilai 3,89, dan FP dengan nilai 3,80 yang memiliki sarana riset yang baik dari laboratorium, literatur dan sebagainya. Namun untuk fakultas yang membidangi ilmu sosial seperti FISIP dan FH memang masih memiliki sarana riset yang tidak sebaik dengan eksakta, dengan masing-masing nilai 3,64 dan 3,44. Hal tersebut karena riset ilmu sosial yang tidak terlalu bergantung pada alat riset. Sementara FEB dengan nilai 3,57 lebih rendah sedikit dari FISIP dan FT yang masuk dalam ilmu eksakta namun sarana risetnya hanya 3,44.

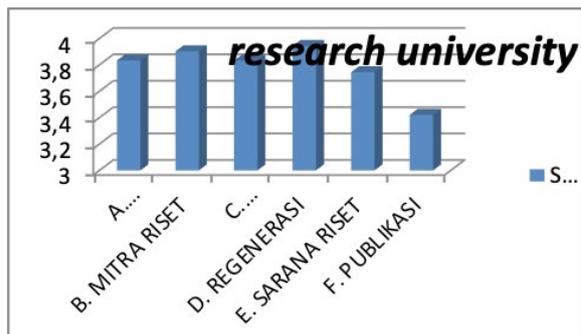
4. Publikasi



Gambar 5. Publikasi

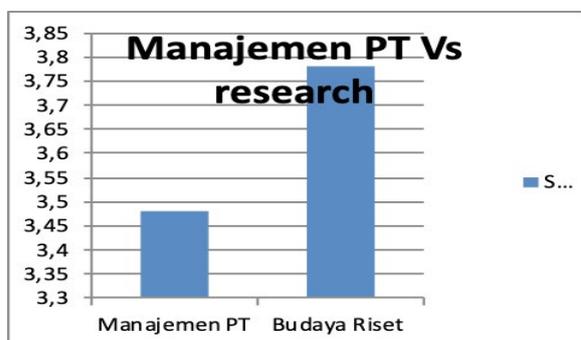
Publikasi ilmiah berbanding lurus dengan cipta dan riset setiap fakultas. FMIPA dan FEB menjadi fakultas dengan publikasi lebih baik dibandingkan yang lain. Publikasi riset FEB dan FMIPA memang lebih produktif karena kedua fakultas sudah mendapatkan ISO dan memiliki jurnal publikasi sendiri. FISIP dan FH sebenarnya memiliki ciptaan riset yang cukup banyak namun memiliki keterbatasan publikasi. Kebanyakan dosen cenderung melakukan mitra riset dan dipublikasikan di luar. FISIP dan FH terbatas mempunyai publikasi jurnal yang terakreditasi.

Secara umum, capaian indikator *research university* di Unila adalah sebagai berikut:



Gambar 6. Research University Universitas Lampung

Regenerasi menempati urutan pertama. Kepemimpinan yang kuat mengakar hingga level bawah, ketika terjadi regenerasi tidak terjadi gejala. Unila sudah memiliki prakarsa dan cipta yang relatif baik, para stakeholder kampus juga berupaya memperluas jaringan riset dengan memperbanyak mitra riset, menjunjung tinggi asas independensi dan konsistensi. Namun, komitmen dan peluang masih terhambat oleh keterbatasan sarana riset di setiap fakultas terutama fakultas bidang ilmu sosial. Satu yang menjadi kendala adalah tidak adanya saluran publikasi terkreditasi untuk penelitian dosen dan mahasiswa. Ketika komitmen, kreativitas, inovasi mulai berkembang namun tidak ada saluran untuk publikasi tentu membuat beberapa pihak enggan untuk produktif dalam penelitian.



Gambar 7. Manajemen Unila dan Budaya Riset Unila

Universitas Lampung sudah memiliki komitmen untuk menjadi *research university*, terlihat jelas dari visi dan misi unila yang menggabungkan pendekatan organisasi dan riset. Margin antara Manajemen Perguruan Tinggi dan budaya riset tidak terpaut jauh yaitu hanya sekitar 0.25 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa unila sedang menuju ke arah *research university*. Namun *research university* tidak akan terwujud tanpa ada manajemen organisasi yang baik. Oleh karena itu, kesinambungan dan sinergitas antar dua variabel ini menjadi sangat strategis untuk mewujudkan unila sebagai *riset university* dengan tujuan utamanya adalah mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

SIMPULAN

Budaya organisasi berkaitan erat dengan proses menuju *research university*. Jika ditarik bandul, posisi Universitas Lampung sudah berada di tengah, sudah ada beberapa syarat sebagai *research university* yang terpenuhi namun ada beberapa hal yang belum dipenuhi dan harus diraih untuk mencapai *research university*, baik dari sisi manajemen perguruan tinggi maupun budaya research. Budaya riset yang dibangun masih bersifat personal, karena kebutuhan pribadi bukan digerakkan secara masif oleh perguruan tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari komparasi antara manajemen perguruan tinggi dan budaya riset. Prakarsa dan konsistensi didominasi oleh keinginan pribadi dan publikasi belum membudaya akibat lemahnya dosen menjangkau akses kepada publikasi tersebut. Sehingga butuh komitmen pemimpin yang tinggi baik dari kebijakan yang dikeluarkan dan dukungan pendanaan, sarana dan prasarana. Selain itu perlu dimunculkan budaya research peneliti yang tidak hanya mementingkan personal saja tetapi *research* dilaksanakan secara kelembagaan dan diyakini sebagai kebutuhan bersama, nyaman dan dilakukan secara bersemangat oleh seluruh tenaga pendidik Universitas Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Altbach, P.G. (2015). What Count for Academic Productivity in Research University? *International Higher Education Journal*, (79), 6-7.
- Sangadji, E.M. (2009). Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasional Pimpinan terhadap Kepuasan Kerja dan Dampaknya pada Kinerja. *Jurnal Paedagogia*, 12, (1), 52-65.
- Setiawati, T. (2009). Pengaruh Kompetensi Kerja terhadap Kinerja Dosen. *Jurnal Media Pendidikan, Gizi, dan Kuliner*, 1, (1), 1-5.
- Shaugnessy, Lynn. (2011). *What is a Research University*. USA: California University.
- Sudiro, A. (2009). Pengaruh Komitmen Keorganisasian dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Tenaga Edukatif/Dosen (Studi di Universitas Brawijaya). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 7, (10), 86-92.
- Sulistyaningsih, Dewi A.S. & Wijayanti, Y.T. (2012). Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 6, (2), 89-101.
- Universitas Lampung dalam Angka. (2016).

PETUNJUK PENULISAN:

Berikut ini adalah petunjuk penulisan dan template artikel yang telah direvisi dan mulai diberlakukan pada edisi penerbitan tahun 2019. Artikel di tulis tidak kurang dari 5000 kata dan tidak lebih dari 7000 kata

This is the revised author guidelines and article template of the Jurnal Sosiohumaniora Unpad that applied for publication year 2016 onwards. Article begins with title followed by authors' name, affiliation, and address, then abstract.

PENYERAHAN ARTIKEL:

Lakukan pendaftaran atau registrasi online pada alamat **<http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/user/register>**. di bagian akhir form, pilih Daftar sebagai: penulis. Pada tahap selanjutnya, lakukan unggah file artikel dalam bentuk .doc (Ms.Word di utamakan office 2003-2007) di link [Penyerahan Naskah Baru]. Berilah Checklist pada isian Checklist naskah untuk menunjukkan bahwa naskah yang akan diunggah sudah mengikuti templet jurnal dan panduan penulisan. Jika sudah, klik Simpan dan lanjutkan. Di tahap ini klik Browse dan pilih file artikel yang akan dikirimkan untuk Jurnal Sosiohumaniora. Klik Unggah. Klik Simpan dan lanjutkan. Selanjutnya, isi form yang ada hingga Penyerahan Selesai.

PANDUAN PENULIS

JUDUL ARTIKEL (TNR,12pt Bold)

Asep Sumaryana¹, Rd. Ahmad Buchari¹, Agus Nero² Ini namaku di sini² (TNR,10pt Bold)

¹Fakultas, Universitas/instansi, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 456363 (TNR, 10pt Normal)

²Afiliasiku ditulis di sini, Ini alamat afiliasiku dituliskan lengkap di sini

E-mail: xxxxx@email.com ; penulis2@email.com ; penulis3@email.com ; penulis3@email.com

ABSTRAK (10pt Bold)

Abstrak ditulis dalam satu paragraf, spasi tunggal, berisi maksimal 250 kata, dengan menggunakan huruf Times New Roman 10pt. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang baik dan benar. Abstrak harus memuat tujuan penelitian, metode (karakteristik subjek penelitian, populasi, sampel, teknik sampling, metode pengumpulan data, serta analisis data), hasil penelitian, serta kesimpulan singkat. Jika dianggap perlu, pada bagian akhir paragraph dapat diberikan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian. Di bawah abstrak, sertakan lima kata kunci yang masing-masing dipisahkan dengan tanda titik koma (;). Pilihlah kata kunci yang memudahkan artikel Anda ditemukan mesin penjelajah.

Kata kunci; petunjuk penulisan; jurnal sosiohumaniora; Unpad; template

ENGLISH TITLE ARTICLES (TNR,12pt Bold)

ABSTRACT (10pt Bold)

Abstract should be written in a one-space paragraph, containing max 250 words, and written in Times New Roman 10 pt. Abstract should be written in Bahasa Indonesia and English. Abstract should include study aims, methods (participant characteristics, population, sample, sampling methods, data collection, and data analysis), findings, and conclusions. If necessary, a recommendation can be given at the end of paragraph. Following the abstract, provide five keywords separated with semicolon (;). Choose keywords carefully that enable search engine to locate your article.

Key words; author guidelines; jurnal sosiohumaniora; Unpad; template

PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan, penulis harus menuliskan tujuan penelitian di bagian akhir pendahuluan. Sebelum menuliskan tujuan penelitian, penulis harus menuliskan (secara berurutan) latar belakang, kajian literatur terdahulu (state of the art) sebagai dasar “gap analysis” pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel, permasalahan penelitian, dan hipotesis (bila ada). Di dalam pendahuluan tidak diperkenankan adanya tinjauan pustaka yang terpisah dalam sub judul tersendiri sebagaimana di laporan penelitian, tetapi dituliskan terintegrasi dengan penjelasan mengenai latar belakang penelitian sehingga kajian literatur tersebut dapat menunjukkan state of the art- atau kebaruan temuan ilmiah.

METODE

Bagian metode berisi penjelasan tentang jenis penelitian/ desain penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang jumlah subjek dan karakteristik subjek disertai data demografi (Azwar, 2007). Pada penelitian kuantitatif, jika penelitian menggunakan alat ukur tertentu, perlu disampaikan nama alat ukur, jumlah aitem, koefisien reliabilitas, serta metode analisis data yang digunakan. Pada penelitian kualitatif, dijelaskan perspektif kualitatif yang digunakan, hingga metode pengambilan data dan analisisnya (Willig, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya secara ilmiah. Tuliskan temuan-temuan ilmiah (scientific finding) yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan tetapi harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Temuan ilmiah yang dimaksud di sini adalah bukan data-data hasil penelitian yang diperoleh. Temuan-temuan ilmiah tersebut harus dijelaskan secara saintifik meliputi: Apakah temuan ilmiah yang diperoleh? Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa trend variabel seperti itu? Semua pertanyaan tersebut harus dijelaskan secara ilmiah, tidak hanya deskriptif, dan ditunjang oleh data empiris yang memadai. Selain itu, harus dijelaskan juga perbandingannya dengan hasil-hasil para peneliti lain yang hampir sama topiknya. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab hipotesis dan/atau pertanyaan penelitian di bagian pendahuluan.

Tabel (maksimal 6 tabel) dan Gambar (maksimal 6 gambar) diletakkan di dalam kelompok teks sesudah tabel atau gambar tersebut dirujuk. Setiap gambar harus diberi judul gambar di sebelah bawah gambar tersebut dan bernomor urut angka diikuti dengan judul gambar. Setiap tabel harus diberi judul tabel dan bernomor urut angka di sebelah atas tabel tersebut diikuti dengan sumber tabel.

Gambar-gambar harus dijamin dapat tercetak dengan jelas (ukuran font, resolusi dan ukuran garis harus yakin tercetak jelas berupa jpeg). kelompok Gambar

terdiri dari diagram/skema, tabel dan sebaiknya diletakkan sesuai kolom diantara kelompok teks atau jika terlalu besar diletakkan di bagian tengah halaman. Tabel tidak boleh mengandung garis-garis vertikal, sedangkan garis-garis horisontal diperbolehkan tetapi hanya yang penting-penting saja.

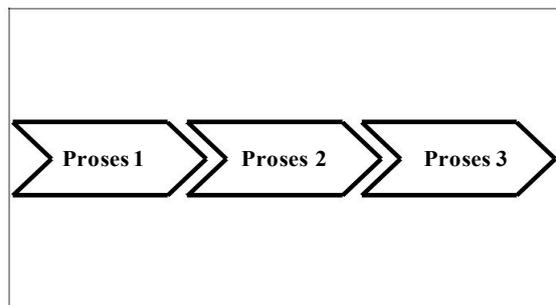
Tabel 1. Korelasi Antar Variabel

Aspek Dukungan Keluarga	Stres Kerja	
	<i>r</i>	<i>p</i>
Dukungan emosional	0,167
Dukungan penghargaan	0,255
Dukungan nasihat	0,285
Dukungan instrument

(Sumber:)

Keterangan: Tuliskan nilai *p* (bukan $p < 0,05$ atau $p < 0,001$) kecuali jika hasil analisisnya menunjukkan $p = 0,000$ maka harus dituliskan $p < 0,001$; atau jika hasilnya $p = 1,000$ maka harus dituliskan $p > 0,99$. Untuk memudahkan mengenali signifikansi, bisa ditambahkan tanda ** untuk nilai $p < 0,001$ dan * untuk nilai $p < 0,05$.

SIMPULAN



Gambar 1. Prosedur Penelitian

Bagian Simpulan terdiri dari satu paragraf saja namun menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan ilmiah yang diperoleh. Simpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan penelitian. Bila perlu, di bagian akhir simpulan dapat juga dituliskan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH (bila ada)

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau donatur dan pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian yang kontribusinya tidak cukup signifikan untuk dimasukkan dalam kelompok penulis (authorship).

DAFTAR PUSTAKA

Semua referensi yang dikutip/disitasi dalam naskah artikel harus dicantumkan dalam bagian Daftar Pustaka. Daftar Pustaka harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal

dari sumber primer (jurnal ilmiah; minimum 80%) dari keseluruhan daftar pustaka) diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Jumlah referensi yang disitasi minimal 15 (lima belas) sumber pustaka. Penulisan kutipan atau sitasi disarankan menggunakan program aplikasi manajemen referensi misalnya: Mendeley, grammarly, EndNote, Zotero, atau lainnya. Format penulisan yang digunakan di Jurnal Sosiohumaniora Unpad adalah APA 6th Edition (American Psychological Association, 2010).

Pustaka yang berupa majalah/jurnal ilmiah:

Agustinus, W. (2016) Kerangka Ekonomo Makro Daerah Kota Bitung di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. *Sosio-humaniora*, 18, 185-190.

Shintadewi, E.A & Sumartias S. (2017). Promosi Kesehatan Hiv-Aids dan Stigma Terhadap Penggunaan Narkoba Suntik (Penasun) di Kabupaten Sumedang. *Sosiohumaniora*, 19, (2), 129-140.

Nugrahanto, W. & Adyawardhina, R. (2018). Demokrasi Dalam Sejarah Militer Indonesia; Kajian Histois Tentang Pemilihan Panglima Tentara Pertama Tahun 1945. *Sosiohumaniora*, 20, (2), 78-85. doi: <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i1.14368>

Pustaka yang berupa judul buku:

Azwar, S. (2007). Metode penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lunsford, A., & Ede, L. (2009). Child education: Perspective on teaching activities. Carbondale: Illinois University Press.

Willig, C. (2008). Introducing qualitative research in psychology: adventures in theory and method. (2nd ed.). London: McGraw-Hill Open University Press

Pustaka yang berupa Prosiding Seminar:

Desiningrum, D. R. (2011). Future time perspective, goal orientation, and subjective well being in elderly. The Padjadjaran International Conference on Psychology (pp.17-23). Bandung, Indonesia: Faculty of Psychology, Padjadjaran University.

Pustaka yang berupa disertasi/tesis/skripsi:

Pratama, A. G. (2009). Kontribusi kesejahteraan-an subjektif pada religiusitas Islam, persepsi tentang penyakit, dan perilaku menjaga kesehatan diri dalam model perilaku memelihara kesehatan: Suatu upaya menemukan model perilaku memelihara kesehatan dengan taraf keccokan optimal pada penderita HIV+. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.

Pustaka yang berupa Handbook:

Albarracin, Johnson, & Zanna. (2005). The handbook of attitudes. New Jersey: Erlbaum.

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. Sixth edition. Washington D.C.: American Psychological Association

INDEKS PENULIS

- A**
Agusmanon Yuniadi 130–139
Ahmad Fauzan 210–215
- D**
Disty Putri Ratna Indrasari 122–129
- E**
Elis Puspitasari 150–158
Eti Suminartika 194–199
- F**
Feni Rosalia 222–227
- H**
Hazbini 210–215
Helza Novalita 113–121
- I**
Ida Yuliani 140–143
- K**
Kuswarini Kusno 194–199
- L**
Lies Sulistiyowati 194–199
- Lilih Muflihah 222–227
Layyinaturrobanayah 140–143
- M**
Mokhammad Anwar 140–143
Mintarti 150–158
Miftahul Falah 130–139, 133–139, 134–139, 135–139, 136–139, 137–139
- N**
Nanang Martono 150–158
Nia Kurniati 113–121
- R**
Reiza Dienaputra 210–215
Rina Adyawardhina 130–139
- S**
Sam'un Jaja Raharja 159–165
Sulaeman R. Nidar 140–143
Sulyana Dadan 150–158
- U**
Uyat Suyatna 173–183

INDEKS SUBJEK

- A**
anak bekerja 122–129, 123–129, 124–129, 125–129, 126–129, 127–129, 128–129
Asas Pemisahan Horizontal 113–121, 117–121, 119–121, 121
- B**
bawang merah 216–221, 217–221, 218–221, 219–221, 220–221, 221
budaya 222–227, 223–227, 224–227, 227
- C**
central modals 166–172, 167–172
COCA 166–172
corpus 166–172, 167–172, 172
Corpus of Contemporary American English 166–172
- E**
efisiensi 194–199, 195–199, 196–199, 197–199, 198–199, 199
efisiensi 216–221, 217–221, 218–221, 220–221, 221
ekspor 173–183, 174–183, 175–183, 176–183, 177–183, 178–183, 179–183, 180–183, 181–183, 182–183, 183
- F**
faktor produksi 194–199, 195–199, 196–199, 197–199, 198–199, 199
- G**
Gaya kepemimpinan 210–215
Gemeente Bandung 130–139, 132–139, 133–139, 134–139, 135–139, 136–139, 137–139, 138–139
- H**
habitus 150–158, 151–158, 152–158, 153–158, 155–158, 156–158, 157–158, 158
Hutan Kota 130–139
- I**
Implementasi 173–183, 174–183, 178–183, 182–183
Indonesia 173–183, 174–183, 175–183, 176–183, 177–183, 178–183, 179–183, 180–183, 181–183, 182–183, 183
ivtobit 122–129
- K**
kebijakan 173–183, 174–183, 175–183, 176–183, 177–183, 178–183, 179–183, 180–183, 181–183, 182–183, 183
kedelai 194–199, 195–199, 196–199, 197–199, 198–199, 199
kekerasan simbolik 150–158, 151–158, 153–158, 158
kinerja usaha 144–149, 145–149, 148–149
kredit 144–149, 145–149, 146–149, 147–149, 148–149
kredit mikro 140–143, 141–143, 142–143, 143
- L**
Lebakmuncang 159–165, 160–165, 161–165, 162–165, 163–165, 164–165
Lembaga keuangan mikro 140–143, 142–143
- luxury axiom 122–129, 123–129, 124–129, 126–129, 128–129
- M**
maskulin 210–215, 211–215, 212–215, 213–215, 214–215, 215
militer dan sipil 210–215, 213–215
modal auxiliary verb 166–172, 169–172, 170–172, 171–172, 172
Model organisasi 200–209, 202–209, 204–209, 206–209, 207–209
- O**
organisasi 173–183, 174–183, 175–183, 177–183, 183
- P**
pemberdayaan perempuan 140–143, 141–143, 142–143, 143
Pengembangan pariwisata perdesaan 159–165
Pengembangan Wakaf Tanah dan Rumah Susun 113–121
pengentasan kemiskinan 140–143, 141–143, 142–143
perangkat daerah 200–209, 201–209, 202–209, 203–209, 204–209, 205–209, 206–209, 207–209, 208–209
Prinsip Syariah 113–121, 121
produk marginal 216–221
produksi 194–199, 195–199, 196–199, 197–199, 198–199, 199
- R**
Ruang Terbuka Hijau 130–139, 132–139, 133–139, 139
- S**
Sawahlunto 184–193, 185–193, 186–193, 187–193, 188–193, 189–193, 190–193, 191–193, 192–193, 193
sekolah 150–158, 151–158, 152–158, 153–158, 154–158, 155–158, 156–158, 157–158, 158
Sistem Dinamik 184–193, 193
siswa miskin 150–158, 151–158, 152–158, 153–158, 154–158, 155–158, 156–158, 157–158, 158
stochastic frontier 216–221, 218–221, 219–221
strategi 159–165, 160–165, 164–165
- T**
Taman Kota 130–139, 138–139, 139
Tambang Batubara 184–193, 193
tanah 122–129, 123–129, 124–129, 125–129, 126–129, 127–129, 128–129
- U**
universitas pembelajaran 222–227
universitas penelitian 222–227, 224–227
urusan pemerintahan 200–209, 201–209, 202–209, 203–209, 205–209, 206–209, 207–209, 208–209
usahatani 216–221, 217–221, 218–221, 220–221, 221
- W**
Wakaf Rumah Susun 113–121
Wakaf Tanah 113–121, 114–121, 121
wealth paradox 122–129, 123–129, 124–129, 125–129, 126–129, 128–129
wirausaha perempuan 144–149, 145–149, 146–149, 147–149, 148–149
Wisata Tambang 184–193, 185–193, 188–193, 189–193

UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan Redaksi Jurnal Sosiohumaniora menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Eng. Pradono, SE., M.Ec., Dev (Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, ITB)
2. Dr. Kunto Sofianto, M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
3. Prof. Dr. Ir. Yogi, MS. (Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, ITB)
4. Prof. Dr. Ir. Nandan Limakrisna, MM., CQM., CMA. (Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta)
5. Endah Djuwendah, SP., MS. (Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran)
6. Dr. Herwan Abdul Muhyi, M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
7. Dr. Dian Indira, M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
8. Dr. Ir. Marina Sulistyati, MS. (Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran)
9. Dr. Dra. R. Nunung Nurwati, M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
10. Dr. Dra. Ypsi Soeria Soemantri, M.Hum (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
11. Dr. Raden Muhammad Mulyadi, SS., M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
12. Dr. Risna Resnawaty, MP. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
13. Prof. Dr. Drs. Sam'un Jaja Raharja, M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
14. Dr. Sawitri Budi Utami, S.IP., M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
15. Dr. Elis Suryana Nani Sumarlina, MS. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
16. Prof. Dr. Reiza D. Dienaputra, M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
17. Dr. Mumuh Muhsin Z, M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
18. Dr. Muhammad Faisal, M.Pd. (Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
19. Dr. Rahman Mulyawan, Drs., M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
20. Dr. Drs. Hazbini, M.Ag. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
21. Dr. Ekaning Krisnawati, SS., M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
22. Dr. Rudi Saprudin Darwis, M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
23. Nur Syamsiyah, S.P., M.P. (Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran)
24. Dr. Rahkman Ardi, M.Psych. (Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga, Surabaya)
25. Dr. Andi Pitono, S.Sos, M.Si. (Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

Sebagai Mitra Bestari (*Peer Reviewer*) pada Jurnal Sosiohumaniora Volume 21 No. 2 Juli 2019. Atas kerjasama yang terjalin selama ini dalam membantu kelancaran penerbitan Jurnal Sosiohumaniora, sehingga mulai pada edisi kali ini Jurnal Sosiohumaniora masuk Peringkat Akreditasi SINTA 2. Semoga kerjasama ini berjalan lebih baik untuk masa yang akan datang.

Pemimpin/Redaksi